

# **IDENTITAS KULTURAL ORANG BESEMAH DI KOTA PAGARALAM**



OLEH :  
**Jumhari  
Hariadi**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PADANG  
2014**

# **IDENTITAS KULTURAL ORANG BESEMAH DI KOTA PAGARALAM**

Hak Cipta terpelihara dan dilindungi Undang-Undang No.19 Tahun 2002.  
Tidak dibenarkan menerbitkan ulang bagian atau keseluruhan isi buku ini  
dalam bentuk apapun juga sebelum mendapat izin tertulis dari penerbit.

**Penulis**

Jumhari  
Hariadi

**Disain Cover**

Rolly Fardinan

**Disain Isi**

Rolly Fardinan

**ISBN**

978-602-8742-76-4

**Percetakan**

CV. TALAO SUMBER REZEKI

**Cetakan Pertama** : Desember 2014

Diterbitkan oleh :

**Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian tentang “Identitas Kultural Orang Besemah di Kota Pagaram” merupakan ikhtiar penulis untuk melacak dan menelusuri kembali akar identitas kultural Orang Besemah di Kota Pagaram. Identitas kultural adalah jati diri yang melekat pada satu individu atau kelompok orang atau etnis tertentu dengan seperangkat atribut dan nilai-nilai budaya yang membedakan dirinya dengan pihak lain (*liyan*). Dalam konteks masyarakat modern, identitas tidaklah bersifat tunggal, tetapi terus berkembang dan berubah sebagai akibat anyanya transformasi. Meskipun begitu, identitas kultural akan senantiasa mengalami proses perawatan kultural untuk terus dijaga dan dileihara dari masyarakat penfdukungnya. Identitas kultural orang Besemah, seperti tinggalan megalitik, Pagaram simbol kota perjuangan, rumah *baghi* dan juga bahasa, sastra dan budaya akan terus berubah dan pada titik tertentu identitas kultural orang Besemah akan didefenisikan dan dan diberi pemaknaan sesuai dengan jiwa zamannya (*zeitgeist*)

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nurmatias, selaku Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Tradisional Padang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan pengumpulan data hingga selesainya laporan kepada narasumber dan pembantu lapangan selama penulis melakukan penelitian di Kota Pagaram, terutma kepada Satarudin Cik Olah (Mang Satar), sang maestro budaya Besemah di Pagaram Akhir kata *tak ada gading yang tak retak*,

penulis mohon kritik dan saran demi kesempurnaan laporan ini dimasa yang akan datang.

Padang, Desember 2014  
Ketua Tim,

Jumhari  
NIP. 19710201 200003 1001

## KATA SAMBUTAN

Identitas dibangun melalui perbedaan adanya relasi dan dialog dengan pihak lain. Identitas juga merupakan produk dari perbedaan dan pengecualian dari simbol-simbol kesatuan yang terbentuk secara alami dan identik. Identitas kultural orang Besemah, sebagai salah satu kelompok bangsa di Sumatera Selatan, menarik untuk diulas. Sebab sebagai suatu kelompok etnis, orang Besemah di Kota Pagaralam memiliki identitas yang bersumber legitimasi kultural dan sosial yang terus menerus diwariskan kepada pendukung budayanya. Kesadaran dan kearifan untuk terus-menerus memperbaharui dan pemberian makna identitas kultural orang Besemah dalam konteks kekinian.

Orang Besemah di Pagaralam dimasa lampau dikenal sebagai puhak yang berjiwa merdeka dan bersikap kesatria, ketika harga diri mereka berada dalam ancaman atau dipandang dengan sikap kurang terhormat. Orang Besemah telah memiliki peradaban yang unggul pada masanya. Jumlah megalitik yang tersebar, arsitektur unik rumah *baghi*, khazanah bahasa, sastra dan budaya. Dan tentu saja simbol Kota Pagaralam sebagai 'kota perjuangan' menjadi bekal kultural untuk menyongsong kehidupan yang lebih bermartabat dan beradab.

Besemah sebagai salah satu puak di Sumatera Selatan memiliki identitas yang khas, yang membedakan mereka dengan 'wong Palembang', sebutan bagi kelompok masyarakat yang tinggal dipusat Keraton Kesultanan Palembang pada masa lampau. Politik identitas orang Besemah di Kota Pagaralam menemukan momentumnya sejak Kota Pagaralam berdiri sebagai wilayah kotamadya tahun 2001, yakni dengan Dengan terbentuknya Kota Pagaralam. Gerakan untuk kembali pada akar

budaya leluhur orang Besemah menjadi spirit untuk terus memelihara dan merawat identitas kultural dan sekaligus memberikan pemaknaan identitas dengan perspektif yang lebih baik dari masa sebelumnya.

Menarik apa yang dikemukakan oleh salah seorang sejarawan muda berbakat di tanah air, Hilmar Farid, yang menyempirkan kalimat *satire*, 'bahwa sejarah digunakan tidak sebagai pengetahuan untuk melihat masalah sekarang, tapi hanya sebagai warisan yang harus dihargai. Artinya selama ini kita gagal dan tidak mampu melihat secara bijak bahwa sejarah ibarat kompas memberikan panduan tentang apa yang harus kita sipakan untuk emnatap kedepan.

Kami menyambut baik hasil penelitian ini, semoga bisa dijadikan sebagai bahan informasi untuk kepentingan penanaman nilai budaya dalam konteks kekinian, dimana pertukaran informasi berlangsung cepat dan kita selalu dituntut untuk terus berubah dan bertindak arif terhadap perubahan sosial dan budaya yang ada pada saat ini

Padang, Desember 2014

Kepala

Drs. Numatias

NIP. 19691226 199703 1 001

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Kata Pengantar</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Sambutan</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Gambar</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	10
<b>BAB II     PAGARALAM: BESEMAH ‘RANAH SINDANG MERDIKA’</b>	<b>11</b>
A. Keadaan Alam dan Penduduknya	11
B. Jagat Besemah: Konstruksi Sejarah, Sosial Budaya dan Ekonomi	17
C. Pemukiman	47
<b>BAB III    IDENTITAS KULTURAL ORANG BESEMAH</b>	<b>49</b>
A. Peninggalan Megalitik	50
B. Pagaralam: ‘Kota Perjuangan’	77
C. Arsitektur Rumah <i>Baghi</i>	94
D. Bahasa, Sastra dan Budaya	103
<b>BAB IV    OTONOMI DAERAH DAN KEBANGKITAN KULTURAL</b>	<b>133</b>
A. Otonomi Daerah dan Sejarah Berdirinya Kota Pagaralam	133

	B. Politik Identitas dan Kebangkitan Kultural	147
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>157</b>
	A. Kesimpulan	157
	B. Saran	160
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>162</b>
	<b>DAFTAR INFORMAN</b>	<b>169</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	<b>171</b>



## DAFTAR TABEL

### Tabel

	Hal
1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pagaram Tahun 2012	13
2. Tanah <i>Erfpact</i> untuk Perkebunan di Sumatera Selatan	43
3. Produksi Kopi Rakyat dan Kopi <i>Onderneming</i> di Karesidenan Palembang (per 1.000 kg)	44
4. Harga Jual Kopi Kering (Ditingkat Petani) di Pagaram dan Sekitarnya	46

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

	Hal
1. Peta Kota Pagaram	12
2. Perkebunan Teh di Gunung Dempo	13
3. Struktur Pemerintahan Lampik Mpat Mardike Duwe	27
4. Arca Megalitik dari Belumai	59
5. Arca Megalitik dari Tegurwangi	62
6. Tugu Perjuangan Simpang Mana	94
7. Rumah <i>Baghi</i>	95
8. Motif <i>Mendale Kencane Mandulike</i>	101
9. Motif <i>Munce Ghebung</i>	101
10. Motif <i>Kuncup Teratai</i>	102
11. Motif <i>Mude Paku</i>	103
12. Aksara <i>Ghincung</i>	106
13. Komnplek Perkantoran Gunung Gare di Kota Pagaram	150
14. Aksara Ulu ( <i>Kaghas</i> ) Koleksi Satarudin Cik Olah	151
15. Papan Nama Jalan dengan Bahasa Indonesia dan Huruf Ulu	152
16. Alat Musik <i>Ginggong</i>	156
17. Satarudin Cik Olah (Mang Satar) Maestro <i>Ginggong</i>	156

# I BAB

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasca krisis ekonomi dan politik 1997-1998, yang berujung pada ambruknya pemerintahan Orde Baru. Indonesia memasuki periode baru, yang secara luas para peneliti dan pengamat menyebutnya sebagai 'era reformasi'. Era ini ditandai dengan pergeseran pendulum kekuasaan pemerintahan nasional, dari rezim otoritarian ke model pemerintahan demokratis. Kewenangan mutlak pemerintah pusat bergeser ke pemerintahan daerah (desentralisasi). Proses desentralisasi selama ini cenderung hanya dilihat dalam kaca mata ekonomi semata. Sehingga proses identifikasi persoalan dan pemecahannya di aras lokal (daerah) cenderung mengabaikan dimensi kulturalnya. Idealnya desentralisasi haruslah dipandang sebagai proses pembukaan secara politis (pusat) dan sah (secara hukum) untuk pelibatan sumber daya sosial, budaya, ekonomi dan politik lokal, dengan begitu wacana pelaksanaan *good governance* tentunya harus mempertimbangkan kapital sosial sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Salah satu persoalan yang mengiringi demokratisasi di Indonesia pasca reformasi, adalah munculnya fenomena kebangkitan identitas primordial. Kebangkitan politik primordial bertemali dengan meningkatnya gejala *provinsialisme* yang kadang kala

---

<sup>1</sup> Irwan Abdullah dan Pande Made Kutanegara, "Otonomi dan Hak-Hak Budaya Daerah", dalam Ki Supriyoko (ed), *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005, hal. 65.

bertumpah tindih dengan etnisitas.<sup>2</sup> Upaya untuk penguatan identitas kultural termanifestasikan melalui pengapungan kembali kepada adat-istiadat, hal ini tentu diperbolehkan sepanjang tidak menghalangi upaya untuk merekonstruksi 'kebudayaan nasional', yang menjadi pengikat kolektif dari bangsa Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya.

Menguatnya politik identitas di ranah lokal bersamaan dengan politik desentralisasi, menurut Syarif Ibrahim Alqadri, pakar ilmu sosial dari Universitas Tanjung Pura, yang secara tegas menyatakan bahwa era reformasi yang mengantarkan bangsa Indonesia ke arah keterbukaan, demokratisasi, otonomi daerah telah melahirkan kembali dan memperkuat kesadaran etnis.<sup>3</sup> Fenomena menguatnya identitas kultural, yang ditandai pula dengan munculnya reposisi adat *vis a vis* negara, seperti gerakan kembali ke nagari di ranah Minang, pemberlakuan tradisi '*ajeg*' di Bali serta munculnya gerakan *komunitarian* dalam politik lokal dan adat di berbagai daerah di Indonesia.<sup>4</sup>

Orang Besemah sebagai entitas dan kelompok masyarakat dengan segala atribut budaya yang dimilikinya tentu saja menghadapi problematika kultural yang sama di era otonomi daerah ini. Besemah sebagai salah satu puak di Sumatera Selatan memiliki identitas yang khas, yang membedakan mereka dengan 'wong Palembang', sebutan bagi kelompok masyarakat yang tinggal dipusat Keraton Kesultanan Palembang pada masa lampau. Identita khas, jika kita berbicara tentang budaya orang Besemah, antara lain seperti arsitektur rumah *Baghi*<sup>5</sup> dan *Sumbay*, yakni sistem pemerintahan tradisional demokratis dengan merujuk pada istilah 'Lampik Empat

---

<sup>2</sup> Azyumardi Azra, 'Pendidikan Multikultural dan Pancasila: Tribute untuk Profesor Tilaar dalam (Sutjipto ed), *10 Windu Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed.* Jakarta: Kompas, 2012, hal. 10-11.

<sup>3</sup> Muhtar Haboddin, 'Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal' dalam *Politik Identitas dalam Dinamika Politik di Berbagai Daerah di Indonesia*, Jurnal Renai, Kajian Politik Lokal dan Sosial Humaniora, Tahun IX No.2.Tahun 2009, Salatiga: Percik, hal. 48.

<sup>4</sup> Untuk uraian lengkapnya bisa dibaca Jamie S. Davidson, David Henley, Sandra Moniaga (ed), *Adat Dalam Politik Indonesia*, Jakarta: KITLV-Jakarta bekerjasama Pustaka Yayasan Obor Indonesia, 2010.

<sup>5</sup> Rois Leonard Arios, 'Arsitektur Rumah Baghi di Kota Pagar Alam', dalam Nursyirwan Effendi (ed), *Bunga Rampai Budaya Sumatera Selatan, Budaya Besemah di Kota Pagar Alam*, Padang: BPNST Press, 2012, hal.1-117.

Mardike Duwe' serta kekhasan lainnya sebagai akibat proses sejarahnya.<sup>6</sup>

Di masa lampau daerah Pasemah bersama Rejang dalam perspektif geo-politik menjadi semacam *-buffer state-* daerah peyangga yang memisahkan antara pengaruh Banten di daerah Bengkulu dan Majapahit di Palembang pada masa kerajaan tradisional. Orang Besemah secara cerdas mampu membangun netralitas dan koeksistensi diantara adidaya regional pada zamannya. Dengan posisi tersebut Pasemah tidak direpotkan dengan beban untuk melaksanakan kewajiban budaya dan tugas apapun.<sup>7</sup> Pada masa Kesultanan Palembang daerah Pasemah dimasukkan kedalam wilayah pemerintahan daerah pedalaman (*ulu*), dengan status sebagai daerah otonom dan memiliki kedaulatan untuk mengatur wilayahnya. Dalam kategorisasi pembagian teritorial Kesultanan Palembang, Pasemah dianggap sebagai daerah Sindang, yang tidak dikenai kewajiban untuk membayar pajak ataupun upeti kepada penguasa Kesultanan Palembang.<sup>8</sup> Akan tetapi mereka berkewajiban membantu kesultanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di daerah perbatasan.

Pasemah relatif berdaulat dan tidak pernah berada dibawah otoritas ataupun penaklukan mutlak baik oleh Banten (Lampung) dan Majapahit di Palembang. Meskipun para Sultan Palembang yang

---

<sup>6</sup> Refisrul, 'Sumbay; Sistem Pemerintahan Tradisional Masyarakat Besemah di Sumatera Selatan', dalam Nursyirwan Effendi (ed), *Bunga Rampai Budaya Sumatera Selatan, Budaya Besemah di Kota Pagar Alam*, Padang: BPNST Press, 2012, hal.190-227. Secara terminologi kata Besemah penggunaannya lebih lekat kepada nama suku bangsa yang menetap di sekitar Gunung Dempo dan Pegunungan Gumay, sedangkan kata Pasemah, dipergunakan dalam konsep politik dan pemerintahan pada masa kolonial. Untuk jelasnya bisa dibaca buku Ahmad Bastari Suan, *Besemah: Lampik Mpat Mardike Duwe*, Palembang: Pesake (Pencinta Sejarah dan Kebudayaan), 2008 dalam Rois Leonard Arios, 'Arsitektur Rumah Baghi di Kota Pagar Alam', dalam Nursyirwan Effendi (ed), *Bunga Rampai Budaya Sumatera Selatan, Budaya Besemah di Kota Pagar Alam*, Padang: BPNST Press, 2012, hal.2.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 112.

<sup>8</sup> P.De Roo de Faille, *Dari Zaman Kesultanan Palembang*, Jakarta: Bhratara, 1971 dan J.L. Van Sevenhoven, *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, Jakarta: Bhratara, 1971. Selain Sindang dalam terminologi pemilahan teritorial Kesultanan Palembang dikenal pula daerah Kepungutan, yakni kawasan yang dikenai kewajiban pajak dari penguasa Keraton Palembang.

memiliki kekuasaan serta wilayah yang berdekatan dengan daerah Pasemah, mereka (penguasa Palembang) tidak pernah mendapatkan pengakuan mutlak dari orang Pasemah, yang terjadi hanyalah semacam perjanjian persahabatan dan pengakuan kedaulatan Palembang secara nominal oleh Pasemah.<sup>9</sup>

Sejarah orang Besemah merefleksikan sebagai kelompok suku bangsa yang mampu mempertahankan identitas-sebagai puak yang mandiri dan berdaulat- dari berbagai tekanan politik dari adidaya regional pada masanya. Secara empiris bangunan identitas kultural orang Besemah tumbuh dan berkembang serta bermetamorfosis seiring konstelasi politik dan ekonomi pada masanya. *Euforia* reformasi disatu sisi titik balik bagi penataan kembali pemerintahan daerah yang lebih baik dari masa sebelumnya. Akan tetapi pada saat bersamaan, era reformasi juga menjadi momentum bagi kebangkitan kembali identitas primordial yang dalam batas tertentu cenderung bersifat *parochial*.

Dibeberapa tempat atas nama kebangkitan adat, segala yang bernuansa lokal tumbuh dan bersemi seperti jamur di musim hujan. Pemerintahan daerah dengan kewenangan dan dukungan masyarakat mencoba merubah simbol dan paradigma daerah, dari citra yang sebelumnya lekat dengan budaya sentralistik, serba seragam berganti dengan keberagaman dan desentralistik. Sehingga hal-hal selama ini ditabukan, dengan serta merta menyeruak dalam kehidupan sosial kita,. Kebangkitan kultural baik yang bercorak religio-magis maupun politik bertumpang tindih dengan etnisitas dan lokalitas tertentu, seperti munculnya perda (peraturan daerah) bernuansa syariat dan adat maupun pengatas- namaan kepentingan putra daerah untuk membatasi dan membendung gerak sosial kelompok pendatang didaerahnya.<sup>10</sup>

Kajian tentang penguatan politik identitas etnis dan budayanya menjadi salah satu tema menarik seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah, tak terkecuali mengenai identitas kultural Orang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 93.

<sup>10</sup> Uraian menarik dan fenomena sosial dan budaya pasca reformasi di berbagai daerah bisa dibaca dalam buku Irwan Abdullah, Wening Udasmoro dan Hasse J (ed), *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer*, Yogyakarta: TICI Publication bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2009.

Besemah, yang sejauh ini menurut pengamatan penulis belum banyak dilakukan. Meskipun beberapa segi sosial dan budaya menyangkut orang Besemah telah banyak diulas oleh pakar dan ahli ilmu sosial, baik dari kalangan akedemisi maupun budayawan, seperti persoalan pemerintahan tradisional, arsitektur tradisional, adat istiadat pergaulan bujang-gadis ataupun yang berbicara mengenai sejarah dan budaya secara umum. Kajian mengenai identitas kultural orang Besemah di Kota Pagar Alam dipandang cukup relevan untuk dilakukan sebagai salah satu usaha melengkapi khazanah historiografi lokal dalam perspektif kekinian.

## **B. Perumusan Masalah**

Kajian ini mengambil batasan spasial Kota Pagar Alam, dengan *scope* waktu (temporal) dari masa reformasi-sampai saat ini (1998-2014). Era reformasi dipandang titik awal pemberlakuan otonomi daerah serta menjadi momentum bagi identitas politik dan kultural orang Besemah. Sedang batas temporal berakhir pada waktu penelitian dilaksanakan, merujuk pada kategorisasi fenomena sosial kemasyarakatan yang dikemukakan oleh Irwan Abdullah, bahwa selama proses sosial berlangsung dalam sebuah masyarakat, maka kajian tersebut tidak akan pernah berhenti.<sup>11</sup> Ada beberapa permasalahan yang cukup aktual untuk dibahas dalam kajian ini, antara lain :

- a. Bagaimana bangunan identitas kultural orang Besemah di Kota Pagar terbentuk dalam konstruksi sosio-historisnya?
- b. Bagaimana munculnya fenomena penguatan identitas kultural terkait dengan otonomi daerah yang saat ini berlangsung di Kota Pagar Alam?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan penelitian ini antara lain mengungkapkan sejarah munculnya fenomena kebangkitan politik identitas dan kultural orang Besemah di Kota Pagar Alam, bagaimana proses tersebut berlangsung dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.

---

<sup>11</sup> Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal. 80-91.

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis memberikan tambahan pengetahuan dan informasi yang menyangkut sejarah dan dinamika identitas kultural orang Besemah dan secara praktis yang dipergunakan sebagai bahan masukan bagi *stakeholder* terkait menyangkut penyelesaian fenomena sosial budaya.

#### D. Kerangka Konseptual

Dalam literatur ilmu politik, pemahaman identitas politik (*political identity*) dengan politik identitas (*political of identity*). Identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi penting kepentingan subjek didalam ikatan suatu komunitas politik, sedangkan politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas, baik identitas politik maupun sosial sebagai sumber sarana politik.<sup>12</sup>

Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik sangat dimungkinkan dan kian mengemuka dalam pretek politik sehari-hari. Identitas sosial menentukan posisi subjek dalam relasi atau interaksi sosialnya (kelas, etnis, ras, jender dan seksualitas). Sedangkan identitas politik menentukan posisi subjek dalam komunitas melalui suatu rasa kepemilikan dan sekaligus menandai posisi subjek yang dalam suatu perbedaan (nasionalitas dan kewarganegaraan).

Menurut Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan politik. Sedangkan Donald L. Morowitz menyebutkan bahwa politik identitas adalah pemberian garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak berubah, maka status sebagai anggota bukan anggota dengan serta merta bersifat permanen.

Setidaknya ada 3(tiga) karakteristik yang melekat pada politik identitas menurut Klaus Von Beyme, yakni; *pertama*, gerakan politik identitas yang pada dasarnya membangun kembali 'narasi besar' yang prinsipnya mereka tolak dan membangun suatu teori yang mengendalikan faktor-faktor biologis sebagai penyusunan

---

<sup>12</sup> Muhtar Haboddin, *op.cit.*, hal. 40-41.

perbedaan-perbedaan mendasar sebagai realitas kehidupannya. Dan *kedua*, gerakan politik identitas memiliki suatu tendensi untuk membangun sistem apartheid terbalik. Ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukan dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan, pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar. Selanjutnya yang *ketiga*, kelemahan dari gerakan politik identitas adalah upaya untuk menciptakan kelompok teori spesifik dari ilmu.<sup>13</sup>

Secara konseptual politik identitas muncul telah muncul jauh sebelum *euforia* reformasi. Bahkan menurut Henk S. Nordholt, politik identitas menemukan bentuknya pada masa rezim Orde Baru berkuasa. Pengaturan dan pengontrolan negara atas warganya dilakukan sebagai cara untuk melemahkan politik etnisitas di Indonesia. Dalam perspektif Henk S. Nordholt, pemerintah Orde Baru telah menformulasikan kebijakan pelemahan politik etnisitas kedalam 4 (empat) hal; *pertama*, tidak ada daerah yang asli, maksudnya semua terbuka sebagai daerah migrasi maupun transmigrasi sehingga semua komunitas tercerabut dari akar sosio-kultural dan politiknya. *Kedua*, pemerintah menghindari terbentuknya kelas, karena itu persoalan menyangkut Suku, Agama dan Ras (SARA) dikontrol secara ketat, yang berhak menggunakan pelabelan SARA adalah pemerintah ketika melabelkan kepada kelompok bersalah atau dikucilkan dalam relasi sosial-politiknya. Dan yang *ketiga*, modernisasi dijalankan supaya pengaruh etnis dan agama merosot. Selajutnya *keempat*, negara mengatur supaya jangan ada yang tumpang-tindih antara agama dan suku. Karena dengan cara ini persatuan tidak pernah ada dan pemerintahan pusat tidak terancam.

Empat kebijakan tersebut berimplikasi secara politis pada relasi pusat-daerah, pemerintah dengan rakyatnya. Oleh sebab itu gairah etnisitas dan agama tidak dipergunakan orang sebagai cara untuk mengekspresikan diri secara politik dan mengungkapkan identitas budayanya, tetapi akan berubah menjadi tempat orang menyembunyikan secara politik dan mencari keamanan diri secara budaya.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 41-42.



Pilihan politik masyarakat dengan menutup diri dan ikut dalam pusaran politik kekuasaan Orde Baru menjadi jalan terbaik. Selanjutnya, ketika negara mengalami pelemahan basis materialnya, maka masyarakat akan mencari perlindungan kelompok agama dan etnisitas. Fenomena yang kini terjadi di tanah air. Penggunaan istilah identitas politik dan politik identitas digunakan bergantian, karena kedua istilah memiliki keterkaitan satu sama lainnya.

### E. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang orang Besemah telah banyak dilakukan, baik pada masa kolonial maupun setelah Indonesia merdeka. Di masa kolonial, etnografi orang Besemah secara gamblang dijelaskan oleh Gramberg dalam ekspedisinya ke wilayah ini pada tahun 1825, setelah Belanda berhasil menaklukkannya.<sup>14</sup> Selanjutnya karya Jeroan Peters<sup>15</sup> yang mengungkapkan persoalan 'ideologi genealogi' pada masyarakat *uluan*, termasuk didalamnya daerah Pasemah. Menurut Jeroan Peters kesadaran genealogis orang *uluan* yang termanifestasikan pada pemujaan 'Puyang' merupakan kunci pembuka untuk memahami kebudayaan pedesaan orang *uluan*. Pemahaman istilah keramat dan sakti, merupakan rujukan dan konsepsi kultural orang *uluan* didalam memahami keberadaan di dunia. Garis keturunan seseorang yang ditarik dari genealogi 'Puyang' menjadi alat legitimitasi yang kuat dalam menentukan seorang pemimpin yang dipilih oleh warga dusun.

Karya yang lain tentang orang Besemah, terutama melihat identitas orang Besemah, dari ragam arsitektur tradisional mereka (rumah *baghi*),<sup>16</sup> ataupun meninjau kembali peran *sumbay* dalam konteks reposisi pemerintah lokal yang berfondasi pada diktum 'Lampik Mpat Mardike Duwe', yang memotret proses demokratisasi pemerintahan lokal yang bersumber kearifan tradisional (musyawarah-mufakat).<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Gramberg, *op.cit.*,

<sup>15</sup> Jeroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, Jakarta: INIS, 1987, hal 86-88.

<sup>16</sup> Rois L A, *op.cit.*,

<sup>17</sup> Refisrul, *op.cit.*,

Beberapa literatur yang mengulas tentang identitas politis ataupun politik identitas terangkum secara luas pada Jurnal Renai terbitan Percik Salatiga, yakni sebuah lembaga riset yang bergerak pada pemberdayaan masyarakat sipil dan politik lokal, khususnya terbitan Tahun IX No. 2 tahun 2009, yang memberikan fenomena sosial kebangkitan kultural dan politik identitas di Indonesia. Karya yang lebih komprehensif tentang adat, kebangkitan politik lokal<sup>18</sup> juga bisa dibaca dari kumpulan artikel Politik Lokal di Indonesia serta Adat dalam Politik Indonesia.<sup>19</sup>

## F. Metoda Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis, metode sejarah kritis di sini dipahami sebagai proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>20</sup> Metode penelitian ini terdiri 4 (empat) tahap, yaitu : pertama, pencarian dan pengumpul sumber data (heuristik), yang baik yang berupa sumber-sumber tertulis maupun sumber-sumber lisan, baik yang bersifat sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dengan melacak arsip maupun dokumen seperti surat kabar sejaman seperti Pagaralam Pos, pelacakan sumber dilakukan melalui studi perpustakaan (*library research*) yang terdapat di Kota Pagaralam, seperti perpustakaan Kota Pagaralam, Dinas Pendidikan Kota Pagaralam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pagaralam serta instansi terkait lainnya. Sedangkan sumber lisan dilakukan dengan melakukan wawancara dan FGD kepada para nara sumber yang memiliki otoritas terkait dengan tema penelitian diatas, seperti sejarawan, budayawan, tokoh adat dan tokoh masyarakat di Kota Pagar Alam. Penggunaan *oral history* (sejarah lisan) juga penting dilakukan untuk melengkapi dokumen tertulis yang ada.

---

<sup>18</sup> Henks S Nordhot, Gerry van Klinken (ed), *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: KITLV-Jakarta bekerjasama YOI, 2007.

<sup>19</sup> Jamie Davidson, David Henley, Sandar Moniaga (ed), *op.cit.*,

<sup>20</sup> Louis Gotschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosoesanto, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 32.

*Kedua, kritik* yaitu tahap penyeleksian sumber-sumber sejarah, meliputi kritik eksteren dan kritik interen. Kritik eksteren ini dilakukan untuk menguji tingkat keabsahan sumber (otentisitas sumber) sedangkan kritik interen dilakukan untuk menguji tingkat kepercayaan sumber (kredibilitas sumber). Ketiga, *interpretasi*, yaitu tahap penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah diseleksi melalui upaya analisa dan sintesa fakta-fakta sejarah. Terakhir, *historiografi*, yaitu tahap penulisan sejarah, pada tahap terakhir ini akan dilakukan koreksi baik secara bertahap maupun secara total. Metode koreksi bertahap dan koreksi total diterapkan guna menghindari kesalahan-kesalahan yang sifatnya *substantial*, sehingga menghasilkan penulisan sejarah analitis.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam lima (5) Bab, yakni sebagai berikut, pada bab pertama, Pendahuluan terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan. Selanjutnya pada bab kedua, akan diuraikan mengenai daerah penelitian, Kota Pagaralam sebagai daerah Besemah 'Ranah Sindang Merdeka', yang terdiri atas keadaan alam dan penduduk, jagad Besemah: konstruksi sejarah, sosial budaya dan ekonomi dan pemukiman.

Pada bagian bab ketiga akan dijelaskan mengenai identitas kultural orang Besemah, dimana pada bagian ini akan diulas lebih dalam beberapa identitas kultural orang Besemah, seperti peninggalan megalitik, Pagaralam sebagai kota perjuangan, arsitektur rumah *baghi* dan bahasa, sastra dan budaya. Kemudian pada bab keempat akan diulas mengenai otonomi daerah dan kebangkitan kultural dengan beberapa ulasan mengenai otonomi daerah dan sejarah berdirinya Kota Pagaralam dan politik identitas dan kebangkitan Kultural. Pada bagian penutup, yakni bab lima, berisi kesimpulan da

**BAB II****PAGARALAM: BESEMAH  
'RANAH SINDANG MERDIKA'****A. Keadaan Alam dan Penduduk**

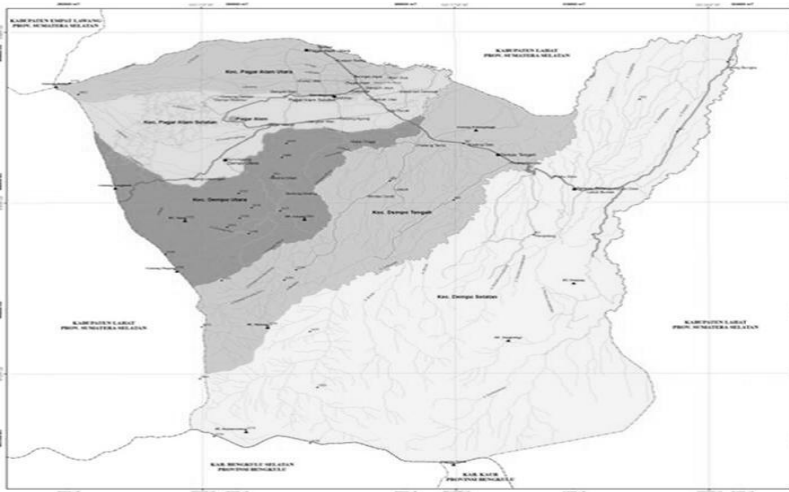
Kota Pagaralam sebagai salah satu kampung halaman orang Besemah berdiri sebagai daerah otonom sejak tahun 2011. Kota Pagaralam juga mendapat sebutan 'Kota Perjuangan' dengan merujuk pada perjalanan sejarah Kota Pagaralam pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia.<sup>21</sup> Secara geografis Kota Pagaralam terletak pada 4<sup>0</sup> Lintang Selatan dan 103,15<sup>0</sup> Bujur Timur dengan luas 63.366 hektar. Dari ibukota Propinsi Sumatera Selatan, yakni Kota Palembang berjarak 298 km dan 60 km dari ibukota Kabupaten Lahat dan Kabupaten Manna, Propinsi Bengkulu yang posisinya di bagian barat dayanya.

Kota Pagaralam terbagi dalam 5 (lima) kecamatan, yakni Kecamatan Pagaralam Utara, Pagaralam Selatan, Dempo Utara, Dempo Selatan dan Kecamatan Dempo Tengah. Secara administratif, Kota Pagaralam berbatasan dengan Kecamatan Pulau Pinang dan Pajar Bulan Kabupaten Lahat. Selanjutnya berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Sakti dibagian selatan. Dibagian baratnya berbatasan dengan Kecamatan Jarai serta dibagian timurnya dengan Kecamatan Kota Agung. Daerah Pagaralam merupakan kawasan perbukitan dengan ketinggian bervariasi dari 100-1000 m dari permukaan air laut. Sebagian besar wilayahnya terletak di kaki Gunung Dempo (3.159 m), sehingga Kota Pagaralam berhawa sejuk,

---

<sup>21</sup> Pada masa pendudukan Jepang Kota Pagaralam menjadi basis pendidikan militer Jepang, yakni dengan didirikannya Giyugun, yang merupakan sekolah pendidikan perwira, keterangan lebih lanjut bisa dilihat pada Djazuli Kuris, *Membangun Bersama Rakyat*, Palembang: Anugerah Pena Persindo, 2006, hal. 2.

dengan suhu rata-rata malam hari sekitar  $14^{\circ}\text{C}$  dan suhu terpanas siang hari mencapai  $34^{\circ}\text{C}$ . Selain itu daerah relatif subur dan cocok kegiatan perkebunan dan agrikultural.



**Gambar 1.** Peta Kota Pagaralam

Sumber: BPS Kota Pagaralam, *Pagaralam Dalam Angka*, 2013.

Kota Pagaralam dialiri oleh beberapa sungai, seperti Sungai Lematang, Selangis Besar, Selasih Ghenik, Air Kundur, Betung, Air Perikan dan Sungai Endikat yang menjadi pembatas alam dengan wilayah Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat. Kontur daerah Pagaralam bervariasi, dari dataran rendah sampai pegunungan, dimana dataran yang cukup luas yakni Kecamatan Pagaralam Selatan dan Kecamatan Pagaralam Utara. Sedangkan lainnya memiliki kontur tanah bergelombang, seperti Kecamatan Dempo Utara, Dempo Tengah dan Dempo Selatan. Tanah di Kota Pagaralam sebagian besar merupakan jenis tanah *latosol* dan *andosol*, yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, sehingga cocok untuk usaha pertanian, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Untuk melihat perbandingan luas wilayah per kecamatan di Kota Pagaralam bias dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 1**  
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pagaralam**  
**Tahun 2012**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Rasio terhadap Luas Kota Pagaralam (%)
1.	Dempo Selatan	217,95	34,40
2.	Dempo Tengah	173,09	27,32
3.	Dempo Utara	123,98	19,56
4.	Pagaralam Selatan	63,17	9,97
5.	Pagaralam Utara	55,47	8,75
Jumlah		633,66	100,00

Sumber: BPS Kota Pagaralam, Pagaralam Dalam Angka, 2013, hal. 10.

Dari jumlah luas Kota Pagaralam yakni 633,66 km<sup>2</sup> dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian sawah irigasi dan sawah tadah hujan. Kemudian lahan kering dipergunakan sebagai kebun, kawasan lahan hutan, baik hutan lindung maupun hutan dikelola masyarakat. Tanah perkebunan dimanfaatkan untuk perkebunan teh yang dikelola oleh PTP VII dan sisa lahan yang dimanfaatkan untuk fasilitas umum, seperti; lapangan olah raga, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, taman kota dan tempat rekreasi.



**Gambar 2.** Perkebunan Teh di Gunung Dempo

Sumber: Dokumen Tim Peneliti, 2014.

Pada masa kolonial Belanda, daerah Pasemah terbagi atas Pasemah Lebar, Pasemah Ulu Lintang, Pasemah Ulu Manna dan Pasemah Ulu Air Keruh. Dalam peta kolonial Belanda, daerah Pasemah terletak diantara Karesidenan Palembang dan wilayah Asisten Residen Bengkulu, dimana pada bagian selatan dan barat daya berbatasan dengan *afdeeling* Manna, Tallo dan Pasemah Ulu Air Keruh (masuk wilayah Bengkulu). Di sebelah barat dan utara berbatasan dengan daerah Rejang, Empat Lawang dan Kikim serta di timur dan tenggara yakni daerah Mulak Ulu, Semendo Darat dan Semendo Ulu Luas, yang kesemuanya masuk wilayah Palembang.<sup>22</sup>

Pada masa kolonial wilayah Pagaralam merupakan *onderafdeeling* dari Pasemah Landen, yang statusnya bertahan sampai pendudukan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, kedudukannya menjadi Kawedanan Tanah Pasemah. Selanjutnya berdasarkan UU No.22 tahun 1963, Kawedanan Tanah Pasemah dimekarkan menjadi 4 (empat) kecamatan yakni Kecamatan Tanjung Sakti, Tanjung Tebat-Kotagung dan Kecamatan Pagaralam dalam wilayah Kabupaten Lahat. Dan sejak 15 Januari 1992, Kecamatan Pagaralam berubah status menjadi Kota Administratif Pagaralam.<sup>23</sup>

Gambaran tentang keadaan alam dan penduduk Pagaralam pada abad ke-19 merupakan daerah yang merdeka dan bebas dari pengaruh asing. Letaknya yang dikelilingi perbukitan dan pegunungan serta lembah yang terjal menjadikan daerah Pasemah terlindungi secara alami dari tekanan dan serangan dari luar. JSG Gramberg, seorang pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda menuliskan keadaan Pasemah pada masa kolonial, dalam laporan tertulisnya pada tahun 1825 setelah berhasil menaklukan daerah Pasemah, Gramberg menggambarkan keadaan alam Pasemah sebagai berikut:

“Barang siapa yang mendaki Bukit barisan dari arah Bengkulu, dan kemudian menjejakkan kaki di tanah kerajaan Palembang yang begitu luas; dan barang siapa yang melangkahkan kakinya dari arah

---

<sup>22</sup> Judul laporan Gramberg (terjemahan), *Mengenai Penaklukan Pasemah*, versi aslinya berjudul *De Inlijving van Het Landschap Pasoemah door J.S.G. Gramberg Indische Ambtenaar*, yang merupakan Buku Dua dari *Sumatera Selatan Melawan Penjajah Abad 19*, Jakarta: Masyarakat Peduli Musi, 2000, hal 22-23.

<sup>23</sup> Ahmad Bastari Suan dkk, *Atung Bungsu, Sejarah Asal Usul Jagad Besemah*, Palembang: Pesake bekerjasama dengan Pemko Pagaralam, 2007, hal. 14

utara Ampat Lawang (negeri empat gerbang) menuju ke dataran Lintang yang indah, sehingga ia mencapai kaki sebelah barat Gunung Dempo, maka sudah sampailah ia di negeri Pasemah. Jika ia berjalan mengelilingi kaki gunung berapi, maka akan tibalah ia disisi timur dataran tinggi yang luas yang menikung agak ke arah tenggara, dan jika dari disitu berjalan terus lebih ke timur lagi hingga dataran tinggi itu berakhir pada sederatan pegunungan tempat, dari sisi itu, terbentuk perbatasan alami negeri Pasemah yang merdeka dan wilayah kekuasaan Hindia Belanda.”<sup>24</sup>

Deretan pegunungan yang mengelilingi daerah Besemah menjadi pelindung dan sekaligus pembatas alamiah antara Besemah dan kelompok dari wilayah tetangganya. Bukit Jambul, Pandan, Balai dan Bukit Pancing memisahkan orang Besemah dengan orang Semendo, yang dianggap memiliki akar genealogis sama. Puncak-puncak yang membentang dari bagian utara hingga selatan menjadi pembatas alami dimana Gunung Patah sebagai batas alamiah dengan wilayah Bengkulu. Sedangkan dibagian barat daya terdapat Bukit Dingin dan Bukit Umang. Dibagian timur berbatasan dengan negeri *Rurah* Mulak Ulu, yang dikenal sebagai wilayah Lematang Ulu.

Gramberg lebih lanjut menyimpulkan bahwa daerah Besemah merupakan lembah yang berada didataran tinggi dari gugusan Bukit Barisan, yang membentang dari timur laut hingga kearah barat daya dengan ketinggian 1800-2200 kaki dan sudut kemiringan tanah 45 derajat. Hanya pada bagian wilayah Lintang dan Lematang Ulu yang menjadi ruang terbuka. Tumbuhan-tumbuhan khas pegunungan kayu belukar (*kreuple hout*) dan juga hutan bambu yang tumbuh disepanjang bantaran sungai-sungai besar seperti Sungai Selangis Besar dan Selangis Renik. Jalan-jalan pada masa ini masih berupa jalan tanah, sedangkan jembatan belum banyak ditemukan, karena orang Besemah merasa lebih aman bila tidak ada jembatan. Selain terdapat sungai, dijumpai pula danau (*tebat*) yang sebenarnya lebih menyerupai kolam. Danau terbentuk secara alami ataupun sengaja dibuat manusia untuk kepentingan *reservoir* (penampung air), yang difungsikan untuk irigasi sawah.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 98.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 99-101.



Secara genealogis, masyarakat Besemah dikelompokkan dalam enam *sumbay*, yakni, *sumbay* Ulu Lurah, Besak, Mangku Anum, Tanjung Ghaye, Penjalang dan *sumbay* Semidang. *Sumbay* Ulu Lurah, Besak, Mangku Anum, Tanjung Ghaye disebut *Lampik Mpat*, sedangkan *sumbay* Penjalang dan Semidang disebut *Merdike Duwe*. Sehingga gabungan tatanan adat ini disebut *Lampik Mpat Mardike Duwe*.<sup>26</sup> Data demografi daerah Besemah sampai akhir abad ke-19 belum diketahui secara pasti. Keterangan yang ada berasal dari catatan orang Eropa, yakni rombongan ekspedisi Inggris yang mengunjungi tanah Besemah pada tahun 1877. Dari catatan rombongan yang masuk ke wilayah *Besemah Libagh*, diperkirakan terdapat 300 dusun. Dusun-dusun ini terdiri dari 43-50 buah rumah dan setiap rumah dihuni rata-rata 8 orang, jadi ada kurang lebih 340-400 orang. Akan tetapi Sumber lain menyebutkan bahwa pada tahun 1860-an terdapat kurang lebih 152 dusun dengan jumlah penduduk sekitar 3000 orang.<sup>27</sup>

Mengenai karakter orang Besemah, Gramberg menyebutkan orang yang merdeka dan mandiri Besemah serta selalu menjaga dan memelihara kedaulatan mereka dari penguasa regional, baik Majapahit di Palembang dan Banten di Lampung. Bahkan Kesultanan Palembang menganggap orang Besemah sebagai sahabat dengan memberikan gelar kehormatan sebagai 'Sindang Merdika'-Sang Penjaga Berbatasan. Ekspedisi militer Belanda untuk menaklukkan Pasemah memerlukan 50 (lima puluh) tahun lamanya dari tahun 1821-1867 untuk mengontrol daerah ini.<sup>28</sup>

Orang Pasemah memiliki ciri fisik dan karakter yang berbeda dengan orang Melayu disekitarnya. Orang Besemah digambarkan perpaduan antara pengaruh Jawa dan orang Lampung bila ditilik dari aspek linguistiknya. Orang Besemah digambarkan sebagai yang kukuh dan cenderung, bila ditanyakan tentang asal-usul leluhur mereka, yang dikaitkan langsung dengan Majapahit. Selain itu, Gramberg juga menggambarkan adanya perbedaan yang mencolok

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal 102-103.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal.53-54.

<sup>28</sup> Juhari, "Karakter dan Jati Diri Kultural Orang Pasemah dalam Perspektif Sejarah", dalam Khairil Anwar (dkk), *Budaya Membentuk Jati Diri dan Karakter Bangsa*, Proceeding Seminar Internasional, diselenggarakan oleh FIB Unand, 13 November 2012, Padang: Fakulotas Ilmu Budaya, hal. 323.

diantara orang Besemah dengan orang Melayu di dataran tinggi yang tinggal disekitarnya, terutama menyangkut pengetahuan dan teknologi pertanian seperti irigasi untuk persawahan mereka, dibandingkan penduduk setempat yang masih menerpakan pola pertanian kuno (berladang).<sup>29</sup>

## **B. Jagat Besemah: Konstruksi Sejarah, Sosial Budaya dan Ekonomi**

### **1. Besemah dan Mitos Atung Bungsu.**

Asal-usul dan penyebutan Besemah serta penduduknya berasal sampai saat ini belum ditemukan keterangan yang pasti. Bahkan daerah Besemah telah di huni oleh manusia, jauh sebelum hadirnya mitos Atung Bungsu. Beberapa tradisi lisan yang berkembang di masyarakat Besemah menceritakan tentang kedatangan kelompok suku-suku yang tiba di tanah Besemah secara bergelombang. Pertama, sumber tradisi lisan yang berasal dari keterangan Ahad, *juraytue* puyang Kedung Gunung Samat di Rempasay, yang menyebutkan bahwa sebelum kedatangan Atung Bungsu, telah tiba secara bergelombang beberapa kelompok suku bangsa, seperti *jeme* Kam-kam, *jeme* Nik dan *jeme* Nuk, *jeme* Ducung, *jeme* Aking dan *jeme* Rebakau, lalu *jeme* Sebakas, *jeme* Rejang dan *jeme* Berige. Atung Bungsu tiba di tanah disekitar Gunung Dempo pada masa wilayah ini diduduki oleh oleh *jeme* Rejang dan *jeme* Berige.<sup>30</sup>

Tradisi lisan yang berkembang di daerah Besemah, yakni cerita yang bersumber dari tuturan dari tetua kampung atau orang tua (*jeme-jeme* tue), postur dan fisik para pendatang yang tiba di tanah Besemah bervariasi. *Jeme* Nik dan *Jeme* Nuk memiliki perawakan badan tinggi dan besar dengan kulit putih kemerahan. Selanjutnya *Jeme* Ducung digambarkan memiliki perawakan kecil, pendek dan lincah. *Jeme* Aking berperawakan tinggi besar dan kekar dengan kulit putih kemerahan dan wataknya keras. Kemudian *Jeme* Rebakau

---

<sup>29</sup> Gramberg, *op.cit.*, hal. 111

<sup>30</sup> Tim Penulis dan Pemerintah Kota Pagaram, *Sejarah Besemah, Dari Zaman Megalitikum, Lampik Empat Merdeka Due, Sindang Merdike ke Kota Perjuangan*, Pagaram: 2005, hal. 41.

berperawakan sedang dan *Jeme* Sebakas melihat postur tubuh seperti kebanyakan orang-orang Melayu saat ini.<sup>31</sup>

Keterangan lain disampaikan oleh M. Zoem Derahap, yang dipanggil dengan sebutan Pak Gasak dari dusun Negerikaye Tanjungsakti, yang mengkisahkan bahwa rakyat Lubuk Umbay yang dipimpin Ratu Rambut Selake merngakui bahwa tanah Besemah milik dari Atung Bungsu, sehingga mereka diberikan kedudukan sebagai sumbay (sumbay Lubuk Umbay), meskipun posisinya berada diluar struktur *Lampep Empat Merdeka Due*. Selanjutnya sebagian masyarakat Besemah mempercayai bahwa kedatangan Atung Bungsu, yang konon disebutkan memiliki hubungan dengan Kerajaan Majapahit ke tanah Besemah bersama Diwe Semidang (puyang Serunting Sakti) dan Diwe Gumay. Diwe Gumay dikisahkan menetap di Bukit Seguntang Palembang, sedangkan Diwe Semidang semula menetap di Bukit Seguntang, lalu mengembara berkelana menjelajahi daerah Sembilan Batanghari, hingga menetap disuatu tempat yang disebut dengan Padang Langgar (Pelangkendiday).<sup>32</sup>

Keterangan mengenai asal-usul Orang Besemah selain merujuk kepada tradisi lisan masyarakat Besemah, juga bersumber pada catatan kolonial seperti cerita yang disampaikan seorang penjelajah bangsa Inggris, E. Presgrave dalam *The Journal of the Indian Archiplego* yang dikutip oleh Gramberg, yang menyebutkan sebagai berikut;

“...sewaktu kerajaan Majapahit runtuh, seorang kakak laki-laki dan seorang adik perempuan dengan banyak pengikut, telah meninggalkan Majapahit dan mendarat di pantai timur Sumatera. Adik perempuannya menempatkan dirinya di Palembang, dimana ia dalam waktu singkat telah menjadi ratu yang terpandang, kakaknya (Atung Bungsu), yang lebih jauh masuk ke pedalaman, menempatkan diri di lembah dari *Passumah* yang subur. Dengan demikian tanah ini diduduki dan dihuni para pendatang ini.”<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 42. Lihat juga Ahmad Bastari Suandkk, *Atung Bungsu, Sejarah Asal Usul Jagad Besemah*, Palembang: Pesake bekerjasama dengan Pemko Pagaram, 2007, hal. 78.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 41-42.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal.43

Berkaitan dengan mitos ataupun cerita mengenai Atung Bungsu memiliki variasi dan beragam tentang tokoh Atung Bungsu, misalnya naskah yang berjudul 'Soerat Assal Oerang Mendjadikan Djagat Passumah' dengan Kode *ML 608 (BR.157.VIII)* dan kode *ML 234* yang tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Sumber dengan kode *ML. 234* ditulis oleh Muhammad Arif dari dusun Benuakeling tanggal 28 November 1898, yang disalin dari suatu kitab orang dusun Tanahpilih, Marga Sumbay Ulu Lurah Benuakeling, yakni Pangeran Samadil. Sumber aslinya dalam bentuk *arab gundul* (surat melayu), yang kemudin ditulis dalam huruf latin. Sumber lain yang ditulis oleh A. Grozali Mengkerin dari Dusun Benuakeling yang berjudul 'Benuakeling Putting Jagad Besemah'. Secara umum kisah mengenai Atung Bungsu dan dua orang anaknya, yaitu Bujang Jawe (Puyang Diwate) dan Riye Rekian berasal dari Kerajaan Majapahit . Asal mula kata 'Besemah' berasal dari cerita istri Atung Bungsu yang bernama Putri Senantan Buwih (anak Ratu Benuakeling) yang ketika sedang mencuci beras di sungai, *bakul* berasnya dimasuki ikan *semah* (*ML.608:5*). Jelasnya Atung Bungsu dan keturunannya dianggap sebagai *folkore* yang membangun konstruksi 'Jagat Besemah'.

Jika kita berbicara istilah 'Jagat Besemah', konsep ini tidaklah mengacu pada pengertian dunia atau alam semesta. Jagat tidak berarti berhubungan dengan suatu wilayah atau negeri, melainkan menekankan pengertian pada adanya periodisasi kesejarahan dalam konsep pemerintahan Besemah. Masa kekuasaan 'jagat besemah' terkait masa kekekuasaan Ratu Atung Bungsu. Jagat besemah secara kultural memiliki hubungan dengan Jagat Acih (Aceh) dan Jagat Jawe (Jawa). Sehingga dalam kosmologi politik, jagat besemah memiliki legitimitasi kultural selain pengakuan politik atas adanya periode Kerajaan Aceh dan Kerajaan Demak.<sup>34</sup>

Versi lain tentang asal-usul Besemah yakni kisah tentang 'wali tua' yang masih hubungan keluarga dengan Kerajaan Majapahit berangkat dari Palembang, kemudian mnikahi puteri (anak) raja Iskandar yang menjadi penguasa di Palembang. Salah satu anak dari hasil perkawinan mereka bernama Atung Bungsu, yang pada suatu hari berperahu menyusuri sungai Lematang dan akhirnya berhenti pada suatu tempat yang dinamakan Benuawakeling. Konon ketika

---

<sup>34</sup>Ahmad Bastari Suan, *op.cit.*, hal. 27-28.

sampai di sungai, Atung Bungsu melihat banyak ikan *semah* yang mengerumuni sisa-sisa makanan yang dibuang ke sungai. Atung Bungsu menceritakan kepada istrinya bahwa di sungai itu, banyak ikan *semah*. Nama ikan *semah* inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal<sup>35</sup>

Sumber lain tentang sejarah Besemah bisa ditelusuri pula dari buku *Karasta Gama*, *Karasta Wisu* dan *Karasta Pusta*. Dua buku yang pertama ditulis sebelum tahun Caka, sedangkan buku terakhir ditulis pada tahun 650 Caka. Ketiga buku ini berasal dari suku *Kam-Kam* (India). Isi utama buku tersebut menceritakan tentang asal-usul Kerajaan Sriwijaya, yang pada salah satu bagian dari isi dari buku tersebut juga membicarakan mengenai Puyang Atung Bungsu atau disebut dengan *Puyang Nimbang Ayik*.

Tuturan lisan mengenai asal-usul suku orang Besemah, yang menceritakan bahwa pendatang dari Pulau Jawa yang tinggal di tepi Sungai Musi. Para pendatang berhasil menaklukkan penguasa di sekitar Sungai Musi. Ketika Palembang takluk oleh pendatang ini, banyak penduduk lokal Palembang yang tidak mampu melawannya, mereka melarikan diri ke daerah pedalaman, yang pada akhirnya merekalah yang disebut sebagai cikal bakal penduduk Besemah. Selain itu ada cerita lain yakni versi Tanjungkurung yang berasal dari Arpah Sumbi, yakni *juray tue* Tanjungkurung, yang mengatakan bahwa Atung Bungsu berasal dari keturunan Kerajaan Majapahit, yang kemudian tinggal di Besemah.<sup>36</sup>

Cerita diatas untuk membuktikan klaim kultural bahwa orang Besemah masih hubungan keturunan dengan Kerajaan Majapahit. Dan sebagai simbol legitimasi kultural adanya keterkaitan dan hubungan kekerabatan dengan Wong Majapahit, orang Besemah dengan bangga menunjukkan sebilah tombak tua yang disebut dengan *tumbal ulas* dan sebuah keris yang bernama *Tata Arjuna (Tatah Renjune)* yang tersimpan di Tanjung Tapus. Benda pusaka

---

<sup>35</sup> Benuwakeling merujuk mengenai nama wilayah India (Keling), yang dianggap salah satu asal Atung Bungsu, lihat uraian lengkap pada penjelasan Ahmad Bastari Suan, *op.cit.*, hal. 79.

<sup>36</sup> Tim Penulis dan Pemerintah Kota Pagaram, *op.cit.*, hal. 48-49.

tersebut, diyakini oleh orang Besemah dibawa oleh leluhur mereka dari tanah Majapahit.<sup>37</sup>

Berbagai mitos menyangkut legenda maupun cerita mengenai tokoh utama, pada dasarnya merupakan sarana untuk mengukuhkan ingatan kolektif sosial dan kesadaran kultural bahwa merupakan kelompok suku atau kaum pilihan dalam konteks masyarakat tradisional. Mitos Atung Bungsu dan kisah Bujang Jawe merupakan usaha menarik garis kultural diantara orang Besemah dengan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya melalui keturunan Puteri Semidang. Sehingga usaha untuk menarik silsilah keturunan lebih bersifat kosmos-treliugis ketimbang historis-realistis.<sup>38</sup>

Besemah jika merujuk etimologinya berasal dari kata 'Besemah' yang merupakan nama ikan, yakni ikan semah, yang termasuk dari jenis *cyprinus*, family ikan semah lainnya, yakni ikan mas dan *tambra*. Cerita mengenai asal-usul 'Besemah' tersurat dalam naskah 'Kitab Puyang Menjadikan Jagad Besemah', cerita ini bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, isinya menyebutkan sebagai berikut:

'Maka Puteri Kenantan Buwih (istri Radin Atung Bungsu) turun ke (sungai) membasuh beras. Maka bakulnya dimasuki oleh anak *ikan semah*. tatkala Puteri Kenantan Buwih pulang dari membasuh beras ada membawa anak ikan *semah* maka tanah (daerah sekitar) itu dinamai oleh Atung Bungsu Tanah Besemah'.<sup>39</sup>

Secara morfologi kata 'Besemah' berasal dari kata *semah*, yang mendapat awalan be- (ber) yang berarti 'ada', 'memiliki', atau 'mengandung' apa yang disebut kata dasar. Sehingga kata 'Besemah' berarti ada semahnya, sedangkan sungai ditemukan ikan disebut *ayik Besemah* yang berarti Air Besemah, yang dalam pengertian lebih lanjut air sungai yang ada ikan semahnya. Tanah Besemah berarti daerah yang disungai-sungainya ditemukan ikan *Besemah*. Nama 'Besemah' diberikan oleh Atung Bungsu untuk menyebut sungai yang bermuara di Sungai Lematang dan berhulu di Bukit patah. Sungai

---

<sup>37</sup> Gramberg, *op.cit.* hal. 110-111.

<sup>38</sup> Sartono Kartodirdjo, *Beberapa Masalah Teori dan Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, 1970, hal. 34.

<sup>39</sup> Ahmad Bastari Suan dkk, *op.cit.*, , hal. 25. Baca pula Kompas, 13 September 2002.

tempat Puteri Kinantan Buwih membasuh beras dan mendapat ikan semah disebut dengan *Ayik Besemah*.<sup>40</sup>

Secara kultural kesatuan Besemah tidaklah merujuk pada batasan geografis yang tegas. Sebutan 'Besemah Sekali Nuduh-Besemah Sekali Sebut' merujuk kepada pengertian ikatan genealogis (kekerabatan), meskipun dipisahkan secara lokalitas dan administratif. Sebagai bagian dari keturunan *juray Besemah* atau *jeme Besemah*. Beberapa daerah yang menjadi bagian dari Besemah Sekali Nuduh, antara lain *Rurah Besemah Ayik* Keghuh (Daerah Besemah Air Keruh), *Rurah Besemah Iligh* (Daerah Besemah Ilir), *Rurah Gumay Tige* Jughu (Daerah Lahat-Bandaragung), *Rurah Besemah Libagh* (Daerah Besemah Lebar), *Rurah Besemah Palas* (Daerah Palas Besemah di Lampung Selatan), *Rurah Besemah Ulu Alas* di Bengkulu Selatan, *Rurah Besemah Ulu Inim* (Daerah *Semende Dagher*'Semende Darat'), *Rurah Besemah Ulu Lintang* (Daerah Besemah Ulu Lintang Kecamatan Jaray), *Rurah Besemah Ulu Luwas* (Daerah Semende Lembak Ulu Lawas, Kecamatan Pulauberangin , Ogan Komering Ulu Selatan), *Rurah Besemah Ulu Manak* ( Daerah Besemah Ulu Manak, Tanjung Sakti) dan juga keturunan orang Besemah, seperti orang Lematang, Kikim, Lintang, Mengkakaw, Kaur dan Rebang.<sup>41</sup>

## 2. Lampik Empat Mardike Duwe sebagai Simbol Kedaulatan Rakyat

Sejarah perkembangan pemerintahan tradisional di Besemah tidak bisa dilepaskan dari sistem pemerintahan Kesultanaan Palembang. Jika kita membicarakan mengenai Palembang setidaknya kita perlu memahamai adanya pembagian ekologi yang pada gilirannya berimplikasi pada aspek sosial ekonomi dan budaya diwilayah ini. Karakteristik lingkungan fisik daerah Palembang secara sederhana dibedakan menjadi, yakni antara pola *iliran* dan *uluan*, dua istilah yang lazim dipergunakan oleh penduduk setempat untuk membedakan kawasan dataran rendah dan kawasan dataran tinggi.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 27, lihat juga Tim Penulis dan Pemerintah Kota Pagaram, *op.cit.*, hal. 45.

<sup>41</sup> Ahmad Bastari Suan, *op.cit.*, hal. 31.

Selain perbedaan geografis, kedua pola tersebut juga merujuk pada perbedaan sosio-ekonomi dan kultur politik wilayah.<sup>42</sup>

Hubungan diantara kekuasaan Kesultanan Palembang dengan daerah-daerah diwilayah kekuasaannya, tidak hanya memposisikan pusat ibukota (Keraton Kesultanan Palembang) sebagai pusat kekuasaan, semata, akan tetapi juga sekaligus sebagai rujukan kultural dan pusat magis dari kerajaan. Sistem ketatanegaraan yang dijalankan semasa Kesultanan Palembang merupakan sarana pengawasan yang amat khas dan cukup efektif. Akan tetapi penerapan kekuasaan tidak berlaku sama untuk kawasan *Iliran* dan *Uluan*.

Secara struktural Kesultanan Palembang membagi wilayah kekuasaan atas daerah *Kepungutan* untuk kawan *Ilir* dan kawasan *Uluan* dengan sebutan wilayah *Sindang*. Dan diantara kedua wilayah tersebut, ada daerah yang disebut wilayah *Sikap* yang memiliki tugas dan tertentu kepada Sultan. Di wilayah *Kepungutan*, yang berasal dari kata dasar 'pungut' disebut daerah *uluhan*, yang merupakan pada kawan *Ilir*. Sultan dan pembesar istana memiliki kekuasaan langsung dan berhak mengenakan berbagai 'pungutan' pajak serta merekrut tenaga kerja pada penduduk di wilayah ini.

Wilayah *kepungutan* merupakan daerah Kesultanan Palembang yang berada di pedalaman yang dipimpin oleh seorang *raban* dan *jenang*.<sup>43</sup> Posisi *raban* dan *jenang* adalah jabatan perantara antara Sultan dengan *pasirah* (kepala marga). Mereka memperoleh penghasilan dari pajak atau cukai berupa hasil bumi yang dikumpulkan oleh *pasirah*, yang kemudian diserahkan kepada Sultan.

Daerah *sikap* memiki keistimewaan yakni, mereka merupakan kelompok dusun yang tidak berada dibawah kekuasaan marga. Akan tetapi langsung dibawah kekuasaan Sultan Palembang. Mereka dibebaskan dari keharusan membayar pajak, tetapi mereka punya kewajiban kerja kepada Sultan. Kerja untuk Sultan ini disebut

---

<sup>42</sup> Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta :LP3ES, 2003 hal.34-34.

<sup>43</sup> Raban dan Jenang merupakan gelar untuk jabatan yang sama, perbedaannya adalah kalau Raban berasal dari golongan bangsawan, sedangkan Jenang berasal dari masyarakat biasa.



*gaweraja*, adalah kerja yang bersifat langsung kepada Sultan; seperti mengayuh perahu (*pengayuh*) dan penunjuk jalan (*perpat*).<sup>44</sup>

Sedangkan untuk wilayah *Sindang*, yang secara harafiah berarti 'daerah perbatasan', yakni kawasan pedalaman kerajaan. Di wilayah *Sindang*, sultan dan pembesar kerajaan tidak mempunyai otoritas dalam menerapkan apalagi memaksakan hak-hak, seperti diterapkan di daerah Kepungutan. Posisi daerah *Sindang*, dianggap oleh pihak kesultanan sebagai penjaga tapal batas kerajaan. Mereka dianggap sebagai orang merdeka dan menjadi teman Sultan. Mereka hanya memiliki 'tugas kultural, yakni disebut *seba* kepada Sultan setiap 3 (tiga) tahun sekali mengunjungi ibukota Palembang, sebagai kertangan Du Bois;

'Tidaklah atas dasar kewajiban, akan tetapi oleh karena adanya adat di kalangan pribumi untuk saling mengunjungi dan menjadi kebiasaan, bahwa mereka juga tidaklah dating dengan tangan hampa'.<sup>45</sup>

Posisi daerah Pasemah bersama dan Rejang menjadi semacam kawasan penyangga (*bufferstate*) yang memisahkan pengaruh Banten dan Majapahit di wilayah ini. Bahkan secara cerdik Pasemah mampu memelihara netralitas dan koeksistensi bersama dengan para penguasa regional pada masanya.-daerah penyangga- yang memisahkan antara pengaruh Banten di daerah Bengkulu dan Majapahit di Palembang pada masa kerajaan tradisonal. Kesultanan Palembang memasukkan daerah *uluan* termasuk didalamnya Pasemah sebagai daerah otonom, dan dengan statusnya sebagai pengawal daerah perbatasan. Mereka hanya berkewajiban membantu kesultanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di daerah perbatasan, sebagaimana digambarkan oleh Roo De Faille dibawah ini:

“ Orang Pasemah bukan semata-mata orang-orang bawahan, mereka lebih merupakan kawan-kawan seperjuangan dari Sultan yang dilindunginya, meskipun mereka, seperti terbukti dari piagam

---

<sup>44</sup> Sevenhoven, *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, Jakarta: Bhratara, 1977, hal. 30.

<sup>45</sup> D.A. Du Bois, De Lampongers, dalam *TNI 1856*, hal 41 dikutip dari Johan Hanafiah, *Melayu-Jawa, Citra Budaya dan Sejarah Palembang*, Jakarta: Rajawali Grafindo bersama Pemda Tk. II Kotamadya Palembang, 1995, hal. 5.

Susuhunan Ratu, telah menerima penjagaan batas (sindang) sebagai tugas dan mengikat diri untuk mentaati beberapa peraturan yang menunjuk kepada pengakuan daripada kekuasaannya.”<sup>46</sup>

Daerah Sindang dipimpin oleh seorang *Depati* (raja kecil) yang bebas, tidak dibebani pajak dan upeti. Akan tetapi mereka memiliki kewajiban melindungi daerah perbatasan kesultanan dari serbuan orang. Diantara Sultan dan penguasa dari daerah Sindang memiliki kewajiban *tiban-tukon* sebagai *tanda raja*. *Tiban-tukon* merupakan bentuk transaksi perdagangan sistem barter antara pihak kesultanan dengan para depati di daerah Sindang. Sultan mengirimkan barang-barang seperti garam, kain, panci besi, obat-obatan dan lain-lainnya yang diperoleh dari pedagang Arab dan Cina kepada para depati. Sebaliknya para depati mengirimkan beras, kapas, damar, lada serta hasil hutan lainnya kepada Sultan.

Dimasa lampau ketika masa otoritas lokal-tradisional *Lampik Empat Merdike Due* dijalankan diwilayah Besemah, daerah ini dibagi atas *Besemah Libagh*, *Besemah Ulu Lintang*, *Besemah Ulu Manak* dan *Besemah Ayik Keghuh*. Gunung Dempo menjadi pembatas alami yang memisahkan *Besemah Libagh* dengan *Besemah Ulu Manak*, sedangkan Bukit Pancing memisahkan *Besemah Libagh* dengan *Semende*. Meskipun memiliki nama yang berbeda-beda, mereka mengakui dan memiliki hubungan kekerabatan yang kuat.<sup>47</sup>

Sebelum adanya sistem pemerintahan modern, yang dibentuk oleh pemerintah kolonial, di daerah Besemah telah dikenal adanya sistem pemerintahan tradisional yang disebut dengan *Lampik Empat Mardike Duwe*.<sup>48</sup> Istilah *lampik* dalam bahasa Besemah berarti semacam tikar kecil yang terbuat dari rotan atau purun (*pughun*) yang dianyam atau dirangkai. *Lampik* memiliki ukuran sekitar panjang lengan panjang atau istilah setempatnya menyebut kira-kira

---

<sup>46</sup> Daerah Pasemah di golongankan sebagai daerah Sindang dalam istilah pembagian daerah Kekuasaan Kesultanan Palembang, Selain itu dikenal sebutan daerah Sikap dan Kepungutan, untuk uraian bisa dibaca karya P.De Roo de Faille, *Dari Zaman Kesultanan Palembang*, Jakarta: Bhratara, 1971 dan J.L. Van Sevenhoven, Lukisan tentang Ibukota Palembang, Jakarta: Bhratara, 1971

Roo De Faille, *op.cit.*, hal. 40.

<sup>47</sup> Tim Penulis dan Pemerintah Kota Pagaram, *op.cit.*, hal. 38.

<sup>48</sup> Ahmad Bastari Suan dkk, *Besemah Lampik Mpat Mardike Duwe*, Pagaram: Pesake (Pencita Sejarah dan Kebudayaan), 2008, hal.5.

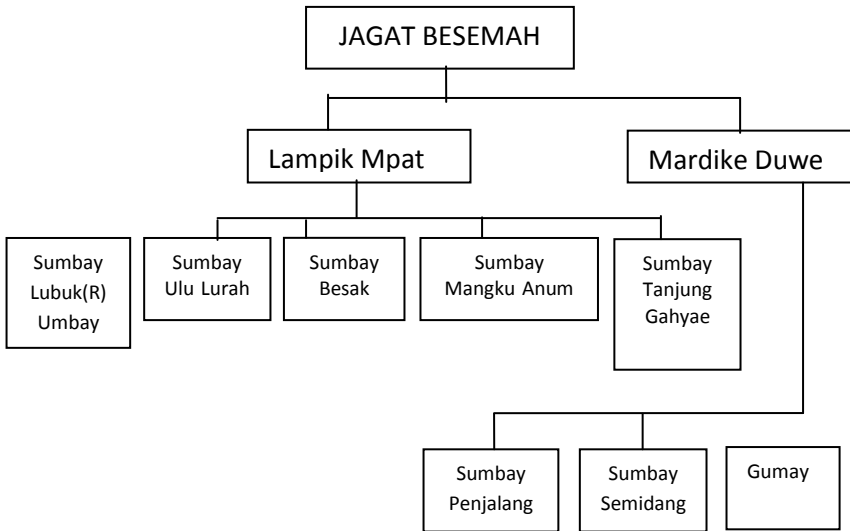
*sesete* atau kurang lebih 40 cm. persegi, yang diberi pelapis dan hiasan artistik, serta nyaman ketika diduduki. Sedangkan kata *mpat* merujuk pada pengertian jumlahnya 'empat'. Sehingga secara sederhana pengertian *lampik mpat* memiliki makna harafiah yakni semacam tikar kecil yang dipergunakan sebagai tempat duduk yang berjumlah empat. Istilah *Lampik Empat* merujuk pada jumlah *juray tuwe juray tuwe* yang berjumlah empat yang berasal dari empat *sumbay*. Dimana dalam setiap peradilan adat (*sidang agung*) dalam sistem pemerintahan tradisional di Besemah duduk diatas *lampik* tersebut. Keempat *juraytuwe sumbay* tersebut, 1) *Juraytuwe Sumbay Ulu Lurah*, 2) *Juraytuwe Sumbay Besak*, 3) *Juraytuwe Sumbay Mangku Anum* dan 4) *Juraytuwe Sumbay Tanjung Ghaye*. Keempat *juraytuwe* peranannya mirip dengan lembaga legislatif atau semacam Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan kata *Mardike* berarti 'merdeka', yang memiliki maksud 'tidak wajib membayar pajak', sedangkan kata *duwe* berarti 2 (dua). Sehingga pengertian *Mardike Duwe*, yakni 2 (dua) yang merdeka atau dibebaskan dari kewajiban tertentu. Istilah 'Mardike Duwe' adalah merujuk pada 2 (dua) *juraytuwe* dari *sumbay* yang pada sidang-sidang biasa atau sidang agung tidak berkewajiban membuat aturan-aturan yang menyangkut seluruh *juray* Besemah. Dua *sumbay* yang berstatus merdeka ini, yakni *Sumbay Penjalang* dan *Sumbay Semidang*. Meskipun kedua *sumbay* tersebut tidak dikenai kewajiban untuk membuat peraturan adat, akan tetapi kedua *sumbay* diwajibkan untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan atau disepakati dalam sidang agung.<sup>49</sup> Untuk lebih jelasnya bias dilihat pada bagan struktur pemerintahan 'Lampik Mpat Mardike Duwe' dibawah ini:

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 6

**Gambar 3.**  
**Struktur Pemerintahan Lampik Mpat Mardike Duwe**



Sumber: Ahmad Bastari Suan, dkk, *Besemah Lampik Mpat Mardike Duwe*, Pagaram: Pesake (Pencinta Sejarah dan Kebudayaan), 2008, hal. 7.

Menurut Van Royen, keenam *sumbay* yang tergabung dalam tatanan pemerintahan tradisional 'Lampik Mpat Mardike Duwe' merupakan suatu kesatuan yang bersifat federatif. Sistem pemerintah menarik garis genealogis sebagai sumber legitimasi antara rakyat dan pemimpinnya.<sup>50</sup> Keberadaan *Lampik Mpat Mardike Duwe* menurut keterangan Kornawi Yacob Oemar (Bujang Kornawi) dari Dusun Perdipe mulai ada keberadaan di Bumi Besemah, diperkirakan pada tahun 1479. Lembaga ini mulai terbentuk bersamaan dengan pemerintahan Pangeran Sido ing Kenayan di Palembang, yakni pertengahan abad ke-17. Istri Pangeran Sido ing Kenayan adalah Ratu Sinuhun anak Nyai Gede ing Pembayun

<sup>50</sup> Amrah Muslimin, *Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung Menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan Dalam Propinsi Sumatera Selatan*, Palembang: Pemda Sumsel, 1986, hal 9-10.

dengan Kyai Tumenggung Mancanegara Cirebon. Ratu Sinuhun inilah yang melakukan kodifikasi hukum pertama bagi wilayah Kesultanan Palembang di luar ibukota Palembang, yang disebut dengan *Undang-Undang Simbur Cahaya*. Ketika Pangeran Sido ing Kenayan dan Ratu Sinuhun berkuasa di Kesultanan Palembang, Besemah di perintah oleh keturunan ke-9 dari Atung Bungsu, yakni Ratu Singe Bekurung.

51

*Sumbay* Pangkal Lurah berjumlah 24 dusun, yang didirikan oleh puyang Sake Sepadi, yang merupakan keturunan ketiga dari Atung Bungsu. Puyang Sake Sepadi mendirikan beberapa dusun di Padang Tinggi, antara lain, Tebatseghut, Muaradue dan Gelungsakti yang berdekatan dengan *petulay* puyang Mudik Lematang. Selanjutnya *Sumbay* Ulu Lurah didirikan oleh *petulay* puyang Keriye Aras, yang bernama puyang Pasatan, yang memiliki 5 (lima) anak. Salah satu keturunannya yang bernama Patih Senggilur mendirikan dusun Kebanagung, Karangdape, Tanahpilih, Benuaraje, Sukurete, Benuakeling, Karangdale, Jambatbale, Pagardin, Girikaye dan Muarajauh (Ulu Lintang). *Petulay* puyang Patih Senggilur juga memiliki juray di Dusun Tanjungalam.

Pendiri *Sumbay* Mangku Anum adalah Puyang Riye Sangadum (adik puyang Riye Pasatan). Sehingga diantara *Sumbay* Ulu Lurah dengan *Sumbay* Mangku Anum merupakan saudara satu bapak (*tunggal pejadi*). Kemudian *Sumbay* Besak didirikan oleh 3 (tiga) puyang, yakni 2 (dua) *petulay* puyang Tanjung Lematang, puyang Peraudipe dan Puyang Semu. *Sumbay* Penjalang didirikan oleh puyang Riye Piyugihan. Puyang Riye Piyugihan mendirikan dusun Meringang yang memiliki arti 'waspada', sehingga sifat *sumbay* ini selalu waspada. Terakhir *Sumbay* Semidang, yang didirikan oleh puyang Serunting Sakti, yang diteruskan kepada keturunannya melalui garis laki-laki (*patrilineal*). *Sumbay* ini semula bertempat di dusun Limaumanis (daerah dusun Pelangkeniday).<sup>52</sup>

*Lampik Mpat Mardike Duwe* sebagai lembaga pemerintahan dan adat yang dimiliki oleh orang Besemah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Lembaga adat.

---

<sup>51</sup> Ahmad Bastari Suan dkk, *op.cit.*, hal. 8

<sup>52</sup> Tim Penulis dan Pemerintah Kota Pagaralam, *op.cit.*, hal. 60-61.

2. Lembaga permusyawaratan/perwakilan atau lembaga demokrasi.
3. Lembaga peradilan atau lembaga hukum
4. Lembaga pemerintahan tradisional atau lembaga tertinggi negara pada masa Jagat Besemah.<sup>53</sup>

*Lampik Mpat Mardike Duwe* merupakan lembaga adat yang anggotanya berasal dari pemangku adat yang disebut dengan *juraytuwe*. *Juraytuwe* menurut Ter Haar adalah mereka yang berasal dari keturunan langsung dari orang yang pertama kali membuka perkampungan atau dusun serta memiliki kekuasaan dalam kepemilikan tanah.<sup>54</sup> Pendapat yang senada juga dinyatakan oleh Jeroen Peters, bahwa untuk memahami masyarakat *uluan*, termasuk daerah Pasemah, kuncinya adalah keberadaan *juray*, yang memiliki makna arti keturunan. Dalam sistem *juray*, anak laki-laki tertua biasanya menjadi pemimpin bagi anggota keluarganya, yang disebut dengan istilah *juray tuo* atau dalam bahasa Besemah *Juraytuwe*. Prosedur ini bisa menyimpang, jika salah satu diantara saudara lelaki memiliki kelebihan bias diangkat sebagai *juray tuo*.<sup>55</sup>

Kepala *juray* adalah orang berperan sebagai pengelola dan penanggung jawab milik bersama, sedangkan anggota *juray* menikmati hak pakai hasil. Pemilikan kolektif meliputi atas; tanah ladang, sawah, kebun sayur dan buha-buahan. *Juray tuwe* juga bertanggung jawab atas pemeliharaan pusaka keramat atau suci, seperti keris, tombak, talam tembaga, yang boleh dipinjamkan ketika anggota keluarga lain mengadakan pesta atau hajatan. Selanjutnya rumah yang ditempati oleh anggota keluarga *juray* yang berasal dari moyang mereka, tidak dapat diperjual-belikan oleh *juray tuwe* tanpa sepengetahuan dari anggota *juray* lainnya.

Posisi pemerintahan tradisional masyarakat Besemah 'Lampik Mpat Mardike Duwe' sebagai lembaga peradilan bagi rakyat Besemah

---

<sup>53</sup> Ahmad Bastari Suan dkk, *op.cit.*, hal. 62.

<sup>54</sup> B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahaan K. Ng. Soebakti Poesponoto dari *Buku Bagensele en Stelsel van Het Adatrecht*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1970, hal. 69 dalam Ahmad Bastari Suan, *op.cit.*, hal. 62.

<sup>55</sup> Jeroen Peters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, Jakarta: INIS, 1987, hal 46.

mulai kabur, ketika penguasa kolonial Belanda menguasai daerah ini. Meskipun begitu, peran lembaga ini tetap berfungsi dan berlaku pada tiap dusun yang ada di wilayah Besemah, dengan nama lembaga *dusun laman* yang mekanisme seperti Lampik Mpat Mardike Duwe. Ditiap-tiap dusun sendiri tidak ada lembaga Lampik Mpat Mardike, karena dusun (asli) hanya ditempati oleh penduduk dari satu *sumbay*.

Dusun-dusun yang ada di Besemah merupakan kesatuan dari orang-orang yang dusun yang tinggal bersama. Dalam *dusun laman* terdapat *para sungut juray*, *sungut dusun*, *jungku-jungku* dan perangkat pemerintahan dusun serta kampung. Kemudian dalam lingkungan peradilan- *dusun lama*- yang berlaku adalah hukum adat. Diantara butir-butir hukum adat peradilan *dusun laman*, adalah 1) *pingas*, 2) *sule*, 3) *tinjak-burung*, 4) *angkit-angkan*, 5) *sabuay-bay*, 6) *tepung*, 7) *arian*, 8) *paruan*, *utang-pinjam*, 9) *timpuan*, 10) *serame-ingunan*, 11) *sasih* dan lain-lain.

Sistem pemerintahan tradisional Lampik Mardiek Due mulai hilang, ketika Belanda berhasil menaklukkan tanah Besemah pada tahun 1869, dimana sejak itu model pemerintahan Besemah berganti menjadi sistem pemerintahan marga dengan para *pesirah* sebagai kepala marga. Jauh sebelum itu penaklukan Belanda atas Kesultanan Palembang pada tahun 1825, juga mengubah atau menghilangkan status daerah Besemah sebagai daerah 'Sindang Merdike'.<sup>56</sup>

Lampik Mpat Mardike Duwe bertemu dan berkumpul berada pada saat diadakan sidang agung, yang disebut istilah *tunggal*, *betunggalan*, *tunggalan*. Sedangkan bila tidak ada persidangan adat, para *juraytuwe* tetap berada di *sumbay* masing-masing. Kedudukan atau tempat bersidang tempat *balay* untuk *Sumbay Ulu Lurah*, *balay Besak* atau *balay sumbaynya* mula-mula bertempat di Padura(k)se sebagai dusun tua. Dari Padurakse berpindah ke benuawakeling lama (Tanjungbunge). Selain terdapat *balay Besak* dan *balay sumbay* tempat bersidang untuk keenam *sumbay* di Besemah yakni *balay agung jagat Besemah*, tempat sidang agung Lampik Mpat Mardike Duwe.

Secara fisik bangunan *balay* jumlahnya hanya satu, akan tetapi mempunyai fungsi ganda. Manakala *balay* dipergunakan sebagai

---

<sup>56</sup> Tim Penulis dan Pemerintah Kota Pagaram, *op.cit.*, hal. 63.

sidang para *juraytuwe se-sumbay Ulu Lurah* maka balay itu berfungsi sebagai *balay sumbay (balai besak Sumbay Ulu Luraha)*. Akan tetapi jika balai dipakai untuk bersidang oleh keenam *juraytuwe* dari keenam *sumbay* yang ada, maka tempatnya dinamakan *balay Agung Jagad Besemah* atau *balay sidang agung Lampit Mpat Mardike Due*.

Pada masa Jagat Besemah berjalan pemerintahan tradisional, yakni masih berbentuk *keratuan* (abad ke-14 sampai dengan abad 17), *balay* di pusat jagad benuwakeling juga berfungsi sebagai istana, sehingga nama *balay* tersebut sebagai *Balay Panjang*. Sehingga istilah *balay besak* atau *balay panjang* berdasarkan tingkatan *sidang sumbay* atau sidang Lampik Mpat Mardike Duwe.

*Balay besak* atau *balay sumbay* untuk *sumbay besak* berada di dusun Tanjungmennag, yang letaknya diantara *ayik Besemah* dengan *ayik Lematang*. Selain itu mereka memiliki tempat lain untuk *balay besaknya* yakni di *kute Rempasay* dan *kute ghaye*, hal ini dimungkinkan karena *sumbay besak* memiliki *juray* paling banyak. Selanjutnya *balay besak* dan *balay sumbay* milik *sumbay Mangku Anum* berada di dusun *Jambat-akagh (Jambat-akar)*. *Balay besak* atau *balay sumbay Tanjung Ghaye* di *Kute Gelungsakti*, selanjutnya *Balay besak* atau *balay sumbay* dari *Sumbay Penjang* di dusun Cagar-agung di tepi *ayik Besemah*, yang kemudian pindah ke *Meringang*, dan yang terkahir *Balay besak* atau *balay sumbay Semidang* di Tebatsalak.

Semula sidang agung Lampik Mpat Mardike Duwe dilakukan di *Balay Besak* atau *Balay Agung* di Benuwakeling menjadi pusat dari jagat Besemah. Akan tetapi pada masa berikutnya kegiatan sidang agung, juga pernah dilakukan di tempat lain, seperti di *Tebatlimaw*, *Pelangkendiday* dan di *Pageruyung*, Besemah Seberang Ndikat. Sidang agung yang terkahir mengatasnamakan Lampik Mpat Mardike Duwe diadakan pada awal September 1945, yakni yakni beberapa waktu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.<sup>57</sup>

*Balay didirikan* setelah dibentuknya *kute*, sedangkan syarat mendirikan haruslah *kute* memiliki *balay* dan gelanggang. Fungsi *balay* merupakan tempat bermusyawarah untuk *sumbay* maupun *juray*, jika musyawarah bersifat internal dalam satu *sumbay* dengan *juraynya* maka *balay* ini disebut *balay panjang*, artinya semua atau

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 66-67.



sepanjang urusan diselesaikan di *balay*. Akan tetapi jika *balay* dipergunakan untuk musyawarah Lampik Mpat Mardike Duwe dinamakan *balay agung*. Selanjutnya *balay* dijadikan sebagai tempat bermusyawarah oleh 6 *sumbay* atau hanya 4 *sumbay* maka tempat ini dinamakan *balay besak*, dimana keempat *sumbay* adalah *sumbay Ulu Lurah*, *Sumbay Besak*, *Sumbay Mangku Anum* dan *Sumbay Tanjung Ghaye*.

Pada setiap persidangan atau musyawarah di *balay besak*, semua perangkat adat seperti *juraytuwe* hadir dalam acara tersebut, yang kadang akal membawa *penatih* dan *perepat*. Jalannya musyawarah kadang kala memakan waktu beberapa hari, musyawarah di *balay besak* lebih meriah dari pada musyawarah *sumbay*. Secara kultural masyarakat Besemah mengenal tataran musyawarah dalam tingkatan hierraki berbeda dengan istilah *balay benjenjang* dan *bertangga turun*. *Balay panjang* nuntuk musyawarah untuk *kute* dalam lingkungan *sumbay* dengan peserta yang hadir *para juray tuwe*. Masalah yang dibicarakan berkisar dalam permasalahan dalam lingkup *kute*, *sumbay* dan *juray*.

Jika musyawarah yang dilaksanakan dalam lingkup enam *sumbay*, maka istilah *balay panjang* menjadi *balay besak (balay agung)*, karena dalam musyawarah ini yang hadir dari keenam *sumbay* dari Lampik Mpat Mardike Due. Pokok pembicaraan dalam musyawarah ini lebih besar cakupannya daripada musyawarah di *balay panjang*, tidak hanya persoalan di jagat besemah tetapi juga diluar jagat besemah. Selain itu para *juray tuwe* yang hadir membawa perangkatnya seperti *penatih* dan *bujang perepat*. Beberapa keputusan yang dibuat dalam musyawarah ini, antara lain menyangkut hak bersama, seperti *pesake rame*, *siring rame*, *utan* dengan *padangan rame*. Persoalan pertahanan dan keamanan juga dibicarakan seperti ; *bujang* diajar silat, *ranji-ranji kepuyanan* dan *gadis* diajar *penatih* dalam hal *bececawe* dengan *simah* dan *mende* serta menentukan *pepandin* dalam kue.

Alur atau jalannya musyawarah dalam tatanan pemerintahan tradisional Besemah, sebelum menentukan *kute* atau tempat untuk menyelenggarakan musyawarah *besak* dan *agung* dilakukan terlebih dahulu *sewide (rasan)*. Para peserta yang hadir dalam musyawarah membawa bekal untuk kegiatan musyawarah, yang telah diatur oleh *juraytuwe kute* tempat penyelenggara musyawarah. *Sewide*

merupakan dasar utama dalam menjaga kerukunan masyarakat Besemah. Sehingga setiap kali *besewide* dalam *balay* harus dipertimbangkan terlebih dahulu dan dibicarakan secara cermat agar keputusan yang dihasilkan bisa diterima semua pihak. *Sewide* diputuskan dengan *seghepat* dalam *kecupatan*, *lengitlah yang mucuk rias*. Karena hasil keputusan ini akan disampaikan kembali di *balay disumbay* bukan untuk dibahas ulang, akan tetapi untuk diketahui oleh *juray sumbay*, sebagaimana tercermin dalam ungkapan, *cupat dalam berasan, seghendi dalam perasanan* (seia-sekata, selaras dan tuntas).

### 3. Pemerintahan Marga

Ditaklukannya Kesultanan Palembang oleh pemerintah kolonial Belanda serta dihapuskan secara resmi status kesultanan pada tahun 1823, maka status Besemah sebagai daerah yang menyandang status *sindang Merdike* secara otomatis ikut terhapus. Demikian pula sistem pemerintahan Lampik Mpat Mardike Duwe di Besemah diganti sistem pemerintahan marga oleh Belanda.

Pengertian marga pertama kali diperkenalkan oleh Kesultanan Palembang, yakni pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman Cinde Walang (1662-1706). Menurut J.K.L. Swaab dalam buku Prof. Dr. G.A.W. Wilken, menyatakan bahwa istilah 'marga' berasal dari bahasa Sanskrit, yakni 'varga' yang mengandung makna suatu daerah teritorial tertentu (*afdeeling territoir*) maupun rumpun keluarga (*genealogis*). Swaab memberikan pengertian marga sebagai himpunan atau perserikatan dari dusun-dusun yang berasal dari satu rumpun.<sup>58</sup> Sedangkan pengertian marga pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Sumatera Selatan, adalah masyarakat hukum adat yang berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerintahan terdepan dalam birokrasi kolonial. Sistem marga diterapkan oleh J. Walland, seorang asisten residen Belanda di Palembang termasuk di Besemah.<sup>59</sup>

Kekuasaan kolonial Belanda tidak hanya menghapuskan sistem pemerintahan tradisional 'Lampik Mpat Mardike Due', akan tetapi juga menerapkan *Undang-Undang Simbur Cahaya* yang telah

---

<sup>58</sup> Amrah Muslimin, *op.cit.*, hal. 14-15.

<sup>59</sup> Ahmad Bastari Suan, *op.cit.*, hal. 75.

dimodifikasi oleh Van Bossche, seorang kontrolir Belanda atas perintah residen De Brauw pada tahun 1853.<sup>60</sup> Secara umum pemerintahan Belanda mempengaruhi pemerintahan marga setidaknya dalam tiga hal, yakni;

1. Penyeragaman cara-cara pemerintahan menuju pada usaha unifikasi.
2. Memperkuat peraturan-peraturan adat sepanjang berjalan sesuai kepetingan Belanda.
3. Mengadakan perubahan-perubahan seperlunya.<sup>61</sup>

Dikarenakan keadaan beberapa bagian wilayah yang memiliki perbedaan, maka tindakan penyeragaman kadang kala mengakibatkan adanya perubahan pada keadaan yang berjalan, maka pemerintahan kolonial Belanda di Sumatera Selatan mengambil beberapa tindakan antara lain;

1. Menetapkan semua kesatuan-kesatuan pemerintahan yang bersifat territorial serupa dengan marga yang ada di daerah Kepungutan yang dahulunya merupakan wilayah Kesultanan Palembang, yang diperintah oleh langsung Belanda pasca dihapuskannya pemerintahan kesultanan.
2. Menetapkan satu macam serta cara peradilan dalam setiap wilayah dikuasai .
3. Mengatur pungutan menurut adat secara lebih rasional.
4. Menjalankan usaha-usaha kodifikasi dari hukum adat.<sup>62</sup>

Selanjutnya pemerintahan kolonial Belanda melakukan beberapa perubahan untuk menghapuskan keadaan-keadaan yang timpang dan penyelewengan- penyelewengan, dengan cara sebagai berikut:

1. Mengadakan pengaturan kembali terhadap sistem pajak dan rodi yang dibuat oleh sultan-sultan.
2. Usaha-usaha penghapusan marga-marga sebagai kesatuan masyarakat hukum, dimana semula pemrintah Belanda ingin menghapus, tetapi kemudian membatalkannya kembali.
3. Penyatuan dan pemecahan (pemekaran) marga-marga.

---

<sup>60</sup> Jeroen Peters, *op.cit.*, hal. 90

<sup>61</sup> Amrah Muslimin, *op.cit.*, hal. 24.

<sup>62</sup> *Ibid.*,

4. Pembentukan kas-kas (dana) marga.
5. Pembentukan dewan-dewan marga.
6. Pernyataan pemilikan (*domeinverklaring*) atas tanah-tanah oleh pemerintahan Belanda.
7. Mengatur peruntukan dan pembagian hasil dari hutan.
8. Mengatur hukum tanah.
9. Pembentukan kesatuan-kesatuan pemerintahan wilayah administrasi meliputi secara hierarki kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tersebut, yakni kedalam *distrik* dan *onderdistrict*.<sup>63</sup>

Di daerah Besemah, dimana ikatan kekerabatan masih kuat, dimana dusun-dusun yang merupakan rumpun-rumpun dari *sumbay* berbaur satu sama lain, maka Belanda menetapkan marga berdasarkan batas-batas geografis. Sehingga Belanda membentuk kesatuan-kesatuan pemerintahan berdasarkan pendekatan territorial, dengan mengabaikan adanya ikatan-ikatan genealogis yang selama ini berjalan. Tujuan utama sebenarnya adalah untuk membentuk pemerintahan yang efektif dan menyempurnakan administrasi marga.<sup>64</sup>

Marga yang terdiri dari beberapa dusun yang disatukan menjadi satu wilayah (marga) yang dipimpin oleh seorang *pasirah* yang bergelar *depati*. Dengan pemerintahan marga di daerah Besemah, secara kultural terjadi pergeseran legimitasi dari yang bersifat religio-magis (garis *puyang*) ke pemberian 'besluit' dan tongkat komando oleh pemerintah Belanda kepada elit pribumi, yakni *depati* dan *pangeran*. Simbol pengakuan seorang depati dilekatkan dengan pemberian kepala tongkat perrak, sedangkan untuk pangeran dengan tongkat berkepala emas. Di Besemah terdapat empat kepala *sumbay* yang bergelar *pangeran* dan ada beberapa kepala dusun yang kadang-kadang memakai gelar *pangeran*.<sup>65</sup>

Sejak Belanda menguasai Besemah, keberadaan *sumbay-sumbay* yang memiliki ikatan genealogis kemudian dipecah-pecah

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 25.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 26-27.

<sup>65</sup> Tim Penulis dan Pemerintah Kota Pagaram, *op.cit.*, hal. 63

oleh Belanda dan menggantinya dengan pendekatan territorial, maka orang Besemah dipisahkan secara administrasi. Untuk mengetahui batas-batas geografis antara daerah satu dengan daerah lainnya, maka digunakan tanda yang mudah dikenali, yang biasanya merupakan batas alam, seperti bukit, sungai atau lembah serta tanda alam lainnya. Beberapa batas marga yang menggunakan penanda ini misalnya, batas antara Marga Tanjungkurung dengan Marga Lubukbuntak yakni *Ayik Ndikat*, batas Marga Alundua dengan Marga Pajarbunan ialah *Ayik Kundugh* yang berhulu di Gunung Dempo. Dengan begitu kekuasaan marga mudah dikenali oleh pimpinan mereka (pesirah).<sup>66</sup>

Perangkat marga dipimpin oleh *Pesirah*, dibantu oleh para perangkatnya seperti *pembarap* (kepala dusun), *pengulu* (kepala urusan agama), juru tulis marga, *paruwatin-proatin-* (*keriye* dan *penggawe*). Selain itu dibentuk pula dewan marga (*raad marga*), dimana sebagai ketuanya dijabat oleh pesirah dengan anggotanya semua *keriye* dan *penggawe* dalam marga itu. Kantor marga berkedudukan di *balay marga*, meskipun hal tersebut bersifat simbolis. Sebab perangkat pesirah seperti *pembarap* dan *juru tulis* lebih banyak berada di kantor marga. Karena kedua jabatan ini merupakan pelaksana harian pemerintahan marga. Kedudukan *pembarap* dan *juru tulis* diangkat berdasarkan 'besluit', yang berbeda dengan pesirah yang dipilih oleh masyarakatnya.

Selain *pembarap* perangkat marga lainnya yang membantu tugas pesirah adalah *pengulu* dan dewan marga. *Pesirah* dan *keriye* dianggap sebagai pemangku adat (diangkat oleh penguasa). Sebab pemangku adat yang sebenarnya adalah *juraytuwe*. Tugas *pembarap*, *keriye*, *pengulu* dan dewan marga yakni bertindak sebagai penasehat *pesirah* dalam menjalankan pemerintahan di marga. Dalam prakteknya *pengulu* jarang dilibatkan dalam kegiatan pemerintahan, sedangkan pendapat atau usulan dewan marga hanya bersifat rekomendasi, sedangkan keputusan tetap ditangan pesirah. Anggota dewan marga yang semula dijabat oleh *pembarap*, *keriye* dan *penggawe*, pada perkembangannya selanjutnya dipilih oleh lingkungan dusunnya, termasuk pula ketua dewan marga yang semula otomatis dipegang oleh pesirah, pada perkembangan

---

<sup>66</sup> Ahmad Bastari Suan dkk, *op.cit.*, hal. 78.

kemudian dipilih oleh lingkungan dusunnya, meskipun kedudukannya tetap dibawah pesirah.<sup>67</sup>

Masa jabatan *pesirah* bisa berjalan selama 2 periode, yakni 10 tahun, jika dianggap berhasil, ia diangkat menjadi *pengiran*. Dan seandainya ia meninggal pada masa jabatannya, kekuasaan dapat diteruskan kepada anaknya, sebelum dipilihnya pesirah yang baru. Akan tetapi jabatan seorang tidak bisa diwariskan ataupun keturunannya dilarang untuk ikut pemilihan pesirah, jika pesirah tersebut melanggar atau dijatuhi sanksi hingga dipecat dari jabatannya sebagai *pesirah*.

Pada pertengahan abad ke19, pemerintah kolonial pada satu sisi memperkuat posisi kekuasaan *pesirah*, akan tetapi sisi lain juga berkepentingan menetapkan bahwa jabatan *pesirah* lowong karena suatu hal, baik karena pemecatan atau kematian untuk memilih pasirah baru oleh warga dusunnya. Sehingga semua pria yang tercatat dalam daftar pajak diperbolehkan mengikuti pemilihan pesirah dibawah pengawasan *kontrolir*. Mengingat bagian terbesar penduduk desa yang masih buta huruf, maka cara penentuan suara dilakukan yakni calon pesirah berdiri pada posisi yang lebih tinggi, dan bagi warga dusun yang mendukungnya diharuskan berdiri dibelakang pasiarah. Posisi genealogi berperan penting untuk legimitasi kekuasaan pesirah. Karena mayoritas penduduk cenderung mengukuhkan jabatan kepada putra bekas pasirah.<sup>68</sup>

Keberadaan dewan marga secara simbolis merupakan wakil rakyat, akan tetapi dalam praktiknya merupakan kepanjangan dari pemerintahan kolonial untuk melaksanakan kepentingan politik dan ekonominya, seperti melakukan pemungutan pajak (*belasting*), kuli jalan untuk ke dusun pasirah ataupun membuat kantor atau rumah pasirah. Selain itu mereka juga menjadi alat pemerintah kolonial untuk membuka konsensi perkebunan (*onderneming*) seperti kopi, karet, teh dan kina.

Setelah kesultanan Palembang dikuasai oleh Belanda, status Besemah tidak lagi dibawah pengaruh kesultanan maupun Belanda, tetapi menjadi daerah merdeka. Untuk memasukkan Besemah sebagai bagian dari administrasi kolonial, maka pemerintah Belanda

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal. 79-80.

<sup>68</sup> Jeroen Peters, *op.cit.*, hal. 94.

mengirimkan ekspedisi militer untuk menaklukkan Besemah. Akibatnya timbul perlawanan rakyat Besemah kepada Belanda yang disebut dengan istilah *mapak perang melawan Belande* (1828-1868). Setelah Besemah berada dibawah kekuasaan Belanda, maka mulai 20 Mei 1869, Belanda membentuk *onderafdeeling Pasemahlanden* dalam *afdeeling Palembangische Bovenlanden*. Marga yang semula merupakan ikatan genalogis berubah menjadi marga yang bersifat territorial<sup>69</sup>, antara lain sebagai berikut:

**1. Marga Sumbay Ulu Lurah**

- 1.1. Marga *Sumbay Ulu Lurah Suku Benuwakeling*
- 1.2. Marga *Sumbay Ulu Lurah Suku Karangdale*
- 1.3. Marga *Sumbay Ulu Lurah Suku Benuwaraje/Sukurete*
- 1.4. Marga *Sumbay Ulu Lurah Suku Karangdape*
- 1.5. Marga *Sumbay Ulu Lurah Suku Gunungkaye*
- 1.6. Marga *Sumbay Ulu Lurah Suku Kebanagung/Sawahbatuan*
- 1.7. Marga *Sumbay Ulu Lurah Suku Belumay*
- 1.8. Marga *Sumbay Ulu Lurah Suku Tanjung Kemuning*
- 1.9. Marga *Sumbay Ulu Lurah Suku Mulak Ulu*
- 1.10. Marga *Sumbay Ulu Lurah Suku Tegurwangi*
- 1.11. Marga *Sumbay Ulu Lurah Suku Pajarbulan-Kuteghaye*
- 1.12. Marga *Sumbay Ulu Lurah Suku Pagaragung*
- 1.13. Marga *Sumbay Ulu Lurah di Besemah Ulu Manak Ulu*
- 1.14. Marga *Besemah Ayik Keghuh (Besemah Air Keruh)*.

**2. Marga Sumbay Besak**

- 2.1. Marga *Sumbay Besak Suku Kebunjati*
- 2.2. Marga *Sumbay Besak Suku Tebatgunung*
- 2.3. Marga *Sumbay Besak Suku Lubukbuntak*
- 2.4. Marga *Sumbay Besak Suku Alunduwe*
- 2.5. Marga *Sumbay Besak Suku Pajarbulan*
- 2.6. Marga *Sumbay Besak Suku Sadan*
- 2.7. Marga *Sumbay Besak Suku Benuweraye di Besemah Ullu Manak Ulu*

---

<sup>69</sup> Ahmad Bastari Suan, *op.cit.*, hal. 86-89.

- 2.8. Marga *Sumbay Besak Suku Muwaretige* (Mulak Ulu).
- 2.9. Marga *Sumbay Besak Suku Penantian*
3. **Marga *Sumbay Mangku Anum***
  - 3.1. Marga *Sumbay Mangku Anum Suku Keretediwe*
  - 3.2. Marga *Sumbay Mangku Anum Suku Penantian*
  - 3.3. Marga *Sumbay Mangku Anum Suku Talangtinggi* (Besemah Ulu Lintang).
  - 3.4. Marga *Sumbay Mangku Anum Suku Tanjung Aghe* (Tanjung-ara)
  - 3.5. Marga *Sumbay Mangku Anum Suku Bumiagung*
  - 3.6. Marga *Sumbay Mangku Anum Suku Muwaresiban*
  - 3.7. Marga *Sumbay Mangku Anum* di Besemah Ulu Manak Ulu
4. **Marga *Sumbay Tanjung Ghaye***
  - 4.1. Marga *Sumbay Tanjung Ghaye Suku Gelungsakti*
  - 4.2. Marga *Sumbay Tanjung Ghaye Suku Muware-payang*
  - 4.3. Marga *Sumbay Tanjung Ghaye Suku Sukebumi*
  - 4.4. Marga *Sumbay Tanjung Ghaye Suku Muwardanaw* (Tanjungraye)
  - 4.5. Marga *Sumbay Tanjung Ghaye Suku Benuweraje*
  - 4.6. Marga *Sumbay Tanjung Ghaye* di Besemah Ulu Manak
5. **Marga *Sumbay Penjalang***
  - 5.1. Marga *Sumbay Penjalang Suku Tanjungkurung*
  - 5.2. Marga *Sumbay Penjalang Suku Margelumpay*
  - 5.3. Marga *Sumbay Penjalang Suku Lubukdalam*
  - 5.4. Marga *Sumbay Penjalang* di Besemah Ulu Manak Ulu
  - 5.5. Marga *Sumbay Penjalang Suku Empayang Kikim* (dan Saling Ulu)
  - 5.6. Marga *Sumbay Penjalang Suku Empayang Ilir*
  - 5.7. Marga *Sumbay Penjalang Suku Lingsing*
  - 5.8. Marga *Sumbay Penjalang Suku Pangi*
  - 5.9. Marga *Sumbay Penjalang* di Rejang Bermani/Kepahiang
6. **Marga *Sumbay Semidang***
  - 6.1. Marga *Sumbay Semidang Suku Pelangkendiday*



- 6.2. Marga *Sumbay Semidang Suku Seleman* (Ulu Lintang)
  - 6.3. Marga *Sumbay Semidang* di Besemah Ulu manak Ilir
  - 6.4. Marga *Sumbay Semidang Suku Ulakdabuk/Ulak Mengkudu* (Musi Tengah)
  - 6.5. Marga *Sumbay Semidang* di Musi Ulu
  - 6.6. Marga *Sumbay Semidang Suku Bukit kabu (Ulu Tale/Ulu Talo)*
  - 6.7. Marga *Sumbay Semidang Suku Mengkenang* (Mulak Ulu)
  - 6.8. Marga *Semidang Gumay* (Kaur Utara)
  - 6.9. Marga *Semidang Gunung Bungkok* (Ulu Bengkulu)
  - 6.10. Marga *Semidang Rambang*
  - 6.11. Marga *Semidang Alunduwe Suku Satu* (Ogan Ulu)
  - 6.12. Marga *Semidang Alunduwe Suku Dua* (Ogan Ulu)
  - 6.13. Marga *Semidang Alunduwe Suku Tiga* (Ogan Ulu)
  - 6.14. Marga *Semidang Mpat Dusun* (di Gumay Ulu)
7. **Marga Gumay**
- 7.1. Marga *Gumay Lembak*
  - 7.2. Marga *Gumay Ulu*
  - 7.3. Marga *Gumay Talang*
  - 7.4. Marga *Anak Gumay* di Pino, Bengkulu Selatan
  - 7.5. Marga *Semidang Gumay* di kaur Utara, Bengkulu
  - 7.6. Marga Empat Rurah Manggul
  - 7.7. Marga Darat (*Padang Peghangay, Mulak Iligh*)
  - 7.8. Marga *Lembak Ulu (Paye)*
  - 7.9. Marga *Lembak Iligh* (Negeri Agung)
  - 7.10. Marga *Mpat Suku Negeri Agung*
  - 7.11. Marga Lintang Kanan
8. **Marga dan Rurah** diluar tanah Besemah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Besmah, antara lain:
1. Marga Kedurang
  2. Marga Padang Guci
  3. Marga Kelam
  4. Marga Kinal
  5. Marga Luwas

6. Marga Ulu Kinal
7. Marga Ulu Luwas
8. Marga Semidang Alas
9. Marga Ulu Alas
10. Marga Besemah Palas (Palas Besemah), Lampung Selatan
11. Marga di Kisam dan Bayur
12. Marga *Besemah Ulu Ogan* (Ulu Ogan)
13. Marga-marga Semende Darat ( Besemah Ulu Inim)
14. Marga-marga Semende Lembak ( Besemah Ulu Luwas)
15. Marga-marga Mengkakaw
16. Marga-marga Rebang
17. Marga-marga Semende di Lampung

#### 4. Perkembangan Sosial Ekonomi

Penduduk Besemah pada masa kolonial secara antropologis digambarkan sebagai petani (*landbouwer*) yang cekatan dan dikatakan telah memiliki pengetahuan yang lebih maju dibanding tetangganya orang Melayu. Sawah-sawah yang dimilikinya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sehari-hari. Selain bertani, orang Besemah juga mengusahakan peternakan diluar kegiatan pertanian sawah mereka. Hewan ternak seperti kerbau, kambing dan jenis unggas, seperti ayam dan itik dipelihara dengan baik oleh orang Besemah. Bahkan seorang Raffles, yang saat itu berkuasa di Bengkulu, mengagumi sikap suka bermusyawarah, keteraturan, ketertiban dan kerapian dusun orang Besemah. Hal ini berbeda dengan kondisi di daerah Bengkulu.<sup>70</sup>

Orang Besemah juga mengenal ketrampilan kerajinan tangan, beberapa alat rumah tangga yang dibuat dari bambu dan kayu. Sedangkan kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti garam, alat perkakas rumah tangga, seperti gelas, tembikar dan juga barang logam seperti besi untuk membuat kelewang, tombak dan keris yang semuanya berasal dari ibu kota Palembang. Demikian pula kain untuk dibuat pakain berasal dari Palembang.

---

<sup>70</sup> Gramberg, *op.cit.*, hal. 120-121.

Di Besemah terdapat 2 (dua) pasar yang merupakan tempat jual beli dan menukar barang-barang hasil pertanian dengan barang-barang yang didatangkan dari Palembang. Orang Besemah yang tinggal berdekatan dengan dataran Lintang membawa barang-barang dagangan mereka dari dusun-dusun mereka ke pasar-pasar mereka yang disebut dengan *kalangan* di Muara Pinang dan Gunung Meraksa. Pasar di dua tempat ini tergolong ramai untuk masanya, karena semua hasil pertanian penting, seperti padi, beras, buah-buahan maupun umbi-umbian diperjual-belikan dalam jumlah yang besar pada setiap pekannya. Selanjutnya bagi orang Besemah yang tinggal berdekatan dengan daerah Lematang, mereka berbelanja di pasar yang ada di Lahat. Pasar ini termasuk cukup ramai dan penting di wilayah ini karena juga menawarkan barang dagangan yang berasal dari negeri barat dan timur.<sup>71</sup>

Meskipun hasil kerajinan tangan masih dalam taraf sederhana, seperti pertukangan kayu, mengukir kayu dan pandai besi untuk membuat senjata. Mereka telah mampu pula membuat mesiu sendiri. Dan yang mengagumkan mereka mampu mengembangkan ketrampilan tersebut tanpa dukungan pihak manapun. Watak orang Besemah yang merdeka dan sikap mandirilah yang mendorong mereka menemukan hal-hal baru, meskipun negeri mereka posisinya mudah diisolasi oleh pengaruh dari luar.

Dalam konteks kepentingan ekonomi kolonial, daerah Besemah merupakan salah satu penghasil produk pertanian yang memiliki nilai ekspor tinggi seperti kopi Robusta bersama Semendoe dan Ranau yang berpusat di Pagaralam.<sup>72</sup> Dari tahun 1887-1893 di daerah Besemah dibuka kurang lebih 21 perkebunan kopi di atas tanah *erfpacht*, yakni tanah yang disewakan selama 75 tahun. Perusahaan perkebunan milik orang-orang Eropa menjadikan daerah Pagaralam dan dataran tinggi Pasemah sebagai lahan untuk budidaya kopi Robusta, seperti yang dilakukan oleh *Cultuur Maatshappij* Indragiri (Swiss) pada tahun 1915. Beberapa daerah di Karesidenan Palembang seperti Pagaralam, Ranau, Komering dan Musi Ilir menjadi daerah menyediakan atau tempat adanya *erfpacht* untuk

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 129-130.

<sup>72</sup> Aloysius Gunadi Brata, *Problematika Masyarakat Kopi Pasemah*, Yogyakarta: Lemlit Universitas Atma Jaya, 2005, hal. 5.

dibuka sebagai kawasan *onderneming* sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.**  
**Tanah *Erfpbat* untuk Perkebunan di Sumatera Selatan**

Tahun	Lokasi	Jenis Tanaman	Jumlah	Luas
1890	Pagaralam	Kopi dan Teh	21	37.000
1900	Pagaralam dan Ranau	Kopi dan Teh	42	117.733
1910	Pagaralam dan Ranau	Kopi, Teh dan Karet	12	28.592
1916	Pagaralam dan Komerling	Kopi, Teh dan Karet	60	82.073
1925	Pagaralam dan Komerling	Kopi, Teh dan Karet	?	89.622
1929	Pagaralam dan Musi Ilir	Kopi, Teh dan Karet	110	95.320

Sumber: J.W.J. Wellan, *Zuid Sumatra, Economisch von Gewesten Djambi, Palembang, de Lampoengsche Districten en Benkoelen*, Wageningen: H. Veenman & Zoon, 1932, hal. 305

Pada masa kolonial didirikan perkebunan (*onderneming*) seperti Pasemah Estate di dekat Pagaralam yang pernah menghasilkan rekor tertinggi produksi kopi pada dekade kedua awal abad ke-20 sebanyak 14.000 ton.<sup>73</sup> Bahkan komoditas kopi untuk daerah Sumatera bagian Selatan termasuk Lampung juga tidak lepas dari pengaruh Besemah, khususnya Semendo yang memiliki akar silsilah sama dengan Besemah.

Penduduk di kawasan dataran tinggi seperti di Pagaralam menyebut kopi jenis Robusta dengan sebutan 'kopi bubuk'. Tanaman kopi ditanam sebagai tanaman sampingan disela kebun buah-buahan. Ada pula yang disisipkan untuk ditanam di lading setelah panen padi pertama. Pengusaha perkebunan dari barat (Eropa) cenderung memilih kopi jenis Robusta. Dimana jenis pohon kopi ini telah dibudidayakan sejak akhir abad ke-19, yang biasanya bisa dipanen setelah tiga atau empat tahun musim tanam.

Pada tahap awal hasil panen kopi oleh *onderneming* dianggap kurang memuaskan, karena panen kopi tidak lebih dari 3 ton pada

<sup>73</sup> Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003, hal 91.

tahun 1913. Maka pihak *onderneming* melakukan serangkaian pembenahan lebih intensif pada tahun 1915. Beberapa pengusaha swasta Eropa yang berasal dari Batavia pun ikut didorong untuk menanamkan modalnya dalam budidaya kopi Robusta. Akan tetapi mengalami kesulitan tenaga kerja, terutama buruh yang berasal dari Pulau Jawa, sementara penduduk lokal kurang tertarik menjadi buruh karena lebih memilih untuk emnggarap ladang kopi sendiri. Bahkan hasil panen kopi *onderneming* baru dianggap memiliki arti ekonomi mulai tahun 1920-an, meskipun harus bersaing dengan produksi kopi rakyat yang berlipat ganda, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.**  
**Produksi Kopi Rakyat dan Kopi Onderneming di Karesidenan Palembang (per 1.000 kg)**

Tahun	Kopi Rakyat	Kopi Onderneming	Nilai Ekspor Kopi Onderneming (f.1.000)
1923	12.026	1.149	8.716
1924	19.881	1.678	16.903
1925	20.981	1.354	19.466
1926	25.364	1.480	32.591
1927	23.407	1.594	18.188
1928	28.229	1.257	16.405
1929	17.818	1.679	14.534

Sumber: Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003 hal. 86

Jika perusahaan perkebunan besar di Pulau Jawa cenderung menghambat dan menahan laju pertumbuhan ekonomi pertanian, maka sebaliknya perusahaan perkebunan di luar Pulau Jawa justru sebaliknya. Perluasan *onderneming* yang menembus hingga daerah pedalaman di Karesidenan Palembang maapu berjalan seiring dan bahkan kadang kala bersaing dengan pertanian rakyat dalam hal komoditas seperti kopi dan karet, terkecuali untuk pengelolaan tanaman teh dan bahan tambang, seperti minyak bumi dan batu bara yang dipegang sepenuhnya oleh perusahaan Eropa.

Tersedianya lahan yang cukup luas dan melimpah di luar Pulau Jawa, membuat operasionalisasi perusahaan Barat tidak mengganggu atau menghambat pertanian rakyat. Tanaman kopi dan karet yang

dibudidayakan oleh *ondermening* dan perkebunan rakyat setempat dapat hidup di lahan kering (ladang). Sementara tebu dan tanaman dagang utama perkebunan-perkebunan besar di Pulau Jawa banyak memakai lahan sawah. Sehingga lahan yang dipergunakan oleh pihak *ondermening* di Pulau Jawa banyak menyita pertanian rakyat. Sedangkan untuk *ondermening* di daerah Karesidenan Palembang banyak membuka tanah yang belum digarap yang pada milik masyarakat adat (tanah marga).

Oleh sebab itu sifat *ondermening* di daerah ini tidak mengganggu pertanian tradisional milik rakyat. Kehadiran perusahaan perkebunan besar justru mendorong perluasan proses komoditasi pertanian penduduk. Bahkan sebagian hasil panen kopi dan karet rakyat di beli oleh *ondermening*. Dengan begitu pihak *ondermening* ikut mengangkat tanaman rakyat sehingga laku di pasaran. Untuk membantu kualitas dan kuantitas produk tanaman tersebut, pemerintah kolonial mendorong pendirian semacam sekolah pertanian yang mendidik dan menyiapkan calon-calon penyuluh pertanian yang handal di Pagaralam dan Muaraenim. Tidak itu saja, sekolah pertanian diperbolehkan menjual bibit tanaman karet dan kopi kepada rakyat.

Selain itu pemerintah kolonial juga menerbitkan *Soeloeh Peroesahaan Tanah*, yakni majalah bulanan berbahasa Melayu yang terbit pertama kali pada tahun 1916. Majalah ini memberikan informasi tentang berbagai teknik penanaman dan perawatan tanaman kopi dan karet. Sayangnya rakyat kebanyakan hanya sedikit mendapat informasi yang lengkap tentang majalah ini. Hanya sekelompok kecil dari pelangganya yang berpikiran maju terutama dari kalangan *pesirah*, *keriye* dan guru yang menjadi pelanggannya.<sup>74</sup>

Melihat sejarah perkebunan kopi di daerah Besemah, termasuk di Pagaralam, maka melalui Perda No.2 /1994 tentang RUTW (Rencana Umum Tata Wilayah) Kabupaten Lahat, dataran tinggi Pasemah diperuntukkan untuk kawasan pertanian, perkebunan kopi, teh, perikanan, pariwisata, hutan lindung dan suaka alam. Daerah Pasemah merupakan salah satu penghasil kopi terpenting di Sumatera Selatan. Daerah ini ini dikenal sebagai 'segitiga kopi' (*Coffee Triangle*) atau 'sabuk kopi bagian selatan' (*Southern Coffee*

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal.88-89.

*Belt*) di Indonesia merujuk pada daerah perbatasan Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu dengan Kopi Robustanya.<sup>75</sup>

Kopi sebagai salah satu produk andalan pertanian dari daerah Pagaralam dan juga Sumatera Selatan, setidaknya tercermin dari luas lahan untuk perkebunan kopi tercatat 294.401,85 hektar dengan produksi 142.574 ton pada tahun 2002. Daerah yang menjadi penyumbang hasil panen kopi, selain Lahat dan Pagaralam, serta beberapa daerah lain seperti Ogan Komering Ulu, Musi Rawas dan Lubuklinggau.<sup>76</sup> Kabupaten Lahat memiliki jumlah areal perkebunan kopi terbesar di Propinsi Sumatera Selatan pada tahun ini, yakni mencapai 115.000 hektar dengan jumlah produksinya ditaksir sekitatar 57.329 ton. Bahkan pada tahun 1980-an berdasarkan penelitian Bennet dan Godoy, Kabupaten Lahat menjadi salah satu sentra penghasil kopi terbesar di Indonesia yakni menyumbang 14% pada tahun 1984.

Harga jual kopi dari beberapa daerah di Indonesia, termasuk yang berasal dari Sumatera Selatan juga mengalami fluktuatif selama periode 1998-2005. Harga sempat menyentuh nilai tertinggi pada tahun 1998, ketika nilai tukar mengalami penurunan atas mata uang dollar, tetapi selebihnya harga kopi cenderung turun pada periode ini. Untuk jenis Kopi Robusta, sebagaimana banyak dihasilkan dari dataran tinggi Pasemah, harganya ditentukan di Bursa Kopi London (Inggris). Sedangkan untuk jenis Arabica ditentukan di Bursa Kopi New York (Amerika Serikat). Sehingga ada asumsi jika dollar naik maka harga jual kopi meningkat, begitu pula sebaliknya. Untuk harga jual kopi kering di daerah Pasemah, yakni ditingkat petani di Pagaralam pada periode diatas bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel .4.**  
**Harga Jual Kopi Kering (Ditingkat Petani)**  
**di Pagaralam dan Sekitarnya**

Tahun	Harga (Rp/kg)
1996	4.308
1998	16.000

<sup>75</sup> Aloysius Gunadi Brata, *op.cit.*, hal. 14-15.

<sup>76</sup> *Ibid.*,

1999-2000	7.000
2000	15.000
2001	5.000
2002	2.500-2.800
2003	3.500-4.000
2004	3.000-4.000
2005	3.000-6.000

Sumber: Aloysius Gunadi Brata, *Problematika Masyarakat Kopi Pasemah*, Yogyakarta: Lemlit Universitas Atma Jaya, 2005, hal. 18.

### C. Pemukiman

Pada masa lampau, kebanyakan dusun-dusun di Besemah dilengkapi bangunan kubu-kubu (*kute*) untuk keperluan keamanan serta tembok pertahanan alami berupa jurang-jurang yang mengelilingi daerah Besemah. Rumah-rumah di dusun-dusun mereka memiliki ukuran besar, luas dan dibangun dengan baik, walaupun hanya terbuat dari bambu atau kayu. Dusun-dusun mereka tertata rapi dan jalan-jalannya terpelihara dengan baik. Selanjutnya terdapat pula balai tempat persidangan yang dibangun secara baik untuk keperluan sidang atau musyawarah masyarakatnya.<sup>77</sup>

Orang Besemah memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam strategi mempertahankan wilayah mereka dari pengaruh asing maupun dari orang-orang yang ingin masuk ke daerahnya. Dusun-dusun di Besemah karena letak alaminya serta adanya kubu-kubu yang dibuat untuk kepentingan pertahanan membuat pemerintah Belanda berpikir keras untuk menaklukkannya. Kubu -kubu pertahanan yang biasanya dikelilingi pagar bambu yang berduri (*kute aur-duri*) dan dilengkapi dengan *palisade* (batang kayu runcing yang sengaja dipasang sebagai alat jebakan). Kadang kala beberapa dusun juga melengkapi dengan membangun *gelumbang* (parit) tunggal atau ganda sebagai penghambat gerak laju musuh yang ingin masuk ke dusun mereka. Selain membuat parit penghalang, ada juga dusun-dusun disini yang melengkapinya dengan lubang atau gua yang sangat dalam yang dibuat secara rapat berdekatan dengan danau atau jurang. Pembentengan dusun-dusun dikerjakan dengan rapi tanpa merusak tanah dan lingkungannya.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal. 127.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 106-108.



Orang Besemah jarang membuat benteng (kubu) pertahanan di tanah terbuka dan datar, sebab hal itu memudahkan orang menjangkanya. Hanya terdapat sedikit benteng yang didirikan di tempat terbuka, dan biasanya meereka melengkapinya tersebut dengan senjata yang disebut *lile* (meriam kecil), yakni semacam tabung-tabung pembuat suara gemuruh (meriam sundut), selain tentu senjata hasil ketrampilan mereka, seperti keris, tombak, kelewang dan parang. Di Besemah kurang lebih terdapat 1100 senapan dan 8 buah *lila*.<sup>79</sup>

Orang Besemah sebelumnya belum pernah mengenal benteng-benteng yang dibangun secara khusus untuk keperluan pertahanan menghadapi musuh dari luar. Mereka baru mengenal benteng yang dibangun secara baik, setelah kekalahan mereka atas pasukan Kolonel de Brauw yang berhasil mengalahkan mereka dan menghancurkan benteng terkuat mereka di Tebat Gunung pada tahun 1854. Untuk itu mereka membangun benteng yang jauh lebih kuat dan mampu menampung jumlah orang lebih banyak di dusun Kebun Jati. Parit perbentengan juga digali lebih dalam serta memagarinya dengan bambu berduri. Sehingga orang Belanda menyematkan tersebut dengan sebutan besemah sebagai 'negeri perbentengan' mengacu pada adanya kubu-kubu yang dibangun di sekitar dusun-dusun orang Besemah.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal. 127.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hal. 108.

**BAB III****IDENTITAS KULTURAL ORANG  
BESEMAH**

Stuart Hall menyatakan bahwa identitas dalam masyarakat modern tak pernah utuh tetapi semakin terfragmentasikan. Identitas tidaklah bersifat tunggal tetapi terbentuk secara bergelombang lintas wacana, praktik dan posisi yang berbeda, yang semuanya terjadi sebagai akibat adanya proses kesejarahan didalamnya, yang terus menerus berproses yang diwarnai adanya perubahan dan transformasi. Identitas dibangun melalui perbedaan adanya relasi dan dialog dengan pihak lain. Identitas juga merupakan produk dari perbedaan dan pengecualian daris simbol-simbol kesatuan yang terbentuk secara alami dan identik<sup>81</sup>

Selain itu jika berbicara mengenai identitas karya klasik Fredrik Barth tentu menjadi salah satu rujukan menyangkut teoritisasi dan konseptual tentang kelompok etnis dan batasanya. Barth menyatakan bahwa pemeliharaan batas etnis-etnis memang memisahkan satu kelompok etnis dari kelompok etnis lainnya demi menjamin dan menjaga kesinambungan kelompok etnis itu sendiri. Akan tetapi isi atau 'kandungan kultural' yang terdapat di dalam suatu kelompok etnis tersebut selalu dinamis. Barth menambahkan bahwa interaksi antar etnis tak akan menyebabkan berkurangnya perbedaan, karena para anggota etnis terikat dengan 'kontrak sosial'

---

<sup>81</sup> Stuart Hall, 'Who Needs an Identity' dalam Stuart Hall dan Paul du Gay (ed), *Questions of Cultural Identity*, London: SAGE Publications, 1996b. hal. 4 dalam Chang Yau Hoon, *Identitas Tionghoa Pasca Suharto Budaya, Politik dan Media*, Jakarta: Yayasan Nabil dan LP3ES, 2012, hal. xii.

untuk memelihara perbedaan budaya kelompok etnis mereka sendiri.<sup>82</sup>

Dalam konteks tersebut diatas, identitas orang Besemah, sebagai salah satu kelompok bangsa di Sumatera Selatan, menarik untuk diulas. Sebab sebagai suatu kelompok etnis, orang Besemah memiliki identitas yang bersumber legitimasi kultural dan sosial yang terus menerus diwariskan kepada pendukung budayanya melalui proses sejarah yang panjang. Pada bagian ini hanya diuraikan beberapa identitas yang dimiliki oleh orang Besemah terutama yang dewasa ini menjadi wacana akademik dan masyarakat luas di Kota Pagaralam, antara lain; peninggalan megalitik, Pagaralam sebagai kota perjuangan, arsitektur rumah *Baghi* dan khazanah bahasa, sastra dan budaya.

#### A. PENINGGALAN MEGALITIK

Majalah Besemah Pagaralam dalam terbitannya bulan Juni tahun 2012 mengangkat persoalan aktual yang menyoroti tinggalan megalitik yang terdapat di Besemah sebagai warisan dunia.<sup>83</sup> Informasi penting yang disampaikan oleh majalah ini, bahwa terdapat 67 situs megalitikum di Kota Pagaralam, yang telah didaftarkan ke UNESCO, lembaga dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurus masalah pendidikan dan kebudayaan di dunia.

Jika melacak peninggalan megalitik di tanah Besemah tentu saja dilepaskan dari aspek perkembangan budaya masyarakat Indonesia pada masa pra sejarah. Kebudayaan manusia Indonesia masa pra sejarah yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian; 1) masa berburu dan mengumpulkan makanan, 2) masa bercocok tanam dan 3) masa kemahiran teknik atau pertukangan (*perundagian*). Tahapan perkembangan kebudayaan tersebut tidak semua ditemukan di semua wilayah nusantara. Sebab antara satu daerah dengan daerah lain memiliki perbedaan tergantung sejauh tingkat pengaruh dan juga intreraksi dari pembawa tradisi budaya megalitik ini ke tempat tersebut.

---

<sup>82</sup> Fredrik Barth, 'Introduction', dalam Fredrik Barth (ed), *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*, Oslo: Pensumtjeneste, 1969, hal. 38.

<sup>83</sup> Warisan Dunia di Bumi Besemah dalam Majalah Besemah Pagaralam Vol. 5 NO.23 Juni 2012, hal.4-11.

Menurut ahli pra sejarah, budaya megalitik masuk ke Indonesia diperkirakan melalui 2 (dua) gelombang. Pada gelombang pertama, yang datang ke Indonesia adalah budaya megalitik tua (*paleolithikum*) yang diperkirakan masuk sekitar 2.500-1.500 sebelum Masehi. Bentuk peninggalannya antara lain, seperti menhir, punden berundak dan patung simbolis monumental. Dan gelombang kedua disebut sebagai megalitikum muda (*neolithikum*) yang diperkirakan masuk ke Indonesia pada awal abad pertama Masehi. Tinggalan budaya pada masa ini, antara lain peti kubur, *dolmen* dan *sarkofagus*.<sup>84</sup>

Benda-benda megalitikum, baik pada masa *paleolithikum* dan *neolithikum* merupakan wujud adanya kepercayaan terhadap roh nenek moyang masyarakat Indonesia masa pra sejarah. Hal yang paling penting keberadaan bangunan megalitium adalah sebagai medium yang menghubungkan antara manusia yang masih hidup dengan kekuatan magis dari roh nenek moyang mereka.<sup>85</sup>

Jejak-jejak kebudayaan megalitik tua dan muda menyebar di daratan Sumatera. Tinggalan megalitik yang dipandang penting terdapat di dataran tinggi Pasemah berdasarkan hasil temuan Van der Hoop.<sup>86</sup> Dan ini menjadikan Pasemah merupakan salah satu tempat di Indonesia yang memiliki tempat khusus dalam studi arkeologi sehubungan dengan banyak tinggalan benda-benda pra sejarah sejak tahun 1950-an sebagaimana disampaikan oleh Peter Bellwood.<sup>87</sup>

Pada masa kolonial, daerah Besemah telah menarik para ilmuwan dan pegawai pemerintah Belanda untuk menyelidikinya. Peninggalan situs megalitik di daerah ini pernah dilaporkan oleh Ullman (1850), Tombrink (1870), Engelhard (1891), Krom (1918), Westenenk (1922) dan Hoven (1927) yang kesemuanya memperkirakan situs megalitik Besemah memiliki keterkaitan

---

<sup>84</sup> Tim Penulis dan Pemerintah Kota Pagaram, Sejarah Besemah, *Dari Zaman Megalitukum, Lampik Empat Merdeka Due, Sindang Merdike ke Kota Perjuangan*, Pagaram: 2005, hal.18-19.

<sup>85</sup> Marwati Djoned Poesponegoro (ed), *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid I*, Jakarta: Proyek IDSN, Ditjaranitra Depdikbud, 1982, hal. 196.

<sup>86</sup> Edwin M. Loeb, *Sumatera Sejarah dan Masyarakatnya*, diterjemahkan oleh Windu Wahyudi Yusuf, Yogyakarta: Ombak, 2013, hal. 372-373.

<sup>87</sup> Peter Bellwood, *Pra Sejarah Kepulauan Indo-Malaysia*, Jakarta: Gramedia, 2000, hal. 414.

dengan peninggalan Hindu. Pendapat ini kemudian dimentahkan atau bahkan ditolak oleh Van Eerde (1929) yang menyebutkan bahwa tinggalan megalitik di Besemah sama sekali tidak pernah dipengaruhi oleh budaya Hindu, tetapi berasal dari masa pra sejarah. Temuan megalitik di Besemah semakin lengkap berkat kerja keras Van der Hoop yang menghasilkan publikasi lengkap tentang situs megalitik di Besemah. Selain itu juga publikasi berharga dari Van Heerkeren dan juga Peacovck membahas iktisar tinggalan megalitik dan juga fungsinya bagi kehidupan sosial manusia pada masa lampau.<sup>88</sup>

Tradisi megalitik yang ditemukan di Besemah memiliki ciri khas, dimana terlihat adanya perubahan dari arca-arca yang berstatis ke arca-arca yang bersifat dinamis, dengan pahatan menyerupai anggota tubuh dan badan yang mengandung gerak dinamis sehingga Von Heine Geldern menyebut megalitik Besemah dengan istilah '*strongly dynamic agitated*'.<sup>89</sup> Beberapa tempat di Besemah yang ditemukan situs megalitik antara lain di Tinggihari, Tanjungsirih, Pulau Pinang, Lubukbuntak (*batu Jeme*), Pulaupanggung, Air Puar, Tebing Tinggi, Geramat (*batu bercoret*), Mingkil, Nanding (*batu gung*), Tebatsibentur, Tanjung Arau, Tegur Arau, Tegur Wangi (*batu beghibu*), Belumai (*batu nik kuanci* dan peti kubur batu), Kotaraya Lembak, Muaradua, Bandaraji, Gunungkaya (*batu bupean/kubus* dan *batu pidaran/dakon*), Muaratebu dan Pagaralam (*batu ghuse, batu bekatek* dan lainnya). Situs-situs megalitik yang tersebar didataran tinggi tanah Besemah meliputi kawasan seluas 80 km persegi. Situs-situs tersebut ditemukan di dataran tinggi, di puncak gunung, lereng serta di lembah berupa. menhir, dolmen, peti kubur batu, lesung dan patung.

Pembuatan arca di Besemah tampaknya dilandasi untuk tujuan religius tertentu. Pembuatan arca yang menyerupai anggota tubuh manusia yang serba besar dan tambun mencerminkan keperkasaan kekuatan dari orang yang digambarkan. Pengerjakan arca ini dilakukan ketika tokoh yang digambarkan masih hidup yang dipahatkan dengan penuh keagungan, kemewahan dan keperkasaan,

---

<sup>88</sup>Tim Penulis dan Pemerintah Kota Pagaralam, op.cit., hal. 20-21.

<sup>89</sup>Ayu Kusumawati dan Haris Sukendar, *Megalitik Bumi Pasemah Peranan Serta Fungsinya*, Jakarta: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, Deputi Bidang Pelstarian dan Pengembangan Budaya, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 2003, hal. 8.

sedangkan pakaian, pelengkap pakaian, hiasan atau perhiasan kadang-kadang dipahatkan. Semua ini tentu saja agar arca orang yang dipahatkan mempunyai wibawa dan memiliki kekuatan yang lebih besar.

Beberapa temuan arca megalitik seperti di Tinggihari merupakan arca dengan ukuran besar dan tentunya dibuat secara kolektif di antara masyarakatnya. Melihat hasil megalitiknya bisa disimpulkan bahwa masyarakat mendukung kebudayaan megalitik di Besemah ini, sudah pasti memiliki struktur sosial yang tertata rapi dan adanya pola kepemimpinan yang berjalan secara baik. Tokoh-tokoh dari pemimpin masyarakat inilah yang dipahatkan sebagai usaha pengakuan atas harkat, martabat dan karismanya.<sup>90</sup>

Temuan peninggalan megalitik di Besemah memiliki banyak variasi, tentu saja hal ini memberikan bukti adanya perkembangan seni budaya dan sistem kepercayaan mereka. Sistem kepercayaan masyarakat yang didasarkan atas kekuatan supranatural yang terkait dengan norma, nilai dan tradisi yang ada di masyarakatnya. Beragamnya temuan situs megalitik di Besemah seklaigus menjadi bukti bahwa besemah merupakan campuran antar megalitik tua dan muda yang menyebabkan budaya Besemah mejadi kaya dan lengkap serta dinamis.

Arca megalitik di Besemah memiliki dua varian, yakni bersifat statis yang ditandai oleh bentuk bahu, badan, pinggul yang asam dari atas sampai ke bawah, tanda-tanda gerak tubuh dan liukan-liuk bagian tubuhnya tidak tampak. Bagian-bagian tubuh kadang-kadang dipahatkan secara kaku (skeptis) dalam bentuk skematis bahkan kadang-kadang tidak dipahatkan. Situs megalitik Besemah memiliki tinggalan yang kompleks, beberapa tinggalan megalitik di Besemah<sup>91</sup>, antara lain;

1. Arca megalitik yakni pahatan dalam bentuk tokoh manusia atau binatang.
2. Menhir yaitu batu tegak (batu berdiri) yang biasanya berkaitan dengan tujuan untuk pemujaan arwah nenek moyang.

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal. 28-30.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hal. 35-37.

3. Kubur kamar batu yakni bangunan yang dibuat dari susunan batu, yang terdiri dari dinding, dasar dan penutup.
4. Dolmen, yakni bangunan yang terdiri dari sebuah batu besar yang ditopang oleh batu lain yang lebih kecil yang dipergunakan sebagai penyangga.
5. Peti batu, yaitu kubur yang terdiri dari susunan batu-batu papan dengan 4 buah batu papan sebagai dinding dan penutup serta batu papan sebagai dasar.
6. Lumpang batu, yakni sebuah batu bagian atasnya rata dan terdapat sebuah lubang atau lebih yang kemungkinan dipakai sebagai penumbuk.
7. Palung batu, yakni sebuah pahatan batu yang terbuat dari monolit berbentuk seperti perahu dan diberi lubang memanjang.
8. Batu tergores, yakni monolit yang pada bagian permukaannya terdapat lubang-lubang besar dan kecil.
9. Batu bergores adalah monolit yang dibagian permukaannya terdapat goresan-goresan yang berkaitan dengan tradisi megalitik.
10. Teras berundak yakni sebuah bangunan yang terdiri dari teras-teras yang biasanya diperkuat dengan batu-batu kali besar dan kecil.
11. Batu datar sebuah monolit yang diletakkan di atas tanah dengan permukaan rata yang biasanya berfungsi untuk upacara pemujaan.
12. Batu pahat adalah batu besar yang pada bagian permukaannya terdapat pahatan, misalnya, batu gajah.

Temuan arca megalitik di Besemah memiliki ciri khusus yang tidak ditemukan pada arca megalitik di tempat lainnya di Indonesia. Keunikan dan kekhasan arca di Besemah adalah pola gerak dan irama dari pahatan-pahatan seluruh bagian badannya, yang begitu hidup dengan gerak yang bebas, tidak terikat oleh aturan seperti pada arca statis. Pola gerak dan irama yang tampak pada hasil pahatan tangan, badan, kaki dan lainnya menunjukkan bahwa arca megalitik Besemah terlihat begitu dinamis. Dimana posisi tangan

yang serba bebas dalam keadaan tertekuk, lurus atau memegang sesuatu dengan jari tangannya dibuat sedemikian lincah dan halus. Ini menunjukkan bahwa tokoh yang dipahatkan mempunyai kesan seolah-olah melakukan gerakan-gerakan dengan bebas. Gerak yang dinamis pada arca megalitik Besemah menunjukkan suatu ciri bahwa arca itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan khusus. Gerak bagian tubuh arca, tangan, badan, kaki menunjukkan unsur dinamis yang hanya dikenal dalam pembuatan arca megalitik Besemah.

Tujuan pembuatan arca yang dinamis, memiliki kaitan atau sebagai kegiatan manusia dalam mendekati diri kepada kekuatan supranatural. Karena terkait dengan konsepsi kepercayaan masyarakat mengenai hubungan mereka dengan pemujaan arwah leluhurnya. Arca yang dinamis tentu saja dilandasi oleh pola pikir dari pembuatnya yang dinamis pula. Pola pikir yang dinamis ini ditandai dengan adanya aktifitas untuk memperoleh hal-hal yang baru yang lebih baik dengan melakukan perubahan-perubahan tertentu. Perubahan tersebut terjadi pada bagian penting dalam kehidupan manusia yakni konsepsi kepercayaan yang akan mempengaruhi perubahan dalam aktifitas pembuatan sarana-sarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan suatu aktifitas religious seperti upacara penguburan dan pemujaan arwah.

Konsepsi tersebut diatas menjadi dasar utama mengapa arca megalitik di Besemah tampil dalam rupa yang dinamis. Keganasan ataupun tantangan alam yang besar dari lingkungan tempat pemukiman pendukung tradisi megalitik di Besemah, baik yang mencakup lingkungan biotik maupun abiotik. Adanya ancaman dari hewan buas atau hama penyakit serta rasa takut atas amukan gajah dan binatang lair, seperti ular menyebabkan suatu usaha untuk melakukan pendekatan melalui unsur kepercayaan. Sehingga lahirnya bentuk-bentuk hasil pahatan arca yang merupakan simbol atau lambang yang diharapkan dapat menjadi pelindung mereka. Simbol-simbol kekuatan yang diharapkan dapat meredam keganasan serangan binatang buas akan tampil dalam bentuk arca manusia dan arca binatang buas.

Arca megalitik di Besemah selain menunjukkan arca manusia yang utuh, dengan bentuk anatomi lengkap dari mulai kepala, leher badan dan kaki (*antropomorfik*) juga ditemukan arca yang menggambarkan bentuk manusia, bersama-sama binatang, misalnya



arca tokoh manusia mengapit kerbau atau gajah. Selain pahatan tiga dimensi, juga ditemukan pahatan yang bersifat dua dimensi (relief) yang digambarkan pada sebuah monolit seperti relief pada batu gajah. Arca megalitik di Besemah, pada dasarnya merupakan penggambaran dari personifikasi dari nenek moyang. Arca ini dipergunakan sebagai medium komunikasi atau usaha mendekatkan diri dengan arwah nenek moyang mereka. Arca megalitik yang berupa pahatan-pahatan yang memiliki kemiripan dengan bentuk manusia dan binatang, berkaitan dengan untuk tujuan religious disamping dipergunakan sebagai simbol-simbol dan tentunya memiliki nilai artistik yang tinggi nilainya.

Arca megalitik yang berbentuk seperti menhir, secara umum merupakan tinggalan atau situs yang pada awalnya dibuat sebagai penggambaran dari orang yang telah meninggal. Menhir ada yang diletakkan pada kubur, sebagai sarana untuk pemujaan agar arwah selamat di tempatnya yang baru, dan yang ditinggalkan juga memperoleh keselamatan. Arca menhir merupakan identifikasi dari seorang tokoh atau pimpinan oleh para keturunannya akan dipuja-puja untuk memperoleh berkah. Selain itu agar arca menhir dapat berperan dan berfungsi maka dipahatkan dengan bentuk-bentuk yang menurut pikiran pendukung megalitik memiliki kekuatan gaib yang lebih besar. Sehingga tak jarang ditemukan arca menhir yang dipahatkan dengan mata melotot, mulut lebar, gigi-gigi yang besar dan runcing, telinga besar dan panjang atau dengan kemaluan yang berdiri tegak. Bentuk-bentuk itulah yang oleh pendukung tradisi megalitik diharapkan dapat memberikan dan menambah kekuatan gaib.

Di Besemah ditemukan pula arca megalitik yang dibuat dengan bagian-bagian tubuh secara lengkap, oleh para arkeolog disebut 'arca menhir', arca biasanya dipahatkan dengan anggota badan yang lengkap dari kepala sampai kaki, selain ada pula yang dipahatkan berdiri sendiri tetapi ada juga yang digambarkan dengan mengapit binatang. Arca megalitik Besemah bentuknya monumental dengan pahatan yang berukuran besar. Ciri-ciri umum tampilan arca megalitik yang ditemukan di Besemah<sup>92</sup>, yakni sebagai berikut:

1. Badan dan anggota badan digambarkan dalam bentuk tambun

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 57-58

2. Bibir tebal, hidung pesek dan mata bulat
3. Bagian kepala lebih kedepan dari bagian tubuhnya sehingga seolah-olah membungkuk
4. Arca ada yang dipahatkan mengapit kerbau atau gajah
5. Kadang dibagian punggung terdapat nekara perunggu atau anak dan pada bagian pinggang terselib sebuah belati-tipe Dongson.

Arca jenis megalitik di Besemah banyak ditemukan di situs Tinggihari, Pulaupanggang, Tanjungsakti, Tegurwangi, Tanjung Arau, Belumai dan lainnya. arca megalitik yang digambarkan mengapit gajah, kerbau, babi hutan atau ular naga yang ditemukan di Besemah, kemungkinan dimaksudkan sebagai simbol apenguasaan manusia terhadap lingkungan yang ganas. Arca megalitik yang ditemukan oleh Van der Hoop, Van Heekeren dan Von Heine Geldern dikatakan banyak yang dipahatkan dalam bentuk yang mengendarai bintang, seperti gajah dan kerbau, setelah diteliti oleh bukannya mengendarai kerbau tetapi sedang mengapit korban. Istilah mengendarai dan mengapit memiliki makna berbeda. Istilah mengendarai tampaknya cenderung pada unsur pemanfaatan yakni hanya memanfaatkan sebagai kendaraan transportasi. Sedangkan gambar memeluk binatang, memiliki makna simbol sebagai penggambaran adanya usaha manusia untuk menguasai binatang buas, supaya tidak mengganggu masyarakat. Arca megalitik dalam bentuk binatang tampaknya mengandung 2 (dua) aspek, yang pertama mengacu pada suatu permohonan untuk memperoleh perlindungan, dan yang kedua, lebih pada ekspresi cipta, rasa dan karsa dibidang seni yang subsatansi tentang lingkungan. Adanya pahatan arca megalitik dalam bentuk binatang, seperti gajah, harimau, kera, ular, kerbau, babi dan lainnya, tentunya memiliki maksud bahwa nenek moyang orang Besemah telah mengenal binatang tersebut dalam kehidupan mereka.

Arca-arca yang ditemukan di Tinggihari memberi petunjuk betapa eratnya kehidupan manusia dan gajah, serta kerbau, sedangkan harimau tampaknya merupakan binatang yang dianggap membahayakan kehidupan mereka. Sehingga belum pernah ditemukan di Besemah, arca tokoh manusia yang dipahatkan menyatu bersama harimau. Arca megalitik di Besemah mengandung

nilai-nilai seni serta kreatifitas tinggi, yang merupakan perubahan secara evolusioner dari sifat-sifat statis ke sifat dinamis.

Arca megalitik Besemah merupakan arca perwujudan dari orang-orang yang masih hidup, arca tersebut dibuat oleh pemimpin atau ketua adat sendiri ketika tokoh yang digambarkan masih hidup. Arca-arca ini dipandang sebagai cara untuk penanda atau peringatan bagi keturunannya. Pembuatan arca memerlukan waktu dan biaya yang besar, serta pemotong hewan kerbaun dalam jumlah besar. Semakin banyak biaya dan kerbau yang dipotong maka orang yang diarcakan semakin tersohor. Jika orang yang diarcakan masih hidup dan masih berkuasa sebagai tokoh masyarakat, maka pembuatan arca tersebut tidak hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat religius, akan tetapi juga memperlihatkan aspek kemegahan dan kebesaran sang tokoh, termasuk dalam kelengkapan pakaiannya serai tanda-tanda atau hiasan yang dipakainya.

Arca megalitik yang disebutkan sebagai 'strongly dynamic agitated', juga memperlihatkan adanya perubahan evolutif dan kebangkitan seni pahat yang memiliki dan ditunjang kecerdasan lokal (*local genius*) masyarakatnya. Ciri-ciri lokal genius, yang dimaksud disini adalah adanya pola pikir yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat atau suku bangsa yang menetap atau penduduk asli di daerah tersebut. Selain itu bahwa muncul lokal genius, tidak berarti budaya material orang Besemah tertutup dari pengaruh luar. Pengaruh luar tetap diterima namun dilakukan dengan penyaringan dan disesuaikan dengan kondisi lokal Besemah.

Salah satu aspek yang menarik, dari temuan megalitik Besemah adalah temuan megalitik dengan pahatan binatang kerbau dengan tokoh manusia di Belumai, Pulau Pinang dan Tinggihari, merupakan hal khas yang ditemukan di tempat lain. Arca megalitik di Besemah, tampak menarik dan unik, karena didataran tinggi seperti di Besemah muncul jenis pahatan binatang yang belum atau sudah dibudidayakan. Arca-arac tersebut antara lain babi hutan, harimau, kera, gajah kerbau dan ular. Sedangkan arca yang dipahatkan disitus megalitik biasanya hanya berupa buaya atau kadal yang oleh pendukung masyarakat pra sejarah dianggap sebagai penjelmaan atau personifikasi arwah nenek moyang mereka.



**Gambar 4.** Arca Megalitik dari Belumai  
Sumber: Dokumen Tim Peneliti, 2014

Ditemukan arca-arca megalitik binatang di Besemah tidak hanya sekedar berfungsi sebagai ekspresi seni dari seorang seniman untuk menyampaikan gagasan dan imajinasinya, akan tetapi untuk tujuan estetis serta perwujudan dari kehidupan keseharian mereka dengan lingkungan alamnya. Dalam bidang seni pendukung tradisi megalitik didataran tinggi di Besemah telah dikenal seni lukis yang berkualitas tinggi, baik dari segi bentuk maupun tata warna. Gaya naturalis serta gaya stilir telah muncul pada pelbagai panel pada dinding batu kubur, yang ditemukan di Tanjung Arau, Tegurwangi dan Kota Lembak (Jarai). Lukisan purba di Tanjung Arau ditemukan oleh Van der Hoop, sedangkan di Tegurwangi dan Kotaraya Lembak oleh penduduk setempat pada tahun 1987. Lukisan purba di Besemah memiliki perpaduan warna yang menunjukkan bukti bahwa pembuatnya telah mengenal tata warna dengan kualitas tinggi.<sup>93</sup>

Lukisan purba di Besemah menggunakan warna merah, putih, hitam dan kuning. Dimana warna putih berasal dari *kaolin* (tanah liat), termasuk pula warna kuning dari tanah liat. Sedangkan untuk warna merah dan coklat menggunakan bahan hematite merah, dan untuk warna hitam dari bahan arang (*charcoal*). Pada masa pra sejarah, warna merah melambangkan aspek religius, yang memiliki

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, hal. 120.

makna adanya kehidupan kembali. Kemudian pada masa selanjutnya warna merah memiliki arti sebagai embol keberanian, hitam bersifat magis-religius, kuning diartikan sebagai lambing keagungan dan putih sebagai simbol kesucian. Lukisan purba yang ditemukan di Besemah telah memiliki suatu aturan dan kaidah yang telah menjadi kesepakatan diantar para leluhur orang Besemah.<sup>94</sup> Benda-benda yang dijadikan obyek luisan purba di Besemah, antara lain, seperti manusia (*antrpomorpik*), fauna (Binatang), flora, benda buatan manusia dan alam.

Lukisan gambar manusia (*antropomorpik*) yang ditemukan di situs-situs Besemah memiliki struktur anatomi yang lengkap dari mulai kepala, leher, badan, kaki serta bagian anggota badan lainnya, seperti mata, telinga mulut dan lainnya secara lengkap, meskipun dibaut dengan proporsi yang tidak persis dengan *antropomorpiknya*. Tokoh manusia ada yang digambarkan posisi kepala lebih menonjol dan terlihat bongkok, badan dibuat terlihat gemuk dan leher pendek. Juga ditemukan lukisan dengan tokoh manusia ada yang mirip manusia ataupun kera. Lukisan wanita dengan payudara yang besar di Tegurwangi. Sehingga dari sini ini tampak adanya kesejajaran keahlian dalam bidang seni pahat dan seni lukis.

Lukisan purba dengan mengambil motif binatang liar maupun binatang yang telah dipelihara oleh manusia seperti hasil temuan Van der Hoop di di penggalian kubur di Tanjungarau, yang menemukan lukisan dengan gambar seorang tokoh yang mengendarai kerbau. Deskripsi Teguh Asmar mengenai lukisan kerbau yang ditemukan di salah satu pintu masuk di salah satu kubur batu di Jarai. Lukisan kerbau tampak tidak proporsional pada ukuran kepala, leher, badan serta kaki. Lukisan purba lainnya, seperti lukisan burung hantu yang ditemukan di Jarai, meskipun ada pandangan berbeda antara Haris Sukendar yang menyebutkan sebagai penggambaran burung hantu dengan kuku panjang dan runcing, sedangkan Teguh Asmar mengatakan sebagai lukisan harimau. Lukisan yang lebih menarik lagi, yakni lukisan kepala naga yang ditemukan di dinding sebelah kiri di dekat pintu masuk kubur jarai. Secara umum, menurut Haris Sukendar lukisan-lukisan fauna di Besemah dapat dikategorikan kedalam dua bagian<sup>95</sup>, yaitu:

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal. 121.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal. 127

1. Sistem lukisan yang dapat dikategorikan ke dalam lukisan realis, yang dilukiskan sesuai bentuk aslinya.
2. Lukisan bersifat stilir, yakni lukisan yang digambarkan dengan bentuk-bentuk yang di gayakan, tetapi memiliki makna seperti aslinya.

Kerbau dianggap memiliki posisi penting dalam tradisi megalitik di Besemah. Dalam berbagai ritual penting kerbaudigunakan sebagai binatang kurban yang dikaitkan dengan kendaraan menuju ke alam arwah atau sebagai konsumsi manusia itu sendiri. Kerbau juga dipandang sebagai simbol harkat dan martabat seseorang, lukisan dengan motif hewan kerbau, banyak di temukan di Besemah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Besemah telah akrab dengan hewan ini. Untuk lukisan yang mengambil motif tanaman (flora), memiliki makna simbol kesuburan atau hanya bersifat estetika semata. Jenis tanaman yang sering dilukiskan sesuai dengan keadaan alamiah atau obyek yang dihias, sedangkan motif hias yang sering ditemukan adalah motif sulur atau jenis tanaman merambat.

Megalitik yang ditemukan di tanah Besemah dalam perspektif yang luas menarik untuk di amati lebih lanjut. Tampaknya dalam kurun waktu yang panjang, menunjukkan adanya perkembangan kemajuan dalam tradisi megalitik. Bentuk artistik dengan kualitas yang tinggi serta terlihat adanya sifat akomodatif dari pengaruh luar. Pahatannya telah menunjukkan ketrampilan teknik yang mengandung berbagai unsur budaya yang telah dipadukan. Indikasi ini terlihat pada unsure-unsur budaya luar yang terletak pada bagian tutup kepala, bentuk, fisik tubuh, pelengkap pakaian dan pakaiannya, seperti temuan di beberapa tempat di Besemah.

Di Tegurwangi ditemukan seni pahat yang seperti mendapat pengaruh dari Yunani, seperti dalam lukisan tokoh-tokoh yang digambarkan dengan tutup kepala berumbai-rumbai dengan hiasan dalam bentuk bulatan-bulatan yang menyerupai pakaian serdadu Romawi. Pengaruh Amerika, dalam hal ini lukisan yang menggambarkan pakaian *ponco* yang digunakan oleh suku-suku di Amerika, dengan pahatan pada bagian kaki seperti memakai kaos kaki tebal seperti dipakai di daerah dingin menurut amatan R.P. Soedjono yang ditemukan di Pulauapnggung, Tanjungsirih, Muara Dua Gumay Ulu dan lainnya. Pengaruh dari budaya Dongson, terlihat dari arca

megalitik yang ditemukan berbagai tempat di Besemah, seperti adanya pahatan nekara perunggu, belati dan pedang dengan pakain lengkap. Pahatan ini menggambarkan alat-alat kelengkapan hidup yang pada awalnya dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di daerah Dongson (Vietnam).



**Gambar. 5.** Arca Megalitik di Tegurwangi  
Sumber: DokumenTim Peneliti, 2014

Pengaruh khusus seperti dari segi bentuk fisik arca megalitik di Besemah seolah-olah menggambarkan bentuk protipe orang negro dengan rambut keriting, hidung pesek dan bibir tebal sebagaimana hasil amatan Teguh Asmar, yang di temukan di situs Kutaraya. Sementara peneliti seperti Ullman, Westenek, Tombrink dan lainnya, cenderung mengaitkan arca-arca megalitik Besemah dipengaruhi oleh Budaya Hindu. Pengaruh luarnya, berasal dari negeri Cina, seperti temuan lukisan kepala nagadi Kutaraya, sebagaimana hasil penelitian van Heekeren.

Dari hasil temuan raca-arca megalitik di Besemah, ada beberapa pendapat mengenai budaya dan manusia pendukung tradisi ini. Menurut Teguh Asmar terlihat bahwa arca-arca di Megalitik di Besemah berasal dari ras negroid, dilihat bentuk fisik penggambaran arca yang ditemukan di Besemah. Sedangkan menurut Surdjanto Puspowardoyo tentang latar belakang peninggalan masa lalu merupakan hasil budaya manusia yang mengandung nilai-nilai

simbolik yang harus diterjemahkan dan diungkapkan peneliti secara lebih lanjut.

## **B. PAGARALAM ‘KOTA PERJUANGAN’**

### **1. Masa Kolonial Belanda**

Setelah pemerintah kolonial Belanda berhasil menaklukkan wilayah Sumatera Selatan pada awal abad ke-19, maka usaha pertama yang dilakukan oleh pemerintah Belanda melakukan perubahan dalam struktur pemerintahan marga yang merupakan kesatuan dari beberapa dusun. Penaklukan atas Belanda Kesultanan Palembang, juga berarti terhapusnya konsep pemerintahan tradisional yakni *state and kingship* yang selama berabad-abad di terapkan di daerah ini. Selanjutnya Belanda menjadikan bekas wilayah Kesultanan Palembang menjadi Karesidenan Palembang, yang meliputi 3 (tiga) *afdeeling* yang masing-masing dikepalai oleh Asisten Residen <sup>96</sup>, Tiga *afdeeling* tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Daerah Palembang dan Dataran Rendah dan sekitarnya dengan ibu kota Palembang.
2. Daerah Dataran Tinggi Palembang, beribukota di Lahat.
3. Daerah Ogan dan Komering Ulu, yang beribu kota di Batu Raja.

Dimana masing-masing *afdeeling* dibagi atas *onderafdeeling* yang dipimpin oleh seorang *Controleur* (kontrolir). Sedangkan *onderafdeeling* terdiri atas distrik yang dikepalai oleh seorang Demang. Distrik membawahi *onderdistrik* yang dipimpin oleh *Asisten Demang*. *Onderdistrik* terdiri dari marga yang dipimpin oleh Pasirah atau Depati. Pembagian *afdeeling* Palembang dan Daerah Dataran Rendah meliputi *onderafdeeling*; Kota Palembang, Talang Betutung, Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Ilir, dan Rawas. *Afdeeling* Dataran Tinggi Palembang, terdiri dari *onderafdeeling* Lematang Ilir, Lematang Ulu, Tanah Pasemah, Tebing Tinggi dan Musi Ulu. Sedangkan *afdeeling* Ogan dan Komering Ulu, meliputi *onderafdeeling* Komering Ulu, Ogan Ulu dan Muara Dua. Untuk wilayah Bangka dan

---

<sup>96</sup> T. Ibrahim Alfian dkk, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Sumatera Selatan*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Sejarah Nasional, 1983/1984, hal. 58.



Belitung dijadikan sebagai karesidenan tersendiri yang lepas dari Palembang.

Residen merupakan pejabat tinggi di daerah ini, selain itu bertindak pula sebagai penguasa administratif, legislatif, yudikatif dan keuangan. Dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh Asisten Residen dan Kontrolir. Jabatan Residen, Asisten Residen dan Kontrolir diduduki oleh orang Belanda. Pemerintahan di daerah sepenuhnya dipimpin oleh pejabat pribumi mulai dari demang, asisten demang, matri polisi dan matri pajak. Sehingga memudahkan komunikasi anantara kepentingan penguasa dengan rakyat pribumi.

Sampai tahun 1905, pemerintah kolonial Belanda menerapkan pemerintahan yang bersifat sentralistik sesuai dengan pasal 71 *Regeerings Reglement (RR)*<sup>97</sup>, meskipun di Belanda sendiri telah menerapkan pemerintahan desentralistik. Jalannya pemerintahan dikendalikan sepenuhnya dari pusat. Badan atau lembaga yang mengurus kepentingan sendiri tidak ada, hanya marga sebagai satu-satunya lembaga pemerintahan yang mendapat tempat dalam struktur birokrasi kolonial di Sumatera Selatan.

Kemenangan kaum liberal di Belanda mendorong adanya pemberian otonomi kepada Hindia Belanda. Selanjutnya berdasarkan *Indlansch Staatblad* 1903, tentang *Decentralisatiewet* yang membuka kemungkinan untuk mewujudkan dewan-dewan lokal serta memberikan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (1906). Sebelum tahun 1908 desentralisasi pemerintahan hanya menjadi daerah *staatgemeente* yang dikepalai oleh seorang walikota (*burgermeester*). kemudian mulai tahun 1908 desentralisasi diperluas dengan mewujudkan beberapa *gemeente* pada *onderafdeeling* Ogan Ilir, Komering Ilir dan lainnya. Dan otonomi daerah semakin diperkuat sampai ke marga melalui *Gemeente Ordonantie* untuk Karesidenan Palembang (*Staatblad* 1919 No. 814), dimana status marga menjadi daerah otonomi terendah yang disebut *Inlandsche Gemeente*. Pada hakekatnya tujuan otonomi daerah adalah untuk menghapuskan sisa-sisa masyarakat tradisional yang dianggap menghambat perkembangan administrasi modern.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Bayu Surianingrat, *Sejarah Pemerintahan di Indonesia Babak Hindia Belanda dan Jepang*, Jakarta; Dewaruci Press, 1981, hal. 11.

<sup>98</sup> Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia V*, Jakarta: Balai Pustaka, 1977, hal. 56.

Otonomi daerah yang diterapkan di Sumatera Selatan ini, tidak didasarkan atas prinsip teritorialitas, melainkan berdasarkan kelompok kesukuannya, dimana marga-mrag tetap dibiarkan hidup terpisah satu sama lain serta memperkecil kekuasaan dan pengaruhnya. Di daerah Uluan, sistem marga telah ada jauh sebelum masa Kesultanan Palembang. Sistem pemerintahan ini berlangsung samapai abad ke-19, baru pada awal abad ke-20. Setelah Belanda mulai mengintesifkan kekuasaannya sampai kedaerah pedalaman, sistem marga tidak lagi mandiri dan merdeka. Campur tangan Belanda atas daerah uluan, mendorong sikap tidak puas dari penduduk pribumi, terlebih setelah kehadiran organisasi Sarekat Islam.

Penduduk tradisonal yang menetap didaerah uluan merupakan masyarakat petani. Orang uluan sebelumnya berkiblat pada puyang-puyang mereka. Setelah Kesultanan Palembang melebarkan pengaruhnyan kedaerah pedalaman, maka daerah ini diatur dengan hukum adat, yakni Undang-Undang Simbur Cahaya yang dikodifikasi oleh Ratu Sinuhun. Kepala-kepala marga dan kepala dusun serta para *juray tuwe* merupakan para elit tradisional. Setelah Belanda mengambil kesultanan Palembang struktur pemerintah berubah. Perubahan yang terlihat jelas di daerah uluan para pasirah atau depati sebagai kepala marga yang dulu dianggap sebagai pelindung rakyat, kini menjadi alat kepentingan pemerintahan kolonial. Hal yang sama juga berlaku pada pejabat agama pribumi, di daerah uluan penghulu atau khotib merupakan pembantu pesirah atau kerio dalam sistem pemerintahan marga, tetapi setelah Belanda berkuasa, para pejabat pribumi ini lebih memihak kepentingan pemerintah kolonia.<sup>99</sup>

Didaerah uluan rakyat (*matagawe*) diberikan kebebasan untuk mengambil apa saja yang terdapat didaerahnya,seperti hasil hutan (kayu, rotan dan lain-lainnya), menangkap ikan, mengambil hasil lebak lebung. Dan telah menjadi sustu kebiasaan bagi penduduk uluan untuk memberikan sebagian hasil hutan atau lainnya kepada pemimpin tradisional mereka (pasirah/depati, pembarep, kerio dan lainnya) sebagai tanda hubungan timbal-balik antara rakyatdengan penguasa. Sedangkan para penguasa pribumi di uluan merupakan

---

<sup>99</sup> T. Ibrahim Alfian dkk, *op.cit.*, hal. 63-68.

wakil sultan yang ada di wilayah ini, hanyalah diwajibkan membayar upeti (*milir seba*) kepada sultan di Uluan, yakni tiga tahun sekali.<sup>100</sup>

Setelah Belanda berhasil menguasai wilayah Sumatera Selatan, situasinya berubah status tanah dan penggarapnya diwajibkan membayar sewa tanah, yang dikenal istilah pajak kepala. Pajak kepala yang merupakan pajak rutin, sangat memberatkan penduduk uluan yang bermata pencaharian sebagai petani. Dengan adanya pembebanan pajak-pajak yang bermacam-macam, menjadi mereka memikul beban hidup yang berat. Sebab selain menyetorkan pajak kepada penguasa kolonial melalui pejabatnya, seperti Demang, Asisten Demang dan matri Polisi, mereka juga teta memberikan sebagian hasil panen atau pajak tersebut kepada penguasa pribumi pula, yakni para pasirah, pembarep dan lainnya.

Untuk memperoleh uang sebagai dana dalam pembiayaan kebutuhan marga, seperti urusan kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya, pemerintah marga di daerah uluan mengeluarkan bermacam-macam peraturan seperti peraturan cacar, pertauran /pajak kapak kayu, peraturan tebus surat kawin, surat cerai dan surat rujuk yang semua dikeluarkan atas persetujuan pemerintah kolonial. Semua peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial penerapannya disertai dengan sanksi yang berat bagi rakyat, yang kadang kala membuat penduduk pribumi tidak mampu menjangkaunya. Adanya praktek sejenis 'cultuur procent' merupakan sumber kecurangan bagai penguasa formal tradisional, yang tentu saja semkain menambah derita rakyat. Beberapa kasus dalam praktek ini kerap merugikan kepentingan penduduk pribumi, misalnya dari pajak kayu, yang masuk ditetapkan 70% untuk kas marga, 30% untuk pasirah. Sementara dari hasil penjualan kayu yang telah dirampas (karena si pengambil -penduduk pribumi- dianggap tidak memenuhi peraturan), 50% disetor ke kas marga, yang 50% lagi diserahkan penguasa tradisional setempat.

Campur tangan juga masuk pula pada daerah yang secara ekonomi potensial untuk menarik pendapatan/keuangan bagi pemerintah kolonial. Beberapa daerah di Sumatera Selatan yang memiliki kekayaan sumber mineral, seperti minyak bumi (Prabumulih, Pendopo, Sungai Lilin, Keluang, Kuang, Benakat, Talang

---

<sup>100</sup> P. De Roo De La Faille, *Dari Zaman Kesultanan Palembang*, Jakarta: Bhratara, 1971, hal. 16.

Akar, Talang Tiga, Talang Jimar, Mangunjaya, Batubn, Pedamaran), batu bara dan emas di Bukit Asam (Tanjung Enim) dan Rejang Lebong. Bagi kawasan pedalaman yang potensial untuk penanaman tanaman ekspor yang laku di pasaran internasional, seperti karet, teh, kopi dan kelapa, pemerintah membuka keran bagi ninvestasi pengusaha swasta untuk membuka *onderneming* dengan hak erfact selama 75 tahun untuk mengeloa lahan di wilayah pedalaman Sumatera Selatan, seperti perkebunan teh dan kopi di gunung Dempo, Pagaralam dan perkebunan kina Kerinjing (Bumi Agung).<sup>101</sup>

## 2. Masa Pendudukan Jepang

Serangan Jepang ke Pearl Harbour, Hawaii (Amerika Serikat) menandai awal dari Perang Asia Timur Raya. Selanjutnya ekspansi pasukan Jepang diarahkan ke wilayah Asia Tenggara, dan Hindia Belanda yang memiliki sumber daya alam, yakni minyak bumi menjadi daya tarik bagi politik imperium Jepang. Gerak cepat bala tentara Jepang pada akhirnya berhasil mengakhiri kekuasaan Belanda di Indonesia, pada tanggal 9 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Kuningan (Jawa Barat).

Daerah Sumatera Selatan memiliki posisi penting dalam perspektif strategi politik-militer Jepang di Sumatera. Pulau Sumatera bersama dengan Semenanjung Malaya dikategorikan sebagai kawasan inti (*nuclear zone*) di kawasan selatan (*Nanyo*). Ini berarti kedua wilayah ini menjadi prioritas invasi Jepang ke Asia Tenggara. Selain karena letaknya strategis dalam konteks kepentingan politik regional Jepang di kawasan ini. Daerah Palembang merupakan penghasil sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, timah dan karet yang dianggap penting untuk mendukung kepentingan ekonomi perang Jepang. Pentingnya posisi Sumatera Selatan dan pulau Sumatera dimata Jepang, sebagaimana dinyatakan oleh Nakamura, seorang perwira Jepang yang pernah bertugas di Sumatera bahwa “mundur dari Sumatera berarti kehilangan Hindia Belanda secara keseluruhan”. Pandangan ini

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, hal. 75-77

tentunya secara tidak langsung mengurangi peran Jawa sebagai jantung kolonial Belanda.<sup>102</sup>

Dalam perspektif kepentingan militer Jepang, penguasaan terhadap Palembang, memiliki nilai strategis bagi Jepang, yakni mereka mendapatkan basis pertahanan yang kuat dan pijakan yang kukuh untuk mengawasi lalu lintas pergerakan pasukan sekutu yang akan mundur dari Sumatera ke Jawa atau gerak masuk bala bantuan Sekutu dari daerah-daerah di sekitar Sumatera, Singapura dan Jawa dapat dicegah. Penyerbuan bala tentara Jepang ke Palembang bersamaan dengan penyerbuan Jepang ke Singapura pada tanggal 12 Februari 1942. Kubu pertahanan pasukan Sekutu (Belanda) di Palembang tampaknya tidak siap mengantisipasi serbuan mendadak tentara Jepang. Setelah pulau Bangka berhasil diduduki oleh bala tentara Jepang pada malam hari tanggal 12 Februari 1942. Maka berselang dua hari kemudian tentara pendudukan Jepang sudah berhasil menguasai kota Palembang.

Wilayah Palembang bersama daerah Semenanjung Malaya berada dibawah penguasaan Brigade Tentara ( *Riku Gun*) ke-25 yang berpusat di Singapura dengan Letnan Jendral Sakuno Todayoshi sebagai pemimpin divisi ke-38 yang bertugas menduduki Palembang. Sedangkan Jawa berada dibawah kontrol Brigade Tentara ( *Riku Gun*) ke-16 yang berkedudukan di Batavia. Untuk wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat dibawah kontrol Angkatan Laut ( *Kai Gun*) yang berpusat di Makasar.<sup>103</sup>

Sikap politik Jepang setelah berhasil menguasai Indonesia, yakni mengeluarkan Undang-Undang No. 2 tanggal 8 Maret 1942, yakni tentang larangan kegiatan berkumpul dan rapat. Tindakan pemerintah militer Jepang bertujuan untuk memberangus dan membatasi semua bentuk perkumpulan pergerakan kebangsaan di masyarakat, baik yang bersifat politik maupun sosial. Dan sebagai akibatnya kehidupan politik nasional praktis berhenti sama sekali, karena kebebasan mengeluarkan pendapat tidak ada lagi. Pada tanggal 10 Maret 1942, pemerintah militer Jepang mengeluarkan

---

<sup>102</sup> Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003, hal. 227-228.

<sup>103</sup> Makmun Abdullah, *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri*, Jakarta: Depdikbud, Ditjarahnitra, Proyek IDSN, 1984/1985, hal. 55.

Peraturan No.1 (*Osamu Serei*), yang isinya menyebutkan bahwa bala tentara Jepang memiliki maksud untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia yang sebangsa dan keturunan dengan bangsa Jepang dan juga berekendak mendirikan ketentraman yang teguh untuk hidup makmur bersama rakyat Indonesia atas dasar mempertahankan Asia Timur Raya.

Simbol-simbol kebangsaan tentara Dai Nipon seperti pengibaran bendera 'matahari terbit' atau *hinomaru* dan lagu kebangsaan Jepang 'kimigayo'. Jepang dengan cepat mengambil alih kendali ekonomi serta mengubah kondisi ekonomi normal menjadi ekonomi perang, yakni sumberdaya dan aktifitas ekonomi di tujukan untuk memenuhi kebutuhan bagi kepentingan militer Jepang dalam menghadapi sekutu. Tekanan dari pemerintah militer Jepang menyebabkan rakyat Indonesia banyak menderita, tak terkecuali rakyat Besemah di Pagarlam, banyak rakyat yang mengalami kelaparan dan kekurangan sandang, sehingga masyarakat terpaksa memakai kain *lantung* dan memakan umbi gadang.

Titik balik kedigdayaan militer Jepang mulai berubah mulai tahun 1944, dimana secara perlahan-lahan pasukan Sekutu mulai berhasil menekan pasukan Jepang. Sehingga posisi militer Jepang tidak lagi berada posisi ofensif, akan tetapi mereka mengambil strategi defensif, bahkan posisi Jepang kian terdesak. Dalam situasi seperti itu, pemerintah Jepang berusaha merangkul dan mengambil simpati penduduk pribumi. Pemerintah militer Jepang membentuk tenaga sukarela yang dapat membantu mereka di dalam peperangan melawan tentara Sekutu. Jepang membentuk *Heiho* dan PETA (Pembela Tanah Air) di Jawa dan *Gyugun* di Sumatera. *Gyugun* mulai dibentuk pada bulan Maret 1943, Jepang mulai membentuk satuan militer pribumi secara penuh, yakni satuan militer yang dipimpin sendiri oleh orang-orang pribumi.

Pembentukan satuan militer pribumi itu diutamakan di daerah-daerah yang ditinggalkan oleh sebagian besar tentara Jepang untuk mempertahankan wilayah timur Indonesia. Posisi Jepang yang kian terdesak oleh gerak maju tentara sekutu, serta jumlah pasukan Jepang yang jumlahnya terbatas serta usia rata-rata prajurit Jepang yang sudah tua menjadi pertimbangan pemerintah militer Jepang

membentuk satuan militer pribumi.<sup>104</sup> Gagasan pembentukan *Heiho* dan *Gyugun* sebagai satuan militer pribumi, dimana *Heiho* menggunakan pasukan pribumi yang telah dididik dan dilatih sebagai bagian integral dari satuan-satuan tentara Jepang, tentu saja kendali dan kontrol berada di tangan perwira-perwira Jepang. Sebaliknya *gyugun* merupakan pasukan Jepang yang benar-benar terpisah dan sepenuhnya terdiri dari orang pribumi sampai tingkat batalyon. Jepang hanya perlu mengendalikan para komandan pasukan pribumi. Gagasan untuk mendirikan *gyugun* mendapat dukungan dari sebagian besar petinggi militer Jepang, seperti Letnan Jendral Inada Masazumi, yakni pasukan pribumi terpisah dari pasukan Jepang, serta pemikiran bahwa militer Jepang tidak mungkin mengalahkan Sekutu. Strategi defensif Jepang perlu memperoleh dukungan sepenuhnya dari penduduk pribumi.

Pemberian latihan dasar kemiliteran oleh Jepang memberikan dampak positif bagi para pemuda yang tergabung dalam *Seinendan* (Barisan Pemuda), *Keibodan* (Barisan Pembantu Polisi) dan latihan dibidang pertahanan, seperti *Heiho* (pembantu prajurit) dan (pembantu prajurit) dan *Gyugun*. *Heiho* dikerahkan oleh pemerintah militer Jepang untuk diperbantukan keluar Indonesia seperti di Malaya, Birma, dan Indo-Cina, sedangkan *Gyugun* dan PETA untuk membantu Jepang di Indonesia. Pembentukan *Gyugun* dan PETA oleh Angkatan Darat ke-16 Jepang tidak hanya di daerah Jawa dan Madura, akan tetapi juga di bebewrapa wilayah lain seperti Sumatera dan pulau-pulau lain yang dikuasai oleh Angkatan Darat ke-25 Jepang. *Gyugun* dilaksanakan secara lokal pada beberapa daerah seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan.

Beberapa tempat yang menjadi lokasi pendidikan dan penempatan *gyugun* di Sumatera, yakni dipilih tiga kota,yaitu Pagaralam (Sumatera Selatan), Bukitinggi (Sumatera Barat) dan Brastagi (Sumatera Utara). Di tiga tempat inilah pendidikan *Gyugun Kanbu* (Infanteri *Gyugun*) diperkenalkan dan dilaksnakan oleh militer Jepang. Pendidikan *gyugun* di Pagaralam untuk para calon perwira, sedangkan untuk calon Bintara dan Tamtama di Lahat dan Tanjungraja. Pagaralam dipilih sebagai pusat pendidikan dan

---

<sup>104</sup> Alamsyah Ratuperwiranegara, *Perjuangan Kemerdekaan di Sumatera Selatan 1945-1950*, Jakarta: tanpa nama penerbit, 1987, hal. 28.

pelatihan untuk calon perwira *gyugun* karena beberapa pertimbangan<sup>105</sup>, antara lain:

- a. Pagaralam yang terletak di kaki Gunung Dempo yang berhawa sejuk dan tanahnya subur, sehingga tidak kekurangan sumber pangan.
- b. Pagaralam secara alamiah terlindungi dengan baik sehingga terjamin keamanannya.
- c. Pagaralam dapat dijadikan markas untuk mengendalikan serta mengawasi kegiatan *Gyugun* secara keseluruhan.
- d. Pimpinan markas besar *Gyugun* di Pagaralam dijabat oleh seorang perwira Jepang, yakni Kapten Kawaida.

Pembentukan *Gyugun Kanbu* oleh pemerintah militer Jepang mendapat sambutan positif dari masyarakat Sumatea Selatan. Terbukti banyak pemuda di daerah ini yang tertarik untuk bergabung serta mendaftarkan diri sebagai calon anggota *gyugun* di *Gyugun Kanbu* di Pagaralam. Para pemuda di daerah Sumatera Selatan tertarik bergabung *Gyugun Kanbu*, tidak lepas adanya anjuran dari Wedana Muaraenim, Abdul Rozak dan tokoh masyarakat, Bay Lim yang menjabat sebagai Kepala Pekerjaan Umum di Lahat. Para pemuda yang bergabung dalam *Gyugun Kanbu* juga didorong oleh keenganan dan ketakutan mereka pada kewajiban *romusha*, kerja paksa yang mendatangkan kesengsaraan. Dengan bergabung dalam *Gyugun Kanbu*, setidaknya mereka terbebas dari jeratan *romusha*.

Para orang tua yang anaknya diterima sebagai *Gyugun Kanbu* merasa bangga dan terhormat dalam pandangan masyarakat saat itu. Selain itu mereka yang diterima menjadi *Gyugun Kanbu* mendapat tunjangan bulanan dari pemerintah militer Jepang sebesar Rp.20,- yang lumayan cukup untuk membantu kesejahteraan keluarga mereka. Para siswa *Gyugun Kanbu* mendapatkan fasilitas yang menraik, seperti tinggal diasrama dan memperoleh kenikmatan mendapat sigaret merek 'KOA' yang saat itu tidak semua orang mudah mendapatkannya. Dorongan untuk mendaftar sebagai *Gyugun Kanbu* juga tidak lepas dari dukungan moril dari para ulama yang senantiasa memompakan spirit perjuanga, bahwa membela tanah air

---

<sup>105</sup> Tim Penulis dan Pemerintah Kota Pagaralam, *op.cit.*, hal. 169.



adalah hukumnya wajib, dan bagi para pemuda yang mati dalam tugas negara, meninggalnya adalah syahid.

Untuk menarik minat para pemuda di daerah Sumatera Selatan termasuk di Pagaralam, pemerintah pendudukan Jepang mengumukan penerimaan *Gyugun Kanbu* melalui surat kabar. Selain itu informasi tentang penerimaan *Gyugun Kanbu* juga disampaikan oleh *pesirah*. Meskipun telah ada pemberitaan secara resmi dari surat kabar tentang penerimaan calon *Gyugun Kanbu*, para pimpinan militer Jepang juga menerima calon *Gyugun Kanbu* yang direkomendasikan dari orang yang dipercaya oleh pemerintah pendudukan Jepang. Dan sebagai dampaknya banyak calon *Gyugun Kanbu* berasal dari kalangan masyarakat menengah dan berasal dari kalangan keluarga pejabat. Sedangkan calon *Gyugun Kanbu* dari masyarakat biasa, harus memiliki kelebihan jasmani dan pengetahuan yang lebih baik dari standar calon *Gyugun Kanbu*. Untuk mendapatkan calon *Gyugun Kanbu* maka pendaftaran penerimaannya tidak hanya dibuka di Pagaralam, kan tetapi juga dilakukan di beberapa kota, yakni di Bengkulu, Jambi, Palembang dan Tanjungkarang. Setelah melalui proses seleksi yang ketat maka siswa yang diterima dilatih sebagai *Gyugun Kanbu* berjumlah 270 orang, yang berasal dari wilayah J orang. Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung. Calon *Gyugun Kanbu* dibagi kedalam 6 (enam) kelas, yang masing-masing terdiri 45 orang. Pendidikan *Gyugun* dibagi kedalam 3 (tiga ) satuan latihan<sup>106</sup>, yakni:

1. *Ichi Syotai* (Satuan Satu), terdiri dari para peserta dari Palembang, Bangka dan Belitung.
2. *Ni Syotai* (Satuan Dua), terdiri dari para peserta dari Bengkulu dan sebagian Jambi.
3. *San Syotai* (Satuan Tiga), terdiri dari peserta dari Lampung dan sebagian Jambi.

Calon *Gyugun Kanbu* yang lolos seleksi, mereka dikumpulkan dan dibawa ketempat tempat pendidikan di Pagaralam, yakni di barak-barak dekat rumah sakit Belanda (*Juliana Hospital*) di jalan Pematangbange. Para calon *Gyugun Kanbu* dikumpulkan dan diberikan penjelasan, seperti mengenai peraturan tata tertib dan

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hal. 172.

disiplin selama mengikuti pendidikan. Mereka juga diberikan perlengkapan untuk keperluan pendidikan dan latihan, antara lain pakaian yang telah dicelup dengan pewarna hijau (*belacu*), kaos kaki, sepatu, ikat pinggang, celana pendek, bantal kecil, kelambu, tutup kepala, ransel dan tempat minuman yang sama dimiliki dengan tentara Jepang dengan kualitas berbeda. Kemudian hal yang membedakan adalah untuk calon perwira ditambah pedang panjang untuk membedakan dengan calon prajurit.

Para calon anggota atau siswa ditempatkan di barak-barak dibelakang *Juliana Hospital* yang berjumlah 5 (lima) buah dimana setiap barak mampung menampung 50-60 orang. Setiap siswa diharuskan menempati pada masing-masing barak sesuai dengan dimana mereka ditempatkan dengan papan namanya sekaligus. Tempat tidur dibarak-barak siswa *Gyugun Kanbu* berupa dipan atau bangku panjang yang terbuat dari kayu. Pakaian seragam siswa *Gyugun* sama dengan seragam tentara Jepang, untuk pakaian seragam upacara, terdiri dari kemeja putih, jas, dan celana yang mirip dengan celana penunggang kuda, sepatu hitam tinggi dan ikat pinggang yang terbuat dari kulit dengan pengait tempat pedang disarungkan untuk keperluan upacara penting kemiliteran. Jika seorang telah dilantik menjadi perwira *Gyugun* mereka mendapat seragam yang sama dengan seragam yang dipakai tentara Jepang beserta pedang samurai sebagai pelengkapannya.

Para siswa *Gyugun* dalam masa pendidikan dan latihan di barak-barak tersebut, menjalani rutinitas keseharian selama masa pendidikan seperti, mereka harus bangun pagi setiap bunyi terompet dibunyikan dipagi hari, selanjutnya mereka melakukan senam *taiso* (senam pagi). Setelah senam pagi, mandi dan sarapan, para siswa berbaris rapi ke tempat pengguntingana rambut. Karena ada disiplin keras semua rambut siswa *Gyugun* harus dicukur gundul. Siswa yang melanggar aturan akan dihukum dengan dijemur dibawah sinar matahari seharian. Salah satu yang membuat siswa menjadi berat untuk melaksanakan perintah selama masa pendidikan dan latihan adalah kewajiban untuk memberi penghormatan kepada serdadu-serdadu Jepang, terutama jika mereka harus lewati pos-pos penjagaan. Jam istirahat malam para siswa yang berada di barak-barak, termasuk kewajiban untuk ikut jaga malam (*fusimbang*) juga diatur. Dengan kata lain selama 24 jam keseharian para siswa yang

dalam masa pendidikan dan latihan diatur secara ketat, tertib dan kedisiplinan diutamakan sekali.

Etika di meja makan tak luput dari peraturan kedisiplinan militer, seperti pada waktu jam makan tiba, para siswa harus berhadapan dan duduk terib dan rapi di tempatnya masing-masing. Makanan dibagi oleh siswa yang bertugas sebagai *tobang* (pembagi makanan), yang biasanya diatur secara bergilir. Makanan yang telah tersaji hanya boleh dimakan setelah perintah atau komando dari petugas di ruang makan.

Selama pendidikan dan pelatihan *Gyugun* pada para siswa dikarantina selama periode awal pendidikan. Mereka tidak diperbolehkan keluar dari asrama atau kompleks pendidikan. Para siswa diawasi secara ketat oleh komandan kompi atau komandan peleton tentara Jepang. Bahkan ketatnya peraturan disiplin menyebabkan ada beberapa siswa yang melarikan diri dari asrama selama masa pendidikan dan pelatihan tersebut. Meskipun disiplin Jepang keras, para siswa mengagumi militer Jepang yang berdisiplin dan berkemauan keras.

Pendidikan kemiliteran yang diterima oleh siswa *Gyugun* meliputi bermacam-macam latihan, seperti penggunaan senjata, teknik pertempuran, baik di dataran rendah maupun di pegunungan, memasang ranjau, senam dan berlatih *spionase*. Masa pendidikan yang dijalani oleh para siswa *Gyugun* selama 3 (tiga) calon bintangara dan tamtama, sedangkan untuk pendidikan perwira lebih lama beberapa bulan lagi. Meskipun masa pendidikan hanya berlangsung singkat, hanya 3 (tiga) bulan mereka memperoleh pendidikan dan pengetahuan seperti ilmu perang, taktik dan strategi bertempur, teori pertahanan, pergantain pasukan, penggunaan senjata laras pendek maupun panjang.

Dalam kurikulum pendidikan dan latihan kemiliteran yang dipadatkan waktunya, pihak militer Jepang telah mengatur jadwal secara rinci, dari mulai kegiatan pagi hingga malam hari. Setiap jam 9 (Sembilan) pagi para siswa melaksanakan kegiatan apel pagi, selanjutnya dikuti dengan belajar teori di kelas sampai jam 1(satu) siang. Pada sore hari belajar latihan senapan, dan bela diri militer serta latihan taktik dan strategi bertempur. Sedangkan pada malam

hari digunakan untuk membersihkan senjata, adapun pendidikan dan latihan *Gyugun*<sup>107</sup> meliputi:

1. Ilmu disiplin dan tata cara militer, ilmu persenjataan, taktik dan teknik bertempur, peraturan baris-berbaris dan pekerjaan administrasi.
2. Latihan lapangan, meliputi latihan baris-berbaris, latihan bongkar-pasang senjata dan menembak dengan senapan *karaben*, latihan bertemour secara perorangan maupun kelompok dan latihan bela diri dengan menggunakan bayonet dan sangkur (*juken jitzu*) dan kerja staf atau administrasi di *Hombi Gyugun*.

Beberapa lokasi yang dijadikan untuk menerapkan ilmu kemiliteran yang diperoleh siswa *Gyugun* di Pagaralam, antara lain lapangan merdeka, kini alun-alun Kota Pagaralam dipakai untuk latihan perang. Kemudian untuk latihan pertempuran di medan terbuka di lakukan di daerah Padangtinggi yang berjarak 11 km dari asrama *Gyugun*, sedangkan untuk medan tempur untuk dataran tinggi, para siswa *Gyugun* di bawah ke Gunung Dempo.

Tidak semua yang mendapat pendidikan dan latihan sebagai *Gyugun Kanbu* dijamin diangkat sebagai perwira *Gyugun*. Setelah masa pendidikan berakhir, para siswa akan mendapat pangkat *Jotohei* (prajurit kepala). Para siswa dipulangkan ke daerah masing-masing dengan status cuti, hanya kepada siswa yang dipromosikan sebagai calon perwira *Gyugun* dipanggil kembali untuk mendapat pendidikan dan pelatihan lebih lanjut, seperti latihan kepemimpinan, ilmu berorganisasi, perawatan, serta taktik dan strategi pertempuran.<sup>108</sup>

Pada akhir pendidikan semua siswa dikumpulkan dan dibawa dari Pagaralam sebagai pusat pendidikan dan latihan *Gyugun* ke markas tentara Jepang yang berada di Lahat. Mereka dikumpulkan dalam suatu ruangan dan diberikan penjelasan serta pengumuman oleh pihak militer Jepang, tentang pengangkatan 45 orang diangkat sebagai perwira *Gyugun* dan secara simbolik diberikan pedang samurai, sedangkan siswa lainnya diangkat dengan pangkat kemiliteran setara dengan sersan. Pelantikan perwira *Gyugun*

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, hal. 176.

<sup>108</sup> Oesman Nangtjik dan Iskandar Gani, *Dr. A.K. Gani Pejuang yang Berwawasan Sipil dan Militer*, Jakarta: PT Multi Harun, 1990, hal. 234.

dilakukan di Lahat, sedangkan bintanga dan tamtama (*Gyuhei*) dilaksanakan di Tanjungraja (Ogan Ilir).

Sesudah menyelesaikan pendidikan para lulusan *Gyugun* ditugaskan dalam berbagai kesatuan kompi. Mereka menjalankan tugas dan rutinitas kemiliteran serta melewati jenjang karir mulai dari pangkat kopral hingga sersan, tergantung pada ketrampilannya. Bagi para perwira *Gyugun*, para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan, dilantik dan diberi pangkat *Cui* (Letnan Satu), *Soi* (Letnan Dua), *Jun-I* (Pembantu Letnan), *Soco* (Sersan Mayor), *Gunso* (Sersan), *Heico* (Kopral), *Joto Hei* (Kopral Kepala), *Itto Hei* (Prajurit Satu) atau *Nitto Hei* (Prajurit Dua). Pangkat dalam *Gyugun* berbeda dengan jenjang kepangkatan *Heiho*. Jenjang kepangkatan *Heiho* dimulai *Itto Hei* (Prajurit Satu), *Joto Hei* (Kopral Kepala), *Heico* (Kopral), *Gunso* (Sersan) dengan pangkat terakhir *Soco* (Sersan Mayor).<sup>109</sup>

*Gyugun Kanbu* terdiri dari beberapa kompi, yang diawasi secara tidak langsung oleh resimen atau batalyon tentara Jepang. Setiap kompi (cutai) diawasi oleh seorang perwira Jepang. Kompi-kompi di karesidenan dikontrol oleh batalyon Jepang, *Gyugun* di Palembang dikontrol oleh batalyon Jepang dibawah pimpinan Kapten Kawaida. Sedangkan untuk daerah di Karesidenan Bengkulu, Lampung dan Jambi dan Bangka Belitung diawasi oleh pimpinannya masing-masing.

Pendidikan *Gyugun* di Pagarlam berlangsung dari tahun 1943 sampai dengan pertengahan tahun 1944. Pendidikan perwira *Gyugun* selama masa itu diikuti 265 taruna, yang berhasil diangkat sebagai letnan dua (*Shoi*) sebanyak 45 orang, termasuk Alamsyah Ratuperwiranegara. Selain itu para calon anggota *Gyugun* diseleksi sesuai dengan potensi dan kemampuan mereka selama mengikuti pendidikan dan latihan. Calon *Syodanco* (komandan peleton) diambil dan diangkat dari kalangan *Cudanco* (komandan kompi), yakni calon yang memiliki kedudukan terpandang dimasyarakat seperti guru, pegawai pamong praja dan tokoh masyarakat. Para calon *Daidanco* (komandan batalyon) pada umumnya dipilih dari kalangan yang berusia lanjut dan memiliki pengaruh didaerah yang akan dijadikan

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, hal. 179.

tempat batalyon atau *Daidan Daidan* yang akan dibentuk oleh pemerintah militer Jepang.<sup>110</sup>

Para lulusan hasil tempaan pendidikan kemiliteran oleh Jepang, menghasilkan para lulusan yang mahir berperang. Para pemuda yang telah memperoleh pendidikan militer memiliki ketrampilan yang berguna pada saat periode revolusi fisik. Posisi Jepang yang kian terdesak oleh sekutu, membuat para perwira *Gyugun* ingin melakukan pemberontakan kepada Jepang. Hal sama pernah akan dicoba para pimpinan *Gyugun* di Lahat yang berunding untuk melawan ke Jepang. Niat itu urung setelah M. Syafei dan dr. A.K. Gani selaku pimpinan Sumatera berusaha mencegah pemberontakan dengan alasan bahwa Jepang tidak lama akan takluk oleh Sekutu.

Sistem pemerintahan dan administrasi Jepang di daerah Besemah, menjalankan model pemerintahan yang mewarisi Belanda. Dimana posisi *pesirah* sebagai kepala marga masih tetap dipertahankan, Jepang tidak banyak melakukan perubahan, mereka tetap mempertahankan sistem pemerintahan marga. Hanya beberapa istilah birokrasi dan hierarki dalam pemerinthan yang semula menggunakan istilah Belanda diganti dengan Jepang. Kepala marag (*pesirah*) disebut *Son-tjo*, kepala dusun (keriye) disebut *Kutjo*. Asisten Demang (*Fuku Guntjo*) dan Demang disebut *Gun-tjo*. Dalam menjalankan tugas seorang Demang dipegang oleh pejabat pribumi dibantu oleh Kepala Polisi Jepang.

Ekonomi perang Jepang mengharuskan para aparatur dan pejabat pemerintahan seperti pesirah hingga demang dimanfaatkan untuk mengumpulkan bahan makanan dan tenaga kerja dari rakyat dengan berbagai cara termasuk dengan tekanan dan kekerasan seperti memanfaatkan jasa polisi rahasia Jepang (*Kenpeitei*) untuk pemerintah militer Jepang. Para pesirah juga menjadi perantara bagi pemerintah Jepang untuk mengumpulkan hasil buminya dan menjual kepada pemerintah pendudukan Jepang dengan harga murah. Selain itu melalui para aparat pemerintah pribumi, pemerintah militer Jepang, meminta setiap dusun mengumpulkan 10 orang setaiap dusun untuk dipekerjakan sebagai *romusha* dalam beberapa pekerjaan seperti membuat jalan, lapangan terbang, mengangkut barang, yang pada gilirannya pekerja *romusha* yang menderita dan

---

<sup>110</sup> Abi Hasan Said, *Bumi Sriwijaya Bersimbah Darah*, Jakarta: Yayasan Krama Yudha, 1991, hal. 52.

meninggal karena tekanan keras dari pihak pemerintah penduduk Jepang pada masa ini.

### 3. Masa Revolusi Kemerdekaan

Proklamasi sebagai jembatan emas menuju kepada terwujudnya masyarakat sejahtera dan berkeadilan sebagaimana diperjuangkan oleh para pemimpin nasional bersama rakyat Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 sejumlah pemuka masyarakat Sumatera bagian Selatan hadir di kediaman A. K. Gani seperti Nungtjik A.R, A.M. Thalib, dr. M.Isa, Ir. Ibrahim, Asaari, Abdul Rozak, Komisaris Polisi Moersod, K.H. Tjikwan dan R.Z. Fanani. Dari golongan muda yang hadir pada tanggal tersebut, antara lain Maelan, orang pertama yang mendengar berita Proklamasi dari meja tugasnya sebagai operator/redaktur Domei Palembang. Dan Maelan pulalah yang membacakan teks proklamasi untuk pertama kalinya di Palembang. Anak muda lainnya yang hadir selain Maelan adalah Mas'ud Bakaruddin, Zaelani, Abi Hasan Said, Amantjik, Habibullah Azhary dan Sholeh.

Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di Palembang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti komunikasi dan transportasi melalui laut, darat dan udara antara kota Jakarta-Palembang yang masih sulit. Selanjutnya komunikasi melalui radio juga dipersulit, karena semua pesawat radio milik rakyat disegel oleh pemerintah Jepang setempat tanpa perkecualian.<sup>111</sup> Pada tanggal 19 Agustus 1945 dilaksanakan pertemuan kedua di rumah Gani, yang dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat dan juga para pemimpin organisasi buruh minyak (Salam Paiman), Parmono (Djawatan Kereta Api), R.M. Oetojo (Pos Telepon dan Telegraf), Agus Rachman dan Hanan. Sedangkan dari kelompok golongan muda, terlihat hadir seperti; M. Yunus Syamsuddin, Husin Achmad, Sualaiman Effendi, Chodewy Amin serta dari anggota *Gyugun* yakni Hasan Kasim, M. arief dan Dani Effendi. Dalam pertemuan ini, Gani lebih menekankan bagaimana langkah-langkah yang harus diambil menyangkut proklamasi kemerdekaan.

---

<sup>111</sup> Makmun Abdullah, *Serangan Balas Prabumulih 1947*, Palembang:: Penerbit Universitas Sriwijaya, 1996, hal. 20.

Tiga hari setelah pertemuan kedua di rumah Gani, *Syu Tyiokan Myako Toshio*, pimpinan pemerintahan pendudukan bala tentara Jepang di Palembang, mengundang Badan Kebaktian rakyat Daerah Palembang atau *Palembang Shyu Sangikai* untuk hadir ke Talang Semut. Para pemuka masyarakat Palembangyang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain, Abdul Rozak, Nuntjik AR, R. Hanan, Asaari, Ir. Ibrahim, Bay Salim, K.H. Tjikwan, Salam Paiman dan Parmono. Sedangkan Gani, sengaja tidak hadir, diakrenakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam pertemuan di kediaman *Tyiokan* yang dihadiri oleh stafnya Matsubara, Kepala Bagian Pemerintahan serta Polisi Rahasia Jepang (*Syomubutjo Tokkokatyo*). Hasil pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain, menyangkut persoalan keamanan dan ketertiban, pihak Indonesia bersedia ikut memikul tanggung jawab sepenuhnya. Selanjutnya Jepang akan menjamin keselamatan segenap pemimpin dan rakyat Indonesia, serta mereka (Jepang) tidak boleh bertindak apapun di luar pengetahuan pihak Indonesia. dan kesepakatan yang paling penting adalah masalah Indonesia merdeka adalah soal bangsa Indonesia sendiri dan tidak boleh dihalangi.<sup>112</sup>

Berita informasi kemerdekaan belum sepenuhnya diketahui oleh tokoh masyarakat dan penduduk Pagaralam yang berada di pedalaman Sumatera Selatan. Ada beberapa versi mengenai berita proklamasi sampai di Pagaralam. Berdasarkan kesaksian pelaku sejarah Depati M. Hasyim, berita proklamasi dikirimkan melalui *teleks* dari dr. A. K. Gani pada tanggal 18 Agustus, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Badan Keamanan Rakyat (BKR) Palembang. Beberapa tokoh Pagaralam seperti M. Sidik Adiem, Depati M. Hasyim dan Datuk Seri Maharajo bertindak cepat dengan memberi informasi berita proklamasi kemerdekaan kepada rakyat Pagaralam. depati M. Hasyim bersama dengan Sanaf dan Bejo Kasan meminjam *auto hugest* milik Kepala Perkebunan Teh Gunung Dempo melakukan perjalanan keluar Kota Pagaralam untuk misi penyebaran berita proklamasi. Mereka berangkat dari Pagaralam menuju ke Tanjungtebat, kemudian menuju ke daerah Kikim lewat daerah Lahat, setelah singgah terlebih dahulu di Perkebunan Karet Sungailaru. Mereka

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, hal. 76-77.



mengumpulkan para karyawan dan pekerja perkebunan karet untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan berita proklamsai, selanjutnya mereka meneruskan perjalanan ke Tebingtinggi dan istirahat semalam di rumah Kepala Polisi Tebingtinggi. Dari Tebingtinggi misi mereka dilanjutkan kembali ke Pagaralam lewat daerah Lintang Empat Lawang sambil menyinggahi beberapa daerah seperti Pendopo, Muarapinang, Seleman dan terakhir ke Jaray.<sup>113</sup>

Versi lain menyebutkan bahwa berita proklamsai baru diketahui di Pagaralam pada tanggal 24 Agustus sampai 25 Agustus 1945, bahkan ada menyebut baru pada tanggal 27 Agustus 1945. Berdasarkan keterangan dari M. Djahri Tinggiari proklamasi kemerdekaan diketahui oleh masyarakat Pagaralam melalui radio milik Ruhim Tinggiari. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 bendera merah putih dikibarkan di halaman toko milik Datuk Seri Maharajo, yang berasal dari bendera Belanda yang telah dirobek bagian birunya. Berdasarkan keterangan dari Depati M. Hasyim, rencana mengibarkan bendera merah putih akan dilaksanakan tanggal 19 September 1945. Sebelumnya melaksanakan rencana itu, Depati M. Hasyim R dan M. Sidik Adim mendatangi terlebih dulu *Kaibu* zahri sebagai kepala polisi untuk meminta ijin mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Rencana menaikkan bendera putih akan dilaksanakan di kantor Sidukang (dekat SMA 1 dan rumah sakit DKT sekarang). Akan tetapi ijin tidak ada, sementara masyarakat Pagaralam, terutama para pejuang dan laskar sudah mengetahui informasi tersebut. Maka pengibaran dilakukan di halaman toko Datuk Seri Maharajo.

Suasana masyarakat kota Pagaralam dan respon mereka ketika proklamasi kemerdekaan bergema sebagaimana kutipan *Guritan Jagad Besemah* karya M. Saman Loear<sup>114</sup> sebagai berikut;

*'Kumpul di Gedung Perjuangan/ Lah datang gale lelawangan/  
Datang lawangan Impit Bukit/ Munggh lawangan Ulu Lintang/  
Datang lawangan ndi Penjalang/ Munggh lawangan ndi  
Semidang/ Lah banyak ndi Sumbay Besak/ Bujang Minang, bujang  
Pelimbang/ Bujang Batak lah diajak/ Bujang Jawe lah nunggu  
pule/ Disitu pule pertame/ Sang Merah Putih mulai naik'.*

<sup>113</sup> Tim Penulis dan Pemerintah Kota Pagaralam, *op.cit.*, hal. 189-190.

<sup>114</sup> M. Saman Loear, *Guritan Jagad Besemah*, Pagaralam: Elca, 1972, hal. 19-20 dalam Tim Penulis dan Pemerintah Kota Pagaralam, *op.cit.*, hal. 191-192.

(Kumpul di Gedung Perjuangan/ Tealah datang semua pejuang/ Datang pejuang Impit Bukit/ Pejuang Ulu Lintang/ Datang pejuang dari (*sumbay*) Penjalang/ Telah banyak datang dari (*sumbay*) Semidang/ Telah banyak datang dari *Sumbay Besak*/ Pemuda Minang/ Pemuda PaLembang/ Pemuda Batak telah diajak/ Pemuda Jawa telah menunggu juga/ Disitu juga perta kali/ Sang Merah Putih dikibarkan).

Upacara pengibaran bendera merah putih di Pagaram dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 1945 di halaman toko Datuk Seri Maharajo. Pada peristiwa pengibaran bendera merah putih ini dihadiri 40 orang, ditambah para pemuda dari Hizbul Wathan (HW) dan para pemuda pejuang dibawah pimpinan Sofjan Rasjad dan Kms Usman. Upacara bendera dimulai pada pukul 10 pagi yang dipimpin oleh Depati M. Hasyim R didampingi oleh Siddik Adiem dan Datuk Seri Maharajo, pertugas pengibar bendera dipercayakan kepada Kenasin yang dikawal oleh organisasi kepanduan dari Hizbul Wathan, sedangkan sebagai *dirigen* untuk lagun kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Almunir Rentagus, sekretaris Hizbul Wathan.

Setelah pemerintah sipil nasioanl mengambil kekuasaan dari pemerintahan Jepang, dibebeberapa daerah termasuk di Sumatera bagian Selatan dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) di daerah ini pada tanggal 3 September 1945. Pada awalnya dr. A.K. gani ditunjuk sebagi ketuanya, kemudian digantikan oleh dr. M. Isa, sedangkan dr. A.K. Gani ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai Residen Palembang. Setelah terbentuk KNID di pusat ibukota Palembang, maka didaerah juga dibentuk organisasi yang sama, dengan kantornya di komplek '*Dempo Rioken*' (Hotel Dempo) KNID Pagaram<sup>115</sup> memiliki susunan pengurusan yang terdiri dari;

Ketua	: M. Siddik Adiem
Wakil Ketua	: dr. Zakir
Penulis Umum	: Depati M. Hasyim R
Penulis I	: Cek Mahmud
Penulis II	: M. Saleh
Pembantu	: Datuk Seri Maharajo Abdul Majid (Kepala Pos)

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, hal. 193-194.

Darma (Kepala Pertanian)  
Daud (Kepala PU)

Setelah terbentuk KNIP dan KNID di daerah, maka sesuai dengan hasil keputusan sidang PPKI pada tanggal 23 Agustus 1945 yakni pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP), yang memiliki tugas menjaga keselamatan rakyat. Para tokoh daerah di Suamtera bagian Selatan yang dipimpin oleh dr. A.K. Gani mengadakan pertemuan dengan opsir-opsir bekas *Gyugun* dan *Heiho* di rumah dr. A.K. Gani di Jalan Kepandean Palembang pada tanggal 29 Agustus 1945. Dalam pertemuan menghasilkan beberapa kesepakatan penting, yakni pembentukan dan peresmian berdirinya Badan Penjaga Keamanan Rakyat (BPKR) pada tanggal 4 September 1945 dihadapan wakil-wakil masyarakat dan para pemuda.

BPKR memiliki tugas membantu kelancaran dan kemampuan pemerintah sipil dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dan sebagai tindak lanjut dari terbentuknya BPKR, maka mulai bulan Okteober 1945 dsietiap daerah kawedanan di seluruh Karesidenan Palembang, termasuk di Kawedanan Tanah Pasemah yang beribukota di Pagaralam harus dibentuk BPKR serta menmemberikan informasi agar para pemuda mendaftarkan diri untuk menjadi anggota BPKR. Sebelum terbentuk BPKR di Kota Pagaralam, para pemuda-pemuda dari berbagai marga membentuk barisan-barisan yang disebut Barisan Rakyat (BARA), yang dilatih oleh para mantan *Gyugun* di beberapa tempat seperti di Marga Pajarbulan, Marga Penantian dan Marga Alundua yang dilatih oleh Samiri Djentikan. Di daerah Tanjungsakti dibentuk barisan yang dinamakan Pemuda, beberapa anggota barisan tersebut, antara lain; Kaila Ibrahim sebagai pimpinan barisan pemuda (dusun Penandingan), Sauf Ginggang sebagai wakil pimpinan (dusun Sindangpanjang). Sedangkan anggota barisan pemuda, antara lain; Tenar Kenamin (dusun Lubukdalam), Marzuki Remasadil (dusun Tanjungbatu), Sinjar (dusun Masambulau), Ongseng Taib (dusun Gunung-agung), A. Roni (dusun Sindangpanjang), Yasum (dusun Negerikaye) dan Senema (dusun Lubukdalam). Tanjungsakti pada masa ini masih menjadi bagian dari Karesidenan Bengkulu. Tanjungsakti masuk menjadi bagian dari Karesidenan Palembang sejak tanggal 15 Januari 1948, setelah

selama 2 (dua) tahun diperjuangkan oleh sejumlah tokoh masyarakat Tanjungsekti, seperti Tenar Kenamin.<sup>116</sup>

BPKR untuk Karesidenan Palembang diangkat Hasan Kasim mantan *Gyugun*, sedangkan para anggota BPKR di Kawedanan Tanah Pasemah ditunjuk beberapa orang, antara lain; Harun Sohar, Ruslan, Djarab, Syamsul Bachrun, Syamsul Bachri Umar, Hamid Jemair, Mansyur, M. Sanaf dan Yunus. BPKR berganti nama menjadi Badan Keamanan Rakyat (BKR) sejak tanggal 13 November 1945, pucuk pimpinan masih dijabat Hasan Kasim. BKR selanjutnya membentuk sektor-sektor pertahanan, termasuk di Pagaralam dengan pimpinan Datuk Ibrahim. BKR akhirnya berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 2 Desember 1945.

Pucuk pimpinan TKR wilayah Sumatera bagian Selatan diangkat dr. A.K. Gani yang bertindak sebagai koordinator dan organisator TKR untuk seluruh wilayah Sumatera. Penujukkan dr. A.K. Gani berdasarkan kawat dari markas tertinggi TKR di Yogyakarta tanggal 5 November 1945. Semula markas TKR untuk wilayah Sumatera berada di Palembang, selanjutnya dipindahkan ke Bukittinggi. Sebagai panglima TKR Sumatera ditunjuk Mayjen Suhardjodojo Harjowardojo, wilayah Sumatera bagian Selatan dibagi kedalam 2 (dua) divisi yang membawahi resimen, batalyon dan kompi. Adapun struktur organisasi dan personalia TKR Sumatera Selatan<sup>117</sup> sebagai berikut;

Panglima TKR Sumatera	: Mayjen Suhardjo Harjowardojo
Kepala Staf	: Koolonel M. Nuh
Komandan Divisi I Garuda	: Kolonel M. Simbolon
Komandan Resimen I Bengkulu	: Letkol Barlian
Komandan Resimen II Lahat	: Letkol Amin Kaum (yang pertama) Letkol Harun Sohar (yang kedua)
Komandan Batalyon I Pagaralam	: Mayor M. Nurdin
Komandan Divisi II Garuda	: Kolonel Bambang Utoyo

Dalam konferensi TKR tanggal 12 November 1945 yang dihadiri oleh seluruh panglima-panglima komandemen, divisi, dan

<sup>116</sup> *Ibid.*, hal. 195.

<sup>117</sup> *Ibid.*, hal. 202-203.

resimen TKR di seluruh Jawa dan Sumatera. Pada konferensi ini, Panglima Divisi V di Banyumas, yakni Kolonel Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat Letnan Jendral yang ditetapkan sejak tanggal 18 November 1945. Selanjutnya melalui Penetapan Pemerintah No. 2/SD tanggal 7 Januari 1946, TKR diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Namun tidak sampai 1(satu) bulan Tentara Keselamatan Rakyat diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 4/SD tanggal 7 Januari 1946 tanggal 25 Januari 1946.

Fase-fase awal pasca proklamasi kemerdekaan, di beberapa tempat di tanah air terjadi pergolakan antara militer Jepang yang baru saja mengalami kekalahan dan semangat militan dari pejuang dan pemuda yang berusaha mengambil alih kekuasaan dari Jepang. Peristiwa pergolakan di Jawa antara Jepang dan para pejuang memberi dampak bagi posisi Jepang ketika berhadapan para pemuda dan pejuang di Sumatera bagian selatan termasuk di Pagaralam. Pada akhir bulan September 1945, perebutan senjata dari tangan Jepang yang berada di seluruh daerah Sumatera Selatan meletus di beberapa tempat seperti di Pendopo Minyak, Sekayu, Mangunjaya, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Musi Rawas (Lubuklinggau), Bangka Belitung, Palembang, Lampung, Jambi, Bengkulu, Kepahyang, Curup, Lahat dan Pagaralam.

Aksi pengambilan senjata dilakukan dengan berbagai cara mulai dengan cara perundingan, pencurian dan perampasan. Meskipun dari pihak tentara Jepang, ada juga beberapa orang tentara Jepang yang suka rela menyerahkan senjata kepada para pejuang. Di beberapa tempat seperti di Pagaralam, juga terjadi penyerahan senjata kepada pihak TKR, tetapi karena dendam atas perilaku tentara Jepang ketika masih berkuasa, tentara Jepang yang bermaksud menyerahkan senjata menjadi sasaran kemarahan rakyat.

Harun Sohar adalah salah satu yang memelopori aksi mengambil paksa dan merebut persenjataan dari penguasaan tentara Jepang. Harun Sohar adalah mantan perwira *Gyugun* yang mengawali gerakan tersebut dengan cara mengerahkan orang-orang hukuman yang telah dibebaskan untuk membunuh orang-orang Jepang. Akibat gerakan Harun Sohar dan orang-orang hukuman yang dikerahkannya menyebabkan beberapa orang Jepang terbunuh, diantaranya seorang

*Soco* (pejabat Jepang yang kedudukannya setingkat marga) pada tanggal 15 Desember 1945. Akibat aksi pembunuhan ini menyebabkan ketegangan dan suasana di Pagaralam menjadi tidak kondusif.

Pada tanggal 16 Desember 1945 pihak Jepang menuntut agar pembunuh menyerahkan diri kepada penguasa Jepang dalam waktu 2 hari, yakni tanggal 18 Desember 1945. Mayor Ruslan sebagai komandan TKR Pagaralam mengetahui hal itu, maka Mayor Ruslan dengan cepat mengadakan pertemuan dengan sejumlah unsur pemerintahan seperti KNID Pagaralam, wedana, kepala polisi, para pasirah dan pimpinan TKR, seperti Harun Sohar, Satar Lenggang, M. Yunus, Nahwi, Djarab, Usman Janggut, depati Yusuf dan Kyai Umar Peraudipe di Tebalimau (dusun Pelangkendiday).<sup>118</sup>

Dalam pertemuan tersebut para pemimpin yang bermusyawarah mengambil kebulatan tekad untuk menghadapi Jepang. Rakyat Pagaralam mendukung keputusan untuk melawan ultimatum Jepang. Bahkan dalam pertemuan tersebut semua pejuang berduyun-duyun datang dari berbagai dusun dan marga yang mewakili *sumbay-sumbay* yang ada ditanah Besemah. Dengan berbekal senjata pusaka milik mereka, seperti *Bujang Besalik, Tumbak Ulas, Tata Renjune, Buntang Bujuk, Rentake* dan lainnya. pertemuan bersejarah ini dikenal dengan nama Rapat *Juraytue* dan Ulubalang Tanah Besemah dari Lampik Mpat Merdike Duwe di dusun Pelangkendiday.

Dalam pertemuan penting ini diumumkan sikap rakyat Besemah untuk siap perang menghadapi Jepang. Mereka menghimbau kepada penduduk di Besemah dan Lintang Empat untuk bersiap-siap menyerang tentara Jepang yang masih bertahan di *butai-butai* mereka. Mayor Ruslan dalam pertemuan tersebut didaulat menjadi pemimpin pertempuran merangkap Ketua Pertahanan Tanah Besemah. Rapat itu juga menghasilkan keputusan penting<sup>119</sup> yakni sebagai berikut:

1. Letnan Satu Sjamsul Bahri Umar dan Sersan Mayor Wanar beserta kesatuan BPKR Pagaralam, pemuda, polisi, Laskar Rakyat dari Marga Alundua dan Marga Bumiagung diberi tugas menyerang *Butai* Jepang di Bumiagung.

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, hal. 205-206.

<sup>119</sup> *Ibid.*, hal. 207-209.

2. Letnan Satu Sjamsul Bachrun sebagai Komandan BPKR Jaray dan Almunir serta pemuda dan Laskar Rakyat dari Marga Penantian, Marga Merpayang dan Marga Pajarbulan dan masyarakat dari Lintang Empat Lawang bertugas menyerang *Butai* Jepang di *BPM, Jerambah* Beringin, Pagaralam.
3. Letnan Satu Nahwi dari kesatuan BPKR Tebatgunung serta pemuda dan Laskar Rakyat dari Marga Lubukbuntah, Marga Kebunjati, Marga Tanjungkurung dan Marga Pelangkendiday bertugas menyerah *Butai* Jepang di Karangdale.
4. Mayor Ruslan dan beberapa perwira stafnya seperti Kapten Djarab, Kapten Hamid dan Letnan Satu M. Mansyur dan pasukannya menyerang *Butai* Jepang di Bumiagung lewat dusun Gununglilan.
5. Persiapan dan penyerangan *Butai* Jepang akan dilaksanakan pada jam 03.30 menjelang subuh.

Pihak Jepang terus mengeluarkan ultimatum meminta agar orang yang membunuh *Soco* segera diserahkan kepada pihak tentara Jepang. Rakyat merespon dengan sikap menolak dan menyatakan perang terhadap Jepang. Target utama serangan pejuang dan rakyat Pagaralam adalah *Butai* Jepang yang ada di Bumiagung. Mayor Ruslan telah mempersiapkan dan merencanakan untuk menyerang Jepang dari berbagai jurusan dan Mayor Ruslan sendirilah yang akan memilih orang-orang muda yang akan ditempatkan di garis depan. Mereka mengenakan kain putih dilengannya sebagai simbol dan membedakan mereka dengan kawan maupun lawannya.

Jam 11 malam ditengah udara Pagaralam yang dingin, Mayor Ruslan bersama pasukannya menuju ke desa Bumiagung melalui Gununglilan. Rombongan pasukan ini menggunakan 4 (empat) buah mobil *prah* (truk). Rombongan pertama yang membawa pasukan Sjamsul Umar berhasil melewati pos penjagaan Jepang, selanjutnya rombongan Mayor Ruslan pada malam mendapatkan serangan dan tembakan dari tentara Jepang. Karena terdesak oleh serangan militer Jepang, Mayor Ruslan berusaha menyelamatkan diri, akan tetapi kekuatan pasukan Jepang tidak mampu dilawan oleh Mayor Ruslan, sehingga Mayor Ruslan akhirnya gugur pada pertempuran malam dan tiga hari kemudian jenazahnya bersama ajudannya seperti Sersan Ansori dari dusun Pelangkendiday ditemukan.

Meskipun Mayor Ruslan telah gugur dalam pertempuran merebut *Butai* Jepang, hal itu tidak menyurutkan perlawanan laskar rakyat untuk meyerang *Butai* Jepang. Salah satu sasaran milik Jepang yang berhasil direbut oleh para pejuang adalah asrama Jepang di *BPM Jerambah* Beringin. Pasukan bantuan juga datang dari Tanjungsakti untuk menghadapi kekuatan Jepang yang memiliki senjata yang lebih baik dan modern. Bahkan pihak tentara Jepang bertindak secara brutal, sehingga banyak para pejuang yang gugur dalam pertempuran ini.

Pertempuran keduabelah pihak dan pertikaian diantara pihak Pejuang dan Jepang mendorong dr. A.K. Gani mengambil tindakan atas kejadian tersebut. Gani mengutus kurir menyampaikan pesan kepada M. Siddik Adiem dan Depati M. Hasyim R yang kebetulan berada di Palembang yang sedang mengikuti rapat pembentukan DPR Propinsi, dimana dalam rapat ini M. Sidik Adiem terpilih sebagai ketua DPR Propinsi Sumatera Selatan. Pesan Gani kepada Depati M. Hasyim R dan M. Siddik Adiem agar segera pulang untuk menyelesaikan pertikain antara para pejuang, pemuda dan masyarakat Pagaralam dengan pihak Jepang. Mereka berdua berangkat ke Pagaralam dengan mobil, setelah sampai di lahat mereka meneruskan perjalanan dengan jalan kaki yang melelahkan, karena harus melalui rute jalan pintas untuk menghindari salah satu *Butai* Jepang di Tanjungtebat. Rute jalan pintas melewati Muaradua, Gumay Ulu, Padangtinggi, Padangkkaghrit dan sampai di Sukebumi Impit Bukit. Setelah sampai di Pagaralam langsung diadakan pertemuan antara pihak Jepang dan pihak Pagaralam yang diwakili oleh Depati M. Hasyim R dan M. Siddik Adiem. Pada akhirnya pihak Jepang tidak mau lagi menyerahkan senjata dan memberikan bantuan kepada pihak laskar pejuang dan rakyat Pagaralam akibat pertempuran yang terjadi dusun Bumiagung, Karangdale dan *BPM Jermbah* Beringin.<sup>120</sup>

Disaat pemerintah nasional sedang berjuang untuk menegakan kemerdekaan dan pengakuan dunia Internasional sebagai negara yang berdaulat. Ada pihak tertentu dari dalam negeri yang melakukan tindakan makar dan menentang kepada pemerintah RI yang syah di Sumatera bagian Selatan. Pada bulan Oktober 1945 di

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, hal. 214-215.



daerah Lintang Empat Lawang terjadi 'pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Mat Jin' yang dipimpin oleh M. Zen Senibar atau dikenal dengan panggilan Zen Palak Abang.<sup>121</sup>

PKI pimpinan M. Zen Senibar mulai berani masuk ke Pagaralam pada tanggal 3 Januari 1945 dan memulai aksinya. Aksi pertama dari PKI pimpinan Zen Palak Abang, yakni menghalang-halangi pasukan TKR dibawah pimpinan Letnan Satu Menalis dan Sersan Mayor Samir yang hendak mengangkut beras 2 (dua) ton di daerah ini. Mereka menganggap surat pengantar yang dikeluarkan oleh Wedana Pagaralam (A. Mangku) sebagai izin untuk membawa beras oleh TKR dianggap tidak sah, karena tidak diketahui dan mendapat persetujuan dari M. Zenibar selaku 'penguasa daerah' itu. Akibatnya tindakan dari anak buah Zenibar, TKR hanya membawa beras 1(satu) ton, sedangkan sisanya dibawah oleh anak buah Zenibar.

Zenibar berusaha menarik simpati rakyat terutama kaum tani dengan bertindak membuka *tengkiang* atau lumbung-lumbung padi yang diadakan oleh pemerintah Jepang dan membaginya secara cuma-cuma kepada masyarakat yang bersedia menjadi anggota PKI. Daerah Empat Lawang, khususnya dusn Sadan menjadi basis dari gerakan ini. Sepak terjang Zenibar ini didendar oleh pemerintah RI, akhirnya beberapa anggota KNID Pagaralam dipanggil Gubernur dr. A.K. Gani untuk meyelesaikan masalah ini.

Depati M. Hasyim menjadi perwakilan pemerintah untuk menyelesaikan gerakan PKI pimpinan Zen Senibar yang saat itu telah memiliki pengikut sebanyak 400 orang. Pada awalnya pemerintah mengambil pendekatan persuasif dengan jalan musyawarah. Akan tetapi dalam proses penyelesaian insiden yang berakibat pihak TKR harus menghentikan tindakan provokatif yang dilakukan anak buah Zen Zenibar. Setelah pihak Zenibar, mereka mau diajak berunding oleh pihak TKR yang diwakili oleh M. Sidik Adiem dan Depati M.

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, hal 216. M. Zen Senibar pada masa kolonial Belanda bekerja sebagai wartawan surat kabar Pemandangan di Jakarta. Dan ketika Perang Asia Pasifik pecah, ia kembali ke kampung halamannya di dusun Sadan. Selanjutnya ia mendirikan markas Partai Komunis Indonesia (PKI) didusun Sadan, pengikutnya berasal dari daerah Lintang, Kedurang dan Padang-guci.ketika di pagaralam dibentuk badan-badan perjuangan seperti BPRI setelah proklamasi kemerdekaan, Zen Palak Abang tidak dilibatkan dalam badan-badan. Sebagai seorang terpelajar ia merasa kecewa, hal inilah memicu sikapnya anti pemerintah dan berusaha mencari dukungan rakyat dan simpati masyarakat di wilayah ini untuk mendukung tindakannya.

Hisyam dengan pihak PKI Zen Zenibar. Dan sebagai syarat mereka menyerah kepada pihak RI, mereka harus menyerahkan senjata secepatnya kepada pihak TKR. Akan tetapi pihak Zen Zenibar tidak mengindahkan ultimatum itu, maka pihak TKR menyerang tempat anggota Zen Zenibar bertahan yang disebut 'Rumah Kembang Delapan' serta berhasil merebutnya dari anggota PKI Zen Zenibar. Zen Zenibar melarikan diri dan pada akhirnya tertangkap dari tempat persembunyiannya di dekat tebat sebelah barat dusun Sadan.<sup>122</sup>

Pendaratan tentara Sekutu untuk melucuti tentara Jepang pada tanggal 12 Oktober 1945 menjadi permulaan konfrontasi dengan pihak sekutu yang diboncengi oleh pihak Belanda. Puncak dari tindakan semena-mena Sekutu terhadap rakyat Sumatera di Palembang mencapai puncaknya dengan terjadinya pertempuran Lima Hari Lima Malam di Palembang, tanggal 1 sampai 5 Januari 1947.<sup>123</sup> Dalam peristiwa bersejarah, rakyat Besemah berperan penting sebagai front belakang, yakni berperan menirinkan bantuan pasukan maupoun logistik, seperti bahan makanan, sayur-sayuran dan beras. Beberapa anggota pasukan TKR dari Pagaram bergabung bersama dengan TKR dari Lahat menuju garis depan di Palembang, seperti Djarab, Syamsul bahrn, Syamsul Bahri Umar, Amir Hamzah, Nurdin, Sahid, Hamid, Usman Nangtjik, hasan Azhari dan Yahmid. Nantigiri.

Ketika Belanda melancarkan Agresi Militernya yang pertama (21 Juli 1947), daerah Pagaram menjadi tempat pengungsian bagi militer RI maupun masyarakat sipil, setelah gerak maju militer Belanda berhasil menduduki Lahat. Untuk mempertahankan Pagaram dari ancaman militer Belanda, maka para pejuang bersama TKR dan pemuda membuka dua front pertahanan, yakni Fronk Ndiat yang dipimpin oleh Kapten Nur dan Font Rantaw Unji dibawah pimpinan Kapten Nurdin. Agresi militer pertama diakhiri dengan perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948, dimana untuk kesepakatan ini di Lahat pihak militer diwakili oleh Kolonel Mollinger dan pihak Indonesia oleh Kolonel Simbolon. Sebagai akibat

---

<sup>122</sup> *Ibid.*, hal. 217-222.

<sup>123</sup> Asnawai Mangkualam, *Perang Kota 120 Jam Rakyat Palembang*, ed (Zawawie Said), Jakarta: Aksara Baru, 1986.

dari perjanjian Renville, maka daerah RI dalam Karesidenan Palembang hanya menyisakan daerah Kawedanan Tanah Pasemah yang berpusat di Pagaralam dengan daerahnya meliputi Kabupaten Musi Ulu rawas ditambah sebagian Kawedanan Musi Ilir, Komering Ulu dan Kawedanan Muara Dua.<sup>124</sup>

Ketika Belanda melakukan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948, 3 (tiga) daerah di Sumatera Selatan yakni Muaradua, Tebingtinggi dan Pagaralam menjadi target penting bagi penguasaan militer Belanda. Ketiga daerah merupakan basis pertahanan dan pemerintahan RI, Belanda berusaha merebut Tebingtinggi sebagai jalan masuk mereka dan sekaligus memudahkan mereka untuk merebut Lubuk Linggau sebagai Markas Subkoss (Sub Komandemen Sumatera Selatan) dan Kota Curup sebagai pusat pemerintahan sipil Sumatera Selatan yang tidak jauh dari Kota Lubuk Linggau. Untuk menghambat gerak maju pasukan Belanda ke Kota Pagaralam, maka pimpinan pasukan RI membentuk 3 (tiga) Front Pertahanan di Pagarala. Pertama, Front Mingkik dibawah pimpinan Harun Sohar dan Sai Husin, kedua, Front Selangis dibawah komando Kapten Satar dan ketiga Front *Padangkaghit* dibawah kendali Letnan Yahya Bahar.

Pada tanggal 30 Desember 1948 Belanda menyerang Pagaralam. Untuk menghadapi gerak maju militer Belanda, Front Selangis dan Front *Padangkaghit* dibawah pimpinan Mayor Yunus memerintahkan penghancuran beberapa *Jerambah* yang ada, yang menghubungkan Lahat dan Pagaralam, seperti di daerah Kubah (*Jerambah* Pulau Pinang dan *Jerambah* Ndikar). Akan tetapi pasukan Belanda pada akhirnya mampu menduduki Pagaralam. Mayor Yunus memerintahkan TNI dan pemuda dan pejuang untuk melakukan politik bumi hangus, antara lain dengan membakar pabrik teh dan perumahan di perkebunan teh di Gunung Dempo, markas TNI di Karangdale, tangsi polisi, rumah sakit, pasar dan beberapa perumahan Belanda di *Demoe Riokan* dan *BPM* Belanda di *Jerambah* Beringin.<sup>125</sup>

Jika pada agresi militer pertama Belanda hanya berhasil menguasai Kota Palembang, maka pada agresi militer kedua, semua ibu kota Karesidenen di Propinsi Sumatera Selatan berhasil diduduki

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hal 226-232.

<sup>125</sup> *Ibid.*, 234-236.

oleh Belanda, seperti Bengkulu, Tanjungkarang dan Lampung. Dalam posisi seperti ini, maka konsolidasi pemerintahan dan strategi militer untuk serangan balasan kepada Belanda disusun dari daerah pengungsian. Jika di tingkat pusat dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin Mr. Syafrudin Prawiranegara yang berpusat di Bukittinggi (Sumatera Barat), maka di daerah yang juga membentuk pemerintahan pengungsian pula. Setelah Pagaram diduduki oleh Belanda, komandan Batalyon XVI ST-STP memabngun markas darurat di dusun Gunung-agung Pauh. Pada tanggal 29 Desember 1948, bertempat di rumah Masiyah dibentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia Kabupaten Lahat (PDRI-KL)<sup>126</sup>, dengan susunan personilnya sebagai berikut:

- Bupati Ketua PDRI-KL : Amaludin
- Wedana Tanah Pasemah : A. Wani Senabu
- Kepala Pejabat Penerangan : M. Siddik Adiem
- Kepala Pejabat Sosial : M Saleh S
- Tata Usaha Staf Penerangan : M. Shoim K
- Tata Usaha/ Sejarah : Ibrahim Sejarah
- Juru Tulis Marga Alundua : Junus Amaludin
- Pesirah Kepala Marga Pajar Bulan : Depati Basuning
- Kepala Urusan : Kenasin S
- Pesirah Kepala Marga Alundua : Depati M Hasyim R
- Pesirah Kepala Marga Penantian : Depati Simbat
- Pesirah Kepala Marga Muarapayang : Depati Tjik Olah
- Komite Nasional Daerah (KNID) : - Yatim Muncar  
- Muhammad Zen

Seperti halnya pemerintahan PDRI di Sumatera Barat yang seringkali berpindah karena alasan keamanan, PDRI-KL yang semula bergema di Kecamatan Jaray, perlahan-lahan karena terus dikejar oleh militer Belanda mereka juga sering kali berpindah karena alasan yang sama. PDRI-KL pernah berkedudukan di dusun Tanjung-agung, selanjutnya berpindah ke dusun 'Tige Setungku', yaitu Pelajaran Nantigiri, Pamahsalak Marga Penantian. Pada tanggal 10 Maret 1949, atas saran dari Pesirah PDRI-KL dipindahkan ke Talangranday dusun Pelajaran. Akan tetapi karena daerah di bombardir oleh Belanda dengan pesawat jenis *Piper Cup*, akhirnya PDRI-KL berpindah ke

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, hal. 247.

Tanjungsakti sebagai basis pertahanan terakhir. Rombongan PDRI-KI dibagi dua, rombongan pertama berangkat ke Tanjungsakti terdiri dari 6 (enam) orang, yakni Bupati Amaludin, Wedana A. Wani, M. Siddik Adiem, Inspektur Polisi Abdullah, Kenasin S dan Janusin. Sedangkan rombongan kedua terdiri dari M. Hasjim R, M. Saleh, Ibrahim S dan Mohammad Shoim kembali ke Pangkalan (Dusun Pelajaran). Di Tanjungsakti rombongan PDRI-KL diterima oleh Residen PDRI Palembang Abdul Rozak.

Tanjungsakti (Besemah Ulu Manak) merupakan daerah basis pertahanan dan pemerintahan Karesidenan. Tanjungsakti pernah basis pertahanan TNI, yakni Sub Teritorial Palembang (STP) dibawah pimpinan Letnan Kolonel Bambang Utoyo. Selain itu daerah juga menjadi pusat pemerintah Karesidenan Palembang, dibawah pimpinan Abdul Rozak. Tanjungsakti menjadi tumpuan terakhir bagi para pejuang baik dari kalangan militer maupun sipil. Tanjungsakti pada masa ini bisa dikatakan sebagai daerah *tumpukan*, yakni para pejuang yang datang dari beberapa daerah di Sumatera Selatan. Sebagai pusat pemerintahan RI di Karesidenan Palembang (PDRI Karesidenan Palembang), Tanjungsakti berperan penting bagi kelangsungan pemerintahan PDRI diwilayah Sumatera Selatan. Beberapa hal yang mendukung Tanjungsakti dijadikan sebagai basis pertahanan dan PDRI Karesidenan Palembang, antara lain ketersediaan logistik (pangan) yang memadai, bahkan Tanjungsakti merupakan satu-satunya kecamatan basis pertahanan pejuang di daerah Lahat dan juga di Sumatera Selatan yang mampu bertahan sampai penyerahan kedaulatan RI pada tahun 1949.<sup>127</sup>

Sesuai dengan kesepakatan dari Konferensi Meja Bundar, maka pihak Belanda mengakui kedaulatan pemerintahan RIS. Penyerahan kedaulatan di daerah Sumatera Selatan dilakukan sebelum terjadinya penyerahan kedaulatan secara nasional, yakni pada tanggal 27 Desember 1949. Hal ini disebabkan para pimpinan daerah di Sumatera Selatan mengambil inisiatif melakukan perundingan bersifat lokal dengan pihak Belanda. Dan sebagai akibatnya, penyerahan kedaulatan di tiap-tiap kota di Sumatera Selatan berbeda-beda, termasuk di Kota Pagaralam. penyerahan kedaulatan di Pagaralam dilakukan pada bulan November 1949.

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, hal 251-257.

Residen PDRI Palembang, Abdul Rozak dan Komandan Batalyon XVI ST-STP Mayor Rasyad Nawai memberi mandat kepada Yatim Muntjar dan Kapten M. Sanaf untuk membentuk 'Panitia Pusat Penjemputan Pemerintah/Tentara Nasional Indonesia di Pagaram. selanjutnya penugasan mandat ini dilimpahkan dan dipercayakan kepada M. Siddik Adiem untuk membantu panitia yang disusun di dusun Tiga Setungku<sup>128</sup>, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Basuning
Ketua I	: Yatim Muntjar (Urusan Pemerintahan Sipil)
Ketua II	: Kapten M. Sanaf (Urusan Ketentaraan)
Sekretaris I	: Amaludin (Tata Usaha)
Sekretaris II	: M. Shoim K (Penghubung Antar-Jawatan)
Seksi Dana	: M. Chon

Panitia ini juga dilengkapi dengan bagian-bagian penting seperti menyediakan para penerjemah (Yanhaki dan Taslim). Keberadaan panitia juga telah mendapat persetujuan atau telah dikethui dari perwakilan UNCI yang berkedudukan di Lahat. Pihak UNCI akhirnya menghubungi Yatim Muntjar dan M. Sanaf, melalui kedua tokoh inilah akhirnya bisa berkomunikasi di Belanda yang saat itu berada di Pagaram. untuk memudahkan perundingan dan penyerahan kedaulatan, panitia yang berada di dusun Tiga Setungku ke Pagaram.

Pada tanggal 26 Desember 1949, rombongan PDRI dan tentara republik seperti Residen Abdul Rozak, Bupati Amaludin, Mayor M. Rasyad Nawawi tiba di Simpang Manak. Ketika rombongan memasuki kota Pagaram, disana-sini rakyat meneriakkan dan menyambut pekik 'merdeka'. Bertempat di rumah Wedana Kawedanan Pasemah, penyerahan dan penandatanganan kedaulatan secara resmi dilakukan, yakni Kapten Han de Link mewakili Belanda dan Mayor Rasyad Nawai dari pihak Republik Indonesia. Dan pada tanggal 30 Desember 1949, Yatim Muntjar dan Kapten M. Sanaf mengembalikan mandate kepada Komandan Batalyon XVI ST-STP termasuk menyerahkan pula semua dokumen sebagai tanda purna tugas sebagai Panitia Pusat Penyambutan Pemerintah RI/TNI.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, hal. 268.

<sup>129</sup> *Ibid.*, hal 270-271.



**Gambar. 6** Tugu Perjuangan Simpang Mana  
Sumber: Koleksi Pagaram Pos

### **C. ARSIKTEKTUR RUMAH *BAGHI***

Salah satu identitas kultural yang dimiliki orang Besemah adalah arsitektur rumah *Baghi*.<sup>130</sup> Di Kota Pagaram konsentrasi rumah *Baghi* ditemukan di daerah Pelang Keniday. Rumah tradisional orang Besemah (rumah *Baghi*) memiliki arsitektur yang unik, karena menggunakan pasak dan ragam hias yang tersebar di hampir seluruh bagian rumah. Orang Besemah di Dusun Pelang Keniday mengelompokkan rumah *Baghi* dalam 4 (empat) tipe yakni: 1) Rumah *Tatahan* 2) Rumah *Gilapan* 3) Rumah *Padu Tiking* dan terakhir Rumah *Padu Ampagh*.

---

<sup>130</sup> Rois Leonard Arios, 'Arsitektur Rumah Baghi di Kota Pagar Alam', dalam Nursyirwan Effendi (ed), *Bunga Rampai Budaya Sumatera Selatan, Budaya Besemah di Kota Pagar Alam*, Padang: BPNST Press, 2012, hal.1-117. Lihat juga Moh Alimansyur dkk, *Arsitektur Tradisional Daerah Sumatera Selatan*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Daerah (IDKD), Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990/1991, terutama bagian Bab III tentang Arsitektur Tradisional Suku Pasemah, hal. 91-132.



**Gambar.7.** Rumah *Baghi*

Sumber: Koleksi Pagaralam Pos, 2014

Pertama, Rumah *Tatahan* adalah rumah tradisional Besemah dimana semua bagian-bagian tertentu di luar rumah diberi ukiran. Oleh karena membuat ukiran dengan cara menatah dengan jenis-jenis pahat maka rumah ini disebut rumah *tatahan*. Rumah ini berbentuk bujursangkar atau persegi panjang dimana ukuran panjang dan lebarnya tidak terlalu besar. Rumah ini didirikan diatas tiang yang tingginya lebih kurang 1,5 m, yang biasanya dibuat dari jenis kayu *kelat* yang memiliki ketahanan dan awet. Kedua, Rumah *Gilapan* yakni rumah yang memiliki bentuk sama dengan rumah *tatahan*, yang membedakan adalah rumah *gilapan* bagian-bagian dinding luarnya tidak diukir, tetapi cukup diketam saja tau sugu.

Ketiga, Rumah *Padu Tiking* adalah rumah tradisional di Besemah, yang memiliki bentuk sama dengan kedua rumah sebelumnya, yang membedakan adalah bangunan rumah ini terutama pada bagian-bagian tertentu dibuat dari kayu dan bambu. Perbedaan lainnya adalah posisi atau penggunaan kayu *kitau*. *Kitau* adalah kayu yang dipakai sebagai peyangga langtai rumah yang diletakkan diatas tiang lauar dan tiang tengah rumah. Dan yang keempat, Rumah *Padu Ampagh* adalah jenis rumah yang dibuat sangat sederhana dengan bahan dari anyaman bamboo. Hal lain



yang membedakan adalah posisi *kitau* yang diletakkan dengan posisi rebah berbeda dengan rumah *padu tiking*.

Dalam arsitektur rumah *baghi* biasanya memiliki ukuran 6mx6m, 7mx7m atau 8mx8m dengan dapurnya lebih kecil yang disesuaikan dengan lebar rumahnya. Secara umum rumah *baghi* memiliki dua bagian utama, yakni rumah dan dapur, yang diantara keduanya dihubungkan dengan sebuah gang (*gaghang*). Sehingga arsitektur rumah *baghi* yang utuh dari luar terlihat bagian rumah, tangga, *gaghang* dan dapur.

Bagian-bagian penting dalam susunan rumah *baghi* terdiri dari beberapa bagian seperti pondasi, kolom, balok (*paduan*), dinding, lantai, plafon, tangga, pintu dan jendela serta atap. Bagian pondasi adalah bagian tiang penyangga rumah (*tiang dudok*) yang posisinya diletakkan atas sandi sebagai tumpuan yang memisahkan tiang penyangga dengan tanah (*aking*). Pada rumah *baghi* yang ada menggunakan dua atau tiga batu sandi. Fungsi batu sandi selain tempat dudukan tiang utama juga berfungsi agar kayu terjaga dari kelembaban dan proses pelapukan.

Bagian kedua kolom yakni bagian yang berada pada bagian sudut rumah dan berada diatas tiang utama yang disebut dengan istilah *penjughu*. Selanjutnya ketiga, yakni balok (*paduan*), bentuknya merupakan kayu yang berbentuk persegi empat yang panjangnya disesuaikan dengan ukuran rumah, ada 3 kategori balok *paduan*, yakni sebagai berikut:

- a. *Kitau*, yakni balok kayu yang dilangsungkan diletakkan diatas *tiang dudok* dengan diameter 10-18 cm, *kitau* ada yang berbentuk bulat dan hanya sebagian kecil kayu persegi yang bentuknya masih kasar.
- b. *Tailan*, yakni balok yang diletakkan diatas *kitau* dengan posisi melintang sepanjang rumah. *Tailan* ada yang langsung menghimpit *kitau* atau antar *tailan* disambungkan satu sama lain dengan cara *ditakik*.
- c. *Galar* adalah kayu berbentuk balok segi empat yang dipasangkan sepanjang rumah dimana pada bagian ujungnya melengkung sebagai hiasan yang menyerupai tanduk maupun perahu. pemasangan *galar* dengan cara *ditakik*. *Galar* memiliki fungsi sebagai penutup sambungan papan lantai pada bagian luar.

Pada rumah *baghi* bagian selanjutnya adalah dinding, yang biasanya dibuat dari papan yang cukup lebar dan tebal. Pada bagian tertentu terdapat sake, yakni papan yang dipasang tegak lurus didinding rumah, yang berfungsi sebagai penutup sambungan antar papan. Selanjutnya untuk bagian lantai rumah *baghi* biasanya menggunakan lantai yang terbuat dari papan kayu dengan ketebalan 3cm-5cm dengan lebar 25-30 cm. pada rumah *baghi* memiliki plafon atau penutup bagian atas rumah. Bentuk plafon ini menyatu dengan *layar* atau *belayar*, yakni penutup rumah berupa dinding pada atap. Bahan utama *layar* adalah berupa anyaman bambu yang berbentuk segi tiga. Plafon selain sebagai penutup bagian atap rumah, juga berfungsi pula sebagai tempat menyimpan barang-barang (*gelemet*).

Pada rumah *baghi* biasanya terdapat tangga, karena rumah *baghi* merupakan bentuk rumah panggung. Tangga ini berfungsi sebagai alat yang membantu pemiliknya keluar masuk rumah yakni dengan cara menaiki dan menuruninya. Biasanya anak tangga dibuat dengan bilangan ganjil, seperti jumlahnya 5 atau 7. Hal ini dikaitkan nilai dan filosofi orang Besemah, yang mengenal istilah *taka*, *tangga*, *tunggu* dan *tinggal*. *Taka* memiliki makna bertingkat, *tangge* yang berarti tetap atau tidak perkembangan. Sedangkan *tunggu* memiliki arti rumah ini agar betah ditempati dan *tinggal* bertai yang sering ditinggal penghuninya.

Bagian selanjutnya pada rumah *baghi* yakni pintu (*lawang*) dan jendela (*jindile*). Pintu dan jendela dibuat dari sebuah papan yang cukup lebar dan tebal. Rata-rata ukuran pintu rumah *baghi* 63 cm x 165 cm. ukuran pintu yang lebih rendah dan kedudukan pintu yang lebih tinggi dari lantai (*palangkahan*) memaksa setiap orang yang masuk harus menundukkan kepala, hal ini mengandung makna seorang yang mau bertamu harus menghormati pemilik rumah. Konsep rumah *baghi* pada umumnya tidak memiliki jendela yang berfungsi sebagai ventilasi sebagai tempat sirkulasi udara. Dan bagian terakhir dari rumah *baghi* adalah atap, yang biasanya dulu dibuat dari bamboo, tetapi sekarang sudah diganti dengan seng. Atap rumah *baghi* mirip dengan atap rumah Mingkabau<sup>131</sup>, yakni kedua ujung atap ditinggikan sehingga tengahnya melengkung.

---

<sup>131</sup> Konon berdasarkan mitos orang Besemah, terutama masyarakat dusun Pelang Keniday yang mengaku berasal dari keturunan Puyang Serunting Sakti, kemiripan ini

Dalam proses pembangunan *rumah baghi* ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam adat orang Besemah, seperti penyelenggaraan musyawarah, pengumpulan dan pengadaan bahan serta teknik dan cara pembuatan. Proses pertama adalah mengadakan musyawarah terlebih dahulu diantara anggota keluarga yang ingin membangun *rumah baghi*. Tujuannya agar dicapai kesepakatan mengenai tanah milik keluarga (ulayat) atau pribadi yang akan dijadikan lahan untuk mendirikan *rumah baghi*. Biasanya dalam musyawarah ini dipimpin oleh tetua adat yang disebut dengan *juray tuwe*.

Proses selanjutnya mengumpulkan bahan untuk membangun *rumah baghi* yakni kayu yang nantinya akan dibuat menjadi *kitau, belandar* dan lainnya. Bahan kayu (kayu gelondongan) yang akan dicari terlebih dahulu dibicarakan kepada *juray tuwe*. Biasanya kayu yang dipergunakan harus terlebih direndam sebelum diolah menjadi bahan *rumah baghi*. Tujuan perendaman untuk mengawetkan kayu sehingga bisa tahan lama, kayu direndam di sungai selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, tetapi minimal direndam selama 40 hari. Dengan direndam kadar asam yang terkandung dalam kayu bisa dihilangkan, sehingga kayu terbebas dari seperti serangan serangga (*rayap*). Orang Besemah telah mengenal kearifan lokal<sup>132</sup> dalam mengidentifikasi jenis kayu yang baik, seperti adanya jenis kayu yang tidak boleh ditebang untuk menjadi bahan kayu dan kayu yang baik untuk dipergunakan dalam membangun *rumah baghi*.

---

disebabkan ketika dalam pengembarannya ke Kerajaan Pagaruyung terkesan dengan rumah gadang. Keterangan lebih lanjut lihat Rois, *op.cit.*, hal. 71.

<sup>132</sup> Kayu yang dilarang untuk ditebang dan digunakan sebagai bahan bangunan *rumah baghi*, seperti pertama, kayu yang ditebang tidak oleh sedang berbunga, karena dikhawatirkan jika dipakai banyak kumbang yang akan melubangi kayu. Kedua, kayu yang terkena petir, karena khawatir rumah yang dibangun dengan kayu akan terkena petir. Selanjutnya ketiga, kayu *pumpungan*, yakni kayu yang ujungnya patah, akrena dikhawatirkan mendatangkan hal yang tidak baik bagi penghuninya. Keempat kayu yang dililit akar, yang dianggap akan mengundang ular untuk masuk ke rumah dan kayu yang rubuh dengan akar-akarnya yang mendatangkan kegaglan baik penghuninya. Jenis kayu yang baik untuk dipergunakan membangun *rumah baghi* adalah kayu yang pada saat tumbuhnya menjadi tempat tinggal lebah madu, yang dipercaya akan memberikan kebahagiaan bagi penghuninya dan kayu yang pada saat ditebang jatuh ke tunggul penebangnya yang dipercaya akan membawa kedamaian bagi penghuninya.

Proses berikutnya teknik dan cara pembuatan *rumah baghi*, tentu saja pada tahap ini pemilik yang akan membangun *rumah baghi* terlebih dahulu mencari tukang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang tata cara membuat *rumah baghi*. Tahap pertama yakni pendirian tiang-tiang yang diikuti dengan pemasangan *kitau* dan *belandar*. Selanjutnya memasang *sake* penyanggah, alang panjang dan alang pendek. Proses berikutnya memasang kuda-kuda, balok bubungan kap dan atap. Setelah pekerjaan pemasangan atap selesai selanjutnya memasang papan untuk lantai dan dinding. Dan proses terakhir membuat tangga untuk keluar dan masuk ke *rumah baghi*.

Dalam proses pembangunan *rumah baghi* orang Besemah mengenal ritual adat atau upacara adat pendirian *rumah baghi*, seperti *Sedekah Negah Ka Tiang*, *Sedekah Nungguh Mubungan*, *Sedekah Nunggu Ghumah* dan *Sedekah Nyimak Ghumah*. Ritual adat memancang tiang atau *Sedekah Negah Ka Tiang* yakni doa selamat agar pemasangan tiang pancang untuk rumah *baghi* berjalan lancar, biasanya dilaksanakan pada pagi hari. Selanjutnya setelah kerangka rumah berdiri, maka dilakukan ritual menaikan bubungan (*Sedekah Nungguh Mubungan*) yang dimulai dari pagi sampai sore. Tujuannya agar para tukang yang bekerja diberikan keselamatan dan kelancaran. Bahan yang diperlukan dalam ritual adat ini, antara lain bendera merah putih yang dipasang dipuncak bubungan, air kelapa hijau, *linggur* (sejenis buah labu) yang tidak boleh dimakan, satu tandan pisang mas, tebung satu batang dan daun sedingin. Secara filosofi bahan-bahan tersebut menyiratkan kearifan lokal orang Besemah tentang harmonisasi mereka dengan alam atau relasi antara makrokosmos dan mikrokosmos.

Setelah rumah sudah jadi, maka untuk menempati rumah baru ini dilakukan ritual *Sedekah Nunggu Ghumah* yakni upacara adat masuk ke rumah baru. *Sedekah* ini sebagai rasa syukur dari pemilik rumah atas selesainya pekerjaan membangun rumah baru. Biasanya doa selamat dilakukan pada pagi hari, pihak tuan rumah juga memberikan bekal bagi para tukang yang telah membantu pembangunan rumah dan kembali kerumahnya (*tukang kabalek*). Pemilik memberikan bekal seperti nasi satu ibat (4-5) piring yang dibungkus dengan daun, lauk-pauk (ikan pepes) dan *lemang* (beras ketan yang dimasak dalam bambu). Dan ritual terakhir yakni

*Sedekah Nyimak Ghumah* atau upacara menguji rumah, ritual ini tidak bersifat wajib dilakukan oleh pemilik rumah.

Rumah *baghi* memiliki struktur yang sederhana, yakni terdiri dari ruang utama, dapur, *gaghang* dan tangga. Konsep tata ruang rumah *baghi* hanya membagi pada dua hal penting yakni rumah utama dan dapur. Ruang utama juga difungsikan juga untuk kegiatan adat, sehingga posisi tempat duduk juga mencerminkan kedudukan kekerabatan dengan pemilik rumah. Bagi tamu terhormat seperti *para juraytuwe*, mereka duduk didekat pintu masuk, yakni bagi rumah yang pintu masuknya dari depan bukan dari *gaghang*. Tempat duduk para tetua adat ditinggikan lebih dari tempat duduk umum tamu umum sekitar 30 cm (*cincai tangge*). Posisi orang dihormati disebut dengan istilah *orang pertame*.

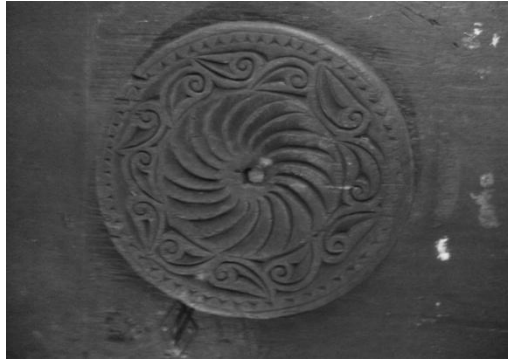
Rumah *baghi* juga memiliki ragam hias yang berfungsi sebagai elemen estetika dan juga menyimbolkan hubungan manusia dengan alam. Ragam hias menjadi salah satu elemen penting yang ditemukan pada rumah *baghi*, baik jenis rumah *tatahan* maupun *ghilapan*. Pada umumnya ragam hias diukir yang ada pada rumah *baghi* terdapat pada bagian dinding depan, pintu masuk utama, dinding samping dan tiang utama rumah. Ukiran yang biasanya ditemukan pada rumah *tatahan* mengacu pada alam seperti arah mata angin, gerak gelombang samudra, flora (tanaman) yang umumnya pada jenis tanaman yang ada disekitar mereka, baik jenis bunga maupun tanaman lainnya.

Beberapa ragam hias atau motif ukiran yang ada di rumah *baghi*<sup>133</sup> adalah *mendale kencane mandulike* dan juga hiasan bunga dan tanaman, seperti *ghebung buloh* atau *munce ghebung* (pucuk bambu muda), daun pakis dan lain-lain. *Mendale Kencane Mandulike* adalah ragam hias utama yang terdapat pada rumah *baghi*. Hiasan biasanya mudah ditemukan pada bagian dinding dan dibuat dengan ukiran timbul. Makna ukiran memiliki filosofi keselaran hubungan antara manusia dan alam. Makna lainnya mempunyai makna sebagai simbol kehidupan sosial yang terus berkesinambungan. Ukiran *Mendale Kencane Mandulike* tidak memiliki khusus tertentu, biasanya mengikuti dari warna kayu digunakan. Cara pembuatan ukiran ini

---

<sup>133</sup> Rois Leonard Arios, *op.cit.*, hal. 92-97. Lihat juga Tumenggung Citra Mirwan, *Besemah Dalam Lintasan Sejarah dan Budaya*, Pagaralam: Pemko Pagaralam, 2010, hal. 30-31.

dengan memakai sebuah alat ukir sejenis pahat yang menyerupai pisau yang disebut dengan istilah *gubang*.



**Gambar 8. Motif Mendale Kencana Mandulike**  
(Sumber: Dokumen Tim Peneliti, 2014)

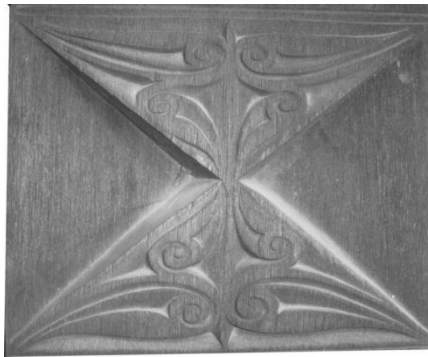
Selain motif *mendale kencana mandulike*, motif yang mengambil dari hiasan bunga dan tanaman juga banyak ditemukan pada jenis ragam hias yang pada rumah *baghi*. Motif ini biasanya terdapat pada bagian dinding terutama pada kayu penghubung antar tiang pada dinding, baik dalam posisi horizontal maupun vertikal. Beberapa motif utama dari ukiran yang mengambil rujukan bunga dan tanaman, yakni *munce ghebung* (bambu muda, rebung), *kuncup teratai*, *mude paku* (daun pakis) serta *lengkenai naik* (bunga-bunga kecil).



**Gambar 9. Motif Munce Ghebung**

Sumber: Rois Leonard Arios, 'Arsitektur Rumah Baghi di Kota Pagar Alam', dalam Nursyirwan Effendi (ed), *Bunga Rampai Budaya Sumatera Selatan, Budaya Besemah di Kota Pagar Alam*, Padang: BPNST Press, 2012, hal. 106

Motif ukiran *munce ghebung* yakni rumpun bambu muda (rebung) yang menggambarkan kehidupan manusia dalam kesatuan keluarga besar yang didalam terdapat nilai keahlian, ketelitian dan kecermatan dalam menata kehidupan sosial dalam kelompoknya maupun kelompok lainnya. Selanjutnya motif *kuncup teratai* yaitu kuncup bunga teratai yang tumbuh di kolam yang menyimbolkan orang Besemah sebagai keluarga besar dari rumpun melayu.



**Gambar 10.** Motif *Kuncup Teratai*

Sumber: Rois Leonard Arios, 'Arsitektur Rumah Baghi di Kota Pagar Alam', dalam Nursyirwan Effendi (ed), *Bunga Rampai Budaya Sumatera Selatan, Budaya Besemah di Kota Pagar Alam*, Padang: BPNST Press, 2012, hal. 107.

Berikutnya motif ukiran *mude paku* yakni daun pakis, yang memiliki makna kemakmuran dan pengayoman bagi anggota keluarga besar orang Besemah sebagai rumpun Melayu. Dan yang terakhir motif yang terdapat pada rumah *baghi* adalah *lengkenai naik*, yakni ukiran yang menyerupai bunga-bunga kecil yang melambangkan perkembangan dari keluarga besar serta kesejahteraan keluarga. Selain itu ada beberapa motif motif bunga dan tanaman yang terdapat pada rumah *baghi* seperti motif *bunga melur*, *bunga tanjong*, *daun sireh*, *bunge roda pedati*, *bunge nenas belandei*, *daun waru*, *pandan suji* dan *bunge serikaye*.



**Gambar 11.** Motif *Mude Paku*

Sumber: Rois Leonard Arios, 'Arsitektur Rumah Baghi di Kota Pagar Alam', dalam Nursyirwan Effendi (ed), *Bunga Rampai Budaya Sumatera Selatan, Budaya Besemah di Kota Pagar Alam*, Padang: BPNST Press, 2012, hal. 106.

#### **D. BAHASA, SASTRA DAN BUDAYA**

Salah satu identitas kultural orang Besemah yang juga penting adalah khazanah bahasa, karya sastra dan budaya yang khas yang membedakan dengan daerah lainnya di Sumatera Selatan, seperti bahasa besemah, guritan, berejung, tadut, peribahasa, gurindam dan lain-lainya. Orang Besemah sebagaimana penduduk nusantara termasuk dalam rumpun Melayu. Konsep bangsa Melayu, pertama merujuk kepada ras, yaitu penduduk yang mendiami kepulauan Indonesia, termasuk semenanjung Malaya. Asal usul ras melayu diperkirakan benua Asia yang menyebar ke wilayah nusantara pada tahun 2500-1500 SM. Mereka disebut dengan melayu tua (proto Melayu), yang membawa kebudayaan neolithikum. Sedangkan gelombang kedua diperkirakan pada thun 300 SM, yang disebut dengan Deutro- Melayu.

Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dan identitas orang Melayu bisa dilacak dari sumber tertulis tentang pemakaian bahasa Melayu pada prasasti Kedudukan Bukit. Prasasti yang ditulis dengan huruf Palawa bertarikh 605 Saka (686 M). Selain prasasti Kedudukan Bukit, prasasti lain yang menginformasikan tentang bahasa Melayu, antara lain prasasti Talang Tuwo (684 M)



yang berisi tentang pembuatan sebuah taman atas perintah raja Sriwijaya yakni Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Selanjutnya prasasti Kota Kapur berisi tentang penyerangan pasukan Sriwijaya ke tanah Jawa. jelasnya bahas Melayu sudah dipergunakan dalam lingkup kecil di Sumatera pada abad ke-7.

Menurut Collins awalnya bahasa Melayu dipergunakan sebagai bahasa untuk medium penyebaran agama Hindu dan Budha Sumatera. Tradisi sansekerta yang memiliki hubungan dengan dengan bahasa Melayu Sumatera. Teks bahasa Melayu kuno diketemukan pada prasasti dan piring perunggu di temukan di Sumatera, Bangka (686 M), Jawa (832 M) serta Filipina (900 M). Sampai abad ke-14 bahasa Melayu Kuno masih digunakan sebagai bahasa prasasti dan batu nisan.

Seiring dengan perubahan zaman, bahasa Melayu mengalami pertumbuhan dan juga pengaruh dalam masyarakat nusantara. Pada abad ke-15 bahasa Melayu yang menjadi bahas pengantar dan tulis di pelabuhan di pesisir nusantara. Bahasa Melayupun diperkaya dengan kata-kata serapan yang bersal dari bahasa Sansekerta dan bahasa Arab, termasuk juga dari bahasa lain , seprti bahasa Jawa, Tamil, Mongolia, Persia dan Cina. Dan puncaknya pada abad ke-16 bahasa Melayu telah menjadi bahasa ilmu pengetahuan, perdagangan, diplomasi dan agama. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa pengantar (*lingua franca*), dikalangan masyarakat dan juga bahasa resmi yang dipergunakan dikalangan istana, dan agama seperti bahasa latin. Bahkan Eropa yang berdagang ke wilayah nusantara seperti orang Portugis juga mempergunakan bahasa Melayu.

Menjelang abad ke-17, bahasa Melayu juga dipergunakan sebagai pengantar bagi keperluan kaum misinioris dibagian timur Indonesia. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa modern pada abad ke-18. Bahasa Melayu ddiipergunakan oleh kolonial Belanda sebagai bahas tulis untuk perjanjian, surat keterangan resmi dan penterjemaahan Injil serta kpeustkaan istana Melayu. Pada kurun abad ini, bahasa Melayu juga menyerap kosa kata yang berasal dari bahasa Belanda dan Inggris. Dan sebagai puncak perkembangan bahasa Melayu telah menjadi bahasa modern , yang melekat pada gaya hidup modern dan kaum terdidik pada awal abad ke-20.<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> Ety Suspa, *Sastra Besemah Bagian Dari "Sastra Melayu Lama" Tinjauan Deskriptif*, Bandung: Uvula Press, 2013, hal 9-12.

Bahasa Besemah sebagai salah satu rumpun bahasa Melayu, tidak saja menjadi lambang identitas kebudayaan daerah. akan tetapi juga menjadi bahasa komunikasi dengan diantara orang Besemah. Bahasa Besemah memakai nada e (*pepet*), nada e ini sama dengan pengucapan e di bahasa Melayu di Semenanjung Malaya. Menurut Mahdi bahasa Besemah merupakan bahasa yang dipergunakan oleh mereka yang bermukim disekitar Gunung Dempo, yakni penduduk Kabupaten Lahat, Kecamatan Kikim, Pulau Pinang, Kota agung, Kota Pagaralam, Tanjung Sakti, Jarai dan Merapi.<sup>135</sup>

Secara kultural orang Besemah juga menerima pengaruh dari Islam, seperti kuat adat pergaulan bujang-gadis, dimana dalam adab atau sopan santun pergaulan antara bujang-gadis harus senantiasa didampingi oleh orang ketiga yang disebut dengan jenang. Karena Islam mengajarkan bahwa mereka yang bukan muhrim tidak diperkenalkan bergaul tanpa ada orang ketiga yang menemani diantara bujang-gadis. Islam juga mempengaruhi pada karya sastra seperti seni sastra Tadut. Seni Tadut merupakan sarana bagi masyarakat Besemah untu menghafal dan mengingat ajaran Islam. Selain penerima norma Islam juga terlihat pada acara akad nikah. Masuknya Islam juga merubah tradisi matra sebagai kepercayaan gaib yang semual lebih banyak mendapat pengaruh pra Islam, seperti penggunaan kata Allah dalam setiap matra yang ada di Besemah.

Orang Besemah juga memiliki aksara tulis yang disebut dengan aksara Ulu, bentuk akasara ulu ada tiga macam, yakni, pertama *kebau nyeberang* yang sering dipakai secara umum, kedua, *kude berentak*, yang dipakai oleh orang-orang kelasa menengah fdalam struktur sosial di Besemah, dan ketiga, *melukut ghen* yang dipergunakan oleh kaum bangsawan.<sup>136</sup>

Tanda baca menurut ejaan huruf Melayu Besemah dalam surat Ulu (*ghincung*) ada 9 (Sembilan)<sup>137</sup>, yakni sebagai berikut:

1. Titik dua dibawah disebut jinah berbunyi A
2. Titik satu dibawah kebitan berbunyi U
3. Titik satu atas disebut lawab berbunyi I

---

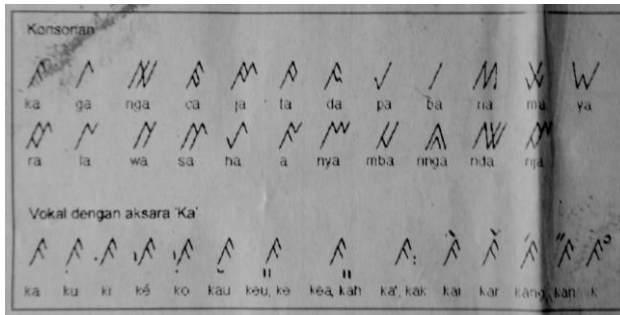
<sup>135</sup> Sutiono Mahdi, *Bahasa Besemah, Bandung: Uvula Press, 2002.*

<sup>136</sup> Satarudin Tjik Olah, *Sang Kancil Melanglang Ghimbe*, Pagaralam: Dinas Budpar, 2010.

<sup>137</sup> *Ibid.*,

4. Titik dua atas disebut jinahan berbunyi AN.
5. Garis lurus dari atas kebawah disebut jungkuk berbunyi AR.
6. Garis satu miring di atas disebut tulang berbunyi AI
7. Titik satu dibawah kiri disebut tulang berbunyi AU
8. Titik satu diatas kiri disebut tulang berbunyi ANG
9. Lingkaran kecil disebelah kanan disebut munuh (tanda mati) menjadi huruf mati.

Penutur bahasa Besemah juga memiliki logat, yakni ciri pengucapan atau pelafalan dari suatu masyarakat pemakai bahasa. Sebagai contoh orang Besemah mengucapkan kata mereka menjadi *merika*, meja dilafalkan *mija*. Dalam bahasa Besemah tidak kenal konsonan x, f, e, z, o. Sebagai pengganti huruf F digunaka huruf P, huruf Z dengan menggunakan huruf J atau S danb huruf U, E dengan huruf I, serta X diganti huruf K.<sup>138</sup>



**Gambar. 12.** Aksara *Ghincung*  
Sumber: Koleksi Pagaralam Pos

Karya sastra menurut Kosasih (1991) memiliki fungsi rekreatif dan didaktif. Sedangkan menurut Hutomo (1991) fungsi sastra juga berfungsi 1) sistem proyeksi, 2) pengesahan kebudayaan, 3) sebagai alat pemaksa berlakunya norma-norma sosial, 4), sebagai alat pendidikan, 5) untuk memberikan suatu jalan yang dibenarkan oleh masyarakat agar lebih superior daripada orang lain, 6) untuk memberikan seseorang jalan dibenarkan masyarakat agar dia dapat mencela orang lain, 7) sebagai alat untuk memprotes ketidakadilan dalam masyarakat dan 8) untuk melarikan diri dari himpitan hidup

<sup>138</sup> Ety Suspa, *op.cit.*, hal. 22.

atau dengan kata lain berfungsi sebagai hiburan.<sup>139</sup> Karya sastra juga merefleksikan mengenai realitas sosial dan budaya masyarakat yang digambarkan dalam karya tersebut pada kurun waktu tertentu.

Orang Besemah juga memiliki karya budaya yang adiluhung dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi harkat dan martabat orang Besemah. Kebudayaan dalam pengertian disini mengacu kepada tiga wujud kebudayaan menurut Konejtaraningrat, yakni kebudayaan sebagai wujud yakni suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma dan aturan. Selanjutnya sebagai wujud dari aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat sereta wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Karya sastra<sup>140</sup>, yang merupakan khazanah budaya orang orang Besemah, antara lain :

1. Mantra
2. Pantun
3. Rejung
4. Guritan
5. Tadut
6. Fabel (cerita binatang)
7. Peribahasa dan Ungkapan (Petata-Petiti)

#### 1. Mantra

Mantra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti perkataan atau ucapan yang memiliki kekuatan gaib, baik untuk keperluan penyembuhan penyakit, mendatangkan kekuatan, kekebalan ataupun mencelakai orang. Jenis matra yang dikenal dalam tradisi orang Besemah sudah mendapat pengaruh Islam. Ciri mantra yang telah diwarnai ajaran Islam, yakni adanya kalimat syahadat dalam mantra, beberapa contoh mantra yang mendapat pengaruh ajaran Islam, misalnya, 1) *mangke kenal* (agar lebih kebal), ...*Manik alah ragam Muhammad, gendum tiade terebuke*, maknanya pegang kata-kata Allah dan Muhammad dengan teguh, maka tidak akan hancur apabila dipukul, 2) *manke jeme injiq* (supaya orang suka),..... *Siar rembun bunge ketibe, manis mate urang seliwer alam terpandang kepadaku haq katenya alah* ( indah mata semua orang akan memandang kepadaku. Benar kata Allah).

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, hal. 5

<sup>140</sup> *Ibid.*, hal. 28.

## 2) Pantun

Orang Besemah juga mengenal pantun, ciri khas pantun Besemah penuh dengan perumpaan dan makna kiasan. Pantun Besemah *baghi* tidak langsung pada tujuan pada sasaran, akan tetapi menggunakan kalimat sindiran dan perumpaan. Disini beberapa ciri khas pantun Besemah, antara lain;

1. Menggunakan bahasa Besemah
2. Satu bait terdiri dari 4 baris
3. Satu baris terdiri dari 4 kata atau lebih
4. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran
5. Baris ketiga dan keempat merupakan isi
6. Pantun Besemah menggunakan kata-kata kiasan, perumpaan dan sindiran

Contoh pantun bahasa Besemah, dibawah ini:

*Anaq badaq luput ka malam*  
*Keluarga mati dipinggir sawah*  
*Dide ndaq takut gelumbang dalam*  
*Luang kadirentas nga jerambah*

( Anak badak dilepaskan malam)  
(Keluarga mati di pinggir sawah)  
(Tak perlu takut gelombnag besar)  
(Sungai diberi jalan pintas dengan jembatan)

Dimasa lampau pantun dipakai oleh bujang-gadis saat beramah tamah atau *begarihan* pada acara-acara tertentu. Pada masa itu seorang bujang dan gadis harus mempunyai kemampuan berpantun untuk menarik simpati dari orang yang disukainya. Secara umum dalam tradisi besemah pada zaman dahulu pantau dipergunakan dalam beberapa aktifitas budaya, seperti, pertama, pada acara meminang gadis (*menuweghi rasan*) atau meminang gadis, dimana pada acara ini kedua belah pihak bercicara dengan berbalas pantun. Kedua, pantun Besemah digunakan pada kegiatan adat *begarihi atau* beramah tamah untuk perkenalan dengan gadis atau bujang. Dalam acara begarih biasanya orang tua masing-masing bertindak sebagai jenannng atau pendamping, dan ketiga, pantun Besemah dipakai pada

acara pernikahan, yakni pada saat tari Keok. Seorang gadis diminta salah satu bujang dalam acara tersebut, sang gadis berpantun kepada sang bujang dan setelah selesai berpantun sang gadis akan menari, selanjutnya kesempatan membalas pantun diberikan pada sibujang. Contoh pantun Besemah untuk acara bujang-gadis (Cik Olah, 2010) seperti dibawah ini:

*Tuhun kayiq mbataq tangguq  
Nanguqi seghesiq ngu seluang  
Amu adding maq nian angguq  
Ibarat beringin dimuke lawang*

(Turun ke air membawa bakul)  
(Menangkap ikan seghesik dan seluang)  
(Kalau adik memang mau sombong)  
(Seperti beringin di depan gapura)

### 3) Rejung

Tradisi sastra lisan lainnya di Besemah, adalah Berejung yakni seni melantunkan syair dan pantun yang diiringi dengan gitar. Sampai saat ini berejung masih bertahan di daerah ini. Berejung pada dasarnya adalah seni yang menggabungkan antara seni musik dan sastra. Dilihat dari pementasannya, penggunaan gitar pada kesenian berejung ada 2 macam yakni, rejung gitar tunggal (1 gitar) dan berejung dengan 2 gita. Secara kultural digunakan baik oleh laki-laki maupun perempuan sebagai sarana untuk beramah-tamah dan perkenalan.

Cerita yang didendangkan dalam berejung bertemakan tentang kehidupan manusia, dari soal cinta, kesedihan, kebahagiaan dan lainnya. Irama rejung akan mengalir dan disesuaikan dengan tema nyanyian, demikian pula jika berejung tentang kebahagiaan, maka alunan musik terdengar bahagia. Cara berejung tergantung dengan syair dan pantun pula, jika pantun bersahutan, maka orang yang berjung akan bersahutan pula, demikian pula sebaliknya.

### 4) Guritan

Guritan adalah seni sastra yang menuturkan atau menceritakan sejarah, kerajaan, percintaan dan budaya. Seni guritan di Besemah

diambang kepunahan, sekilas seni memiliki kemiripan dengan seni tadut. Guritan dilantunkan dengan berbagai nada, dimana pada biasanya pelan, pada pertengahan nada intonasi ada yang pelan, dicepatkan dan datar. Guritan biasanya disampaikan oleh kaum laki-laki dengan cara duduk bersila diatas tikar. Ciri-ciri guritan biasanya bertema tentang cerita sejarah dari masa kerajaan, masa penjajahan hingga Indonesia merdeka. Sebagai sebuah karya sastra, geguritan tidak dikenal pengarang atau penciptanya (anonym). Suara yang indah akan mempengaruhi suasana penceritaan geguritan, selanjutnya modal utama dari seniman geguritan adalah suara merdu dan nafas panjang.

### 5) Tadut

Tadut merupakan sastra tutur Besemah, yang berhubungan dengan cara mempelajari agama, terutama ajaran agama Islam. Tadut merupakan jenis sastra puisi, kata tadut berasal dari bahasa Arab, yang memiliki arti pengulangan atau berulang-ulang. Tadut dipergunakan sebagai sarana untuk kegiatan penyebaran ajaran Islam kepada penduduk Besemah oleh para ulama atau mubalig.

Pada masa lampau dilakukan oleh mereka yang memiliki pengetahuan agama mumpuni, biasanya para petadut adalah orang yang mahir dan paham kitab kuning. Lazimnya tadut didahului oleh guru ngaji, yang selanjutnya dilanjutkan oleh murid-muridnya. Isi Tadut berisi tentang ajaran agama Islam, seperti Rukun Iman, Rukun Islam dan lainnya, sedangkan tadut pada masa sekarang berupa adab, kritik sosial, nasihat, peringatan dan humor, dibawa contoh Tadut yang berkaitan dengan ajaran Islam dan Tadut Kontemporer:

#### - Tadut Rukun Iman

*Adepun rukun iman ade enam parekare  
Paretame, parecaye kepede Allah Ta'ala  
Keduwe, parecaye kepede Malaikat  
Ketige, parecaye kepede rasul Allah  
Keempat, parecaye kepede kitab Allah  
Kelime, parecaye kepede aghi kiamat  
Keenam, parecaye kepede tekedirNye*

#### - Tadut Rukun Islam

*Rukun Islam ade lime*

*Paretame, syahadat mengucap dengan sungguh  
Laa illa haillallah Muhammad Rasul Allah  
Keduwe, menegaqka sembahyang lime wektu  
Ketige, puwase bulan remedun  
Keempat, mbayar sekat nga peterah  
Kelime, naiq aji ke baitullah*

- Tadut Kontemporer  
*Anaq ghuse ngentaq-ngentaq  
Mati ditinggang li deghian  
Jangan dikire nyawe gi besaq  
Janji Tuhan belum keruan*

#### 6) Andai-Andai (*Fabel*)

Andai-andai merupakan jenis karya sastra yang mirip dengan *fabel*, yakni ceita dimana tokoh-tokohnya semua berasal dari binatang yang berperan layaknya manusia. Binatang-binatang tersebut dapat berbicara, makan-minum dan berkeluarga seperti manusia. Niali utama dari karya sastra banyak mengandung nilai edukasi. Salah tokoh binatang yang dalam karya sastra andai-andai di Besemah, adalah kancil (sejenis pelanduk) menjadi tokoh utamanya. Sebagai sastra tutur, andai- andai lebih menarik bila dituturkan dari orang yang ahli mendongeng atau dituturkan langsung. Andai-andai di Besemah yang cukup dikenal adalah '*Kancil Melanglang Ghimbe*'.

#### 7) Peribahasa dan Ungkapan (*Petata-Petiti*)

Peribahasa adalah kelompok kata yang menggunakan bahasa yang mengandung pesan-pesan yang dapat diteladani. Masyarakat Melayu memiliki kekayaan dalam peribahasa. Dalam khazanah sastra Melayu peribahasa merupakan karya sastra yang masih dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Peribahasa (*pebase*) di pergunakan oleh masyarakat Besemah, terutama dikalangan generasi tua untuk berkomunikasi. Beberapa peribahasa di Besemah, ada yang berisi tentang perumpaan, nasihat dan prinsip hidup, dibawah ini beberapa peribahasa yang dikenal luas oleh orang Besemah<sup>141</sup>, antara lain:

<sup>141</sup> Dikutip dari Satarudin Cik Olah, *Petata-Petiti dan Pepatah serta Pribahasa*, naskah yang belum diterbitkan, tanpa tahun.



- *Luk setue ndepat baning.*

Artinya seekor macan menemukan kura-kura, hendak digigit kulit kura-kura amat keras karena kura-kura dalam keadaan bahaya menarik kepala dan kakinya kedalam sehingga tempurung belakangnya saja yang nampak macan dalam keadaan kebingungan.

Arti kiasannya diumpamakan kepada seseorang yang tidak memiliki kemampuan atau keahlian untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan sehingga dalam keadaan bingung dan termenung sehingga pekerjaan tidak dilaksanakan, habis habis dengan keluhan "bagaimana ini bagaimana itu, wah bikin susah orang saja yang kasih kerja ini.

- *Luk ngapakah tuai.*

Artinya tua (ani-ani) untuk memotong padi dibuat untuk memotong padi dibuat untuk memotong kayu atau bambu sehingga tidak kunjung putus.

Arti kiasannya diumpamakan pada seseorang yang bukan profesinya mengerjakan suatu pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut tidak kunjung selesai yang akhirnya berantakan.

- *Nunggu resie mbedang ulagh, pembedang jangan patah ulagh dibedang jangan mati, tanah dibedang jangan telembang.*

Artinya Pemukul ular jangan patah ular dipukul jangan mati, tanah dipukul jangan terlekek.

Arti kiasannya tindakan seorang yang arif bijaksana; umpamanya dalam menyelesaikan suatu khusus/pertikaian/perkara, diselesaikan secara kekeluargaan dengan rukun dan damai tidak merugikan masing pihak dan pejabat yang berwenang tidak kehilangan wibawa, sehingga kerukunan hidup tetap berjalan dengan baik dan harmonis.

- *Luk pungkut ulu tulong.*

Artinya pungkut nama ikan yang hidup disumber mata air atau kubangan, perasaannya dialah yang paling berkuasa sehingga segala tindak tanduknya segalanya otoriter semaunya saja.

Arti kiasannya dalam suatu wilayah pemukiman yang terisolir, ketua atau pimpinannya merasa sangat gagah dan berkuasa sehingga tidak mengindahkan kepentingan anak buahnya, segalanya dikerjakan kemauannya saja tidak sekali-kali mengindahkan kepentingan orang banyak.

- *Luk bekatak bawah sayak.*

Artinya *bekatak* (kodok) terkurung dibawah sayak atau tempurung keadaannya gelap gulita dan sempit, perasaanya (kodok) itu bahwa seluas tempurung itulah dunia ini tidak tahu sama sekali katak/kodok itu bahwa diluar tempurung itu dunia terbentang luas dengan cahaya yang terang benderang.

Arti kiasannya diumpamakan kepada seseorang yang tinggal disuatu tempat yang terpencil jauh dari keramaian hubunganpun tidak ada, maka yang bersangkutan merasa bahwa dunia ini adalah sekitar lingkaran yang terjangkau oleh matanya tidak tahu ia bahwa dunia ini tidak terkirakan luasnya, ditengah luasnya dunia itu terdapat bermacam keramaian dan beraneka ragam sarana dan fasilitas kehidupan manusia.

- *Sembak ndepat sangsile ghungkat.*

Artinya seseorang menemukan papaya roboh, sehingga buahnya yang lebat berhamburan dan yang menemukan tak menghiraukan apa-apa lagi memunguti buahnya padahal bukan penemu yang menanamnya.

Arti kiasannya di ibaratkan kepada sekelompok masyarakat disuatu tempat memenjarah barang-barang milik umum atau milik Negara sehingga siapa saja yang ingin terus saja mengambil seenaknya tanpa menghiraukan siapa yang punya.

- *Piawang mecah timbe*

Artinya *piawang* adalah sebutan kepada seorang yang ahli dalam menaklukkan binatang berbisa (Sejenis lebah) pada pohon yang tinggi untuk mengambil madu timba (dulang) tempat menampung masin madu. Bila timbe dipecahkan berantakanlah manis madu yang diperolehnya.

Arti kiasannya diumpamakan kepada seseorang yang jadi panutan masyarakat atau orang yang menetapkan segala

ketentuan, tiba-tiba dialah yang melanggar ketentuan itu dan ketetapan atau hukum yang belaku menjadi rusak atau menjadi cacat.

- *Luluk kemaghau kejut ujang.*

Artinya pada musim kemarau udara dan tanah dalam keadaan kering dan gersang, apabila ditebar hujan tanah menjadi basah secara mendadak sehingga tanah yang retak dan gersang tadi menjadi amblas dan terjadilah tanah longsor yang menimbulkan bahaya, bencana banjir dan sebagainya.

Arti kiasannya diibaratkan pada seseorang yang sudah menderita kesusahan yang lama, tiba-tiba mengalami perubahan mendadak (orang miskin kaya mendadak) sehingga perasaannya juga mendadak berubah bahkan sudah lupa akan asal (lupa daratan).

- *Linggang macanan ati kambing*

Artinya watak dan perangai seperti harimau, namun hatinya seperti kambing.

Arti kiasannya diibaratkan kepada seseorang yang sikap dan pembawaannya, perangainya seperti harimau gagah perkasa dapat dibilang hebat namun mentalnya/ nyalinya sangat lemah dan pengecut serta tidak bertanggung jawab.

- *Nunggu resie lang buas, narap jauh makan dikuku.*

Artinya elang yang bas selalu mengintai bintang mangsanya (binatang —binatang kecil) bila dilihat dari atas ada mangsa elang secepat kilat menyambar mangsanya yang tajam setelah dapat langsung dibawanya terbang untuk dimakan.

Arti kiasannya diibaratkan kepada seorang penguasa yang selalu memeras dan menindas bahayanya dengan tidak memandang hubungan kolejal terhadap bawahannya anak buahnya.

- *Nunggu resie setue ghabuk, mpuk buas dik makan anak, nde kecil diumaikan nde besak diipuki.*

Artinya *setue* = harimau, *ghabuk* = warna bulu yang sudah tua, harimau yang sudah tua umumnya buas walau bagaimanapun tidak

makan anak, anak yang kecil diberi makan dan anak yang besar dipelihara dan dididik.

Arti kiasannya diibaratkan kepada seorang pembesar/pimpinan walau bagaimana keras disiplinya tetap berhati baik, tidak akan menjerumuskan anak buahnya yang kecil dibimbing dan yang besar diarahkan sehingga terjalannya hirarsi kerja yang harmonis.

- *Mintak sisik nga keli.*

Artinya Keli ikan lele yang tidak mempunyai sisik, mintak sisik ikan keli tidak mungkin akan diberinya karena memang tidak punya.

Arti kiasannya meminta sesuatu kepada orang-orang yang tidak punya (mintak bantuan kepada orang miskin).

- *Nambak gunung ngarami laut.*

Artinya gunung sudah merupakan sebuah gundukan tanah yang besar dan tinggi walau tidak ditambah memang sudah tinggi, begitu pula laut airnya yang asin walau tidak diberi garam memang sudah asin.

Arti kiasannya memberi sedekah pada orang kaya atau membantu orang yang sudah kuat dan mampu, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang percuma.

- *Kesian nga ratu.*

Artinya merasa kasihan kepada orang yang berkuasa dan kaya

Arti kiasannya beribah hati dengan orang yang hidup bahagia sejahtera. Sifat perasaan demikian tak patut dilakukan.

- *Ayik dik keghuh ikan dapat.*

Artinya Air tetap jernih dan tentang ikan di tangkap dapat.

Arti kiasannya diumpamakan pada seseorang yang penuh kebijakannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

- *Betuah menjadi buah dik betuah bunge saje.*

Artinya bila bertuah menjadi buah bila tidak bertuah memang bunga.

Arti kiasannya bila angan-angan atau rencana tercapai adalah nasib baik, bila tidak tercapai apa boleh buat.

- *Lum bepalu lah gemeludak la bepalu gemelinte.*

Artinya belum memukulkan palu sudah gaduh setelah dipalu liat terbata-bata.

Arti kiasannya diibaratkan dengan suatu musyawarah, sebelum rapat amat ruwet setelah rapat sangat alot.

- *Gegighik teghujak.*

Artinya mengorek kuping tertusuk kedalam setidaknya terasa sakit.

Arti kiasannya suatu pekerjaan yang pada mulanya dianggap ringan, setelah dikerjakan banyak sekali kesulitannya namun masih juga diselesaikan walaupun terasa berat.

- *Kambing mati tede dik ghulih.*

Artinya memotong seekor kambing sebagai persembahan namun permintaan tidak diperoleh.

Arti kiasannya diumpamakan kepada seseorang yang meminta pertolongan kepada seseorang untuk suatu kepentingan dengan memberikan suatu imbalan namun permintaan tidak berhasil.

- *Kerali naik tiang, kijang masuk saput.*

Artinya Ikan kerali naik kerumah dan kijang masuk kedalam selimut.

Arti kiasannya Sesuatu yang sangat diharapkan datang dengan sendirinya, atau datang rezeki yang tak terduga.

- *Sembak cucup ngene puyuh, kate cucup aku ngene kate puyuh aku belindap.*

Artinya alat perangkap untuk menangkap puyuh merasa mendapat burung puyuh, sedang puyuh merasa mendapat rumah.

Arti kiasannya ibarat seseorang yang mendapat pertolongan sedang seorang lagi mendapat bantuan sehingga keduanya sama-sama menikmati perbuatan tersebut.

- *Luk batu umban kelubuk.*

Artinya seperti batu jatuh kedalam sungai tidak meninggalkan bekas dan tanda-tanda (hilang lenyap).

Arti kiasannya sesuatu yang hilang tiada meninggalkan bekas tanpa jejak.

- *Luk hung campur keghangan.*

Artinya seperti siput campur kerikil digoncang dia ikut tergoncang namun untuk dimasak kerikil ditinggalkan.

Arti kiasannya dalam suatu pemilihan atau penyaringan bagi yang memenuhi persyaratan diterima yang tidak memenuhi persyaratan disisihkan.

- *Ngaitkah mas ke ekok setue.*

Artinya menempelkan emas pada ekor macan/harimau bila hendak diambil sudah pasti akan diterkamnya.

- *Ngurupkah sawah nga pelang pengunian.*

Artinya sebidang sawah yang luas ditukar dengan tanah tempat pesemaian.

Arti kiasannya menukarkan suatu barang yang tidak seimbangan besar atau banyaknya perbuatan itu sangat merugikan.

- *Besulap malam tige puluh, dimane pajam sulap disitu badah temalam.* Artinya membawa obor di malam yang gelap gulita dimana obor padam disitulah bermalam.

Arti kiasannya melaksanakan sesuatu pekerjaan dengan bahan, modal hanya sampai disitulah akhir pekerjaan.

- *Lah iligh mangke mudik la karam mangke betimbe.*

Artinya sudah jauh hanyut baru hendak mengudik sungai, sudah karam baru hendak menimba air /dalam perahu.

Arti kiasannya setelah selesai suatu pekerjaan tetapi tidak berhasil baru hendak berusaha agar mencapai hasil yang diharapkan.

- *Luk keghakap naik batu, idup dindak mati sedut.*

Artinya sirih yang tumbuh diatas batu hidup enggan mati tak mau.

Arti kiasannya seseorang yang keasaan bidupnya sangat sengsara dan menderita sekali hidupnya.

- *Dang duduk meraut ghanjau kebile ncagak ndedak jarak.*

Artinya sedang duduk meraut bamboo untuk ranjau bila berdiri meninjau/ mengawasi musuh.

Arti kiasannya seseorang yang tiada hentinya melakukan pekerjaan tanpa istirahat.

- *Galak diajak linang digamit.*

Artinya seseorang yang amat gemar akan sesuatu lalu ditawarkan tentu sangat senang sekali, juga orang yang suka atau cinta tau-tau disenggol tentu sangat bergairah sekali.

Arti kiasannya seseorang yang mengidam-idamkan sesuatu maka yang bersangkutan ditawarkan sudah pasti sangat antusias. Begitu pula seorang jejaka yang mencintai seorang gadis tiba-tiba disentuh oleh gadis tersebut sudah tentu jejaka dimaksud sangat menggelora sekali cintainya.

- *Tunak mbak le pang bawah batang mbak lepu bawah batu.*

Artinya *le pang* = temun dibawah batang mantap sekali letaknya tidak akan berpindah tempatnya, begitu pula ikan lepu yang berdiam dibawah batu tidak mau pindah walau bagaimanapun riak dan arus air.

Arti kiasannya diibaratkan kepada seseorang yang tidak banyak ulah segala gerak tindakannya mantap sekali.

- *Duduk batu bediri kayu sedikit dik tau lelingaran.*

Artinya duduk seperti batu tegak seperti kayu tidak dapat bergerak kemana-mana

Arti kiasannya seseorang harus bermukim disuatu tempat tidak boleh berpindah-pindah.

- *Sembak sembilu dalam ayik*

Artinya sembilu yang terendam air bila terpijak tidak terasa melukai karena diinginnya.

Arti kiasannya tingkah laku seseorang yang lembut lemah gemulai sehingga apabila ia melakukan sesuatu tindakan tidak terasa oleh orang lain.

- *Sembak ayik lambung kuku.*

Artinya setitis air yang melekat pada ujung kuku mudah sekali terlepas, dengan sekali lenting saja terbuang.

- *Luk nanak dalam belange.*

Artinya memasak dalam kualiti seada isinya kelihatan

Arti kiasannya suatu perbuatan dari seseorang yang secara terang tak ada yang tersembunyi (tidak ada rahasia).

- *Luk tenggaghe kudak memae.*

Artinya seperti kandang ayam dimasuki musang hiruk pikuk semua isinya berantakan.

Arti kiasannya ibarat sebuah negeri dimasuki musuh sedang isinya (warganya) tidak mengadakan perlawanan sehingga menjadi porak poranda.

- *Luk ayam takutkah elang.*

Artinya ayam bila melihat burung elang sangat ketakutan sehingga lari puntang panting

Arti kiasannya seseorang yang takut akan sesuatu sehingga tak dapat berbuat apa-apa bahkan semua pekerjaan bias menjadi gagal.

- *Pacak-pacak tupai melompat kebile kina gi kah nemunye umban.*

Artinya sepandai-pandai tupai melompat masih juga jatuh ketanah.

Arti kiasannya sepintar-pintar seseorang menyembunyikan suatu perbuatan atau dengan cerdik melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum akhirnya terjebak juga oleh penegak hukum.

- *Bakal badak dik kah tinggal kebile-bile kah diulanginye.*



Artinya jalan yang dilewati badan tidak akan tinggal disuatu saat akan dilaluinya lagi.

Arti kiasannya diibaratkan pada suatu keluarga yang berketurunan bangsawan atau penguasa yang terputus memegang kekuasaan (merintah) pada suatu saat akan timbul kembali jabatan sebagai penguasa itu dipangku kembali oleh anak cucunya.

- *Sawah dangkal pelunyah kambing banyaklah tinjak tingga licak.*

Artinya menawat sawah dengan seekor kambing sedang tanahnya keras terjal, banyaklah jejak kambing daripada lumpur.

Arti kiasannya sesuatu pekerjaan yang dilakukan dengan alat yang kurang memadai (tidak mencukupi syarat) hasilnya tidak akan baik sesuai harapan.

Arti kiasannya pendahulu atau pimpinan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau mengemban suatu tugas pekerjaan harus mengamankan jalannya suatu perencanaan dan mengatur strategi medan sehingga semua pelaksanaan pekerjaan mencapai harapan sesuai rencana. Bagi yang ditengah-tengah agar tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan tugas pekerjaan dan sepatutnya menjadi pemandu semua pelaksanaan program serta bagi yang kemudian harus mampu atau sanggup menghimpun semua sisa pekerjaan untuk diselesaikan sesuai dengan perencanaan.

- *Janji nunggu kate betaruh.*

Artinya apabila mengucapkan suatu janji harus ditepati, bila dimungkiri akan mengundang resiko dan bertanggung jawab yang berat apabila mengucapkan kata-kata baik itu perintah ataupun ketentuan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Arti kiasannya sudah cukup jelas

- *Ende ughang ende ughang, endi dighi ende dighi, ndepat mbalik rame beghagih.*

Artinya hak orang adalah kepunyaan orang lain, hak sendiri adalah milik sendiri dan hak orang lain jangan diganggu dan hak sendiri dipertahankan.

Apabila menemukan suatu barang yang bukan kepunyaan kita patut dikembalikan pada yang berhak atau pemiliknya.

Apabila ada sesuatu yang menjadi milik bersama agar dibagi secara adil.

Arti kiasannya dalam suatu wilayah pemukiman masyarakat umpama disuatu desa setiap warga memiliki hak masing-masing yang harus dipelihara dan dipertahankan, maka oleh sebab itu setiap hak dari seseorang tidak boleh diganggu. Apabila menemukan suatu barang yang tercecar atau tertinggal disuatu tempat maka yang menemukannya wajib mengembalikannya kepada yang punya apabila tidak diketahui yang punya maka diumumkan menurut cara yang lazim dilakukan ditempat itu agar yang punya mengambil kembali barang tersebut pada yang menemukannya.

Apabila ada sesuatu yang menjadi milik bersama maka dilakukan pembagian secara adil.

- *Dik tau ngiluki jangan merusak jadinya.*

Artinya bila seseorang yang belum mampu melakukan suatu perbuatan yang bermanfaat bagi orang banyak, janganlah hendaknya melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan terhadap kepentingan orang banyak dan setiap kepentingan orang banyak hendaklah dipelihara dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

- *Bidakah kene urung nga dik tau urung.*

Artinya segala pekerjaan yang menyangkut kepentingan kehidupan sehari-hari, agar diselenggarakan menurut urutan kepentingannya (skala prioritasnya).

- *Cakap mbak kucing luputkah malam.*

Artinya seperti kucing dilepaskan pada malam hari, lari kesana menerkam kembali tidak sedikitpun merasa canggung.

Arti kiasannya diibaratkan pada seseorang yang mempunyai banyak pengetahuan memiliki kemampuan yang tinggi sehingga serba pandai dan cekatan melaksanakan sesuatu pekerjaan

- *Nggantangi asap.*

Artinya menakani asap tentu tidak akan dapat

Arti kiasannya melakukan sesuatu perbuatan yang sia-sia (mubazir) tentu tak ada manfaatnya.

- *Meghaup nggan siku ati tangan dik beisi.*

Artinya mengambil sesuatu dengan kedua belah tangan sampai kesiku tapi telapak tangan kosong.

Arti kiasannya seseorang yang diserahkan mengumpulkan barang sebanyak-banyaknya tapi tidak tertampung dengan baik akhirnya hasilnya nihil.

- *Besak berudu dikubangan besak buaye dimuare*

Artinya besarnya berudu/ kecibung hanya didalamnya kubangan, buaya besarnya di muara atau lautan.

Arti kiasannya diibaratkan pada seseorang yang memimpin suatu satuan masyarakat disuatu tempat umpama bagi pimpinan yang terendah niulai kebesarannya ditempat terkecil itu sama besarnya dengan nilai kebesar pimpinan ditempat yang lebih atas. Contoh kepala unit pemukiman yang terkecil seperti desa atau dusun, nilai kebesaran/wibawa kepala dusun dalam dusun yang bersangkutan sama dengan nilai kebesaran kepala daerah propinsi untuk propinsi yang bersangkutan.

- *Berete idaran diwe merintah kendak jeme banyak.*

Artinya memiliki harta kekayaan adalah ketetapan yang maha kuasa menjadi penguasa atau memangku kekuasaan adalah atas persetujuan orang banyak (masyarakat).

Arti kiasannya orang yang kehidupan sejatera atau berada adalah ketetapan atau kehendak yang maha kuasa sedang untuk menjadi penguasa pemerintah adalah menurut kemufakatan orang banyak.

- *Amu pacak niti buih selamat badan keseberang.*

Artinya bila dapat berjalan diatas buih/air maka selamatlah sampai keseberang

Arti kiasannya bila seorang yang cukup arip bijaksana dan cerdas cendikia maka dalam kehidupannya selalu jaya terhindar dari segala mala petaka.

- *Luk nangkap belalang panduk, dibunuh mati endung dik dibunuh mati bapak.*

Artinya seperti menangkap belalang bila dibunuh mati ibu bila tidak dibunuh mati bapak.

Arti kiasannya melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan yang berakibat ganda, dilakukan satu akan mendapat bencana dilakukan yang satu lagi timbul bencana bagi yang lainnya pula.

- *Kedarat pajoh setue kayak pajuh buaye.*

Artinya didarat dimakan harimau diair dimakan buaya.

Arti kiasannya pada masa yang sedang genting atau dalam keadaan yang gawat/dalam suasana perang, oleh salah satu pihak diancam pihak lain juga mengancam.

- *Luk itik nga ayam.*

Artinya seperti itik dengan ayam, itik hidup diair sedangkan ayam hidup didarat.

Arti kiasannya dua orang yang lain-lain keinginan watak dan perilaku yang berbeda sehingga tidak menyatukan pendapat apalagi pekerjaan.

- *Bapak nyadap endung bedagang niuw.*

Artinya bapak menyadap enau mengambil nira untuk membuat gula sedang ibunya berjualan kelapa sudah tentu menjadi gula kelapa yang manis lagi gurih.

Arti kiasannya diibaratkan kepada seorang pemuda/jejaka atau seorang gadis yang orang tuanya berada berkecukupan.

- *Tuah mesang celake ayain padi masak tinggalkah kutan.*

Artinya bagi musang bertuah/beruntung sedangkan bagi ayam celaka, padi masak tinggal dipanen ditinggalkan pergi ke hutan.

Arti kiasannya ibarat seorang yang sedang mengalami nasib sial benar-benar tidak beruntung.

- *Mintak padi tengkiang penuh.*

Artinya lumbung pada penuh sesak dengan padi tapi meminta pada orang lain.

Arti kiasannya orang yang berada/ kaya memintak bantuan kepada orang yang tidak punya, perbuatan itu tergolong serakah.

- *Pancing tekait ase ngene.*

Artinya pancing/kail terkait pada ranting didalam air bila ditarik talinya akan membalas tarikan seolah-olah ditarik ikan.

Arti kiasannya suatu pekerjaan yang tidak mencapai sasaran/hasil yang diharapkan namun yang bersangkutan merasa bahwa pekenjaannya mengenai sasaran dan pekerjaannya tidak berhasil.

- *Sembak teteguk nga perenggi angkat.*

Artinya perenggi labu parang yang baru dikeluarkan dari wajan/panci tempat merebusnya dimakan sedang hangat-hangatnya tertelan, dikeluarkan tidak dapat lagi sedang panasnya menggelegak didalam perut.

Arti kiasannya sesuatu pekerjaan atau tindak perbuatan yang beresiko tinggi dan permasalahannya tidak terelakkan sehingga menimbulkan kepanikan yang ruwet.

- *Sembak nggaduh api pucuk mubungan.*

Artinya menaruh api diatas bubungan, sudah barang tentu kekhawatiran dan kecemasan yang mendebarkan menyelubungi seluruh tubuh.

Arti kiasannya seseorang yang memiliki sesuatu yang pada suatu saat akan menimbulkan permasalahan besar yang sulit untuk diselesaikan.

- *Pacak nebak kete belum pacan nerke lambung aris.*

Artinya pandai memahami kata yang belum diucapkan pandai menduga ucung tali jarring.

Arti kiasannya seorang yang pandai, cerdik cerdas tangkas, arib bijaksana.

- *Nyubuk pedu man kami dide kemane angin kami tau.*

Artinya dengan tidak melihat pedoman/ kompas dapat mengetahui arah angin.

Arti kiasannya seseorang yang mempunyai niat atau rencana untuk melaksanakan suatu tindakan perbuatan walaupun tidak diucapkan orang lain sudah tahu akan maksudnya.

- *Mane kendak nuju gale segale ragaman nuruti ati.*

Artinya semua keinginan terdapat segala permainan menurut kehendak hati.

Arti kiasannya semua pekerjaan berjalan dengan baik mulus dan lancar sesuai dengan rencana.

- *Luk buluh sise nggelumpai.*

Artinya seperti potongan-potongan bambu bekas membuat gelumpai cintang perinang berserakan.

Arti kiasannya suatu negeri atau kota yang hancur berantakan porak poranda biasanya terjadi karena baru selesai dilanda bencana alam atau bencana perang.

- *Ngupih basah nyeludang anyut.*

Artinya upih basah adalah karena mengemban keranjang untuk mengangkut tabung air setiap upih yang basah sudah pasti karena sudah alas untuk mengemban keranjang berisi air, sedangkan seludang yang hanyut juga basah kuyup biasanya membawa sampah untuk dihanyutkan atau dibuang.

Arti kiasannya seseorang yang melakukan semua jenis pekerjaan untuk majikan supaya mendapat balas kasihan sangat majikan.

- *Tiap nyughuki bawah bawah gaghang ii ade tu diambil.*

Artinya memasuki bawah beranda rumah karena ada yang diambil

Arti kiasannya seseorang yang mengabdikan diri kepada seseorang tentu ada yang diinginkannya dari seseorang itu.

- *Nggurak sembade bawah batang.*

Artinya membongkar sarang semut selempada sudah pasti akan dikerumuninya dan semuanya akan menggigit.

Arti kiasannya mengungkap suatu permasalahan atau suatu kasus yang terjadi secara berantai setelah diungkapkan, selesai satu tumbuh dua, selesai dua tumbuh tiga empat dan seterusnya.

- *Tikus dik mati kucing dik malu.*

Artinya tikus tidak mati kucing tidak malu.

Arti kiasannya menyelesaikan sesuatu masalah dengan seadil-adilnya dan penuh kebijakan sehingga masing-masing pihak merasa kecewa.

- *Ati ditelinge rupukan diikuk mate.*

Artinya hari atau perasaan dilobang telinga pikiran dibola mata.

Arti kiasannya seseorang yang tidak begitu jauh jangkauan pikirannya, pemikirannya singkat akalinya pendek sehingga ia tidak dapat sama sekali menganalisa semua permasalahan bahkan orangnya daya tangkapnya kurang simpul pemikirannya hanya tertumpu kepada pandangan benda-benda (materialistis).

- *Sembak unak belawan barut ade ngukut ade bepaut*

Artinya anak duri rotan bila mengait kain melekat teguh sekali, tak dapat dilepaskan begitu saja.

Arti kiasannya hubungan seseorang dengan seseorang amat erat sehingga tak dapat dipisahkan biasanya diibaratkan kepada hubungan cinta antar bujang gadis.

- *Luk ngulaki anak ayam.*

Artinya memasukkan anak ayam kedalam sebuah kotak atau tabung, dimasukkan satu keluar dua berapa dimasukkan keluar lagi sehingga menjadikan kejengkelan.

## PETATA PETITI

Amanat leluhur yang dituangkan dalam bentuk pepatah atau kiasan yang sifatnya adalah larangan dan perintah.

- *Jangan ngupung stue, jangan pekare nga pemerintah*

Artinya mengepung harimau sudah pasti kita akan celaka setidak-tidaknya diterkam dan dicakarnya bahkan bisa dibunuhnya.

Arti kiasannya perkara dengan pemerintah, tidak harapan akan menang dalam perkara karena segala sesuatu ketentuan dari pemerintah adalah hukum yang wajib ditaati.

▪ *Jangan nutuh dahan peningiran.*

Artinya dan tempat kita berpijak atau duduk dipotong sudah pasti kita akan terjatuh dan celaka.

Arti kiasannya merusak atau membuat /berlaku sehingga akan menghancurkan kehidupan kita yang akan mendatangkan kemelaratan.

▪ *Jangan nube ulu mandian*

Artinya menuba (meracun) satu anak sungai yang dihilirnya menjadi pemandian umum tentu akan mendatangkan bencana terhadap orang dan hewan ternak yang sudah barang tentu menimbulkan kerugian atau celaka bagi orang banyak.

Arti kiasannya melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan sumber kehidupan masyarakat ramai yang akibatnya sama-sama menderita.

▪ *Jangan manakah batu keluar*

Artinya dalam sebuah pertahanan atau benteng apabila melemparkan sesuatu dari dalam hal itu sudah pasti akan ketahuan oleh musuh sehingga musuh akan berusaha untuk mengadakan serangan.

Arti kiasannya bagi seseorang yang membeberkan keburukan atau aib dari lingkungan keluarga kepada umum maka orang akan menilai dan mengukur kelemahan kita sehingga mudah sekali terjadi perpecahan dalam suatu keluarga.

▪ *Jangan nepuk ayek didulang akan mercik muka sendiri.*

Artinya menepuk air didalam piring dihadapan kita sudah tentu airnya akan memercik kemuka sendiri.



Arti kiasannya seseorang yang membeberkan celaka atau aib anggota keluarga sendiri sudah tentu orang lain akan menilai bahwa kitalah yang paling buruk.

▪ *Jangan merebe jalan*

Artinya jika menarok sejenis ranting kayu dari semak ditengah jalan umum, maka orang bila lewat dan kita sendiri tidak bisa melaluinya.

Arti kiasannya melakukan sesuatu perbuatan yang akan menimbulkan terhambatnya lalu lintas atau kelancarannya roda kehidupan masyarakat ramai tertutupnya jalan untuk mencapai kesejahteraan umum dan kita sendiri.

▪ *Jangan bundekah kere naik akar*

Artinya melakukan suatu perbuatan yang bersifat mengajak atau menganjurkan kera untuk menaiki akan yang menjalari sebuah pohon akan menimbulkan kerusakan atau kerugian.

Arti kiasannya seseorang yang menjadi panutan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sepatutnya maka akan diikuti oleh orang banyak yang akan menimbulkan suatu bencana atau kerugian.

▪ *Jangan menjujul rebe orang*

Artinya bila seseorang membakar tebasan orang lain maka nyala tidak akan terkendali, setiap kebun ada sekat-sekat anggokan rerumputan kering agar tidak apinya menjalar kekebun orang lain dan yang punya kebun mempunyai cara tersendiri untuk menyalakan kerugian orang lain, tetapi bila bukan yang punya membakamya asal bakar saja yang penting menyala entah akan merusak tanaman orang lain masa bodoh.

Arti kiasannya seseorang menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahan orang lain dengan tidak memandang untung ruginya apakah yang punya permasalahan keberatan atau ruginya apakah yang punya permasalahan keberatan atau tidak diputuskan saja hal ini tidak mustahil menimbulkan rasa tidak puas bagi yang punya permasalahan.

▪ *Jangan awak tue njujul punduk.*

Artinya orang membakar pondok (dangau) tempat berteduh sehingga anak cucu kehilangan tempat berlindung (berteduh) untuk selamanya.

Arti kiasannya seseorang yang dituakan dalam masyarakat (Sebagai pigur masyarakat) yang mengayomi orang banyak melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan rusaknya sendi kehidupan masyarakat sehingga hilangnya kepercayaan orang banyak terhadap dirinya.

▪ *Jangan munuh kecici pengetaman*

Artinya membunuh burung yang memakan hama padi yang lazim disebut semangi padi, akibatnya hama berkembang biak dan merusak tanaman padi sehingga tidak mendatangkan hasil (panen gagal) setiap melakukan hal tersebut adalah perbuatan yang mendatangkan kembali (pantangan) sedangkan membunuh kecici bukan pada waktu panen lagi dianggap kembali apalagi pada saat panen.

Arti kiasannya pada satu saat sedang melaksanakan pekerjaan yang memerlukan dukungan orang banyak (keja besar) dari seseorang tiba-tiba yang bersangkutan melakukan perbuatan yang merusak/menghancurkan tatanan kehidupan orang ramai sehingga masyarakat menilai yang bersangkutan tidak patut dipercayai lagi sehingga kerja besar yang bersangkutan menjadi gagal total.

▪ *Jangan mbunuh tikus njujul tengkiang.*

Artinya membunuh seekor tikus dengan memberi lumbung padi karena tikus bersarang dilumbung padi akibatnya lumbung berikutnya patah didalamnya terbakar habis dimana padi tersebut persediannya untuk permakan selama satu tahun oleh karena padi habis terbakar maka selama setahun penuh tidak ada yang akan dimakan.

Arti kiasannya dalam suatu wilayah pemukiman baik di desa maupun dikota ada suatu perhimpunan (organisasi) maka terdapatlah dalam tubuh perhimpunan tersebut beberapa oknum yang selalu merusak/ merugikan perhimpunan dimaksud oleh ketua atau pimpinan organisasi tersebut perhimpunan dibubarkan sehingga menimbulkan kerugian yang amat besar

seluruh masyarakat turut merasakan derita akibat dan perbuatan / tindakan dari pimpinannya itu.

- *Jangan nganak bencai luk kaghe ngumbut.*

Artinya *nganak benai* adalah menyerupai anak *bencai* (kera) bila sedang membuka pucuk tanaman (umbut) anak kera atau bencai saling berebutan sehingga menjadi rusaknya tanaman seperti padi dan lain sebagainya.

Arti kiasannya sekelompok masyarakat dalam sesuatu perbuatan yang berbentuk menerima sesuatu kebutuhan hajat hidup manusia tidak tertib (tidak bisa berdisiplin) sehingga saling berebutan sehingga tidak menyenangkan pandangan mata melihat perbuatan tersebut bahkan sering menimbulkan kerusakan terhadap barang-barang.

- *Jangan meraih punggow kehadapan.*

Artinya meraih *punggoe* (kayu yang telah mati) kehadapan sendiri bisa mendatangkan celaka bahkan bisa mati.

Arti kiasannya melakukan sesuatu tindakan yang diduga atau patut diduga akan menimbulkan bahaya pada diri sendiri.

- *Jangan memancing pirik umpan kebau, besaklah bie tinggah rasan*

Artinya bila memancing ikan kecil (*pirik*) pendapatnya tidak seberapa, sedang umpan pancinganya kerbau bebannya seratus ribu kali besarnya ikan *pirik* pekerjaan itu tidak seimbang akan menderita kerugian yang amat besar.

Arti kiasannya seseorang melakukan suatu pekerjaan atau membangun sesuatu dengan biaya yang berlipat ganda lebih besar dari kepentingan atau manfaatnya.

- *Jangan awak kecil duduk diluan, nyilap kemenyan bapang ade.*

Artinya setiap orang yang masih muda (kecil) seharusnya tidak duduk diluan (pojok tempat duduk orang yang dihormati) sedang membakar kemenyan seharusnya orang yang lebih tua, dalam suatu keluarga untuk membakar kemenyan itu adalah bapak.

Arti kiasannya seseorang yang melakukan suatu tindakan yang bukan hak dan kewenangannya atau mengambil alih tugas

wewenang orang yang lebih tinggi kekuasaannya. Hal itu akan menimbulkan suatu kesalahan yang berakibat buruk terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

▪ *Berangkekalah padang siangilah jalan kayak.*

Artinya pedang adalah alat senjata, yang fungsinya untuk berkelahi, supaya disarungkan agar menghentikan segala permusuhan, jalan kayak adalah jalan satapak yang menuju tempat pemandian umum, agar disiangi atau dibersihkan supaya orang melalui jalan tersebut tidak khawatir akan digigit binatang berbisa atau tersandung kaki atau akan terpelisit dan terjatuh.

Arti kiasannya hentikanlah semua silang sengketa atau gontok-gontokan berbuatlah sebanyak-banyaknya amal bhakti selesai untuk kesejahteraan masyarakat.

▪ *Gawe ughang gawe dighi, aguk berdusun jangan di tinggali, anak umang ditunakkan kerbai jande dibiyekeh.*

Artinya pekerjaan orang lain adalah pekerjaan kita juga dan pekerjaan orang banyak didalam dusun harus kita ikuti, anak yatim piatu dicarikan jodoh sedang perempuan janda digotong royongi pekerjaannya.

Arti kiasannya kita sebagai anggota masyarakat berkewajiban melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, sedang anak yatim piatu dan perempuan janda adalah menjadi beban dan tanggung jawab masyarakat dusun yang bersangkutan.

▪ *Lughus tali membelah papan, bekelawai bemuanai.*

Artinya rentangan tali atau benang adalah untuk membelah papan supaya lurus sehingga tidak melenceng kekiri atau kekanan. Bekelawai bemuanai, maksudnya ada kelawai disatu sisi dan ada muanai disatu sisi tidak membaur samaunya.

Arti kiasannya lurus tali artinya garis pemisah antara wanita dan pria dalam suatu keluarga ada rasa singkuh dan sundi sehingga campur aduk antara saudara perempuan dan saudara laki- laki tabu.

- *Bejalan niti rebah kucing mengukut benang selambe betiti di jambat sebatang.*

Artinya berjalan melalui jalan/bakal/runung yang dilalui berulang-ulang oleh orang banyak dan berpegang menelusuri sehelai benang yang terbentang serta meniti sebuah jambat atau titian sepotong bambu atau kayu.

Arti kiasannya segala perbuatan dan tindak tanduk dalam menjalani kehidupan sehari-hari harus mematuhi segala ketentuan hukum.

- *Kebile dulu cakap ngapah yamow kebile tangan jangan menghintal kebile kedian galam bebentalan.*

Artinya apabila berjalan lebih dulu/terdahulu agar sanggup menerpah butiran titisan embun atau hujan yang melekat pada dedaunan.

Arti kiasannya apabila berjalan ditengah agar tidak menghambat gerakan orang lain sebaiknya mendorong, bagi yang didepan dan menarik yang dibelakang, bagi yang berjalan kemudian agar mengamankan semua peralatan teman-teman.

# BAB IV

## OTONOMI DAERAH DAN KEBANGKITAN KULTURAL

### A. Otonomi Daerah dan Sejarah Berdirinya Kota Pagaralam

Otonomi daerah dan demokrasi merupakan isu utama yang mewarnai dunia politik di Indonesia. Sebagian ilmuwan sosial seperti Antlov, Aspinall, Feally dan Usman, menyebut proses desentralisasi di Indonesia disamakan dengan proses demokratisasi dan kebangkitan masyarakat sipil.<sup>142</sup> Keruntuhan rezim Orde Baru, memberikan bukti bahwa pemerintahan Orde Baru yang terkesan solid dan tergoyahkan, ternyata menciptakan ketahanan dan kemapanan yang bersifat semu belaka. Sebab ketika rezim ini tumbang, pada saat yang sama muncul pula politik identitas etnis, keagamaan dan daerah yang jauh lebih dominan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu hal yang mencolok dari kecenderungan proses desentralisasi, yakni terbukanya daerah baru -pemekaran-baik dalam rangka memenuhi keterjangkauan akses ekonomi dan politik serta pemerataan pembangunan di daerah. Pada gilirannya proses pemekaran daerah baru tidak hanya berlandaskan kalkulasi sosial ekonomi-politik belaka, tetapi juga bertumpu pada argumentasi dan ikatan kolektif etnis beserta atribut yang didalamnya.

---

<sup>142</sup> Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, 'Pendahuluan' dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed), *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: KITLV-Jakarta dan YOI, 2007, hal. 2.

Sejarah terbentuknya Kota Pagaralam<sup>143</sup> tidak lepas dari arus perubahan politik nasional, dimana reformasi di daerah menjadi ruang penting bagi usaha mewujudkan sebuah kota yang diinginkan oleh warga Pagaralam. Berdasarkan UUD 1945, yakni pasal 18, dimana spirit dari pasal ini adalah adanya kewajiban pemerintah untuk membuka keran politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Artinya desentralisasi menjadi titik penting bagi penyelenggaraan otonomi daerah di tingkat dua, baik berupa kota maupun kabupaten yang semula berada dibawah otorisasi pemerintah propinsi. Ada beberapa pertimbangan dalam kerangka otonomi daerah, yakni dimensi politis dan dimensi administratif. Tiga prinsip dasar yang menjadi penting otonomi daerah yakni nyata, bertanggung jawab dan dinamis.

Kota Pagaralam sebelum menjadi daerah otonom merupakan daerah *onderafdeeling Pasemah Lenden* yang berpusat di Bandar, Dempo Selatan tahun 1908. Selanjutnya pada masa pendudukan Jepang kedudukan *onderafdeeling Pasemah Lenden* dipertahankan. Hingga kemudian namanya diganti menjadi daerah Kawedanan Tanah Pasemah pada awal Indonesia merdeka. Kemudian berdasarkan UU N0.2 tahun 1963, status kawedanan dihapuskan dan dibentuklah 4 kecamatan yang meliputi, kecamatan Tanjung Sakti, Tanjung Tebat-Kota Agung dan Pagaralam.

Pemekaran Kota Pagaralam yang terlepas dari daerah induknya -Kabupaten Lahat- selain karena pertimbangan sosial ekonomi dan layanan administrasi pemerintahan. Hal yang perlu juga diperhatikan disini, bahwa usaha menjadikan Kota Pagaralam menjadi wilayah yang mandiri juga menyertakan adanya argumentasi realitas kesejarahan dan mengakomodir kepentingan elit lokal. Slogan Kota Pagaralam 'Besemah Kota Perjuangan' menjadi salah satu simbol dan sekaligus penanda bahwa Kota Pagaralam memiliki klaim historis serta sekaligus sebagai usaha membangun konstruksi identitas sosial orang Besemah di Kota Pagaralam.

Sejak dihapuskan kawedanan Pagaralam, maka Pagaralam menjadi wilayah setingkat kecamatan dengan wilayah lima

---

<sup>143</sup> Mengenai proses terbentuknya Kota Pagaralam, uraian yang bersifat kronologis bisa dibaca dalam karangan Jazulis Kuris, *Kronologis Pembentukan Pagar Alam (Sebuah Reportase)*, Pagaralam: Pemko Pagaralam, 2012.

kecamatan yang ada saat ini, yakni daerah Dempo Selatan, Dempo Utara, Dempo Tengah, Pagaralam Selatan dan Pagaralam Utara, dimana Jazuli Kuris merupakan camat terkahir Kecamatan Pagarlam, seblum berubah menjadi Kota Pagarlam. Beberapa pejabat (camat) yang pernah memimpin kecamatan Pagaralam antara lain;

- Harun Nangcik (1967).
- Kailani Ibrahim (1967-1970)
- Zamzami akhmad (1970-1973)
- Mansyur Akhir (1973-1978)
- A. Kori Basri (1978-1980)
- M. Yusak Saleh (1980-1982)
- A. Raswan Bakri ((1982-1984)
- Rasyid Pajim (1984-1989)
- H. A. Wani Marie (1989-1991)
- Jazuli Kuris (1991-2001)

Kota Pagaralam yang semula hanya merupakan daerah setingkat kecamatan di Kabupaten Lahat. Usulan untuk menjadikan daerah Pagaralam menjadi daerah otonom telah muncul sejak tahun 1966, yakni setelah adanya kesepakatan dan keinginan dari para tokoh masyarakat di bekas Kawedanan Tanah untuk membentuk 'kabupaten Besemah'. Namun keinginan tersebut tidak terlaksana. Pembentukan kota Pagaralam justru dipicu oleh kekalahan Partai Golkar didaerah ini. Kekalahan Partai Golkar di Pagaralama pada tahun 1982, mendorong salah satu elit lokal Pagaralam, yakni H. Kapten Sanap pulang dari Palembang.<sup>144</sup> Kekhawatiran bahwa kekalahan Partai Golkar pada gilirannya menjadikan pembangunan Kota Pagaralam menjadi tersendat. Maka pada tahun 1984, berkumpul 8 (delapan) tokoh masyarakat Pagaralam, yakni; H.A. Rais Saleh, H.M. Juni . H. Rais Hikmah, H. Sarim Manaf, H. Abdul Zahri, H. Yuni Cikmang, H. Nang Din dan H. Dimiyati Rais untuk melakukan perubahan dan mendorong partisipasi masyarakat Pagaralam untuk memenangkan Partai Golkar pada pemilu selanjutnya. Sehingga pada tahun 1987, Partai Golkar merebut 80% pemilih di Kota Pagaralam dan pada gilirannya upaya untuk mewujudkan Pagaralam sebagai kota adiministratif berjalan sukses pada tahun 1992. Selama proses pembentukan Pagaralam,

---

<sup>144</sup> *Ibid.*, hal. 11-12.



semau biaya pengurusan administrasi serta lainnya, berasal dari masyarakat Pagaram, dan juga dari sumbangan para pedagang adan pengusaha Pagaram.

Proses pembentukan kecamatan Pagaram menjadi Kota Administratif tidak lepas dari proses birokrasi yang diawali dengan dibentuknya sebuah panitia, yang mengirimkan permohonan kepada Menteri dalam Negeri pada tanggal 15 April 1987, pada masa Camat Pagaram dijabat oleh A. Wani Mario. Selain itu adanya dukungan politik yang diperoleh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat melalui surat ke Gubernur Sumatera Selatan tanggal 6 Juni 1987.

Dukungan dari tokoh masyarakat, Camat Pagaram, DPRD Kabupaten Lahat dan Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri dari bulan April-Agustus 1987, maka setelah memakan waktu selama 4 tahun, pada tahun 1991, yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1991 tentang pembentukan Kota Administarsi Pagaram dan pemekaran wilayah kecamatan Pagaram, menjadi kecamatan Pagaram Utara, Pagaram Selatan, Dempo Utara dan Dempo Selatan yang dibawah administratif Kabupaten Lahat. Kota Administratif Pagaram secara resmi dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri yang saat itu dijabat oleh Rudini pada tanggal 15 Januari 1992, ditandai dengan pelantikan Musrin Yasak sebagai Walikota Administratif Pagaram yang pertama, dan sekaligus menetapkan Kota Pagaram sebagai Kota Perjuangan.

Pada awal periode reformasi-1998- pergolakan politik dan demonstrasi di tanah air juga berpengaruh dalam dinamika politik lokal di Kotif Pagaram. Pada masa terbentuk Kotif Pagaram, walikota dijabat oleh Musrin Yusak, tetapa tidak lama kemudian Musrin Yusak digantikan pula oleh Husli Marik. Pada tahun 1999 Jazuli Kuris menggantikan posisi Husli Marik sebagai Walikota Kotif Pagaram.

Sejak otonomi daerah sebagaimana amant UU No.22 tahun 1999, di Indonesia tidak lagi dikenal istilah kota administratif (kotif). Karena pembagian wilayah propinsi hanya mengenal daerah kabupaten dan kota. Setidaknya terdapat 43 kota di Indonesia yang berstatus sebagai kota administratif, salah satunya Kota Pagaram. Berdasarkan PP No.63 tahun 1991 tentang pembentuk Kotif, selain

Pagaralam, kotif lainnya di Propinsi Sumatera Selatan adalah Kota Prabumulih, Lubuk Linggau dan Baturaja.

Inisiatif pembentukan Pagaralam menjadi Kota Otonom, diawali pada 5 Januari 1999, yakni bermula dari surat pengajuan dari H.A. Rais Saleh, pemimpin Muhammadiyah bersama 26 tokoh masyarakat lainnya menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur Sumatera Selatan, Rosihad Arsyad, disertai tembusannya kepada Bupati Lahat, Ketua DPRD Lahat dan Walikota Pagaralam.

Beberapa tokoh masyarakat Pagaralam yang ikut mendukung usula Rais Saleh, antara lain: M. Yuhan Wahid (mantan padsisrah Alun Dua), Suraji Bejo (manatan Kepala Kampung Pasar Pagaralam). Djali Husin (mantan pasirah Pelang Kenidai), Duadji (mantan pasirah Lubuk Buntahk) dan Amir Terim (tokoh masyarakat Muara Siban). Selain itu dukungan juga datang dari perwakilan organisasi masyarakat, yakni Dahlan Mansyur (LVRI), Alkodri (Ketua DPD KNPI) dan ketua perkumpulan warga Minangkabau di Pagaralam (Sopian Rasad). Partai politik yang di Pagaralam memberikan dukungan politik untuk usulan pembentukan Kota Otonom Pagaralam, seperti Rohib Senakin (Golkar), Suharindi (PAN), Buchari (PDI), Suraji (PDIP), Bustomi (Partai NU), Samiri (PKP), Muslimin (PNI), Rasman (PKB), A.Sughan (Partai Keadilana), Sofyan Samin dan Ahmad Edi Yusuf (PBB), Tajri (PID), Julimin (PR), Bahtiar Azis (PDR), Arisno (PBN), Kasmun (PPI), Ujang Afriansyah (PKM) serta M. Nasir (PPP).

Rosihan Arsyad sebagai gubernur Sumatera Selatan merespon secara bijak usulan pembentukan Kota Pagaralam menjadi kota otonom dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) gubernur dengan no: 070/SK/IV/1999, tanggal 13 Februari 1999. Aspirasi perubahan status kota Pagaralam menunjukkan titik terang setelah terbentuknya Panitia Rencana Pembentukan Kota Pagaralam (PRPKP), yang diketuai oleh H. A. Rais Saleh, Zainal Arifin (wakil sekretaris) dan Bendahara Edy Kusumah dengan anggota H. Amir Hamzah Atip (tokoh masyarakat), H. M. Amin (purnawirawan). H. M. Juni (Pengusaha), H. K. Dahlan Mansyur (LVRI), Z. Abidin Salim (Pepabri), M. saman Loear (Pemangku Adat), Sofiyon Rasad (tokoh masyarakat) serta Yantoho (pengusaha) sebagai seksi penggalangan dana.

Proses administrasi terus berjalan dengan pembentukan tim kerja peningkatan status Kotif Pagaram menjadi Kotamadya berdasarkan SK NO. 135/63/SK/ 1999 dari Bupati Lahat (Harunata) tanggal 17 Maret 1999. Dukungan secara politik juga diberikan oleh DPRD Kota Pagaram, No.32/SK/DPRD, tanggal 31 Maret 1999 tentang persetujuan peningkatan status Kotif Pagaram menjadi Kotamadya Pagaram. Pemerintah propinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan atas rencana ini, bahkan gubernur Rosihan Arsyad mengirim surat ke Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri mengenai usulan rencana pemekaran daerah tingkat II yakni dari 10 menjadi 13, serta peningkatan 4 kota administratif, termasuk Pagaram tanggal 12 April 1999. Dan secara marathon gubernur Rosyihan Arsad, pada tanggal 3 Mei 1999 mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah tingkat II di Propinsi Sumatera Selatan, yang isinya meminta agar proses dan pengusulan pemekaran daerah hendaknya mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta persetujuan dari pihak legislatif (DPRD) dari daerah masing-masing.

Untuk melengkapi persyaratan administrasi, bupati Lahat, Harunata memberikan surat-surat penting, termasuk mengirimkan daftar isian tentang rencana pembentukan Kotamadya Pagaram. Dalam daftar isian juga dicantumkan mengenai kelayakan administrasi dan pertimbangan ekonomi serta lainnya, seperti letak geografis, luas wilayah serta data kependudukannya. Dari hasil laporan tim analisis pembentukan kota Otonom Pagaram kepada Bupati Lahat, Harunata tanggal 18 Mei 1999, menyebutkan bahwa Kota Pagaram layak ditingkat statusnya.

Dukungan secara politik secara konsisten dan berkesinambungan diberikan oleh pemerintah propinsi Sumatera Selatan untuk mendukung perubahan status kota Pagaram dengan mengirimkan kepada pemerintah pusat, yakni presiden RI melalui Kemendagri pada tanggal 9 Juni 1999. Hal sama ditunjukkan oleh DPR dengan mengeluarkan SK No. 10/SK/DPRD/ 1999 mengenai persetujuan awal untuk anggaran operasional Kota Pagaram yakni sebesar Rp. 500 juta melalui APBD Kabupaten Lahat, yang ditindaklanjuti dengan SK Bupati Lahat No. 135/138/SK/1999. Pemerintah propinsi juga ikut membantu penyediaan dana perubahan status Kota Pagaram, dengan memberikan dana bantuan awal

pemekaran sebesar Rp. 400 juta berdasarkan SK No.466/SK/I/1999, tanggal 4 Agustus 1999.

Dukungan dari arus bawah, yakni masyarakat Pagaralam terlihat nyata, terutama keterlibatan para pengusaha dan pedagang kopi (*robusta*) dan juga penduduk pemilik lahan kopi. Pada tanggal 17 Mei 1999, tokoh masyarakat dan para pedagang kopi berkumpul di rumah dinas walikota (Husli Marik), bersama unsur Muspida, seperti Danramil, Kapolsek dan Kacab Kejaksaan Negeri Pagaralam serta dua Camat Pagaralam Selatan dan Pagaralam Utara. Isi pertemuan tersebut adalah dukungan pemerintah dan masyarakat untuk merealisasikan perubahan status Kota Pagaralam. Beberapa tokoh masyarakat seperti H. Abdul Rais Saleh and Dimiyati Rais bersama Bupati Harunata dan Walikota Husli Marik berkomitmen mendukung keinginan masyarakat dan pemerintah untuk merubah ststus Kota Pagaralam.

Organisasi Pedagang Kopi Pagaralam (OPKI) dibentuk sebagai hasil musyawarah para pedagang untuk mengumpulkan dana bagi pembentukan Kota Otonom Pagaralam. Organisasi ini dipimpin oleh Amidin, sekeretaris Dimiyati rais yang beranggotakan 80 orang pedagang kopi serat sebagai penasehatnya adalah Walikota Admistratif Pagaralam. Dan sebagai hasil keputusan musyawarah OPKI menghasilkan 5 keputusan penting yakni sebagai berikut:

- 1) Kepengurusan OPKI segera disahkan dengan diterbitkan legalitas formal dari Walikota Pagaralam.
- 2) OPKI memberikan sumbangan secara sukarela dengan nilai nomina Rp. 50 ribu untuk setiap truk dan Rp. 100 ribu untuk Fuso untuk mendukung peningkatan status Kota Pagaralam.
- 3) Bagi anggota OPKI yang mematuhi ketentuan hasil musyawarah akan dikenai sanksi.
- 4) Tata cara dan tehnis pengumpulan dana bantuan dari anggota OPKI ditentukan kemudian.
- 5) Para camat diharapkan menyampaikan informasi ini kepada para kepala desa, agar warga desa juga menyumbang sebanyak 1 kg per hektar daris etiap pemilik kebun kopi.

Dukungan pendanaan dari organisasi para pedagang kopi dan masyarakat tertuang dalam SK Bupati Lahat, No. 6 tahun 1999, tanggal 4 Juni 1999 tentang dokumen penerimaan sumbangan suka

rela dari warga untuk kepentingan perubahan status kota Pagaralam. Selain dukungan pendanaan untuk kegiatan perubahan status Kota Pagaralam, warga juga menyiapkan lahan untuk lokasi perkantoran, yakni seluas 43 hektar yang terletak di Desa Sandar Kecamatan Dempo, yang tertera dari dokumen dari Husli Marik (walikotif) kepada Bupati Lahat, tanggal 1 Juni 1999.

Tahun 1999 menjadi tahun krusial bagi Kota Administratif Pagaralam, jika Kotif Pagaralam mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat menjadi Kota Otonomi, tetapi seandainya tidak mampu Kotif Pagaralam dikembalikan ke Kabupaten Lahat sebagai kabupaten induknya. Gubernur Sumsel akhirnya mengirimkan surat ke Kemdagri pada tanggal 19 April 2000, tentang rencana pemekaran 10 kabupaten kota di Sumsel dan peningkatan status kota administratif menjadi kota otonom, termasuk Pagaralam. Secara ringkas surat ini meminta kejelasan mengenai usulan pemekaran di wilayah Sumsel yang dirasakan belum ada kejelasan. Padahal kebutuhan pemekaran dan peningkatan status kotif menjadi kota otonomi sudah ditunggu masyarakat, maka Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) bersama Komisi II DPR segera menurunkan timnya ke daerah untuk meninjau dan melakukan kajian mengenai keadaan Kotif Pagaralam.

Menjawab kerisauan bergai pihak di daerah yang meminta pemerintah pusat untuk segera menindaklanjuti usulan peningkatan status kotif Pagaralam menjadi kota otonom. Maka pada tanggal 16 November 2000 bertempat Departemen Dalam Negeri, khususnya pada bagian Otonomi Daerah, diadakan rapat yang membahas tentang pengajuan usul serta kelengkapan persyaratan peningkatan status dari kotif menjadi kota otonom. Rapat dihadiri oleh H. Djazuli Kuris, walikota Kotif Pagaralam, serta pihak terkait dari Depdagri. Hal utama yang dibahas dalam rapat ini adalah pemebntukan dan peningkatan status daerah didasarkan atas pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya bagi terselenggarannya otonomin daerah.

Mekanisme pengusulan pemekaran dan peningkatan status kota, yakni permintaan usulan dari kepala daerah telah mendapat persetujuan dari DPRD setempat, selanjutnya pemerintah pusat melalui DPOD melakukan kajian beerdasarkan kelengkapan

administrasi dan beberapa pertimbangan menyangkut kemampuan ekonomi hingga aspek-aspek lain yang dianggap penting untuk terselenggaranya pemerintahan. Berdasarkan hasil penelaah dan juga kajian lapangan maka tugas DPOD menyampaikan pertimbangan untuk penyusunan rancangan undang-undang yang mengatur pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran daerah otonom.

Respon positif atas perjuangan panjang keinginan warga dan pemerintah Kotif Pagaralam mulai terlihat jelas dengan keluarnya surat dari pemerintah pusat (depdagri) kepada gubernur Sumsel tanggal 20 Mei 2000, yang diparaf oleh Dirjen Pemerintah Umum, Dr. Ir. Sudarsono, H, MA. Dalam surat tanggapan mengenai permintaan dan usulan pemekaran dari 10 menjadi 12 kabupaten kota dan peningkatan status kotif menjadi kota otonom termasuk Pagaralam, meminta semua kepala daerah yang daerahnya dimekarkan atau ditingkatkan statusnya dari kotif menjadi kota otonom agar menjalankannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pemekaran wilayah dan peningkatan status kotif menjadi kota otonom.

Proses politik berjalan dengan cepat, ketika pihak DPRD propinsi Sumsel melalui SK DPRD No. 04 tahun 2000 tentang dukungan dan persetujuan terhadap rencana pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Bangka dan peningkatan status kotif menjadi kota otonom kepada Kotif Prabumulih, Lubuk Linggau, Pagaralam dan Baturaja. Rekomendasi politik dari DPRD propinsi Sumsel, dipertegas lagi dengan persetujuan bantahan awal bagi kabupaten hasil pemekaran dan peningkatan status kotif menjadi kota otonom melalui SK DPR Propinsi Sumsel NO. 05 tahun 2000 tanggal 7 Juni 2000.

Rekomendasi dari pihak legislatif propinsi Sumsel, ditindaklanjuti oleh Bupati Lahat, Harunata dengan menyampaikn surat rekomendasi kepada gubernur Sumsel mengenai rekomendasi peningkatan status Kotif Pagaralam menjadi Daerah Otonom Pagaralam, yang intinya bahwa telah ketersediaan lahan untuk lokasi perkantoran rencana kota Pagaralam dengan luas 24 hektar, yang berasal dari hibah masyarakat. Surat rekomendasi ini juga sekaligus menjadi salah satu kelengkapan berkas pengusulan peningkatan status kotif Pagaralam menjadi kota otonom Pagaralam.

Perjalanan sejarah kotif Pagaralam menjadi Kota Otonom, tidak lepas ingatan H. A. Fachri MM, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Lahat pada era dimana masyarakat Pagaralam besersama-sama pemkab Kabupaten Lahat, Kotif Pagaralam dan pemerintah propinsi Sumatera Selatan bersama unsure muspida dan DPRD masing-masing daerah bahu-membahu mewujudkan impian menjadi kotif Pagaraalam menjadi kota otonom. A. Fahri menceritakan kisah penting dan heroik dari masyarakat Pagaralam sebagaimana kutipan dibawah ini:

‘Dukungan dari pemerintah Kabupaten Lahat untuk menjadikan Pagaralam sebagai Kota Otonom, ditunjukkan dengan memberikan kemudian bagi proses administrasi pengusulan Kota Pagaralam menjadi Kota Otonom. Saat itu, karena saya menjabat Sekwilda, semua berkas usulan pembentukan kota yang masuk di meja kerja saya, tidak pernah ditahan. Hal ini untuk memberikan kemudahan dalam adminsitrase, karena pada dasarnya Pagaralam layak untuk ditingkatkan statusnya.’

Gerakan politik dan sosial untuk mendukung pemerintahan dalam usaha meningkatkan perubahan status Kotif Pagaralam menjadi Kota Otonom kembali digulirkan segenap elemen masyarakat Pagaralam. Pada tahun 2000 terbentuklah Presidium Pembentukan Kota Pagaralam (PPKP). Pembentukan presedeium merupakan perwujudan dari dukungan nyata dari masyarakat Pagaralam kepada pemerintah Kotif Pagaralam yang saat itu dipimpin oleh H. Djazuli Kuris. Inisiatif munculnya presidium ini, setelah H. Suakimi, BA, putra Pagaralam yang menjadi pegawai Depdagri mengusulkan kepada walikotif Djazuli Kuris agar membuat sebuah organisasi yang dapat membantu mempercepat pengusulan pemebntukan Kota Otonom Pagaralam, sebagaimana dilakukan di beberapa daerah lain yang mengusulkan pembentukan kota atau kabiupaten serta propinsi baru. Atas dasar saran ini, maka Djazuli Kuris meminta kepada sejumlah pemuda Pagarlam untuk membentuk presidium tersebut.

PPKP terbentuk dengan pembina H. Djazuli Kuris, H. Rais Saleh, H. Dimyati Rais, H. Sainal Robi dan H. Juni. Ketua presidium dikeytuai oleh Alkhodri, dengan wakilnya Herdiansyah Bana, sekretaris, Yopi Mayolana dan bendahara Ahmad Damrah. Sedangkan anggotanya melibatkan semua elemen pemuda, masyarakat dan PNS di Kotif

Pagaralam. Pentingnya pembentukan PPKP, sebagaimana disampaikan oleh Wakil ketua presidium yang saat itu dijabat oleh H. Herdiansyah, seorang tokoh pemuda Pagaralam dan pernah menjadi anggota DPRD dari PAN, sebagaimana kutipan dibawah ini:

‘ Presidium kota dibentuk untuk membantu Walikotif dalam mengumpulkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan untuk mendirikan Kota Pagaralam, serta turut serta dalam hal melakukan lobi-lobi di pemerintahan pusat, untuk menyakinkan bahwa Pagaralam layak menjadi Kota Otonom. Tidak itu saja, hal terpenting yakni PPKP juga bertugas mendesak pemerintah untuk segera menetapkan Pagaralam sebagai Kota Otonom’.

Contoh nyata kegiatan dari PPKP seperti diceritakan oleh Herdiansyah Bana, yakni pada saat kunjungan tim penilai dari Dirjen PUMDA Depdagri bersama akademisi UI, tim presidium berusaha menyakinkan bahwa dukungan dan keinginan kuat dari masyarakat Pagaralam untuk menjadikan Kotif Pagaralam menjadi Kota Otonom Pagaralam. Tim presidium juga menyatakan kepada tim penilai pusat, bahwa selain dukungan masyarakat, keinginan meningkatkan perubahan status, juga dengan pertimbangan logis bahwa secara fisik, ekonomi beserta infrastrukturnya penduduknya telah siap dan layak untuk ditingkatkan statusnya. Bahkan kepada salah satu anggota tim penilai, yakni ekono Aviliani, tim presidium berusaha menyakinkan dan menyakinkan tim penilai, bahwa kotif Pagaralam layak menjadi Kota Otonom.

Perjuangan untuk merealisasikan perubahan status Kotif Pagaralam menjadi Kota Otonom, tidak selamanya berjalan lancar. Ada kalanya juga mengalami kendala akibat perubahan situasi politik dan perubahan struktur organisasi, terutama setelah perubahan nomenkatur Dirjen PUOD ke Ditjen PUMDA Depdagri dan terbentuknya DPOD, ada kekhawatiran berkas usulan peningkatan status Kotif Pagaralam menjadi Kota Otonom bersama Kotif Lubuk Linggau dan Prabumulih belum diterima oleh Dirjen PUMDA. Informasi tentang hal ini diketahui oleh Walikotif Djazuli Kuris bersama Walikotif Lubuk Linggau (Riduan Effendi) dan perwakilan Kotif Prabumulih, Ahmad Rohimza pada pemerintahan Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2000 di Depok.



Adanya informasi bahwa berkas pengusulan tersebut hilang atau tercecer membuat cemas Walikota Djazuli Kuris, untuk itu beliau mengambil tindakan penting yakni dengan menyampaikan kelengkapan data usulan dan menyerahkan langsung kepada Ditejen PUMDA serta Direktur APEKSI di Jakarta, mengingat batas usulan ini samapai tanggal 7 Mei 2000. Suasana yang tidak menentu ini mendorong Walikota Prabumulih, Lubuk Linggau dan Pagaralam melaporkan secara kondisi ini kepada bupati Lahat pada pertemuan APEKSI di Depok serta menyampaikan dan memnita Tim Pengkajian Kelayakan Ditjue PUMDA Depdagri untuk melakukan kajian dan analisis kelayakan kotif ditingkatkan statsunya menjadi Kota Otonom. Bahkan Dzauli Kuris sempat menekan dan menyandera staf PUMDA, Situmorang hingga semua berkas uusan pembentukan kota Pagaralam sebagai Kota Otonom dinyatkan lengkap sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dan lagi-lagi faktor keberuntungan menaungi tujuan mulai walikotif Pagaralam, Djazuli Kuris, berkat hubungan baik serta dukungan dari salah seorang putra Pagaralam yang bekerja di Depdagri, H. Sukaimi, semua kecemasan secara pelan pasti bisa diatasi. Semua berkas yang hilang diganti ditelusuri kembali kemudian difoto copy ulang. Dan atas bantuan Sukaimi sendiri tak lain adalah saudara kandung dari Djazuli Kuris, semau berkas kelengkapan pengusulan Kotif menjadi Kota Otonom, termasuk Lubul Linggau, Prabumulih dan Pagaralam berhasil dilengkapi dan lengkap pemberkasannya.

Akhirnya jerih payah perjuangan semua elemen masyarakat Pagaralam menuai hasil yang melegakan semua pihak. Pada tanggal 7 Februari 2001, Sekwilda Kabupaten Lahat memerintahkan kepada Walokotif Pagaralam, Djazuli Kuris untuk memenuhi undangan dari Ditjen PUMDA dan DPOD guna rencana pemantapan paparan dan pengakjain DPOD di Jakarta. Dalam pertemuan dengan Ditjen PUMDA yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2001 dihasilkan beberapa kesepakatan, yakni sebagai tindak lanjut bagi pengusulan perubahan status Kotif menjadi Kota Otonom Pagaralam, diminta menyediakan dana partisipasi dengan nilai Rp. 30 juta. Berhubung kas daerah Kabupaten lahat dalam keadaan kosong, maka bendahara pemkab Lahat, Hariyanto yang juga bendahara Masjid Bandar Agung Lahat berinisiatif meminjam uang kas Masjid sesuai dengan nilai yang

diminta oleh pihak pusat. Kesepakatan berikutnya bahwa rencana pemaparan akan dilaksanakan tanggal 19 Februari 2001, dan kesepakatan penting lainnya, bahwa dalam paparan tersebut harus dihadiri oleh perwakilan tokoh masyarakat.

Kesepakatan diatas menjadi angin segar bagi rencana perubahan status Kotif pagaralam menjadi Kota Otonom Pagaralam. Pada akhir Februari 2001 bertempat di Hotel Mercure Jakarta ekspos dan dan pengkajian usulan pembentukan Kota Pagaralam digelar. Pada acara penting ini selain pihak Direjen PUMDA, juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting untuk membahas dan mengkaji kelayakan Pgaralam ditingkatkan menjadi Kota Otonom, salah satunya anggota tim penilai, Dr. Aviliani. Dari Pagaralam hadir Walikotif Djazuli Kuris, tokoh masyarakat Pagaralam, H. Rais Saleh dan tokoh pemuda Al Khodri, perwakilan ini semua dipimoin oleh Bupati lahat, H. Herunata.

Jalan kearah status baru Kotif Pagaralam mulai lancer, setelah memlalui ber bagai upaya dan pendekatan serta sekaligus melengkapi data-data pendukung mengenai kelyakan Kota Administratif Pagaralam menjadi Kota Otonom. Dalam sesi Tanya jawab pada pemaparan mengenai usulan peningkatan status KOTif Pagaralam menjadi Kota Otono Pagaralam. Pihak pengusul menyampaikan kepada tim penilai DPOD dan Dirjen PUMDA, bahwa perngusualn perubahan status ini merupakan aspirasi dari masyarakat dan juga didukung pula oleh pihak legislatif, baik dari DPRD Kabupaten Lahat maupun propinsi Sumatera Selatan. Usulan tersebut juga merupakan salah satu dari kebijakan gubernur dan tidak ada tekanan dan juga janji politik dari pihak luar maupun pemerintah. Hal ini dikuatkan dengan hasil penelitian khusus dari Tim Penilaian yang dibentuk oleh Bupati Lahat.

Beberapa pertimbangan penting dalam paparan dan diskusi antara pihak pengusul perubahan Kotif Pagaralam menjadi Kota Otonom, antara lain, faktor kesejarahan, dimana Kotif Pagaralam, pernah mengkadi Kawedanan Tanah Pasemah samapai terbitnya PP No.63 tentang pembentukan Kotif Pagaralam. Selanjutnya jumlah penduduk Pagaralam pada saat pengajuan usulan menjadi Kota Otonom Pagaralam tahun 2001 berjumlah 115.000, artinya sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi kota otonom yakni batas jumlah minimal penduduknya 100.000 saja. Kemudian sector

ekonomi pendukung bagi kelayakan sebagai kota otonom, yaitu keberadaan pasar Sehepati Sehendi dan Dempo Permai dipandang potensial untuk mendukung rencana perubahan ini dan selain itu letak geografis Pagaralam yang terpisah dengan ibu kota Kabupaten Lahat, juga menjadikan Pagaralam sangat strategis untuk dijadikan sebagai Kota Otonom. Dan yang paling mendasar adanya dukungan dan keterlibatan masyarakat baik dukungan secara politis dan juga ekonomi, yakni dalam pendanaan yang berasal dari pengusaha lopi dan juga rakyat pemilik kopi untuk mendukung kelancaran proses peningkatan status Kotif Pagaralam menjadi Kota Otonom Pagaralam. hal penting lainnya, yakni adanya beberapa masalah yang mendesak untuk segera dipenuhi, yakni pemenuhan sarana dan prasarana seiring dengan kemajuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, pertambahan penduduk yang menjadikan Kotif Pagaralam harus menjadi daerah otonom.

Keinginan masyarakat pemerintah dan masyarakat Pagaralam untuk mewujudkan sebagai Kota Otonom mulai mendekati kenyataan, setelah berhasil menyakinkan dalam pemamparan perlu Kotif Pagaralam ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonom Pagaralam. Walikota Pagaralam, H. Djazuli Kuris mengeluarkan SK No. 125/05/SK/ KOTIF-PGA/2001, tanggal 8 Februari 2001 mengenai Tim Rencana dan Pelaksana Peningkatan Status Kotif menjadi Kota Otonom Pagaralam, dengan penanggung jawab Walikota Pagaralam dibantu dari pihak muspida, PNS, tokoh pemuda dan masyarakat Pagaralam.

Persiapan penting lainnya menjelang disahkannya pembentukan Kota Otonom Pagaralam adalah pembuatan logo atau lambang Kota Pagaralam. Walikota H. Djazuli Kuris melalui sekretarisnya Zainal Arifin mengeluarkan surat No. 001/683/Kotif?PA/2001 tanggal 25 April 2001 mengundang semua lapisan masyarakat dari kalangan akademisi hingga masyarakat umum untuk mengikuti sayembara pembuatan logo atau lambang Kota Pagaralam. Tujuan diadakannya sayembara selain untuk menghimpun aspirasi dari masyarakat, juga melalui sayembara ini diperoleh lambang Kota Pagaralam yang mencerminkan identitas orang Besemah. Peserta sayembara dapat mengirimkan karya mereka ke pemerintahan Kotif Pagaralam melalui Bagian Tata Pemerintahan.

Pada akhirnya hari bersejarah yang dinantikan oleh pemerintah dan masyarakat Kotif Pagaralam tiba jua, pada tanggal 21 Juni 2001 bertempat di Ruang Sidang Paripurna Nusantara 1 DPR RI melalui pimpinan rapat sidang yang dipimpin oleh Wakil KETua DPR RI, Soetadjo Soerjogoeritno mensahkan secara resmi Kotif Pagaralam berubah menjadi Kota Pagaralam setelah mendengar dan mempelajari serta memepertimbangkan usulan peningkatn status Kotif Pagaralam menjadi Kota Otonom Pagaralam dari pihak Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sesuai dengan UU No, 8 tahun 2001.

Pengesahan perubahan status ini disambut gembira oleh segenap komponen masyarakat Pagaralam yang hadir di gedung DPR RI, seperti Ikatan Keluarga Besemah , H. Sakaimi Kuris, Jmi Alamsyah Putra, Imam Prabu, Bakti Chandra dan Rustam dan lainnya. Status perubahan Kotif Pagaralam menjadi Kota Otonom semakin sempurna, setelah dokumen peresmiannya disahkan oleh presiden RI, Abdurahman Wahid. Berdirinya Kota Pagarlam bersamaan pula dengan disahkannya Kota Padang Sidempuan, Tanjung Pinang, Kota Batu dan Bau-Bau. Dan pada tanggal yang berbeda disahkapn pula oleh DPR RI Kota Lubuk Linggau, Prabumulih, Tasikmalaya, Cimahi, Langsa dan Kota Singkawang.

Dengan disahkannya UU No. 8 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagaralam, gerak pembangunan semakin menemukan momentumnya, maka berdasrakan SK Menetri dalam Negeri No. 131.26-341 tahun 2001, tanggal 3 September 2001 tentang pengangkatan pejabat Walikota Pagaralam. berdasarkan legalitas hukum ini, maka H. Djazuli Kuris diangkat secara resmi oleh mendagri Hari Sabarno melauai Gubernur Suamtera Selatan H. Rosiah Arsyad bertempat di Gedung Juang Kota Pagaralam.

## **B. Politik Identitas dan Kebangkitan Kultural**

Secara teoritis politik identitas merupakan sesuatu yang bersifat hidup atau ada dalam setiap etnis, dimana keberadaannya bersifat laten dan potensial, dan sewaktu-waktu dapat muncul sebagai kekuatan dominan. Sedangkan secara empiris, politik identitas merupakan aktualisasi partisipasi politik yang yang terkontruksi dari akar budaya masyarakat setempat dan secara terus-menerus di internalisasikan didalam kebudayaan masyarakatnya dalam suatu jalinan interaksi sosial. Menurut Castells,

politik identitas merupakan partisipasi individual pada kehidupan sosial yang ditentukan oleh budaya dan psikologis seseorang.<sup>145</sup>

Castells juga menyebutkan adanya tiga bentukan pembangunan identitas, yakni identitas legitimitasi, identitas resisten dan identitas proyek<sup>146</sup>. Secara konseptual politik identitas muncul telah muncul jauh sebelum euforia reformasi. Bahkan menurut Henk S. Nordholt, politik identitas di Indonesia mulai menemukan bentuknya pada masa rezim Orde Baru berkuasa. Pengaturan dan pengontrolan negara atas warganya dilakukan sebagai cara untuk melemahkan politik etnisitas di Indonesia.<sup>147</sup>

Dengan diterapkannya otonomi daerah, sesungguhnya merupakan awal bagi lahirnya kembali sebuah masyarakat dengan segala dinamikanya. Kebangkitan kultural berjalan seiring dengan pranata hukum dan sosial yang diciptakan dan dibangun oleh pemerintah dengan dukungan masyarakat dan *stake holder* yang ada didalamnya menjadikan momentum kebangkitan kultural terlembagakan dan berjalan secara sistematis.

Dalam konteks tersebut, politik identitas dan kebangkitan kultural di Kota Pagaralam dibangun oleh adanya aktor utama (Jazuli Kuris) dan tokoh adat yang terorganisasi dalam Lembaga Adat Besemah Kota Pagaralam, dengan salah satu tokoh intelektualnya, yakni Satarudin Cik Olah serta putra Pagaralam yang ada diluar kota seperti Ahmad bastari Suan. Bersama koleganya, Mang Din (panggilan Satarudin) berusaha menghimpun dan menyusun kembali

---

<sup>145</sup> Sri Astuti Buchari, *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*, Jakarta: YOI, 2014, hal. 19.

<sup>146</sup> Identitas legitimitasi yaitu identitas yang diperkenalkan oleh sebuah institusi yang mendominasi suatu masyarakat untuk merasionalkan dan melanjutkan dominasinya terhadap aktor-aktor sosial, identitas resisten adalah proses pembentukan identitas oleh aktor-aktor sosial dalam posisi tertekan sebagai akibat adanya dominasi dan stereotype oleh pihak lain sehingga melahirkan resistensi dan identitas yang berbeda dari pihak yang kalah. Sedangkan identitas proyek merupakan suatu identitas dimana aktor-aktor sosial membentuk suatu identitas baru yang adapat menentukan posisi baru dalam masyarakat sekaligus mentransformasikan struktur masyarakat secara keseluruhan.

<sup>147</sup> Muhtar Habuddin, , 'Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal' dalam *Politik Identitas dalam Dinamika Politik di Berbagai Daerah di Indonesia*, Jurnal Renai, Kajian Politik Lokal dan Sosial Humaniora, Tahun IX No.2.Tahun 2009, Salatiga: Percik, hal. 43.

pranata adat dan budaya Besemah.<sup>148</sup> Selain mengenalkan khazanah lama, beberapa budaya lokal, seperti Tumenggung Citra Mirwan juga aktif menulis kembali karya sastra dan sejarah *Besemah* yang belum didokumentasikan secara tertulis,<sup>149</sup> Beberapa karya tulis ilmiah tentang Besemah beserta aspek budaya yang melingkupi juga dilakukan oleh mereka yang berasal lingkungan akademis, seperti karya Ahmad Bastari Suan dan Ety Suspa.<sup>150</sup>

Jazuli Kuris sebagai walikota pertama Kota Pagaralam dan selanjutnya dua periode menduduki jabatan walikota melalui pilkada, selain dikenal oleh masyarakat sebagai bapak pembangunan Kota Pagaralam. Jazuli Kuris menjadi inisiator dan kreator bagi pembentukan kembali spirit 'kultural' orang Besemah di Kota Pagaralam. Melalui kebijakan dan aparatur birokrasi yang dimilikinya berusaha 'membangkitkan kembali' identitas kultural orang Besemah, seperti pembangunan perkantoran Kota Pagaralam di Gunung Gare dengan mengadopsi arsitektur 'rumah baghi'.

---

<sup>148</sup> Beberapa kerja keras dari BMA Kota Pagaralam untuk mendukung program Pemko Pagaralam dibidang budaya, seperti Mencetak kembali Oendang-Oendang Simboer Tjahayatahun 2009, Himpunan Adat Istiadat Besemah Kota Pagaralam tahun 2009 serta penyusunan buku panduan pelajaran Huruf Besemah (surat ulu) tahun 2009. Informasi mengenai sejarah lembaga adat Besemah serta kontribusi lembaga ini bagi pengembangan dan pelestarian budaya Besemah digali dari wawancara dengan Satarudin Tjik Olah Salah satu pengurus lembaga dat Besemah, 30 Maret 2014 di Pagaralam..

<sup>149</sup> Beberapa karya Tumenggung Citra Mirwan, antar lain, *Himpunan Adat Besemah, Besemah Dalam Lintasan Sejarah dan Budaya*, Pagaralam: Pemko Pagaralam, 2010. Selanjutnya *Pangkal Guritan Besemah*, Pagaralam: Pemko Pagaralam, 2013

<sup>150</sup> Ahmad Bastari Suan, *Atung Bungsu, Sejarah Asal Usul Jagad Besemah*, Palembang: Pesake bekerjasama dengan Pemko Pagaralam, 2007, *Tatacara Adat Perkawinan Suku Bangsa Besemah di Sumatera Selatan*, Palembang: Dinas Pendidikan Nasional, 2007. Selanjutnya Ety Suspa, *Sastra Besemah bagian dari "Sastra Melayu Lama"*, *Tinjauan Deskriptif*, Bandung: Uvula Press, 2013.



**Gambar. 13.** Komplek Perkantoran Gunung Gare di Kota Pagaralam  
Sumber: Dokumen Tim Peneliti, 2014

### 1. Kontestasi Aksara Ulu Besemah di Ruang Publik

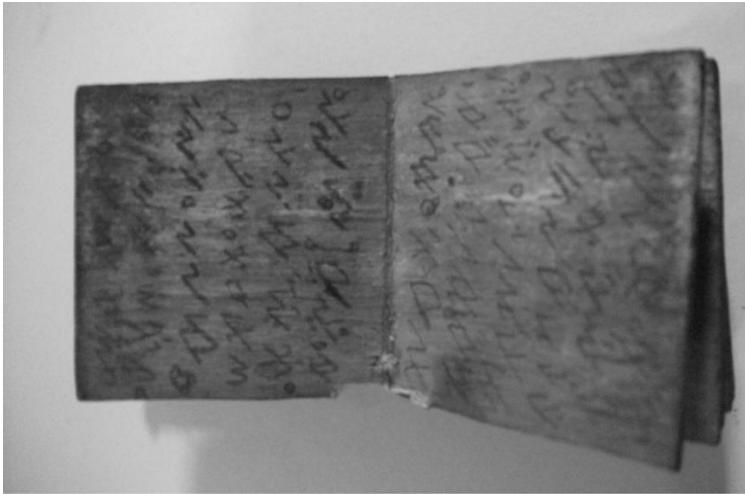
Kontestasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna perlombaan, yang secara harafiah berarti sebagai ajang kompetensi. Sedangkan aksara memiliki makna sebagai sistem tanda grafis yang dipergunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, jenis sistem tanda grafis, misalnya aksara pallawa, aksara batak, aksara *Ka Ga Nga* dan lainnya. Sedangkan istilah naskah merujuk pada kata *manuscript* (Inggris) dan *handschrift* (Belanda), yang berarti karangan tulisan tangan dengan menggunakan aksara tertentu. Diantara aksara dan naskah saling terkait satu sama lain, untuk memahami naskah orang harus mengetahui aksara, begitu pula sebaliknya, untuk mengkaji naskah, orangpun harus memahami dulu akasara.<sup>151</sup>

Aksara Ulu merujuk penggunaan teks atau tulisan huruf di beberapa tempat di uluan baik di Bengkulu maupun Sumatera Selatan , seperti Pasemah, Serawai, Rawas, Lintang dan Ogan. Para sarjana asing menyebut aksara ulu dengan sebutan aksara *Ka Ga Nga* (Jaspan, 1964) dan beberapa lainnya seperti Hassel (1881), Sturlel (1842), Helfrich (1904), Lekkerkerker (1916), Westenek (1919), Wink (1926) daan Voorhoeve menyebut dengan istilah *rencong*.

---

<sup>151</sup> Undri dkk, *Inventarisasi Aksara Ka Ga Nga di Bumi Rafflesia*, Padang: BPNB Padang, 2012, hal. 7-8.

Naskah uluan pada umumnya dibuat dari beberapa bahan, seperti kulit kayu, rotan, tanduk dan bambu, baik dalam bentuk sebilah bambu (*gelumpai*) ruas bambu maupun bambu bulat. Secara umum naskah uluan. Naskah uluan secara umum berisi mulai dari persolan pengobatan, asa-usul pertanian, mantra-mantra, adat memining (*caro paduan kulo*) kesenian dan lain-lainnya.



**Gambar. 14.** Aksara Ulu (*Kaghas*) Koleksin Satarudin Cik Olah  
Sumber: Dokumen Tim Peneliti, 2014

Salah satu instrumen pelestarian budaya orang Besemah-aksara *ulu*- yakni melalui pemanfaatan muatan lokal (*mulok*). *Mulok* adalah kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah, dimana bahan dikajikan berdasarakan pada potensi sosial budaya dan kearifan lokal masyarakatnya. *Mulok* memiliki posisi penting, karena setiap daerah membutuhkan identitas atau jati diri yang membedakan dengan daerah lain. Salah satu sumber muatan lokal adalah Pelajaran Hurup Besemah (*surat ulu*) yang dikarang oleh Satarudin Tjik Olah, aksara ulu beserta transkripnya di disusun secara berurutan dimulai dari *Ke Ge Nge* sampai *Nje Ngse Ghe*.<sup>152</sup> Selain itu juga dijelaskan mengenai tanda baca serta contoh penggunaannya dalam kalimat.

---

<sup>152</sup> Satarudin, *op.cit.*, hal.9.



Penggunaan papan nama jalan dalam bahasa Indonesia disertai penulisannya dalam aksara ulu, menjadi simbol kebangkitan kultural orang Besemah pasca otonomi daerah. Nama jalan, selain berhubungan dengan arti nama-nama tempat juga merupakan wujud dari perebutan sosial dan kekuasaan.<sup>153</sup> Nama-nama jalan di Kota Pagaralam sebagian besar ditulis dengan huruf latin dan aksara ulu. Fenomena ini bukanlah yang baru, karena beberapa daerah di Indonesia sudah menggunakannya, seperti di Solo dan Yogyakarta, termasuk di Kota Curup, Rejang Lebong yang juga menggunakan aksara ulu pula.



**Gambar. 15.** Papan Nama Jalan dengan Bahasa Indonesia dan Huruf Ulu  
Sumber: Dokumen Tim Peneliti, 2014

## 2. Kontestasi Bahasa dan Budaya Besemah di Media

Bahasa Besemah merupakan tuturan lisan yang dialeknya mirip dengan bahasa melayu, seperti penggunaan huruf e (diiucapkan lemah), *kemane* (kemana) dan *kenape* (kenapa). Kosakata dari bahasa Besemah memiliki ciri unik, dimana setiap huruf vocal (a) diganti huruf vocal (e). Bahasa Besemah secara umum dipergunakan sebagai bahasa komunikasi di Kota Pagaralam, yang secara luas sudah mendapat pengaruh bahasa Melayu Palembang. Sedangkan istilah

---

<sup>153</sup> Sarkawi B. Husein, 'Sepanjang Jalan Kenangan: Makna dan Perebutan Simbol Nama Jalan di Kota Surabaya dalam F. Colombijn dkk (ed), *Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia*, Jakarta: Ombak-NIOD, 2005, hal. 572.

atau kosa kata bahasa Besemah, hanya sedikit dikenal luas oleh publik, seperti kata 'jeme' yang berarti orang, 'jeme Besemah' (orang Besemah).

Media secara umum dipahami sebagai sarana komunikasi, seperti pers, media penyiran dan sinema. Jean Seaton mengatakan bahwa media sebagai agen kontrol sosial. Media berperan sebagai alat untuk memediasi, yakni merekonstruksi materi sumber dengan pelbagai cara, terutama untuk menjadikannya menarik bagi audiens.<sup>154</sup> Sementara ruang publik dalam bahasa Inggris (*public sphere*) atau dalam bahasa Jerman (*ooflichtkeit*). Kata 'publik' yang kita pakai dalam bahasa Indonesia berasal dari kata latin yakni 'publicus' yang memiliki pengertian sebagai suatu ruang tempat hal-hal yang bersifat umum dibicarakan.<sup>155</sup>

Dalam kajian ini kontestasi bahasa dan budaya Besemah di media dilacak atau dirunut kembali dengan mengeksplorasi beberapa media lokal seperti Majalah Besemah, yang diterbitkan oleh Pemko Pagaram, Surat Kabar Pagaram Pos, yang merupakan dari anak perusahaan dari Koran Sumatera Ekspres.

Media lokal seperti Koran Pagaram Pos dan Majalah Besemah menyediakan rubrik yang berkaitan dengan budaya Besemah, yakni dalam kolom Budaya dan Pariwisata, yang biasa diterbitkan setiap seminggu sekali, yakni pada tiap hari Sabtu. Keterbatasan sumber tulisan dan juga mereka yang berminat menulis persoalan kebudayaan besemah menjadikan rubrik budaya dan pariwisata tidak dimuat secara regular.<sup>156</sup>

Internalisasi budaya Besemah, baik menyangkut sejarah, tinggalan purbakala, pengenalan akasara ulu dan beberapa materi budaya tradisiional diulas pada rubrik ini. Mulai dari persoalan mengenai sejarah dan asal-usul nama Besemah yang mengutip tulisan Ahmad Bastari Suan dan pemanfaatan tinggalan megalith

---

<sup>154</sup> Graeme Burton, *Pengantar Untuk Memahami, Media dan Budaya Populer*, Jakarta: Jalasutra, 1999, hal. 9-10.

<sup>155</sup> F. Budi Hardiman, *Ruang Publik, Melacak 'Partispasi Demokratis' dari Polis sampai Cyberspace*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.

<sup>156</sup> Wawancara dengan Almidiansyah, Pemimpin Redaksi Pagaram Pos, 30 Maret 2014 di Pagaram..

sebagai potensi wisata sejarah.<sup>157</sup> Kisah mengenai puyang atau tokoh penyebar Islam, yakni mengupas *petata-petiti* media syiar Islam dan UU Simbur Cahaya yang dianggap mengadopsi budaya Besemah.<sup>158</sup> Pengenalan aksara di berbagai daerah di Sumatera Selatan dan usaha menjadikan megalith sebagai warisan dunia yang diakui oleh badan dunia (UNESCO).<sup>159</sup> Selain juga dimuat mengenai mater budaya tradisional, seperti pengenalan senjata tradisional kepada generasi muda.<sup>160</sup>

Majalah Besemah dalam beberapa edisi juga memuat mengenai khazanah budaya Besemah terutama dalam rubrik budaya dan pariwisata, seperti ulasan mengenai Besemah dan merunut sejarah Pagaram sebagai kota Perjuangan.<sup>161</sup> Inventarisasi benda cagar budaya terutama tinggalan megalitik yang menjadi satu ikon sejarah Besemah menjadi wacana utama Pemerintah Kota Pagaram dan masyarakatnya.<sup>162</sup> Dan upaya menjadikan tinggalan megalith sebagai warisan budaya dunia.<sup>163</sup> Fenomena kebangkitan kultural Besemah lainnya, yakni penggunaan nama *puyang* sebagai nama kelurahan. Kota Pagaram yang memiliki 35 kelurahan, beberapa nama kelurahan menggunakan *puyang* orang Besemah seperti Kelurahan Atung Bungsu, Kelurahan Kance Diwe, Kelurahan Penjalang, Kelurahan Agung Larangan dan Kelurahan Rebah Tinggi. Selain itu juga nama kelurahan diambil dari gabungan seperti Kelurahan Pagar Wangi berasal dari nama Dusun Tegur Wangi dan Pagardin. Kemudian Kelurahan Jangkar Mas yang berasal dari gabungan nama Dusun Jambak Akar dan Ujan Mas serta Kelurahan

---

<sup>157</sup> Koran Pagaram Pos, Rubrik Budaya dan Pariwisata, Hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014.

<sup>158</sup> Koran Pagaram Pos, Rubrik Budaya dan Pariwisata, Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014.

<sup>159</sup> Koran Pagaram Pos, Rubrik Budaya dan Pariwisata, Hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014.

<sup>160</sup> Koran Pagaram Pos, Rubrik Budaya dan Pariwisata, Hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014.

<sup>161</sup> Majalah Besemah Pagaram, Vol. 1 No.1 Juni 2008.

<sup>162</sup> Majalah Besemah Pagaram, Vol.5 No. 22 Februari 2012.

<sup>163</sup> Majalah Besemah Pagaram, Vol. 5 No,23 Juni 2012

Tanjung Agung yang berasal dari nama Dusun Tanjung Puyang dan Pagar Agung.<sup>164</sup>

Selain penggunaan nama *puyang* sebagai nama kelurahan, Pemerintah Kota Pagaralam mengabadikan nama-nama *Pesirah* yang karismatik yang pernah menjadi pemimpin marga di Kota Pagaralam dan memberi warna bagi sejarah Pagaralam. Setidaknya ada 2 (dua) nama *pesirah* yang dijadikan sebagai nama jalan yang berada Kecamatan Dempo Utara, yakni Jalan Pesirah Ratu Seniun, yang berawal dari Dusun Jambat Akar, Kelurahan Jangkar Mas hingga Dusun Bumi Agung, Kelurahan Bumi Agung (pertigaan Dusun Muara Siban). Dan Jalan Pesirah Leman, yang berawal pertigaan Dusun Muara Siban hingga Dusun Kerinjing, Kelurahan Agung Lawangan. Mereka berdua pernah menjabat sebagai *Pesirah Marga Sumbay Mangku Anom Suku* (SMAS) Muara Siban. Dengan menggunakan nama kedua tokoh tersebut, generasi muda akan memahami tentang sejarah *pesirah* dan marga serta kepemimpinan kedua *pesirah* ini. Hal ini sebagaimana harapan yang diungkapkan oleh Helmi Majib (60), mantan juru tulis Marga SMAS Muara Siban dari tahun 1970 sampai dengan 1983.<sup>165</sup>

Pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pagaralam melalui media lokal, mulai memperkenalkan tradisi budaya dan juga kesenian tradisional yang selama ini belum banyak diketahui oleh generasi muda di Kota Pagaralam. Beberapa alat kesenian yang hanya ditemukan di Pagaralam adalah *ginggong*, Ketua Lembaga Adat Besemah di Kota Pagaralam adalah salah satu maestro untuk alat musik ini.<sup>166</sup>

---

<sup>164</sup> Koran Pagaralam Pos, Rubrik Budaya dan Pariwisata, Hari Sabtu tanggal 29 November 2014

<sup>165</sup> Koran Pagaralam Pos, Rubrik Budaya dan Pariwisata, Hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014.

<sup>166</sup> Koran Pagaralam Pos, Rubrik Budaya dan Pariwisata, Hari Sabtu tanggal 6 September 2014.



**Gambar. 16. Alat Musik *Ginggong***

Sumber: Dokumen Tim Peneliti, 2014

Menurut Mang Satar, panggilan akrab dari Satarudin Cik Olah, alat musik *ginggong* dibuat dari bahan-bahan pilihan dan berkualitas. Dalam proses pembuatannya, harus dilakukan dengan seksama dan teliti. Agar nantinya kualitas bunyi yang dihasilkan sesuai dengan keinginan. Ukuran paling panjang untuk sebuah *ginggong* hanyalah 5 cm. Kemudian cara memainkannya juga sangat unik. Jika harmonika dimainkan dengan cara ditiup, maka *ginggong* dimainkan dengan cara ditiup sambil dipetik. Pada masa lampau *ginggong* dimainkan sebagai alat hiburan bujang dan gadis.



**Gambar. 17. Satarudin Cik Olah (Mang Satar), Maestro *Ginggong***

Sumber: Dokumen Tim Peneliti, 2014

# BAB V

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Reformasi dan otonomi daerah yang seringkali dianggap sebagai periode transisi, dimana terjadi pergeseran kekuasaan yang semula sentralistik beralih menjadi desentralistik membuka ruang bagi munculnya fenomena kebangkitan identitas primordial. Fenomena ini merupakan hal yang umum dan kita temukan di berbagai daerah di negara kita. Semangat keterbukaan yang menjadi slogan reformasi menjadi pintu pembuka bagi tiap untuk mengukuhkan identitas kultural yang selama berada dibawah bayang-bayang rezim *otoritarian* yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi.

Orang Besemah yang tinggal di Kota Pagaralam sebagai entitas suku bangsa menghadapi problema terkait dengan identitas kulturalnya. Dimasa lampau identitas mereka sebagai orang Sindang (sang penjaga perbatasan) yang memiliki karakter merdeka, berjiwa demokratis (*Lampik Mpat Merdike Duwe*) dan pantang menyerah terhadap lawan (kolonial) yang ingin menguasai tanah Besemah. Bahkan orang Besemah mampu menjaga keseimbangan dan netralitas dari pengaruh Majapahit di Palembang dan Banten di Bengkulu.

Wilayah budaya Besemah melampaui batas-batas adminitrasi dari daerah yang membentang dari bagian dataran tinggi disekitar Dempo hingga daerah Bengkulu dan Lampung. Orang Besemah mengaku bahwa mereka berasal dari keturunan Atung Bungsu, tokoh ini terlepas dari perdebatan menyangkut jejak dan mitos pengambaraannya dari tanah Majapahit sampai ke Besemah, Atung Bungsu merupakan simbol pengikat dan menjadi semacam 'local hero' bagi orang Besemah.

Sebutan nama Besemah berasal dari kata 'semah' yakni sejenis ikan yang banyak ditemukan di sungai-sungai tanah Besemah. Dimasa lampau jauh sebelum munculnya otonomi desa, orang Besemah telah menerapkan prinsip kemandirian dan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Diktum mereka yang dikenal dengan 'Lampik Mpat Merdike Duwe' yang pada dasarnya merupakan federasi atau perserikatan dari 4 (empat) *sumbay Ulu Lurah, sumbay Besak, Sumbay Mangku Anum* dan *sumbay Tanjung Gahyae* yang ditambah dengan *sumbay Penjalang* dan *sumbay Semidang*.

Ideologi *pyang* menjadi legitimasi kultural bagi tradisi kepemimpinan di tanah Besemah. Ikatan genealogis menjadi sarana dan sekaligus instrument penting bagi adanya dukungan seseorang untuk diangkat sebagai seorang *juray tuwe*. Meskipun pada umumnya seorang *juray tuwe* dipilih dan diangkat dari anak laki-laki pertama dalam keluarga. Ketika Kesultanan Palembang memperluas pengaruhnya sampai ke tanah Besemah, maka diperkenalkan sistem marga yang mengganti pemerintahan tradisional orang Besemah. Sistem marga mampu bertahan hingga dihapuskannya pada Orde Baru, yakni setelah adanya UU. NO. 5 tahun 1979, tentang Desa. Dalam struktur marga, *pesirah* merupakan pimpinan terendah dalam birokrasi kolonial.

Dalam perspektif ekonomi kolonial, daerah Besemah merupakan penghasil tanaman penting perkebunan, seperti kopi (*kopi robusta*) dan teh. Besemah disebut sebagai wilayah segitiga mas bersama daerah Lampung dan Bengkulu karena hasil kopinya yang berkualitas tinggi. Lanskap tanah Besemah menguntungkan setidaknya bagi kepentingan pertahanan terhadap serangan dari lawan. Sebab posisinya dikelilingi oleh pegunungan dan jalan terjal dan jurang serta sungai yang secara alamiah merupakan benteng alami.

Barth menyatakan bahwa batas etnis dan perawatannya menjadi hal penting, karena demi kesinambungan dan terjamin kebersamaan dan kesamaan identitas dipandang sebagai sarana efektif membangun solidaritas dan kolektifitas. Dalam konteks ini, orang Besemah setidaknya memiliki identitas bersama yang memandu mereka menghadapi tantangan ekonomi dan sosial budaya pada saat ini dan masa yang akan datang. Setidaknya dalam kajian

ini, ada 4 (empat) hal utama yang menjadi simbol dan pengikat identitas kultural orang Besemah. Pertama, Besemah memiliki tinggalan megalitik yang jumlah dan serta penyebarannya menunjukkan bahwa jejak peradaban orang Besemah telah tinggi mutunya pada masanya. Daerah Besemah menjadi daerah penting bagi riset arkeologi terutama menyangkut tinggalan megalitiknya ini. Ciri utama dari megalitik yang ditemukan di tanah Besemah, dinyatakan oleh Von Heine Geldern sebagai *strongly dynamic agitated*' yakni berarti arca-arca dari megalitik memiliki sifat dinamis.

Kedua, Kota Pagaram menyandang sebagai 'kota perjuangan' sebagai wujud kebanggaan atas peran dan kontribusi Kota Pagaram dalam lintasan sejarahnya. Pada masa kolonial orang Besemah yang tinggal mampu menyulitkan Belanda untuk menaklukkan wilayah ini. Dan pada masa pendudukan Jepang, Kota Pagaram adalah tempat bagi pengemblengan dan penempaan bagi calon *Gyugun Kanbu*, yakni calon perwira infantri dalam struktur kemiliteran Jepang. Pagaram dipilih sebagai tempat pendidikan dan pelatihan untuk calon *Gyugun Kanbu*, karena Kota Pagaram memiliki persyaratan sebagai tempat kawah candradimuka ini, yakni iklimnya yang sejuk berada disekitar Gunung Dempo, ketersediaan bahan pangan dan jamina keamanannya. Pada masa revolusi kemerdekaan Kota Pagaram bersama daerah Tanjungsakti menjadi benteng pertahanan penting bagi pemerintahan sipil dan militer. Posisi daerah ini relatif menguntungkan bagi para pejuang dan TKR dalam menghambat gerak maju dan ofensif militer Belanda, baik pada masa agresi militer pertama maupun agresi militer kedua.

Salah satu identitas yang saat ini mudah kita temukan di Kota Pagaram, yakni keberadaan dari rumah *baghi*, terutama di Dusun Pelang Keniday. Rumah *baghi* menjadi simbol identitas orang Besemah, sepertinya rumah *gadang* (Minangkabau) dan rumah *limas* (Palembang). Arsitektur rumah *baghi* beserta ragam hiasnya yang unik, seperti motif *mendale kencana mandulike*, *munce ghebung* ataupun motif lainnya, selain memiliki nilai estetika juga mempunyai filosofi yang mendalam yang merefleksikan relasi yang harmoni antara manusia dan alam sekitarnya.

Identitas kultural orang Besemah di Kota Pagaram yang tak kalah pentingnya adalah khazanah bahasa, sastra dan budaya



Besemah. Bahasa Besemah sebagai rumpun dari bahasa Melayu memiliki sejarah panjang dan keunikan dibandingkan dengan bahasa Melayu lainnya. Orang Besemah juga memiliki aksara *ulu* (*ghicung*) sebagai wujud ketinggian tingkat literasinya. Orang Besemah memiliki karya sastra dan budaya tinggi seperti mantra, pantun, rejang, guritan, tadut dan peribase.

Politik identitas orang Besemah di Kota Pagaralam menemukan momentumnya sejak Kota Pagaralam berdiri sebagai wilayah kotamadya tahun 2001. Dengan terbentuknya Kota Pagaralam, Walikota Jazuli Kuris bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda serta segenap lapisan masyarakat di Kota Pagaralam berikhtiar membangkitkan kembali identitas kultural orang Besemah sebagai bagain jati diri orang Besemah. Muncuknya gerakan politik kultural orang Besemah seperti penggunaan Aksara *Ulu* untuk penamaan plang (papan) jalan dan kembali digalakan pada era otonomi daerah.

Kontetasi akasara ulu dan bahasa *ulu* mendapatkan salurannya, ketika Pemko Pagar alam menginisiasi berbagai kebijakan yang mendukung minat mengkaji kembali identitas lokal, seperti merevitalisasi naskah-khagas- serta mempopulerkan terminologi dan idiom bahasa Besemah di ruang publik maupun media massa lokal, yakni penerbitan majalah Besemah dan juga terbitan harian Pagarlam Pos menjadi simbol sekaligus penanda fenomena kebangkitan identitas.

## B. SARAN

Belajar dari fenomena kebangkitan identitas kultural orang Besemah di Kota Pagaralam di era otonomi daerah, yakni pentingnya bagi kita semua menghargai budaya sendiri ditengah arus globalisasi dunia. Penanaman nilai-nilai luhur budaya kepada generasi muda dirasa menjadi kebutuhan yang mendesak bagi semua pemangku kepntingan yang ada di Kota Pagaralam. Kesadaran akan jati diri sebagai orang Besemah yang memiliki kebanggaan atas identitas kultural. Dan rasa bangga sebagai puak yang mandiri, berdaulat serta memiliki tinggalan budaya yang agung, seperti megalitik, rumah *baghi*, sastra dan budaya. Juga kebanggan bahwa dengan slogan Kota Pagaralam sebagai Kota Perjuangan. Spirit atas kebanggaan identitas

kultural inilah yang akan menjadi penunjuk arah (kompas) bagi langkah pembangunan kebudayaan orang Besemah di Pagaralam dimasa yang akan datang.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdullah, Irwan dan Pande Made Kutanegara, "Otonomi dan Hak-Hak Budaya Daerah", dalam Ki Supriyoko (ed), *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005
- Abdullah, Irwan, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdullah, Irwan, Wening Udasmoro dan Hasse J (ed), *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer*, Yogyakarta: TICI Publication bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2009.
- Abdullah, Makmun, *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri*, Jakarta: Depdikbud, Ditjarahnitra, Proyek IDSN, 1984/1985.
- Agustino, Leo, 'Dinasti Politik Pasca Otonomi Orde Baru: Pengalaman Banten' dalam *Otonomi Daerah untuk Siapa*, Prisma, *Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi*, Vol. 29, No.3, Juli 2009.
- Alfian, T. Ibrahim dkk, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Sumatera Selatan*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Sejarah Nasional, 1983/1984.
- Alimansyur, Moh dkk, *Arsitektur Tradisional Daerah Sumatera Selatan*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Daerah (IDKD), Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990/1991.

- Arios, Rois Leonard, 'Arsitektur Rumah Baghi di Kota Pagar Alam', dalam Nursyirwan Effendi (ed), *Bunga Rampai Budaya Sumatera Selatan, Budaya Basemah di Kota Pagar Alam*, Padang: BPNST Press, 2012.
- Azra, Azyumardi 'Pendidikan Multikultural dan Pancasila: Tribute untuk Profesor Tilaar dalam (Sutjipto ed), *10 Windu Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed.* Jakarta: Kompas, 2012.
- Barth, Fredrik, 'Introduction', dalam Fredrik Barth (ed), *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*, Oslo: Pensumtjeneste, 1969.
- Bellwood, Peter, *Pra Sejarah Kepulauan Indo-Malaysia*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Brata, Aloysius Gunadi, *Problematika Masyarakat Kopi Pasemah*, Yogyakarta: Lemlit Universitas Atma Jaya, 2005.
- Burton, Graeme *Pengantar Untuk Memahami, Media dan Budaya Populer*, Jakarta: Jalasutra, 1999.
- Buchari, Sri Astuti, *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*, Jakarta: YOI, 2014.
- Davidson, Jamie S, David Henley, Sandra Moniaga (ed), *Adat Dalam Politik Indonesia*, Jakarta: KITLV-Jakarta bekerjasama Pustaka Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Gotschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notooesanto, Jakarta: UI Press, 1986.
- Haboddin, Muhtar, 'Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal' dalam *Politik Identitas dalam Dinamika Politik di Berbagai Daerah di Indonesia*, Jurnal Renai, Kajian Politik Lokal dan Sosial Humaniora, Tahun IX No.2. Tahun 2009, Salatiga: Percik.

- Hadiz, Vedi R, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia, A Souteast Asia Perspective*, Singapura: ISEAS, 2011.
- Hanafiah, Johan *Melayu-Jawa, Citra Budaya dan Sejarah Palembang*, Jakarta: Rajawali Grafindo bersama Pemda Tk. II Kotamadya Palembang, 1995.
- Hall, Stuart, 'Who Needs an Identity' dalam Stuart Hall dan Paul du Gay (ed), *Questions of Cultural Identity*, London: SAGE Publications, 1996b.
- Hardiman, F. Budi, *Ruang Publik, Melacak 'Partispasi Demokratis' dari Polis sampai Cyberspace*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Hoon, Chang Yau, *Identitas Tionghoa Pasca Suharto Budaya, Politik dan Media*, Jakarta: Yayasan Nabil dan LP3ES, 2012.
- Husein, Sarkawi B. 'Sepanjang Jalan Kenangan: Makna dan Perebutan Simbol Nama Jalan di Kota Surabaya dalam F. Colombijn dkk (ed), *Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia*, Jakarta: Ombak-NIOD, 2005.
- J.L. Van Sevenhoven, Lukisan tentang Ibukota Palembang, Jakarta: Bhratara, 1971.
- J.S.G. Gramberg, *Pasemah*, dalam *Tijdschrift Voor Indische Taal-land, en Volkenkunde*, deel XVI, Batavia Lange & Co, 1867.
- J.S.G. Gramberg (terjemahan), *Mengenai Penaklukan Pasemah*, versi aslinya berjudul *De Inlijving van Het Landschap Pasoemah door J.S.G. Gramberg Indische Ambtenaar*, yang merupakan Buku Dua dari *Sumatera Selatan Melawan Penjajah Abad 19*, Jakarta: Masyarakat Peduli Musi, 2000,.
- Jumhari, "Karakter dan Jati Diri Kultural Orang Pasemah dalam Perspektif Sejarah", dalam Khairil Anwar (dkk), *Budaya Membentuk Jati Diri dan Karakter Bangsa, Proceeding Seminar*

Internasional, diselenggarakan oleh FIB Unand, 13 November 2012, Padang: Fakultas Ilmu Budaya.

- Kartodirdjo, Sartono, *Beberapa Masalah Teori dan Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, 1970.
- Kartodirdjo, Sartono, *Sejarah Nasional Indonesia V*, Jakarta: Balai Pustaka, 1977.
- Kusumawati, Ayu dan Haris Sukendar, *Megalitik Bumi Pasemah Peranan Serta Fungsinya*, Jakarta: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, Deputi Bidang Pelstarian dan Pengembangan Budaya, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 2003.
- Kuris, Djazuli, *Membangun Bersama Rakyat*, Palembang: Anugerah Pena Persindo, 2006.
- Kuris, Djazuli, *Kronologis Pembentukan Pagar Alam (Sebuah Reportase)*, Pagaralam: Pemko Pagaralam, 2012.
- Loear, M. Saman, *Guritan Jagad Besemah*, Pagaralam: Elca, 1972.
- Loeb, Edwin M, *Sumatera Sejarah dan Masyarakatnya*, diterjemahkan oleh Windu Wahyudi Yusuf, Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Mahdi, Sutiono, *Bahasa Besemah*, Bandung: Uvula Press, 2002.
- Mangkualam, Asnawi, *Perang Kota 120 Jam Rakyat Palembang*, ed (Zawawie Said), Jakarta: Aksara Baru, 1986.
- Mirwan, Tumenggung Citra, *Himpunan Adat Besemah, Besemah Dalam Lintasan Sejarah dan Budaya*, Pagaralam: Pemko Pagaralam, 2010.

Mirwan, Tumenggung Citra, *Pangkal Guritan Besemah*, Pagaralam: Pemko Pagaralam, 2013.

Muslimin, Amrah, *Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung Menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan Dalam Propinsi Sumatera Selatan*, Palembang: Pemda Sumsel, 1986.

Nangtjik, Oesman dan Iskandar Gani, *Dr. A.K. Gani Pejuang yang Berwawasan Sipil dan Militer*, Jakarta: PT Multi Harun, 1990.

Nordholt, Henk Schulte dan Gerry van Klinken, 'Pendahuluan' dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed), *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: KITLV-Jakarta dan YOI, 2007.

Olah, Satarudin Tjik, *Sang Kancil Melanglang Ghimbe*, Pagaralam: Dinas Budpar, 2010.

Olah, Satarudin Cik, *Petata-Petiti dan Pepatah serta Pribahasa*, naskah yang belum diterbitkan, tanpa tahun.

P.De Roo de Faille, *Dari Zaman Kesultanan Palembang*, Jakarta: Bhratara, 1971

Ratuperwiranegara, Alamsyah, *Perjuangan Kemerdekaan di Sumatera Selatan 1945-1950*, Jakarta: tanpa nama penerbit, 1987.

Peeters, Jeroen, *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, Jakarta: INIS, 1987.

Poesponegoro, Marwati Djoned (ed), *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid I*, Jakarta: Proyek IDSN, Ditjaranitra Depdikbud, 1982.

Refisrul, 'Sumbai; Sistem Pemerintahan Tradisional Masyarakat Besemah di Sumatera Selatan', dalam Nursyirwan Effendi (ed), *Bunga Rampai Budaya Sumatera Selatan, Budaya Basemah di Kota Pagar Alam*, Padang: BPNST Press, 2012.

- Said, Abi Hasan, *Bumi Sriwijaya Bersimbah Darah*, Jakarta: Yayasan Krama Yudha, 1991.
- Sakai, Minako, 'Creating a New Centre in the Periphery of Indonesia: Sumatra Malay Identity Politic', dalam (Minako Sakai, Glenn Banks and J.H. Walkers, ed), *The Politics of the Periphery in Indonesia, Social and Geographical Perspectives*, Singapura: NUS Press, 2009.
- Schulte, Henk Nordholt dan Gerry van Klinken, 'Pendahuluan' dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed), *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: KITLV-Jakarta dan YOI, 2007.
- Sjaf, Sofyan, *Politik Etnik, Dinamika Politik Lokal di Kendari*, Jakarta: Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Suan, Ahmad Bastari, *Besemah: Lampik Empat Merdike Due*, Palembang: Pesake (Pencinta Sejarah dan Kebudayaan), 2008
- Suan, Ahmad Bastari, *Atung Bungsu, Sejarah Asal Usul Jagad Besemah*, Palembang: Pesake bekerjasama dengan Pemko Pagaram, 2007.
- Suan, Ahmad Bastari, *Tatacara Adat Perkawinan Suku Bangsa Besemah di Sumatera Selatan*, Palembang: Dinas Pendidikan Nasional, 2007.
- Surianingrat, Bayu, *Sejarah Pemerintahan di Indonesia Babak Hindia Belanda dan Jepang*, Jakarta; Dewaruci Press, 1981.
- Suspa, Ety, *Sastra Besemah bagian dari "Sastra Melayu Lama", Tinjauan Deskriptif*, Bandung: Uvula Press, 2013.
- Tim Penulis dan Pemerintah Kota Pagaram, *Sejarah Besemah, Dari Zaman Megalitikum, Lampik Empat Merdike Due, Sindang Merdike ke Kota Perjuangan*, Pagaram: 2005.



Undri dkk, *Inventarisasi Aksara Ka Ga Nga di Bumi Rafflesia*, Padang: BPNB Padang, 2012,

Zed, Mestika, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003.

### **Koran dan Majalah**

Koran Pagaralam Pos, Rubrik Budaya dan Pariwisata, Hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014.

Koran Pagaralam Pos, Rubrik Budaya dan Pariwisata, Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014.

Koran Pagaralam Pos, Rubrik Budaya dan Pariwisata, Hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014.

Koran Pagaralam Pos, Rubrik Budaya dan Pariwisata, Hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014.

Koran Pagaralam Pos, Rubrik Budaya dan Pariwisata, Hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014.

Koran Pagaralam Pos, Rubrik Budaya dan Pariwisata, Hari Sabtu tanggal 6 September 2014.

Koran Pagaralam Pos, Rubrik Budaya dan Pariwisata, Hari Sabtu tanggal 29 November 2014

Majalah Besemah Pagaralam, Vol. 1 No.1 Juni 2008.

Majalah Besemah Pagaralam, Vol.5 No. 22 Februari 2012.

Majalah Besemah Pagaralam, Vol. 5 No,23 Juni 2012

## Daftar Informan

1. Nama : Satarudin Cik Olah  
Umur : 76 Tahun  
Pendidikan : SGB  
Pekerjaan : Pensiunan PNS, Ketua Lembaga Adat Kota Pagaralam  
Alamat : Kota Pagaralam
2. Nama : Ahmad Bastari Suan  
Umur : 68 Tahun  
Pendidikan : Sarjana  
Pekerjaan : Pensiunan PNS, Budayawan  
Alamat : Kota Palembang
3. Nama : Kasim  
Umur : 65 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Wiraswata, Ketua Yayasan Dempo Lestari  
Alamat : Kota Pagaralam
4. Nama : Almidiansyah  
Umur : 35  
Pendidikan : Sarjana  
Pekerjaan : Wartawan (Pimred Pagaralam Pos)  
Alamat : Kota Pagaralam
5. Nama : Sidarta  
Umur : 33Tahun  
Pendidikan : Sarjana

- Pekerjaan : Wartawan Pagaralam Pos  
Alamat : Kota Pagaralam
6. Nama : Fakhrozi Nurhafi  
Umur : 34 Tahun  
Pendidikan : Sarjana  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Kota Pagaralam
7. Nama : Refdinal  
Umur : 33 Tahun  
Pendidikan : Sarjana  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Kota Pagaralam

**Lampiran Himpunan Adat Istiadat Besemah Kota Pagaram  
Tahun 2009****DAFTAR ISI****Kata Pengantar****Sambutan Walikota Pagar Alam****Daftar Isi****BAB I PENDAHULUAN**

- A. Umum
- B. Kehidupan Masyarakat
- C. Pengertian Tentang Adat Istiadat
- D. Azaz-azas Adat
- E. Sifat Adat Istiadat
- F. Sumber dan Peranan Adat Istiadat
- G. Pembina Adat Istiadat

**HIMPUNAN ADAT ISTIADAT MASYARAKAT BESAMAH KOTA  
PAGAR ALAM****BAB I KETENTUAN UMUM****BAB II UPACARA ADAT**

- A. Adat Kelahiran Anak, Adat Perkawinan
- B. Adat Perkawinan
- C. Adat Kematian
- D. Adat Mendirikan Rumah
- E. Adat Upacara Sedekah Padang
- F. Adat Nepung
- G. Adat Memandikan Pusaka
- H. Adat Upacara Sumpah

**BAB III ADAT SOPAN SANTUN**

- A. Adat Tutur Kata
- B. Adat Bertandang

**BAB IV HUKUM ADAT**

- A. Hukum Adat Hak Perorangan
- B. Hukum Kekerabatan
- C. Hukum Perkawinan
- D. Sistem Perkawinan
- E. Perceraian
- F. Hukum Harta Dan Benda-Benda Yang Diatasnya
- G. Hukum Perjanjian Adat
- H. Hukum Silang Sengketa

## **BAB V PENUTUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. UMUM**

1. Berkat Rahmat dan Ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, perjuangan Bangsa Indonesia dalam memperjuangkan peri kehidupan yang bebas dan kemerdekaannya. Hal ini dapat tercapai adalah dengan terwujudnya kesatuan, persatuan dan sebagai pendukung utama adalah bahwa bangsa Indonesia memiliki suatu kesatuan pandangan hidup bangsa dalam wujud Pancasila, yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa. Pancasila sekaligus dijadikan Dasar Negara merupakan sumber kelahiran dari tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

2. Nilai-nilai budaya dimaksud juga berperan sebagai pedoman serta pendorong bagi perilaku manusia Indonesia. Di setiap daerah tumbuh dan berkembang adat istiadat sebagai salah satu sumber pengenalnya. Kesemuanya itu merupakan kaedah-kaedah dan pola-pola yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat Indonesia yang merupakan identitasnya dan klasifikasinya sebagai orang yang beradat.

#### **B. KEHIDUPAN MASYARAKAT**

Ditengan-tengah kehidupan masyarakat bermacam-macam ragam kaedah-kaedah dan pola-pola kehidupan yang pada umumnya dipatuhi masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat hukum Adat Istiadat Sumatera Selatan, orang sejak dahulu sampai sekarang masih tetap

- a. Selain mematuhi kaedah-kaedah adat istiadat tersebut yang bersifat tradisional yang berkisar pada kebutuhan pokok untuk mencapai kerukunan masyarakat sebagai keseimbangan dari tata tertib masyarakat.
- b. Juga menjunjung tinggi dan melaksanakan kaedah-kaedah keimanan sebagai wahyu dari Allah SWT, yang berkisar pada kebutuhan pokok untuk mendapatkan keridhoan dari Allah SWT guna mencapai kehidupan hasanan dunia akhirat.

- c. Bersamaan dengan itu juga melaksanakan kaedah-kaedah hukum yang dibentuk oleh lembaga-lembaga Pemerintahan yang berwenang, yang berkisar pada kebutuhan pokok untuk mencapai kedamaian sebagai suatu keserasian antara ketertiban (yang bersifat lahiriyah) dan ketentraman (yang bersifat batiniah).
- d. Pelaksanaan dari seluruh kaedah-kaedah adat istiadat, keyakinan dan hukum tersebut saling berkaitan serta saling mempengaruhi satu sama lainnya, sehingga menumbuhkan keserasian dan kenyamanan serta ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

### **C. PENGERTIAN TENTANG ADAT ISTIADAT**

1. Adat istiadat adalah segala bentuk kegiatan, perbuatan dan tindakan kesusilaan serta kebiasaan masyarakat yang menjadi tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari antara satu sama lain, seperti : sopan santun, upacara adat dan hukum adat

2. Adat istiadat itu terdiri dua bagian yaitu :

- a. Tidak mempunyai akibat hukum atau reaksi adat yang disebut “adat istiadat”, seperti upacara adat.
- b. Mempunyai akibat hukum atau reaksi adat yang disebut “adat lembaga”.

Antara kedua bagian tersebut mempunyai persenyawaan yang terpisah.

### **D. AZAS-AZAS ADAT**

Azas dari pada adat istiadat adalah untuk memelihara keseimbangan dan hubungan kerukunan antara manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, antara manusia dengan alam. Keseimbangan ini dahulu diartikan keseimbangan kosmos yaitu keseimbangan kepercayaan terhadap tenaga-tenaga gaib yang mengurus seluruh alam semesta dan semua tenaga gaib membawa seluruh alam semesta kedalam suatu kaedah seimbang.

Dengan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh perubahan ketatanegaraan (Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum). Kehidupan ekonomi dan sosial sebagai dampak pembangunan oleh pengaruh globalisasi (Masuknya IPTEK serta unsur-unsur kebudayaan dari

luar) dan semakin mendalamnya ajaran agama Islam yang berdasarkan tauhid. Khususnya masyarakat Propinsi Sumatera Selatan sebagai Lingkungan Adat Istiadat, tidak lagi mempunyai padangan hidup sedemikian sehingga tidak lagi menganut kepercayaan keseimbangan kosmos tersebut.

Keseimbangan tersebut dikembalikan kepada memelihara kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan menyelaraskan hak dan kewajiban pribadi. Kerukunan yang meliputi keseimbangan dalam tata kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk menyelaraskan hak dan kewajiban pribadi dengan hak kewajiban antar pribadi (masyarakat) dan terhadap alam semesta. Sepanjang timbulnya gangguan terhadap keseimbangan dalam tata kehidupan yang dimaksud maka hukum adat yang mengatur akibat hukum yang dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut.

#### **E. SIFAT ADAT ISTIADAT**

Sesuai dengan perkembangan pandangan hidup bangsa Indonesia pada saat ini khususnya masyarakat adat di Daerah Sumatera Selatan seperti tersebut huruf "D" diatas, dimana perkembangan adat istiadat di daerah ini khususnya mengenai hukum adat telah menyesuaikan diri dalam perkembangan dibawah ini dan sifat-sifatnya menjadi :

- a. *Harmonis*: Sifat yang menjunjung tinggi kehidupan tanpa ada gangguan terhadap tata kehidupan.
- b. *Kebersamaan*: Menurut adat istiadat maka pribadi merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, dan hal ini meliputi seluruh aspek kehidupan. Hal ini terutama berarti bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban pribadi diselaraskan dengan kepentingan umum atau masyarakat.
- c. *Konkrit* : Cara berpikir yang senantiasa mencoba agar supaya hal-hal dimaksud, diinginkan, dikehendaki, ataupun yang akan dikerjakan diberi wujud suatu benda, sekalipun fungsinya hanya lambang saja.
- d. *Visual* : Bahwa dengan perbuatan nyata, perbuatan simbolik atau suatu ucapan, suatu tindakan dianggap telah selesai ketika itu juga. Dengan demikian segala sesuatu yang telah terjadi



sebelumnya dan sesudah tindakan tersebut tidak ada sangkut pautnya dan tidak mempunyai hubungan sebab akibat.

#### **F. SUMBER DAN PERANAN ADAT ISTIADAT**

Dasar hukum Perundang-Undangan berlakunya hukum adat :

- a. Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda dasar berlakunya hukum adat dikembalikan pada Pasal 131 ayat 2 sub (b) *Indische Stats Rehelinh* (UUD Hindia Belanda). Pada dasarnya untuk orang Indonesia (pribumi) berlaku peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan agama dan kebiasaan mereka.
- b. Berdasarkan Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945 dasar hukum berlakunya Hukum Adat yang tercantum dalam Pasal 131 ayat 2 sub (b) ISR tersebut masih berlaku.
- c. Penjelasan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa disebutkan bahwa UU ini mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan Dan Pelestarian Serta Pembangunan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat Dan Lembaga Adat Di Daerah.
- e. Mengenai peranan adat istiadat sejak dahulu sampai sekarang adat istiadat masih tetap terpelihara dalam mengatur kehidupan masyarakat, dengan tidak mengurangi bahwa masyarakat tetap memenuhi peraturan perundang-undangan dan tetap menjalankan syariat Islam. Jadi sepanjang halnya tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk dalam bidang syariat agama Islam, tetaplah adat istiadat diperlukan.

#### **G. PEMBINA ADAT ISTIADAT**

1. Perubahan pandangan hidup masyarakat daerah Propinsi Sumatera Selatan seperti tersebut dalam huruf "D" diatas membawa perubahan pula dalam tanggapan mereka mengenai nilai-nilai. Hal ini dapat dimaklumi dari bahan-bahan informasi mengenai adat istiadat sebagai hasil dari observasi seperti digariskan dalam surat Gubernur

KDH 1 Propinsi Sumatera Selatan tanggal 7 September 1994 No.147/04755/III/1994 Tentang Observasi mengenai materi adat istiadat di Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan sumber dari observasi tersebut adalah :

- a. Oendang-oendang Simboer Tjahaja
- b. Buku : Kependudukan Peranan Lembaga Adat di Sumatera Selatan setelah berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1997 sebagai hasil penelitian oleh kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 1987.

Hasil observasi diolah sesuai penggarisan Gubernur Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan dalam surat keputusan tanggal 22 Agustus 1988 No.674/SK/III/1988 tentang pengelolaan hasil pengumpulan bahan informasi mengenai berbagai adat istiadat segi materinya (isi adat istiadat) di Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan.

2. Bahan-bahan informasi mengenai berbagai adat istiadat dilengkapi dengan menelaah :

- a. Terjemahan buku disertai DR.WF. Lublink Weddek, Hukum Delik Adat dalam peradilan Rapat Marga Palembang.
- b. Beberapa dokumen hasil penelitian Proyek Inventaris dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Selatan.

3. Sesuai dengan surat keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan tersebut, pengelolah dilakukan oleh tim pengelola yang terdiri dari :

- a. Anggota Pelaksana Pembina Adat Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan :
  - H.M. Ali Amin., SH
  - H. Hambali Hasan, SH
  - Mohd. Muid, SH
- b. Tenaga Pengajar dari Universitas Sriwijaya
  - Prof. Drs. H.M. Wijaya
  - Albar Sentosa Subari, SH, SU

4. Berdasarkan pengolahan bahan informasi mengenai berbagai adat tersebut disusun kompilasi adat istiadat untuk masing-masing Kabupaten/Kota Daerah Sumatera Selatan sebagai buku kumpulan yang membuat uraian atau bahan-bahan adat istiadat, pendapat mengenai hukum adat. Himpunan adat istiadat ini digunakan sebagai pedoman untuk pembinaan adat istiadat di Daerah Tingkat II masing-masing.

5. Penyusunan Himpunan Adat Istiadat terlampir untuk Kota Pagar Alam telah mendapat kesepakatan dengan Pemangku Adat Kelurahan dan Lurah dalam kota Pagar Alam. Dalam hal ini telah dibicarakan dalam forum konsultasi penyusun Himpunan Adat Istiadat Kota Pagar Alam pada tanggal 15 Mei 2006.

## HIMPUNAN ADAT ISTIADAT MASYARAKAT BESEMAH KOTA PAGAR ALAM

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Himpunan Adat Istiadat ini yang dimaksud dengan :

- a. Lembaga Adat adalah suatu Lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur dan melaksanakan Hukum Adat di Tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Pemangku Adat adalah suatu unit organisasi yang mempunyai tugas wewenang untuk melaksanakan Hukum Adat tingkat Kelurahan.
- c. Yang Berwajib adalah aparat penegak hukum, Polisi Negara, Polisi Khusus, Jaksa dan Hakim
- d. Lurah adalah pejabat pimpinan pemerintah di kelurahan
- e. Ketua Rukun Warga/Ketua Rukun Tetangga adalah perangkat Kelurahan yang mengepalai suatu lingkungan.
- f. Yang Berwenang adalah Instansi/Lembaga Pemerintahan yang dalam tugas dan fungsinya berwenang menyelesaikan urusan yang bersangkutan.
- g. Adat setempat adalah Adat yang hidup, berkembang, diikuti dan dipelihara oleh masyarakat.
- h. Adat terang adalah suatu perbuatan/kegiatan yang harus diketahui/disaksikan oleh Kepala Pemerintahan dan atau Pemangku Adat.
- i. Bergubalan adalah suatu perbuatan dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan (gadis/janda) menyerahkan diri atas kehendak bersama ke rumah Pejabat/Pemangku Adat meminta perlindungan dengan maksud untuk kawin.
- j. Damai adalah suatu tindakan/kegiatan dari hasil musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah perselisihan silang sengketa pelanggaran untuk mengembalikan hubungan yang harmonis serta menghilangkan rasa dendam antara kedua

- belah pihak yang berselisih, dengan tidak mengurangi wewenang dari pihak yang berwajib.
- k. Melahirkan adalah suatu perbuatan salah satu proses awal dari perkawinan adat.
  - l. Kawin lari adalah suatu perbuatan/tindakan seorang laki-laki dan perempuan (gadis/janda) meninggalkan tempat kediaman untuk melakukan perkawinan/pernikahan.
  - m. Menggubali adalah suatu perbuatan/tindakan dari seorang perempuan (gadis/janda) menyerahkan diri kerumah Pejabat/Pemangku Adat meminta perlindungan dengan maksud minta dikawinkan dengan sorang laki-laki yang telah mencemarinya.
  - n. Perselisihan adalah suatu silang sengketa dalam keperdataan.
  - o. Pelanggaran adalah suatu tindakan/kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap ketentraman, ketertiban dan keseimbangan secara sepihak terhadap pihak lain sehingga menimbulkan kerugian material dan inmaterial.
  - p. Reaksi Adat, adalah :
    - 1. Bangun (timbang bangun) adalah suatu pemberian berupa uang atau benda sebagai hasil musyawarah dan mufakat dari pihak keluarga yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang kepada ahli korban disebut “bangun maye”.
    - 2. Membasuh Dusun (Tepung Dusun) adalah melaksanakan suatu upacara dengan menyembelih kerbau atau kambing ataupun melakukan perbuatan lain yang setara dengan nilai biaya persedekahan tersebut atas dasar musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Lurah atau Pemangku Adat oleh karena telah terjadi pelanggaran adat (membuat gawe, meranggang gawe, sumbang besar dan sumbang kecil).
    - 3. Denda adalah pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh pelanggar adat.
    - 4. Ganti rugi adalah suatu pemberian uang atau barang oleh pihak yang telah merugikan kepada pihak yang dirugikan karena telah terjadi pelanggaran adat. Mengembalikan suatu biaya (termasuk jujur dan pintaan ataupun barang pemberian dan gadai pertunangan) yang akibat adanya pelanggaran adat.

5. Penyingsingan adalah pembayaran uang sebagai pengganti kerugian inmaterial (pemulihan keseimbangan) oleh pihak yang mungkir/menolak perkawinan dengan siapa ia harus dikawinkan.
6. Setengah bangun adalah suatu pembayaran sejumlah uang oleh seseorang yang menyebabkan hilangnya istri dari seseorang (karena harus bercerai) kepada bekas suami yang bersangkutan, atas musyawarah mufakat dari kedua belah pihak.
7. Tekap malu adalah pembayaran sejumlah uang oleh seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar kehormatan seseorang yang merupakan pelanggaran Adat dengan maksud untuk memulihkan kehormatan dan harga diri dan ketentraman yang bersangkutan.
8. Tepung Tawar adalah suatu upacara sebagai wujud perdamaian karena telah terjadi pelanggaran adat, juga berupa pembayaran sejumlah uang yang setara nilainya dengan biaya tepung tawar tersebut diatas atas dasar musyawarah mufakat dari kedua belah pihak.
9. Wajib dikawinkan adalah suatu tindakan hukum karena telah terjadi perzinahan (membuat gawe) dengan mengindahkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Sumbang Besar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan ibunya, dengan saudara perempuannya (kelawai).
11. Sumbang Kecil adalah perbuatan bersetubuh antara mertua laki-laki dengan menantu perempuan atau menantu laki-laki dengan mertua perempuan.
12. Sumbang Mata adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang tidak pantas dipandang oleh orang lain sesuai dengan adat setempat.
13. Membuat Gawe adalah Zinah, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan bersetubuh tanpa dinaungi pernikahan.

14. Meragang Gawe adalah suatu perbuatan laki-laki terhadap perempuan dengan menyentuh atau meraba tubuh perempuan yang tertutup.
15. Meranting Gawe adalah suatu perbuatan laki-laki menyenggol atau memegang tangan dibawah siku atau kaki dibawah lutut perempuan (gadis/janda).
16. CempELE adalah suatu perbuatan pelanggaran adat yang dilakukan oleh seorang terhadap orang lain sehingga menimbulkan rasa tidak senang bagi yang bersangkutan, antara lain :
  - a. CempELE Tangan adalah perbuatan seorang memukul benda orang lain.
  - b. CempELE Mulut adalah suatu pembicaraan dari seseorang yang menimbulkan orang lain tidak senang (mengatakan status sosial seseorang, mengatakan perbuatan/kelakuan orang lain, berkata yang bersifat mengejek, mencerca atau menghina orang lain.
  - c. CempELE Mate adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja melihat sesuatu yang dilakukan orang lain yang tidak patut dilihat.
  - d. CempELE TelingE adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja mendengarkan sesuatu yang tidak patut didengarkan.

## **BAB II**

### **UPACARA ADAT**

#### **Bagian Pertama**

#### **Adat Kelahiran**

##### **A. Adat Kelahiran Anak**

###### **Pasal 2**

Pada saat setelah anak lahir diadakan suatu upacara sederhana, bayi disempunguhi dan dicekoki sebagaimana lazimnya dilakukan menurut adat setempat (disebut Kupik Balik Diayik)

###### **Pasal 3**

Setelah bayi tersebut terlepas tali pusat dilakukan suatu upacara sederhana (disebut sedekah tanggal pusat). Selanjutnya saat itu pula membayar aqiqah menurut Syariat Agama Islam

#### **Pasal 4**

Pada saat bayi berumur 40 hari maka diadakan upacara turun mandi dan tutup tawar

#### **Pasal 5**

Pada waktu dilakuka mengkhitan anak (Sunnah Rasul) diadakan suatu upacara sebagaimana lazimnya dilakukan menurut adat setempat (disebut membujangkan anak atau menggadiskan anak).

### **Bagian Kedua**

#### **Adat Perkawinan**

##### **B. Adat Perkawinan**

#### **Pasal 6**

Perkawinan didahului dengan berasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan (disebut numpunkah kule) menurut cara yang lazim dilakukan menurut adat setempat.

#### **Pasal 7**

Pada berasan ini pada saat melakukan musyawarah mufakat kedua belah pihak dihadiri oleh Kepala Pemerintahan setempat dan Pemangku Adat (jurai tua dan sammu jurai) disebut "Adat Terang"

#### **Pasal 8**

Dalam musyawarah berasan/numpunkah kule sebagaimana Pasal 6 diatas telah ditentukan semua persyaratan perkawinan (bila ada) besarnya pintaan, bantuan dari pihak laki-laki pada pihak perempuan, adat pelangkahan dan persyaratan lainnya yang lazim dilakukan menurut adat setempat

#### **Pasal 9**

Setelah tercapai kesepakatan kedua belah pihak (rasan padu) maka kedua belah pihak mengadakan upacara peresmian pertunangan (sedekah bubur sembilan) yang dilakukan menurut adat setempat

#### **Pasal 7**

Pada berasan ini pada saat melakukan musyawarah mufakat kedua belah pihak dihadiri oleh Kepala Pemerintahan setempat dan Pemangku Adat (jurai tua dan sammu jurai) disebut "Adat Terang"



### **Pasal 8**

Dalam musyawarah berasan/numpunkah kule sebagaimana Pasal 6 diatas telah ditentukan semua persyaratan perkawinan (bila ada) besarnya pintaan, bantuan dari pihak laki-laki pada pihak perempuan, adat pelangkahan dan persyaratan lainnya yang lazim dilakukan menurut adat setempat.

### **Pasal 9**

Setelah tercapai kesepakatan kedua belah pihak (rasan padu) maka kedua belah pihak mengadakan upacara peresmian pertunangan (sedekah bubur sembilan) yang dilakukan menurut adat setempat

### **Pasal 10**

Dalam pelaksanaan upacara peresmian pertunangan tersebut calon pengantin dijemput menurut cara yang lazim berlaku menurut adat setempat dan jika calon pengantin perempuan diiringi gadis ngantat perempuan tue (kerbei) calon pengantin laki-laki hanya diiringi oleh bujang ngantat.

### **Pasal 11**

Jika calon pengantin perempuan pada saat berada dirumah calon mertua maka gadis ngantat boleh menerima tamu bujang dari sanak keluarga calon pengantin laki-laki untuk beramah tamah menurut kebiasaan-kebiasaan adat setempat (nyemantung, memberikan cinder mata kepada gadis ngantat, disebut nyidah).

### **Pasal 12**

Untuk menentukan pelaksanaan hari perkawinan maka pihak yang akan melaksanakan pernikahan menemui pihak calon bisa guna menentukan hari perikahan disebut Bepandas.

### **Pasal 13**

Pada saat dilaksanakan pesta pernikahan setelah selesai acara akad nikah diadakan beberapa upacara antara lain ngampak simah, ngarak pengantin, menampilkan kesenian yang lazim dilakukan/kebiasaan adat setempat.

### **Pasal 14**

Penjemputan calon pengantin dilakukan biasanya dua hari sebelum hari H, dalam penjemputan pengantin ini dilakukan oleh

utusan orang tua/keluarga pihak pengantin dan diiringi bujangan dan gadis (dengan upacara menurut kebiasaan adat setempat)

#### **Pasal 15**

Setelah selesai semua kegiatan yang berhubungan dengan upacara pernikahan maka keesokan harinya pengantin kembali kerumah orang tuanya bersama pasangan suami istri yang baru melakukan akad nikah, dengan diiringi pengantar mempelai (bujangan ngantat bagi mempelai laki-laki dan gadis ngantat bagi mempelai wanita serta perempuan tua sebagai jenang)

#### **Pasal 16**

Setibanya kedua pasangan pengantin dirumah bisan maka diadakan sedekah/upacara mantaukah pukang, dan sepasang pengantin datang ke rumah orang tua/mertua disebut berulang ngantat pukang (upacara dilakukan menurut kebiasaan adat setempat).

#### **Pasal 17**

Setelah selesai upacara ngantat pukang tersebut maka kedua pasangan suami istri kembali ketempat semula dan dilakukan upacara sederhana yaitu sedekah nekui bujang gadis.

#### **Pasal 18**

Pada satu hari sebelum upacara perkawinan dilakukan penyembelihan kerbau (bagi yang mampu) sebelum hewan dimaksud disembelih terlebih dahulu dilakukan ritual menurut kebiasaan adat setempat tidak bertentangan dengan akidah syari'at agama yang dianut, dilanjutkan dengan menarik palak kerbau setelah itu kerbau dimaksud disembelih.

#### **Pasal 19**

Hewan/kerbau yang disembelih tersebut dagingnya dibagi menurut kebiasaan adat setempat antara lain :

- a. Untuk ahli rumah (pangkal aguk)
- b. Untuk pihak besan (kandik ngantat pukang)
- c. Untuk peninge kepala meraje anak belai
- d. Untuk peninge dengan dusun laman (yang akan melakukan pantauan/mantau bunting dan simah)

**Bagian Ketiga**  
**Adat Kematian**  
**C. Upacara Kematian**

**Pasal 20**

Jika seseorang meninggal dunia supaya ahli warisnya memberitahukan semua sanak keluarga handai tolan dengan cara menurut kebiasaan setempat (dengan menabuh beduk kungkunan/memberitahukan sanak keluarga yang tinggal dilain dusun).

**Pasal 21**

Penyelenggaraan pemakaman jenazah berpedoman pada tuntunan syari'at agama seraya memperhatikan kebiasaan menurut adat setempat.

**Pasal 22**

Selain pemakaman jenazah maka warga masyarakat sekitar serta sanak keluarga takzia tiga hari untuk meringankan beban keluarga ahli musibah serta mohon do'a kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya dilakukan upacara hari ketujuh dan keempat puluh menurut kebiasaan adat istiadat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at agama

**Bagian Keempat**  
**Adat Mendirikan Rumah**  
**D. Upacara Mendirikan Rumah**

**Pasal 23**

Setiap warga/penduduk yang hendak mendirikan rumah harus terlebih dahulu mendapat izin yang berwenang.

**Pasal 24**

Upacara nancang tiang (peletakan batu pertama) adalah suatu upacara memulai/awal pekerjaan bangunan rumah dilakukan menurut kebiasaan adat setempat.

**Pasal 25**

Upacara munggahkan bubungan (menunaikan bubungan) dilakukan menurut kebiasaan adat setempat.

**Pasal 26**

Upacara nyemak rumah adalah suatu upacara/kendurian setelah rumah dimaksud selesai dibangun, dilakukan pada awal menunggu rumah dengan maksud bersyukur dan memohon pinta Tuhan Yang Maha Kuasa agar mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan, sekaligus menyatakan rasa terima kasih kepada tukang yang mengerjakan pembangunan rumah (mundung tukang).

### **Bagian Kelima**

#### **Adat Berladang**

##### **E. Upacara Sedekah Padang**

###### **Pasal 27**

Sedekah padag adalah suatu upacara sederhana pada waktu akan membuka ladang, dilakukan menurut kebiasaan adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at agama

###### **Pasal 28**

Sedekah makan padi empai adalah suatu upacara setempat panen dan dilakukan menurut kebiasaan adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at agama, dengan maksud menyatakan rasa syukur dan mohon pinta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera lahir batin.

### **Bagian Keenam**

#### **Adat Nepung Atau Membasuh Dusun**

##### **F. Upacara Nepung**

###### **Pasal 29**

Upacara nepung ini dilakukan oleh karena terjadi suatu perbuatan/tindakan, baik sengaja atau tidak sengaja sehingga menyebabkan orang lain cedera, maka atas musyawarah mufakat pihak menyebabkan cederanya seseorang maka yang bersangkutan memikul beban semua biaya yang berkaitan dengan upacara ini dan mengembalikan semua kerugian akibat tindakan/perbuatan pelaku pelanggaran adat dimaksud.

###### **Pasal 30**

Upacara membasuh dusun dilakukan apabila terjadi sesuatu bencana (bahaya api, banjir, topan dan bencana lainnya) hal ini menjadi beban penduduk setempat, apabila terjadi pelanggaran adat

(perzinahan) seluruh upacara membasuh dusun dimaksud dibebankan kepada yang melakukan pelanggaran adat (hukum pelanggaran adat dikenakan Pasal 10 Bab Kesatu Undang-undang Simbur Cahaya).

### **Pasal 31**

Pelaksanaan upacara membasuh dusun dimaksud Pasal 30 dipimpin oleh pemangku adat/jurai tua dan diketahui oleh Kepala Pemerintahan setempat.

## **Bagian Ketujuh**

### **Adat Memandikan Pusaka**

#### **G. Upacara Memandikan Pusaka**

### **Pasal 32**

Upacara memandikan pusaka adalah suatu upacara yang dilakukan pada saat keadaan dalam bahaya (gawat) antara lain : dalam keadaan bahaya perang, serangan wabah penyakit menular yang mematikan, terjadi kemarau panjang, atau adanya petunjuk (firasat). Pelaksanaannya dipimpin oleh pemangku adat/jurai tua disaksikan oleh penduduk setempat waktu dan tempat ditentukan oleh jurai tua.

## **Bagian Delapan**

### **Adat Upacara Sumpah**

#### **H. Upacara Sumpah**

### **Pasal 33**

Upacara sumpah ini disamping memperhatikan aqiqah dan syari'at agama dilakukan menurut kebiasaan adat setempat dipimpin oleh pemangku adat/jurai tua dan dihadiri oleh orang-orang tertentu (tidak boleh dihadiri oleh perempuan dan anak-anak).

## **BAB III**

### **ADAT SOPAN SANTUN**

#### **A. Adat Tutur Kata**

### **Pasal 34**

Orang muda dalam percakapan dengan orang yang lebih atau supaya memperhatikan tata tutur yang sopan dengan mengucapkan sopan dengan mengucapkan kata-kata yang halus sehingga sedap didengar oleh yang lebih tua

### **Pasal 35**

Jika anak menyambut anggota keluarga supaya menyebutkan dengan benar menurut susunan keluarga seperti :

- a. Anak ayah sebutan menurut tata tutur adat setempat (bapak, rama, ayah)
- b. Anak dengan ibu menyebutkan ibu, mak, nduk atau panggilan menurut adat setempat
- c. Menantu dengan mertua supaya menyebutnya dengan adat setempat
- d. Kemenakan/keponakan dengan kata kakak dari ayah sebutlah dengan tuturan menurut adat setempat (wak/bapak tue) dengan saudara perempuan ayah dipanggil ayah (wak bagi kakak perempuan, ibung/bibi bagi adik perempuan)
- e. Jika kakak laki-laki dari ibu dipanggil wak, jika adik laki-laki dipanggil mamak
- f. Jika kakak perempuan dari ayah dipanggil wak, jika adik perempuan dari ayah dipanggil ibung
- g. Terhadap menantu dari saudara lain jenis (kelawai muanai dipanggil dayang bagi menantu perempuan, dan nakan bagi menantu laki-laki)
- h. Untuk panggilan terhadap mertua saudara (kakak/adik)
  - Mertua laki-laki dipanggil bapang bisan
  - Mertua perempuan dipanggil endung bisan
- i. Untuk bisan laki-laki dan bisan perempuan dipanggil warang, bagi bisan laki-laki dipanggil warang, bagi bisan laki-laki dan bisan perempuan dipanggil bisan, begitu pula sebaliknya
- j. Bagi menantu laki-laki memanggil mertua “beliau banyak” dan bagi menantu perempuan memanggil mertua “beliau ni, atau beliau tu” untuk menjawab pembicaraan mertua maka menantu menjawab mertua tadi dengan engkau aye”

### **Pasal 36**

Panggilan/tuturan kehormatan terhadap pejabat pemerintah (priyai disebut “rame mendike” atau beliau ini)

## **B. Adat Bertandang**

### **Pasal 37**

Bujang yang hendak bertandang/bertamu kerumah gadis harus terlebih dahulu meminta izin orang tua gadis dengan cara yang patut (menjunjung tinggi kehormatan dan harga diri dari keluarga gadis)

### **Pasal 38**

Bujang yang hendak bertandang/bertamu kerumah gadis supaya (sepatutnya) setelah orang tua (bapak) dari gadis bersangkutan sedang tidak berada di rumah dengan maksud untuk menjaga singkuh sundi

### **Pasal 39**

Bujang bertandang/bertamu kerumah gadis supaya disenangi oleh keluarga si gadis menurut kebiasaan adat setempat

### **Pasal 40**

Bujang yang hendak bertandang/bertamu kerumah gadis, jika bapak/ayah gadis masih berada dirumah maka bertandang/bertamu ditunda dahulu sampai bapak gadis meninggalkan rumah

### **Pasal 41**

Bujang yang bertandang/bertamu sepatutnya menjaga sopan santun dan tata krama yang baik, dan tidak dibenarkan sama sekali menimbulkan suasana yang mengganggu ketentraman keamanan lingkungan

### **Pasal 42**

Dalam pergaulan ditengah masyarakat sepatutnya menjaga jalinan hubungan yang harmonis dan serasi sehingga keserasian hubungan dimaksud terpelihara

### **Pasal 43**

Setiap warga masyarakat dalam pergaulan sepatutnya menghormati adat sopan santun, tata krama atau tata tutur menurut adat setempat, terutama mengindahkan rasa singkuh sundi

### **Pasal 44**

Setiap warga masyarakat sepatutnya tidak melakukan suatu perbuatan/tindakan sumbang mata.

### **Pasal 45**

Anggota masyarakat dalam pergaulan sehari-hari sepatutnya menghormati adat setempat baik cara berpakaian, berbicara tata tutur sapa, cara makan minum serta memiliki rasa malu dan harga diri.

#### **Pasal 46**

Anggota masyarakat yang menderita sakit akal/jiwa tidak patut dipasung, tetapi harus dipelihara dan diobati sehingga tidak mengganggu dan membahayakan masyarakat.

#### **Pasal 47**

Setiap warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sepatutnya mengikuti segala kegiatan adat tolong menolong dan adat gotong royong

#### **Pasal 48**

Setiap orang/anggota masyarakat yang menemukan barang di suatu tempat, sepatutnya mengembalikan barang temuan tersebut kepada pemiliknya atau diserahkan kepada ketua RT/RW Kepala Dusun dan Lurah setempat.

### **BAB IV**

#### **HUKUM ADAT**

##### **Bagian Pertama**

##### **Hukum Adat Hak Perorangan**

###### **A. Hukum Adat Hak Perorangan**

Seseorang diakui sebagai anggota masyarakat (menurut adat lama disebut *mate gawe*) yang mempunyai kewajiban dan hak secara penuh, jika yang bersangkutan telah dewasa atau sudah menikah (berkeluarga) dan atau sesuai menurut adat setempat.

##### **Bagian Kedua**

##### **Hukum Keluargaan Adat**

###### **B. Hukum Kekkerabatan**

#### **Pasal 50**

Apabila seseorang meninggal dunia atau sudah tidak kuasa lagi menjalankan kewajibannya, maka baik laki-laki maupun perempuan



berhak untuk pengganti dan penerus keturunan orang tuanya sesuai dengan adat setempat atau kesepakatan keluarga yang bersangkutan

### **Pasal 51**

Seseorang baik laki-laki maupun perempuan berkewajiban memelihara orang tuanya dan mertuanya juga menyelesaikan hak dan kewajiban orang tuanya dan mertuanya sampai akhir hayatnya dengan adat setempat

## **C. Hukun Perkawinan**

### **Pasal 52**

Bentuk perkawinan dapat berupa perkawinan ambik anak pernantuan dan perkawinan jurai sesame (same endean)

### **Pasal 53**

Perkawinan kule berete (anak lanang ditunakkah anak betine belaki), semua kegiatan yang berhubungan dengan perkawinan dengan segala tata caranya, dilakukan oleh pihak laki-laki yang berakibat istri mengikuti suami/bertempat tinggal bersama suami bersama anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah sebagai penerus keturunan suami

### **Pasal 54**

Pada perkawinan Ambik Anak kecuali peminangan semua kegiatan dengan segala tata caranya dilakukan oleh pihak keluarga perempuan, yang berakibat suami mengikuti istri/bertempat tinggal bersama istri (keluarga istri) dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah penerus keturunan istri (pihak istri)

### **Pasal 55**

Pada perkawinan ambil anak penantuan semua kegiatan sama seperti pada Pasal 54 kecuali tempat tinggal, sementara adik laki-laki dari pihak istri belum berkeluarga suami bertempat tinggal bersama istrinya (keluarga istri) dan setelah adik ipar dimaksud berkeluarga maka suami bersama istri bertempat tinggal di pihak suami

### **Pasal 56**

Pada perkawinan Jurai Sesame (perkawinan same ende) segala kegiatan yang menyangkut perkawinan tersebut, kecuali peminangan dilakukan atas kesepakatan musyawarah antar kedua belah pihak (pihak calon suami dan calon istri) setelah melakukan perkawinan

suami istri dalam menentukan tempat tinggal atas kesepakatan bersama. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka adalah sebagai keturunan kedua belah pihak

#### **Pasal 57**

Kawin lari (bergubalan/sebambangan) merupakan salah satu bentuk awal dari proses perkawinan adat berdasarkan kesepakatan bujang gadis yang bersangkutan untuk kawin, namun belum ada persetujuan dari orang tua masing-masing, untuk mewujudkan kehendak dikawinkan dimaksud mereka meminta perlindungan kepada kepala (lurah/kepala dusun) pemangku adat.

#### **Pasal 58**

Pada perkawinan lari tersebut Pasal 57 diatas, lurah atau pemangku adat patut memberi perlindungan setelah ada pertanyaan tertulis dari bujang gadis yang bersangkutan bahwa kehendak mereka untuk dikawinkan adalah kemauan mereka berdua.

#### **Pasal 59**

Kawin lari (bergubalan/sebambangan) yang telah memperoleh perlindungan dari Lurah atau Pemangku Adat, selanjutnya diberitahukan kepada orang tua keluarga yang bersangkutan, dan setelah memperoleh persetujuan maka proses penyelesaian selanjutnya sama seperti proses perkawinan biasa (Adat Terang).

#### **Pasal 60**

Apabila tidak persetujuan orang tua/keluarga yang bersangkutan, maka Lurah atau Pemangku adat memproses perkawinan tersebut untuk selanjutnya diteruskan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai Pasal 6 ayat (1) dan ayat (6) serta Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974

### **D. Sistem Perkawinan**

Apabila calon pengantin laki-laki atau perempuan melintas/melangahi saudara-saudaranya yang lebih tua (laki-laki atau perempuan) maka pihak calon pengantin laki-laki membayar denda pelanggaran kepada yang dilintasi/dilangkahi sesuai menurut adat setempat atau berdasarkan musyawarah

**Pasal 62**

Apabila bujang gadis bergubalan atau bujang bambang gadis tidak hamil dan atas kemauan bujang gadis tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang disertai pernyataan tertulis dari keduanya, maka pejabat/pemangku adat tempat mereka bergubalan harus memberikan perlindungan dan penyelesaian segala hal perkawinan mereka itu sesuai menurut adat setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Pasal 63**

Apabila gadis hamil bergubalan dengan bujang (yang manghamili) maka Pejabat/Pemangku Adat tempat yang bersangkutan bergubalan harus memberikan perlindungan dan menyelesaikan segala hal memperhatikan adat setempat dan peraturab Perundang-undangan yang berlaku

**Pasal 64**

Apabila gadis menggumbali laki-laki yang menghamilinya, akan tetapi laki-laki tersebut mungkir/ingkar (tidak bertanggung jawab), maka pejabat/Pemangku Adat tempat kejadian menyelesaikan peristiwa itu menurut adat jika hal tersebut tidak dapat diselesaikan, dilaporkan/diserahkan kepada pihak berwajib

**Pasal 65**

Apabila randa/janda tidak hamil bergubalan dengan laki-laki atas keamanan mereka berdua, maka Pejabat/Pemangku Adat tempat mereka bergubalan harus memberikan perlindungan dan menyelesaikan segala hal ikhwal perkawinan mereka itu sesuai adat setempat dengan tetap dan memperhatikan perawatan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 66**

Apabila randa/janda hamil bergubalan dengan laki-laki atas kemauan mereka berdua, maka Pejabat/Pemangku Adat tempat mereka bergubalan harus memberikan perlindungan dan menyelesaikan segala hal ikhwal perkawinan mereka itu sesuai dengan adat setempat dengan tetap memperhatikan perundang-undangan.

**Pasal 67**

Apabila randa/janda menggubuli laki-laki yang menghamilinya, akan tetapi tersebut mungkir/ingkar (tidak

bertanggung jawab) maka Pejabat/Pemangku Adat tempat kejadian menyelesaikan peristiwa itu menurut adat jika hal tersebut diselesaikan, dilaporkan/diserahkan kepada pihak yang berwajib

#### **Pasal 68**

Apabila bujang nangkap batin (melaporkan kepada pejabat setempat) yang bermaksud minta dikawinkan dengan gadis tunangannya maka Pejabat/Pemangku Adat ditempat kejadian menyelesaikan masalah tersebut dengan orang tua bujang dan gadis sesuai menurut adat setempat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

#### **Pasal 69**

Apabila randa/janda hamil bergubalan dengan laki-laki atas kemauan mereka berdua, maka Pejabat/Pemangku Adat setempat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **E. Perceraian**

#### **Pasal 70**

Setiap perceraian harus/dapat dilakukan dimuka pengadilan sepanjang perkawinan dilaksanakan menurut perundang-undangan yang berlaku

#### **Pasal 71**

Pemaksaan anak dibawah umur akibat putusya perkawinan (cerai hidup) dapat diselesaikan musyawarah antara kedua orang tuanya, bila mana tidak mencapai kesepakatan maka pengadilan memberikan ketetapan

#### **Pasal 72**

Perceraian sepatutnya tidak dilakukan tanpa melalui tata cara/prosedur hukum menurut hukum ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **Pasal 73**

Kedudukan harta dalam perkawinan ditentukan oleh bentuk perkawinan suami istri yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Bab IV Bagian Kedua huruf "C" Pasal 52 himpunan adat ini.

**Pasal 74**

Harus bawaan yang dibawah suami maupun istri di dalam ikatan perkawinan dapat dipergunakan untuk keperluan rumah tangga atas persetujuan yang bersangkutan.

**Pasal 75**

Apabila perkawinan putus karena cerai mati, maka harta bawaan suami/istri yang meninggal diteruskan kepada anak, jika tidak ada anak maka harta tersebut kembali kepada keluarga suami/istri yang meninggal.

**Pasal 76**

Apabila perkawinan putus karena cerai hidup maka harta bawaan kembali kepada yang bersangkutan

**Pasal 77**

Harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta sepencarian (milik bersama) dan penggunaannya atas dasar kesepakatan

**Pasal 78**

Apabila perkawinan putus karena cerai hidup maka harta pencarian (harta milik bersama) dibagi dua antara suami istri yang bercerai

**Pasal 79**

Apabila perkawinan putus karena cerai mati maka harta sepencarian (harta milik bersama) setelah diperhitungkan hutang-hutang dan wasiat serta biaya lainnya, maka harta tersebut dibagi dua antara keluarga yang masih hidup dan keluarga suami/istri yang meninggal

**Pasal 80**

Pembagian harta warisan dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk pewaris (kule, berate, ambek anak dan jurai sesame/same endean)

**Pasal 81**

Apabila bentuk pewarisan Kule Berate (anak lanang ditunakkah) maka pewarisnya adalah bapak dan ahli warisnya adalah anak kandung laki-laki yang tertua diutamakan seterusnya berikut menurut urutan semua anak laki-laki sesuai dengan adat setempat atas dasar musyawarah mufakat

**Pasal 82**

Apabila bentuk perkawinan adalah ambek anak, maka pewarisnya adalah ibu dan ahli warisnya adalah semua anak kandung (sesuai menurut adat setempat) atas dasar musyawarah mufakat

**Pasal 83**

Apabila bentuk perkawinan jurai sesame (sama Endean) maka pewarisnya adalah orang tuanya (laki-laki dan perempuan) maka ahli warisnya semua anak kandungnya dan atau berdasarkan musyawarah mufakat (menurut adat setempat)

**Pasal 84**

Jika seorang bujang (belum pernah kawin) meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka sebagai ahli warisnya adalah orang tuanya, bilamana orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu maka ahli warisnya adalah saudaranya baik laki-laki maupun perempuan atau atas dasar musyawarah dan mufakat sesuai adat setempat

**Pasal 85**

Apabila seorang janda atau duda tidak mempunyai anak, meninggal dunia dan meninggalkan harta (hasil pencarian duda atau janda itu sendiri) maka ahli warisnya sama dengan Pasal 84 di atas

**Bagian Ketiga****Hukum Tanah dan Benda-Benda yang ditasnya****Pasal 86**

Hak ulayat (tanah marga) dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan tanah masyarakat hukum adat tetap dikuasai masyarakat sepanjang kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Pasal 87**

Warga masyarakat dapat menguasai /membuka sebidang sebagai hak perorangan (hak usaha) di lingkungan hak ulayat (tanah marga) dari suatu masyarakat hukum adat dengan sepengetahuan Lurah dan Pemangku Adat yang bersangkutan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

**Pasal 88**

Hak perorangan tersebut harus ada tanda-tanda batas yang jelas dan diusahakan (ditanami dengan tanaman tumbuh) secara terus menerus. Setelah tiga tahun diusahakan hak perorangan itu dapat diakui sebagai hak usaha adat

**Pasal 89**

Apabila hak perorangan (hak usaha adat) tidak diusahakan (tidak ditanam) sehingga menjadi belukar maka tanah itu kembali menjadi hak ulayat (tanah marga). Jika yang bersangkutan ingin mengusahakan kembali maka yang bersangkutan mendapat hak wewenang dulu (hak terdahulu) dari anggota masyarakat lain yang ingin mengusahakan tanah itu

**Pasal 90**

Untuk meningkatkan hak perorangan (hak usaha adat) menjadi hak milik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Pagar Alam

**Pasal 91**

Setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan menurut ketentuan yang berlaku

**Pasal 92**

Jika seseorang ingin mendirikan bangunan (rumah tempat tinggal) diatas tanah orang lain dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis, diketahui dan disaksikan oleh Lurah atau Pemangku Adat setempat.

**Pasal 93**

Jika menenam tanaman di atas tanah orang lain dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis, diketahui dan disaksikan oleh Lurah dan Pemangku Adat

**Pasal 94**

Gadai tanah dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat dari kedua belah pihak, yang dibuat secara tertulis, diketahui dan disaksikan oleh Lurah dan Pemangku Adat setempat serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Pasal 95**

Pembagian air siring sawah (irigasi tradisional)

- a. Setiap bidang sawah mendapat 1 (satu) tanggam air
- b. Setiap petak kolam (pauk) mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) tanggam air
- c. Untuk tanah sisa dari pembagian tanah sawah disebut cuntang sawah, apabila dibuka menjadi sawah maka mendapat pembagian air  $\frac{1}{2}$  (setengah) tanggam air
- d. Pembuatan sawah baru yang menggunakan mata air sawah yang sudah ada supaya mendapat persetujuan dari pemilik sawah pengguna air

**Pasal 96**

Setiap orang tidak dibenarkan mengambil batu, pasir, kayu dan bambu disekitar bendungan mata air sawah, perbuatan/tindakan tersebut melanggar adat, dikenakan hukum adat (reaksi adat) sesuai dengan ketentuan adat setempat

**Bagian Keempat  
Hukum Perjanjian Adat****Pasal 97**

Perjanjian adat dilakukan dihadapan pejabat/pemangku adat setempat (adat terang), perjanjian dimaksud dibuat secara tertulis diketahui oleh Pejabat/Pemangku Adat setempat

**Pasal 98**

Dalam timbulnya hak dan kewajiban dalam perjanjian adat setelah tercapai kesepakatan masing-masing pihak untuk selanjutnya diikuti dengan pemberian tanah jadi (panjar)

**Pasal 99**

Jika perjanjian adat yang diikuti dengan pemberian tanah tanda jadi (panjar) tidak dapat dilaksanakan/batal :

- a. Jika pembatalan dilakukan oleh pemberi panjar, maka tanda jadi (panjar) tersebut tidak dikembalikan oleh penerima panjar atau sesuai dengan adat setempat
- b. Jika pembatalan dilakukan oleh penerima tanda jadi (panjar) maka tanda jadi (panjar) tersebut dikembalikan sesuai dengan perjanjian atau menurut adat setempat



**Pasal 100**

Menempati rumah orang lain dengan cara menumpang, menyewa dan lain-lain berdasarkan kesepakatan antara pemilik rumah dan yang akan menghuni dilakukan perjanjian tertulis dan menurut adat terang

**Pasal 101**

Bagi hasil (paruhan) baik hewan maupun tanaman dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak dengan perjanjian tertulis dan menurut adat terang

**Pasal 102**

Tolong menolong dalam masyarakat hukum adat dapat berupa budi dibalas budi, budi dibalas dengan imbalan upah, budi dibalas dengan perbuatan yang sama

**Pasal 103**

Gotong royong dalam masyarakat hukum adat dilakukan untuk kepentingan bersama seperti membuat jalan, jembatan, membuat rumah ibadah dan lain sebagainya

**Bagian Kelima****Hukum Silang Sengketa Adat****Pasal 104**

Apabila terjadi perselisihan dalam bidang harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud maka hendaklah diselesaikan secara damai melalui musyawarah mufakat kedua belah pihak yang disaksikan oleh Lurah dan Pemangku Adat setempat, hasil perdamaian tersebut dibuat secara tertulis, jika penyelesaian tidak tercapai maka masing-masing pihak mengajukan gugatan

**B. Bidang Pelanggaran****Pasal 105**

Jika laki-laki menyenggol atau memegang tangan gadis atau janda atau istri orang dan perempuan itu mengadu, dapat dihukum denda setingginya lima ratus ribu rupiah menurut Pasal 18 Bab Satu Undang-Undang Simbur Cahaya.

**Pasal 106**

Jika laki-laki memegang gadis itu randah atau istri orang atau disebut “nating gawe” dihukum denda satu juta rupiah menurut Pasal 19 Undang-Undang Simbur Cahaya dan membayar tekap malu pada perempuan setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah menurut Pasal 19 Bab Kesatu Undang-Undang Simbur Cahaya

**Pasal 107**

Jika laki-laki memegang di atas siku gadis, atau randa “meragang gawe” namanya dihukum denda satu juta lima ratus ribu rupiah menurut Pasal 20 Bab Kesatu Undang-Undang Simbur Cahaya

**Pasal 108**

Jika laki-laki memegang gadis atau janda lantas memeluk badannya “narangang gawe” namanya dihukum denda setingginya tiga juta rupiah dan membayar tekap malu pada perempuan tersebut setinggi-tingginya satu juta lima ratus ribu rupiah menurut Pasal 21 Bab Kesatu Undang-Undang Simbur Cahaya

**Pasal 109**

Jika laki-laki menangkap merebut kain atau kembangan selendang gadis/janda disebut nangkap rinjau, dihukum denda setinggi-tingginya tiga juta rupiah dan membayar tekap malu pada gadis/janda setinggi-tingginya dua juta rupiah menurut Pasal 22 Bab 1 Undang-Undang Simbur Cahaya dan jika gadis bersangkutan suka kawin (nikah) dengan bujang itu maka tekap malu dua juta rupiah tidak lagi dibayar pada gadis itu

**Pasal 110**

Jika laki-laki memegang istri orang dihukum denda setinggi-tingginya tiga juta rupiah menurut Pasal 22 Bab Kesatu Undang-Undang Simbur Cahaya dan uang denda tersebut satu juta lima ratus ribu rupiah dibayarkan kepada perempuan atau lakinya

**Pasal 111**

Jika istri orang membuat gawe dan lakinya mengadu, perempuan itu kena hukuman raja dan gandaknya dihukum satu ekor kerbau pada lakinya dan dihukum denda tiga juta rupiah menurut Pasal 24 Bab Kesatu Undang-Undang Simbur Cahaya

Keterangan :

Pasal ini menghendaki :

1. Perempuan itu dihukum oleh pengadilan yang berwenang sesuai dengan Pasal 284 (1) le dari KUHP dihukum penjara selama 9 bulan
2. Gendak perempuan (lawan berbuat zina) dihukum menyerahkan satu ekor kerbau kepada suami perempuan itu
3. Laki-laki itu dihukum pula denda sebanyak tiga juta rupiah

#### **Pasal 112**

Jika bergubalan atau melarikan istri orang dihukum setengah bangun setinggi-tingginya sepuluh juta rupiah pada suaminya dan dihukum denda setinggi-tingginya enam juta rupiah pada pengadilan yang berwenang, jika laki-laki Bambang perempuan yang bercerai yang belum habis masa idahnya atau randa yang suaminya mati belum lebih dari empat bulan sepuluh hari dihukum denda setinggi-tingginya satu juta rupiah dan membayar satu juta lima ratus ribu rupiah pada ahlinya perempuan itu menurut Pasal 25 Bab Kesatu Undang-Undang Simbur Cahaya.

#### **Pasal 113**

Janda (randa boleh di enggau dinikahkan) dengan sanak (saudara) lakinya yang mati tetapi boleh dipaksa menurut Pasal 26 Bab Kesatu Undang-Undang Simbur Cahaya

#### **Pasal 114**

Jika terjadi sumbang di dalam dusun dikenakan hukuman membasuh dusun :

1. Sumbang besar memotong seekor kerbau
2. Sumbang kecil memotong seekor kambing dan keperluan sedekah secukupnya

Keterangan :

1. Sumbang besar ; Bapak bersetubuh dengan anak perempuannya, anak bersetubuh dengan ibunya sendiri, saudara laki-laki bersetubuh dengan saudara perempuannya
2. Sumbang kecil ; Mertua laki-laki bersetubuh dengan menantu perempuan menentu laki-laki bersetubuh dengan mertua perempuan

#### **Pasal 115**

Jika laki-laki melingkas (mengintai) perempuan mandi bersembunyi “bengkarung jangal jungul namanya dihukum denda

satu juta rupiah menurut Pasal 29 Bab Kesatu Undang-Undang Simbur Cahaya.

#### **Pasal 116**

Jika orang tua gadis melayani bujang berasan dua atau tiga orang untuk menjadi menantunya “ayam satu bertembung dua” dihukum denda tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dan membayar tekap malu pada bujang yang tidak menjadi menantunya menurut Pasal 30 Bab Kesatu Undang-Undang Simbur Cahaya.

#### **Pasal 117**

Jika bujang menabuh bunyi-bunyian berkeliling rumah yang ditunggu gadis dan yang punya rumah tidak suka “kumbang melilit kandang” namanya dihukum denda satu juta rupiah menurut Pasal 31 Bab Kesatu Undang-Undang Simbur Cahaya

#### **Pasal 118**

Jika bujang berjalan-jalan maka bujang merebut kembang diatas kepala gadis “elang menarap buaya” namanya, dihukum denda lima ratus ribu rupiah menurut Pasal 32 Bab Kesatu Undang-Undang Simbur Cahaya.

#### **Pasal 119**

Jika gadis bergubalan ternyata bunting maka bujang kena denda setinggi-tingginya tiga juta rupiah menurut Pasal 8 Bab Kesatu Undang-Undang Simbur Cahaya.

#### **Pasal 120**

Jika randa bergubalan ternyata bunting maka laki-laki yang punya perbuatan dikenakan denda tiga juta rupiah menurut Pasal 9 Bab Kesatu Undang-Undang Simbur Cahaya.

#### **Pasal 121**

Jika gadis/randa bunting tidak hanya siapa punya perbuatan maka perempuan itu dihukum denda setinggi-tingginya tiga juta rupiah dan perempuan itu atau sanaknya bersedekah kambing “Membasuh Dusun”

#### **Pasal 122**

Jika perempuan bunting gelap tidak nyata siapa melakukannya perbuatan, lantas numpang tinggal dirumah orang akan melahirkan maka yang punya rumah kena tepung satu ekor kambing menurut Pasal 11 Bab Kesatu Undang-Undang Simbur Cahaya

**Pasal 123**

Jika gadis bertunangan dengan terang maka gadis dibambang bujang lain atau ahli gadis mungkir tidak suka lagi dengan bujang tunangannya anak gadisnya tidak dengan sebab yang patut maka dikenakan denda setinggi-tingginya tiga juta rupiah dan membayar penyingsingan pada bujang tunangannya setinggi-tingginya tujuh ratus lima puluh ribu rupiah menurut Pasal 13 Bab Kesatu Undang-Undang Simbur Cahaya

**Pasal 124**

Jika bujang mungkir dengan tunangannya tanpa sebab yang patut maka bujang tidak dapat menuntut (mendakwa) pada gadisnya atau walinya menurut Pasal 14 Bab Kesatu Undang-Undang Simbur Cahaya

**Pasal 125**

Barang siapa membakar ladang atau kebun hendaknya memberi tahu terlebih dahulu pada desa serta pukul canang keliling dusun maka barang siapa melanggar ketentuan tersebut dapat dihukum denda setinggi-tingginya tiga juta rupiah serta ganti rugi kebakaran yang ditimbulkan menurut hukum adat dan Pasal 54 ayat 1 Bab Pelanggaran Berladang Undang-Undang Simbur Cahaya

**Pasal 126**

Jika jarak kekasannya sudah dibuat lebar 7 depa dan telah diterima orang mempunyai jarak kebun tersebut, maka kebun hangus atau terbakar dengan tidak sengaja tidak lagi menjadi tanggungan ganti rugi, menurut hukum adat Undang-Undang Simbur Cahaya Pasal 54 ayat 2 Bab Pelanggaran Berladang

**Pasal 127**

Jika membakar ladang atau kebun apinya melompat ke kebun lainnya di luar kebun kurang dijaga maka yang punya kebun/ladang dapat dihukum denda setinggi-tingginya tiga juta rupiah menurut hukum adat Undang-Undang Simbur Cahaya Bab Pelanggaran Berladang

**Pasal 128**

Kandang kerbau dan sapi hendaknya dibuat diluar dusun dan tidak sekali-kali dikurung hewan tersebut, boleh dikurung dibawah rumah, barang siapa melanggar ketentuan tersebut dapat dihukum denda setinggi-tingginya sejua lima ratus ribu rupiah menurut

hukum adat dan Undang-Undang Simbur Cahaya Bab Pelanggaran Berladang

#### **Pasal 129**

Kerbau, sapi dan kambing pada malam hari hendaklah dimasukkan ke dalam kandangnya jika orang melanggar dapat dikenakan denda setinggi-tingginya satu juta lima ratus ribu rupiah menurut hukum adat dan Pasal 54 Bab Pelanggaran Berladang dan Beternak Undang-Undang Simbur Cahaya.

#### **Pasal 130**

Jika pada malam hari terdapat berkeliaran hewan tersebut, hewan itu berkeliaran di jalan-jalan besar atau di dalam dusun atau masuk ke ladang atau kebun, maka yang punya hewan tersebut dapat dihukum denda setinggi-tingginya tiga juta rupiah serta mengganti kerugian yang mempunyai kebun atau ladang, jika kebun tidak mempunyai kandang/pagar maka yang punya hewan tersebut tidak dapat dikenakan ganti rugi yang ditimbulkan, melainkan hanya dapat denda saja menurut hukum adat dan Undang-Undang Simbur Cahaya Pasal 57 ayat 3 Bab Pelanggaran Berladang dan Beternak.

#### **Pasal 131**

Siang hari hewan tersebut boleh dilepaskan di dalam hutan akan tetapi kalau hewan tersebut berjalan di jalan raya atau di dalam dusun atau masuk ladang orang atau kebun maka yang punya hewan tersebut dihukum denda setinggi-tingginya dua juta rupiah dan pada pemilik ladang (Pasal 23 ayat 2 Bab III Undang-Undang Simbur Cahaya)

#### **Pasal 132**

Jika ladang atau kebun tidak mempunyai pagar yang memadai maka ketentuan hukumnya menurut Pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Simbur Cahaya

#### **Pasal 133**

Jika orang mendirikan rumah tidak dengan izin proatinya, maka dia dihukum denda tiga juta rupiah dan harus memindahkan rumahnya menurut hukum adat dan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Simbur Cahaya.

**Pasal 134**

Kalau yang punya rumah tidak mau dipindahkan maka yang berwenang, berkuasa mencabut penuh absolut biaya tersebut disebut menjadi tanggungan yang punya rumah menurut hukum adat dan Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Simbur Cahaya

**Pasal 135**

Rumah dan sebagian serta tumbuh tanam di dalam dusun atau di pinggir jalan yang akan menimbulkan bahaya, maka yang punya dapat dihukum setinggi-tingginya sampai tiga juta rupiah, maka dari itu harus dirobohkan atau diperbaiki menurut hukum adat dan Undang-Undang Simbur Cahaya.

**Pasal 136**

Rumah yang didirikan di dusun dengan diberi jarak dengan yang lainnya sekurang-kurangnya 6 meter, barang siapa melanggar peraturan tersebut, dapat dihukum dengan setinggi-tingginya satu juta lima ratus ribu rupiah serta rumahnya dipindahkan menurut hukum adat dan Pasal 45 ayat 1 Bab Pelanggaran Undang-Undang Simbur Cahaya

**Pasal 137**

Kalau yang punya rumah tidak mau dipindahkan, maka sangsi yang dikenakan menurut ketentuan Pasal 44 dan Pasal 134 ayat 2 Bab Pelanggaran Undang-Undang Simbur Cahaya

**Pasal 138**

Jika halaman rumah tidak dibersihkan dengan semestinya maka yang punya rumah dapat dihukum denda setinggi-tingginya satu juta lima ratus ribu rupiah menurut hukum adat dan Pasal 46 Bab Pelanggaran Undang-Undang Simbur Cahaya

**Pasal 139**

Barang siapa menerima tamu tanpa izin petugas desa maka ia dapat di hukum denda setinggi-tingginya satu juta rupiah menurut hukum adat dan Pasal 47 Bab Pelanggaran Undang-Undang Simbur Cahaya

**Pasal 140**

Jika di malam hari rumah di dalam dusun desa tidak dijaga, maka yang punya rumah dapat dihukum denda setinggi-tingginya

satu juta rupiah menurut hukum adat dan Pasal 48 Bab Pelanggaran Undang-Undang Simbur Cahaya

#### **Pasal 141**

Jika orang punya rumah di dalam dusun/desa terbakar sebab tidak dijaga tetapi ada rumah lain terbakar memang yang punya rumah yang terbakar dapat dihukum setinggi-tingginya satu juta lima ratus ribu rupiah menurut hukum adat dan Pasal 49 Bab Pelanggaran Undang-Undang Simbur Cahaya

#### **Pasal 142**

Jika orang yang punya rumah di dalam dusun/desa terbakar karena tidak dijaga lantas dusun/desa atau bagian dari dusun/desa turut terbakar maka orang yang punya rumah dapat dikenakan tepung dusun yaitu satu ekor kerbau, seratus kilo beras seratus biji bahan tersebut untuk bahan persedekahan orang banyak/kampung menurut hukum adat dan Pasal 50 Bab Pelanggaran Undang-Undang Simbur Cahaya

#### **Pasal 143**

Dilarang orang menumbuk padi atau lain-lain atau mengumpulkan bujang gadis pada malam hari atau membuat keramaian di dalam dusun/lebak tanpa seizin Kepala Dusun/Desa, barang siapa melanggar aturan tersebut dapat dihukum denda setinggi-tingginya satu juta lima ratus ribu rupiah menurut hukum adat dan Pasal 51 Bab Pelanggaran aturan berladang Undang-Undang Simbur Cahaya

#### **Pasal 144**

Barang siapa yang membuat kebun atau ladang tanpa seizin pasiran/yang berwenang maka dapat dihukum dengan satu juta lima ratus ribu rupiah serta kebun atau ladang tersebut menurut hukum adat dan Pasal 52 Bab Pelanggaran Berladang Undang-Undang Simbur Cahaya

#### **Pasal 145**

Kalau pelanggaran ini terjadi di hutan di dalam dusun/desa tempat orang mengambil bahan untuk rumah maka ia dapat dihukum denda setinggi-tingginya tiga juta rupiah menurut hukum adat dan Pasal 52 ayat 2 Bab V Pelanggaran Berladang Undang-Undang Simbur Cahaya.



**Pasal 146**

Jika orang membuat ladang atau kebun hendaklah membuat sekurang-kurangnya 7 depa dari jalan besar siapa melanggar dihukum dengan denda setinggi-tingginya satu juta lima ratus ribu rupiah serta bagian ladang atau masuk ukuran depan tidak boleh dilanjutkan menurut hukum adat dan Pasal 53 Bab Pelanggaran Berladang Undang-Undang Simbur Cahaya

**Pasal 147**

Jika orang melakukan pemukulan, menampar dan meninju atau mencabut senjata tajam atau merusak tanaman orang lain atau bangunan dikenakan denda setinggi-tingginya tiga juta rupiah menurut hukum adat Pasal 13 Bab Kelima Undang-Undang Simbur Cahaya

**Pasal 148**

Jika orang berkelahi di depan rumah orang lain dikenakan denda setinggi-tingginya satu juta lima ratus ribu rupiah dan kena tepung bengkak atau benjol setinggi-tingginya satu jutarupiah menurut hukum adat Pasal 14 Bab Kelima Undang-Undang Simbur Cahaya

**Pasal 149**

Jika orang berkelahi di depan rumah orang lain “asu markuse” dikenakan denda setinggi-tingginya satu juta rupiah, apabila terjadi perkelahian di dalam rumah “singe merkuse” dihukum denda setinggi-tingginya satu juta rupiah dan uang denda tersebut dibayar pada yang punya rumah menurut Pasal 15 Bab Kelima Undang-Undang Simbur Cahaya

**Pasal 150**

Jika orang misuh-misuh pada orang lain atau mengatakan sesuatu yang tidak patut “silip” namanya, dihukum membayar pada orang dikatai beras satu gantang, kelapa satu biji, ayam satu ekor dan sirih satu kisol menurut Pasal 18 Bab Kelima Undang-Undang Simbur Cahaya

**Pasal 151**

Jika orang memaki-maki terhadap istri orang lain atau anak gadis orang lain atau mengatakan perbuatan yang tidak patut dan tidak boleh dinyatakan disebut “cemepe mulut” dihukum denda

setinggi-tingginya tiga juta rupiah menurut Pasal 19 Bab Kelima Undang-Undang Simbur Cahaya

#### **Pasal 152**

Barang siapa mengatakan perbuatan aib orang lain atau keluarga orang lain perbuatan tersebut “compale mulut” dikenakan hukuman denda lima ratus ribu rupiah menurut Pasal 19 Bab Kelima Undang-Undang Simbur Cahaya

#### **Pasal 153**

Setiap orang/anggota masyarakat dilarang menyimpan, menahan, merubah bentuk atau warna barang yang ditemukan di tempat umum (di jalan di lapangan di sungai dan di tempat lainnya) barang tersebut harus dilaporkan adat untuk diumumkan dan dikembalikan kepada pemiliknya. Yang melanggar terhadap perbuatan tersebut dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya satu juta lima ratus ribu rupiah menurut Pasal 30 Bab Kelima Undang-Undang Simbur Cahaya

#### **Pasal 154**

Barang siapa dengan perbuatannya sengaja atau tidak sengaja mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain akan diambil tindakan hukum oleh yang berwajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **Pasal 155**

Barang siapa melakukan perbuatan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan orang lain cedera diambil tindakan oleh yang berwajib sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan tindakan hukum adat Pasal 147 bagian ini dan Pasal 13 Bab Kelima Undang-Undang Simbur Cahaya

#### **Pasal 156**

Barang siapa memasuki perkarangan/bersembunyi dibawah rumah orang lain pada waktu malam hari tanpa maksud yang jelas, yang diduga hendak membunuh (kera pati) atau mengganggu istri atau anak gadis (kerap gawe) dari pemilik rumah dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya tiga juta rupiah menurut Pasal 42 Bab Kelima Undang-Undang Simbur Cahaya .

**Pasal 157**

Setiap orang/anggota masyarakat dilarang memasang perangkap, tikus, kala, belatik, ranjau, dan lain-lain dekat sawah, kebun, ladang, jalan dan tempat lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain. Pelanggaran terhadap perbuatan tersebut dapat dihukum denda setinggi-tingginya tiga juta rupiah, bila orang cidera kena tepung sebesar tiga juta rupiah menurut Pasal 46 Bab Kelima Undang-Undang Simbur Cahaya.

**Pasal 158**

Setiap orang/anggota masyarakat dilarang menebang pohon tempat lebah bersarang yang menghasilkan madu (pohon sialang) pelanggaran terhadap perbuatan tersebut mendapat tindakan hukuman denda setinggi-tingginya tiga juta rupiah dan kenan bangun sebesar sepuluh juta rupiah pada yang punya sialang menurut Pasal 48 Bab Kelima Undang-Undang Simbur Cahaya

**Pasal 159**

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan menyandera orang yang berhutang kepadanya dengan maksud untuk mendapatkan pembayaran hutang tersebut (nunggui). Perbuatan tersebut melanggar hukum adat dan mendapat hukuman denda setinggi-tingginya tiga juta rupiah menurut Pasal 49 Bab Kelima Undang-Undang Simbur Cahaya

**Pasal 160**

Reaksi adat yang dikenakan/dibebankan terhadap pelanggaran adat dimaksud dalam pasal-pasal huruf B bagian kelima adalah sebagai berikut :

- a. Bangun (timbang bangun, mangun maya)
- b. Basuh dusun (membasuh dusun, tepung dusun)
- c. Denda
- d. Ganti Rugi
- e. Mengembalikan semua biaya (termasuk jujur) maupun barang (denda) termasuk gadai pertunangan
- f. Penyingsingan
- g. Setengah bangun
- h. Tekap malu
- i. Tepung tawar
- j. Wajib dikawinkan

**Pasal 161**

Penerapan reaksi agar dimaksud Pasal 128 untuk memelihara tata tertib dan mengamalkan keseimbangan yang telah terganggu pelaksanaannya menurut adat setempat

**Pasal 162**

Pelanggaran adat yang dapat mengakibatkan merugikan material dan atau immaterial dari seorang atau sekelompok orang/masyarakat mufakat yang dipimpin oleh Lurah dan Pemangku Adat setempat meliputi pemulihan hubungan baik antara kedua belah pihak mengembalikan kerugian-kerugian yang diderita kepada pihak yang dirugikan dan mengembalikan kerukunan masyarakat. Hasil musyawarah mufakat tersebut dibuat dan diketahui oleh Lurah dan Pemangku Adat setempat

**Pasal 163**

Apabila perselisihan secara damai tidak tercapai maka pihak yang merasa dirugikan dapat melapor atau mengadukan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwenang/yang berwajib

**BAB V****PENUTUP****Pasal 164**

Himpunan ini merupakan pedoman yang ketentuannya selalu merujuk pada adat setempat (dalam hal adat setempat belum mengatur maka himpunan adat ini dapat dipergunakan).

**Pasal 165**

Adat setempat yang dimaksud dalam himpunan adat ini adalah adat yang hidup, berkembang, diikuti dan dipelihara oleh masyarakat hukum adat masing-masing.

**Pasal 166**

Kepada semua pihak/instansi yang terkait dalam penyelesaian masalah adat istiadat (upacara adat, sopan santun, dan hukum adat) himpunan adat ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dengan tetap memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang mencerminkan keadilan dan dirasakan adil

Ketetapan Musyawarah Lembaga Adat Besemah Kota Pagar Alam

Nomor : 1/Ktp/LA/2007 Tanggal 3 November 2007

Tentang : Perubahan nilai mata uang ringgit menjadi mata uang rupiah sebagai tercantum dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya

### **LEMBAGA ADAT BESEMAH KOTA PAGAR ALAM**

Bermufakat di Balai Adat Besemah Kota Pagar Alam pada tanggal 3 November 2007.

Bahwa Lembaga Adat Kota Pagar Alam hendak menetapkan perubahan nilai mata uang Ringgit sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya yang telah diubah menurut Keputusan Musyawarah utusan-utusan Kepala Anak Negeri pada tanggal 2 sampai 6 September 1972 di Palembang dengan nilai mata uang rupiah pada saat ini.

Bahwa Lembaga Adat Besemah Kota Pagar Alam hendak memaklumkan tentang perubahan nilai uang Ringgit menjadi mata uang Rupiah.

Telah dibentuk dengan mengingat sepanjang Adat,

#### **Pasal 167**

Bentuk reaksi adat (sangsi) terhadap pelanggaran adat dalam bab ini, bagian kelima huruf B dari Pasal 103 sampai dengan Pasal 131 sebagai dimaksud Pasal 128 bab ini akan ditetapkan dengan keputusan lembaga adat Kota Pagar Alam

## KEPUTUSAN

Telah ditetapkan bahwa nilai mata uang Ringgit sebagaimana tersebut dalam buku Undang-Undang Simbur Cahaya dimaksud menjadi mata uang Rupiah adalah tiap satu Ringgit nilainya dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar ketetapan ini diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat maka salinan surat ketetapan ini disebar luaskan menurut lazimnya yang berlaku di dalam Wilayah Kota Pagar Alam

Ditetapkan : Pagar Alam

Pada Tanggal: 3 November 2007

**Ketua Lembaga Adat Besemah  
Kota Pagar Alam**

**(H. AMRAN)**